



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan;
- b. bahwa kondisi masyarakat saat ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat;
- c. bahwa pengaturan mengenai rencana induk Kota Cerdas (*Smart City*) perlu didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, kuat, dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah guna menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan yang efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK KOTA CERDAS TAHUN 2025–2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Teknologi adalah sarana, metode, dan proses berbasis ilmu pengetahuan dan rekayasa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah melalui pemanfaatan digital (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem digital lainnya) dan non digital.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
7. Kota Cerdas adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan yang ada di RPJMD, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Rencana Induk Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan *smart city* di Daerah untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2029.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang menjadikan Daerah sebagai Kota Cerdas dalam periode tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman strategis menciptakan Daerah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya melalui penerapan digitalisasi dan non digitalisasi kehidupan sehari-hari dan sebagai panduan memecahkan permasalahan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program Kota Cerdas dengan RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
- b. memprioritaskan program dan kegiatan yang relevan dengan Kota Cerdas berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Daerah;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan bagi manajemen internal dan pelayanan publik, serta memperbaiki ekosistem digital di Daerah yang dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong terwujudnya tujuan visi pembangunan Daerah dengan fokus pada kesejahteraan sosial, pengelolaan lingkungan, kemajuan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan citra Daerah; dan
- e. dapat menjadi dasar memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Kedudukan Rencana Induk Kota Cerdas sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah berbasis teknologi;
- b. pengembangan infrastruktur digital yang mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. koordinasi dan kolaborasi pembangunan Daerah dengan berbagai pihak.
- d. acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang sejalan dengan prinsip *Smart City*; dan
- e. sebagai jembatan keberlanjutan Kota Cerdas periode berikutnya.

BAB II

RENCANA INDUK KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Kota Cerdas (*Smart City*) disusun sebagai dokumen perencanaan strategis pembangunan *Smart City* yang memuat inisiatif program beserta tahapan implementasinya secara sistematis.
- (2) Rencana Induk Kota Cerdas (*Smart City*) terdiri atas susunan *roadmap smart city* sebagai panduan tahapan implementasi inisiatif *smart city* secara sistematis, terpadu dan selaras dengan visi pembangunan Daerah.
- (3) Peta Jalan Kota Cerdas (*Smart City*) memuat program prioritas tahunan termasuk inisiatif *quickwins* yang menjadi langkah percepatan penerapan *smart city*.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Induk Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Ketentuan mengenai peta jalan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Kota Cerdas (*Smart City*) mengacu pada 10 (sepuluh) indikator tujuan visi yang merupakan kebijakan Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD, meliputi:
 - a. laju pertumbuhan ekonomi;
 - b. angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis;
 - c. indeks kesehatan;
 - d. indeks pendidikan;
 - e. indeks pbumian pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - f. indeks harmoni indonesia;
 - g. tingkat kemiskinan;
 - h. rasio gini;
 - i. nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota; dan
 - j. indeks reformasi birokrasi;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.

- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain termasuk di dalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan pembangunan Daerah, meliputi:
- a. masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi non pemerintah; dan/atau
 - e. lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Kota Cerdas ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali
- (2) Sistematika Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. bab I berisi Pendahuluan;
 - b. bab II berisi Gambaran Umum Kota Semarang;
 - c. bab III berisi Landasan *Smart City*;
 - d. bab IV berisi Konsep *Smart City*;
 - e. bab V berisi Kebijakan *Smart City*;
 - f. bab VI berisi Analisis Situasi;
 - g. bab VII berisi Rencana Strategis;
 - h. bab VIII berisi Implementasi Rencana Aksi dan Operasional;
 - i. bab IX berisi Tata Kelola dan Kelembagaan *Smart City*; dan
 - j. bab X berisi Penutup.

BAB III PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam Rencana Induk Kota Cerdas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, ketentuan Rencana Induk Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2026 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Tahun 2021-2026 (*Masterplan Smart City of Semarang*) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 23 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PRIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.

Pembina

NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA INDUK KOTA
CERDAS (*SMART CITY*) TAHUN 2025-2029

RENCANA INDUK KOTA CERDAS (*SMART CITY*) TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini berbagai kota besar di dunia memasuki fase pembangunan yang sangat dinamis. Pembangunan infrastruktur skala besar seperti jalan tol, jaringan transportasi massal, bandara, serta pusat bisnis dan perumahan modern terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Banyak kota berupaya menyeimbangkan laju pembangunan fisik dengan prinsip keberlanjutan. Inisiatif untuk mewujudkan kota yang lebih nyaman, inklusi dan berkelanjutan semakin ditingkatkan. Begitu pula teknologi digital juga diterapkan secara luas dalam pelayanan publik, pengelolaan transportasi, keamanan, hingga pemantauan lingkungan, dan lainnya, yang sejalan dengan konsep *Smart City*.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Urbanisasi yang cepat memperbesar kesenjangan sosial dan memperparah tekanan terhadap sumber daya kota. Permasalahan seperti ketimpangan akses layanan dasar, polusi lingkungan, banjir, serta risiko perubahan iklim menjadi isu yang harus ditangani dengan serius. Dalam dinamika pembangunan tersebut, kota besar dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan, mengintegrasikan inovasi teknologi, memperhatikan prinsip inklusivitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Semua upaya

ini bertujuan untuk menciptakan kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berdaya saing, adil, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Kondisi kota besar di Indonesia saat ini beragam, namun terjadi beberapa tren secara umum hampir di berbagai kota di Indonesia. Seperti: urbanisasi makin cepat, teknologi digital makin mendominasi, masalah lingkungan semakin serius, tantangan kemacetan yang meluas, perubahan gaya hidup, pergeseran pola kerja (*work from anywhere*), ketimpangan sosial, resiliensi kota dan masih banyak lainnya. Berdasar potret tersebut, kota besar di Indonesia akan terus tumbuh, berinovasi, dan beradaptasi, berpacu dengan waktu untuk menjadikan kotanya lebih pintar, lebih hijau, dan lebih manusiawi menghadapi konsekuensi dari perkembangan perkotaan yang begitu cepat dan pengaruh eksternal yang mempengaruhi.

Dalam menghadapi kompleksitas pembangunan kota besar seperti disampaikan di atas, maka konsep *Smart City* muncul sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi tata kelola kota sekaligus mengatasi berbagai tantangan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan. *Smart City* Dalam prakteknya akan lebih mengedepankan penggunaan digitalisasi dalam mengintegrasikan berbagai sistem perkotaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Melalui penerapan *Smart City* diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai pengelolaan dan penyelenggaraan layanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kota Semarang telah memulai perjalanan menuju kota cerdas (*Smart City*) sejak tahun 2013. Pada saat itu fokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam perjalanannya hingga saat ini, Semarang telah dua kali menyusun dokumen *Masterplan Smart City*, yaitu: *Masterplan Smart City* Tahun 2017-2021 yang lebih fokus pada

pembangunan infrastruktur dasar dan integrasi sistem informasi dan pada tahap berikutnya *Masterplan Smart City* Tahun 2021-2026 yang melakukan penguatan pada aspek tata kelola, ekonomi, dan lingkungan cerdas.

Pada kedua *masterplan* sebelumnya tersebut, telah memberikan pondasi yang kuat bagi pengembangan *Smart City* di Kota Semarang dengan berbagai capaian seperti pengembangan aplikasi layanan publik, sistem transportasi terintegrasi, dan inisiatif pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, dan lainnya. Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, Kota Semarang masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut dimasa depan, antara lain:

- Permasalahan Lingkungan (banjir, rob, dan penurunan permukaan tanah / *land subsidence* yang masih menjadi isu krusial).
- Ketimpangan Infrastruktur (masih adanya kesenjangan infrastruktur antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran kota).
- Transformasi Digital (Dalam digitalisasi, perlu peningkatan literasi digital dan akses teknologi pada aparatur pemerintah dan seluruh segmen / lapisan masyarakat).
- Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi (pertumbuhan penduduk yang pesat, akan berdampak pada kebutuhan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik).
- Serta banyak faktor eksternal lainnya yang akan mempengaruhi kehidupan perkotaan di masa depan.

Berkaitan dengan tantangan yang masih dan akan dihadapi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, maka hal-hal tersebut memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegratif, terutama dalam menghadapi era transformasi digital, perubahan lingkungan / iklim, pengaruh global dan situasi ekonomi / sosial yang membutuhkan perhatian dalam mengantisipasi dan penanganannya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi. RPJPD ini menjadi acuan utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2025-2029, yang akan menjadi landasan operasional bagi pembangunan kota dalam lima tahun ke depan. Dalam konteks ini, pengembangan *Smart City* tidak hanya dipandang sebagai upaya pemanfaatan teknologi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan visi pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena seperti dokumen *masterplan* terdahulu, bahwa konsep *Smart City* digunakan untuk memecahkan berbagai masalah perkotaan yang dihadapi dan telah tertuang pada RPJMD periode tahun berkenaan.

Berdasarkan perkembangan dan tantangan yang ada, serta mengacu pada RPJPD dan RPJMD terbaru, penyusunan Dokumen *Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis untuk memperbarui tema *Smart City* menyesuaikan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat saat ini dan lima tahun ke depan. Perlu disadari bahwa *Smart City* tidak hanya yang berbentuk digital tetapi juga non digital. Sehingga yang tidak kalah penting *Smart City* dapat mengintegrasikan tujuan visi pembangunan lima tahun ke depan dengan mensinkronkan program *Smart City* dengan target atau indikator tujuan visi pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

Selama program *Smart City* bergulir di Kota Semarang sejak lebih sepuluh tahun yang lalu, Kota Semarang telah berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pembangunan. Oleh karena itu peran pemangku kepentingan pembangunan perlu ditingkatkan dalam perencanaan dan implementasi pengembangan *Smart City* ke depan. *Masterplan Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat

menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan Pembangunan Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Semarang sebagai kota cerdas yang inklusif, berkelanjutan, untuk menuju kota yang maju ekonominya dan kota yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, harapannya Kota Semarang dapat menjadi contoh sukses pengembangan *Smart City* di Indonesia.

1.2 Maksud

Dokumen *Masterplan Smart City* ini dimaksudkan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan Pembangunan yang menjadikan Kota Semarang sebagai kota cerdas dalam periode 2025 hingga 2029. Secara umum, dokumen ini akan menjadi pedoman strategis bagi Kota Semarang dalam menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya melalui penerapan digitalisasi dan non digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai panduan memecahkan permasalahan perkotaan yang terdapat pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

1.3 Tujuan

1. Agar dalam penyusunan program *Smart City* tersinkronisasi dan terintegrasi dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan Renstra OPD Tahun 2025-2029.
2. Memprioritaskan program dan kegiatan yang relevan dengan *Smart City* serta berdasar kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kota Semarang.
3. Lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan (bagi manajemen internal dan pelayanan publik), serta memperbaiki ekosistem digital di Kota Semarang yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

4. Akan mendorong terwujudnya tujuan visi pembangunan Kota Semarang dengan fokus pada kesejahteraan sosial, pengelolaan lingkungan, kemajuan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan citra kota.
5. Dapat menjadi dasar memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah Kota Semarang dengan pemangku kepentingan pembangunan kota.

1.4 Sasaran

1. Sasaran utama dokumen ini adalah mendorong terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi cerdas untuk menciptakan kota yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
2. Tersusunnya rencana strategis jangka menengah melalui program *Smart City* dengan mempertimbangkan integrasi teknologi dalam semua aspek kehidupan kota, serta memastikan kelanjutan implementasi *Smart City* hingga tahun 2029.
3. Terwujudnya kolaborasi antara Pemkot Semarang dengan pemangku kepentingan pembangunan kota untuk menciptakan solusi teknologi inovatif, baik yang berbasis digital maupun non digital yang mendukung pemecahan permasalahan dan mewujudkan pengembangan kota.

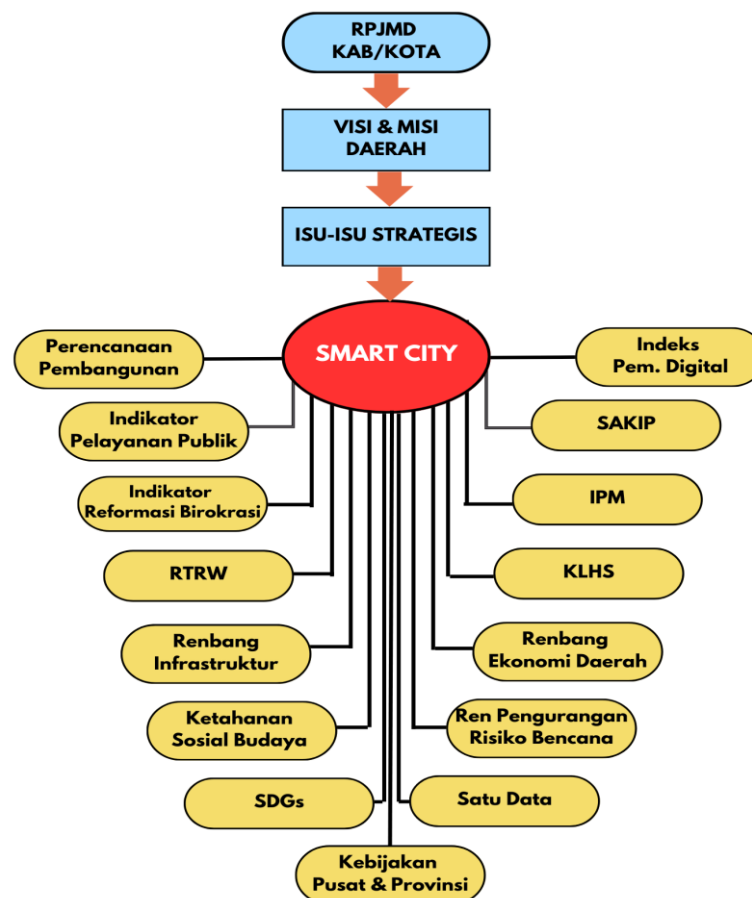
1.5 Hubungan *Masterplan Smart City* dengan Dokumen Lain

Masterplan Smart City bukan dokumen yang berdiri sendiri terpisah dengan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan daerah. Oleh karenanya melainkan *Masterplan Smart City* Kota Semarang harus selaras dengan dokumen pembangunan lainnya agar ada keberlanjutan, efektif, dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat. Keselarasan tersebut tidak hanya dengan dokumen pembangunan Kota Semarang,

tetapi juga dengan dokumen pembangunan pemerintah pusat dan provinsi, serta pemangku kepentingan Pembangunan lainnya. Sehingga antara *Masterplan Smart City* Kota Semarang dengan dokumen pembangunan lainnya berhubungan erat.

Sinkronisasi dan sinergi ini penting karena pengembangan *Smart City* tidak hanya berbasis teknologi (baik digital atau non digital), tetapi juga selaras dengan visi pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan. *Masterplan* Kota Cerdas berfungsi sebagai kerangka strategis untuk mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan tata kelola yang berkelanjutan dalam pembangunan Kota Semarang. *Smart City* diharapkan sesuai tujuan pembangunan kota, akan dapat mensejahterakan masyarakatnya, menciptakan kepuasan layanan publik dan meningkatkan citra kota.

Hubungan ini bersifat langsung maupun tidak langsung, yang dapat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan pembangunan kota. Dalam arti bahwa hubungan berbagai dokumen, kebijakan, program (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota lain) dan kegiatan yang pada pemerintah Kota Semarang, akan bersinergi, berkolaborasi dan berkontribusi pada program *Smart City*.



Gambar 1
Hubungan *Masterplan Smart City* Kota Semarang dengan Elemen Pembangunan Daerah Lainnya

Berikut hubungan *Masterplan Smart City* Kota Semarang dengan beberapa elemen rencana pembangunan daerah lainnya:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Masterplan Smart City berhubungan erat dengan perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi pedoman dalam integrasi teknologi dan inovasi untuk menjawab isu-isu strategis yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Inisiatif *Smart City* dapat mendukung pencapaian visi-misi RPJMD. *Masterplan Smart City* harus diintegrasikan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) agar dapat diimplementasikan secara efektif.

2. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi)

Konsep *Smart City* memiliki keterkaitan yang erat dengan Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi). *Smart City* berfokus pada integrasi teknologi dalam tata kelola perkotaan, sehingga mendorong peningkatan kualitas layanan berbasis digital. Indeks Pemerintahan Digital mengukur sejauh mana sebuah pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, proses administrasi, memperkuat partisipasi masyarakat, mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengembangan *Smart City* di suatu wilayah, umumnya akan berkontribusi positif terhadap nilai Indeks Pemerintahan Digital / DGI.

3. Indikator Pelayanan Publik (IPP)

Masterplan Smart City memiliki keterkaitan erat dengan IPP, karena penerapan konsep *Smart City* dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui IPP. Implementasi *Smart City* dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, yang berdampak pada skor IPP yang lebih baik.

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Masterplan Smart City memiliki hubungan dengan SAKIP karena penerapan konsep *Smart City* dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. *Masterplan Smart City* mendorong digitalisasi pemerintahan, seperti SPBE dan *big data analytics* yang dapat mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan berbasis data di pemerintahan.

5. Indikator Reformasi Birokrasi (IRB)

Smart City memiliki hubungan langsung dengan IRB. Penerapan konsep *Smart Governance* dalam *Smart City* berkontribusi langsung pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. *Smart City* mendukung digitalisasi pemerintahan untuk

mengurangi birokrasi yang lambat dan berbelit, sehingga terwujud efektivitas dan efisiensi birokrasi serta penyederhanaan prosedur.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hubungan *Masterplan Smart City* dengan IPM, karena penerapan konsep *Smart City* berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam tiga aspek utama yaitu: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. *Masterplan Smart City* berperan besar dalam meningkatkan IPM melalui inovasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan publik, Semarang dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih Sejahtera.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Masterplan Smart City memiliki keterkaitan erat dengan RTRW karena implementasi *Smart City* harus menyesuaikan tata ruang yang mendukung infrastruktur digital, transportasi cerdas, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga *Masterplan Smart City* harus berjalan seiring dengan RTRW dalam menciptakan tata kota yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. *Smart City* memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, infrastruktur, transportasi, dan lingkungan, sehingga pembangunan kota lebih terarah, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Masterplan Smart City memiliki keterkaitan erat dengan KLHS karena implementasi *Smart City* harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. KLHS berfungsi sebagai instrumen evaluasi lingkungan dalam kebijakan, rencana, dan program, sehingga penerapan *Smart City* harus mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan, mitigasi risiko, serta keberlanjutan ekosistem perkotaan.

9. Rencana Pembangunan Infrastruktur

Masterplan Smart City memiliki hubungan keterkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur karena penerapan konsep *Smart City* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur yang dapat mendukung transformasi digital, konektivitas, serta efisiensi dalam pelayanan publik. Pada *Smart City* memerlukan infrastruktur yang mendukung implementasi teknologi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, hingga pengelolaan sampah. Oleh karenanya rencana pembangunan infrastruktur harus diselaraskan dengan strategi *Smart City* , sehingga kota dapat berkembang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.

10. Rencana Pengembangan Ekonomi Daerah

Masterplan Smart City memiliki pengaruh besar terhadap rencana pengembangan ekonomi daerah karena penerapan teknologi dalam pembangunan kota dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep *Smart City* mendorong pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

11. Ketahanan Sosial Budaya

Masterplan Smart City memiliki dampak langsung terhadap ketahanan sosial budaya karena implementasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat mendukung penguatan identitas budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memfasilitasi interaksi antar masyarakat lebih inklusif. Konsep *Smart City* tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada ranah non digital seperti pada pelestarian nilai-nilai budaya dan peningkatan partisipasi sosial. Dalam hal ini, *Smart City* dapat memperkuat identitas budaya dan memperkokoh ketahanan sosial budaya di tengah perubahan zaman

12. Rencana Pengurangan Risiko Bencana

Masterplan Smart City berperan dalam pengurangan risiko bencana, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan ketangguhan kota terhadap berbagai jenis bencana. Konsep *Smart City* yang mengintegrasikan sistem teknologi canggih seperti *Internet of Things (IoT)*, *big data*, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat membantu memonitor, merespons, dan mengurangi dampak bencana secara lebih efektif melalui sistem peringatan dini.

13. Sustainable Development Goals (SDGs)

Masterplan Smart City terkait erat dengan pencapaian SDGs, terutama dalam mewujudkan kota yang inklusif, berkelanjutan dan inovatif. *Smart City* mendukung berbagai tujuan SDGs, dalam memperkuat ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat menciptakan kota yang resilient dalam menghadapi tantangan masa depan.

14. Satu Data Indonesia

Smart City dan Satu Data Indonesia memiliki hubungan yang saling mendukung. Pembangunan *Smart City* memerlukan data yang akurat, terbuka, terintegrasi, dan dapat diakses dengan mudah. Hal tersebut merupakan prinsip-prinsip yang juga menjadi landasan utama program Satu Data Indonesia. Penerapan konsep *Smart City* membutuhkan basis data yang kuat untuk mendukung perencanaan, implementasi, hingga evaluasi berbagai program kota cerdas. Selain itu satu data Indonesia menyediakan mekanisme pertukaran data antar sektor secara standar dan terkoordinasi, sehingga mempercepat integrasi sistem layanan dalam *Smart City*.

15. Kebijakan Nasional dan Provinsi

Hubungan *Masterplan Smart City* Kota Semarang dengan Kebijakan pembangunan pemerintah dan pemerintah Provinsi wajib selaras, karena pembangunan kota dengan dukungan *Smart City* harus

memedomani dan memeperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Termasuk dalam hal ini, konsep *Smart City* merujuk pada kebijakan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

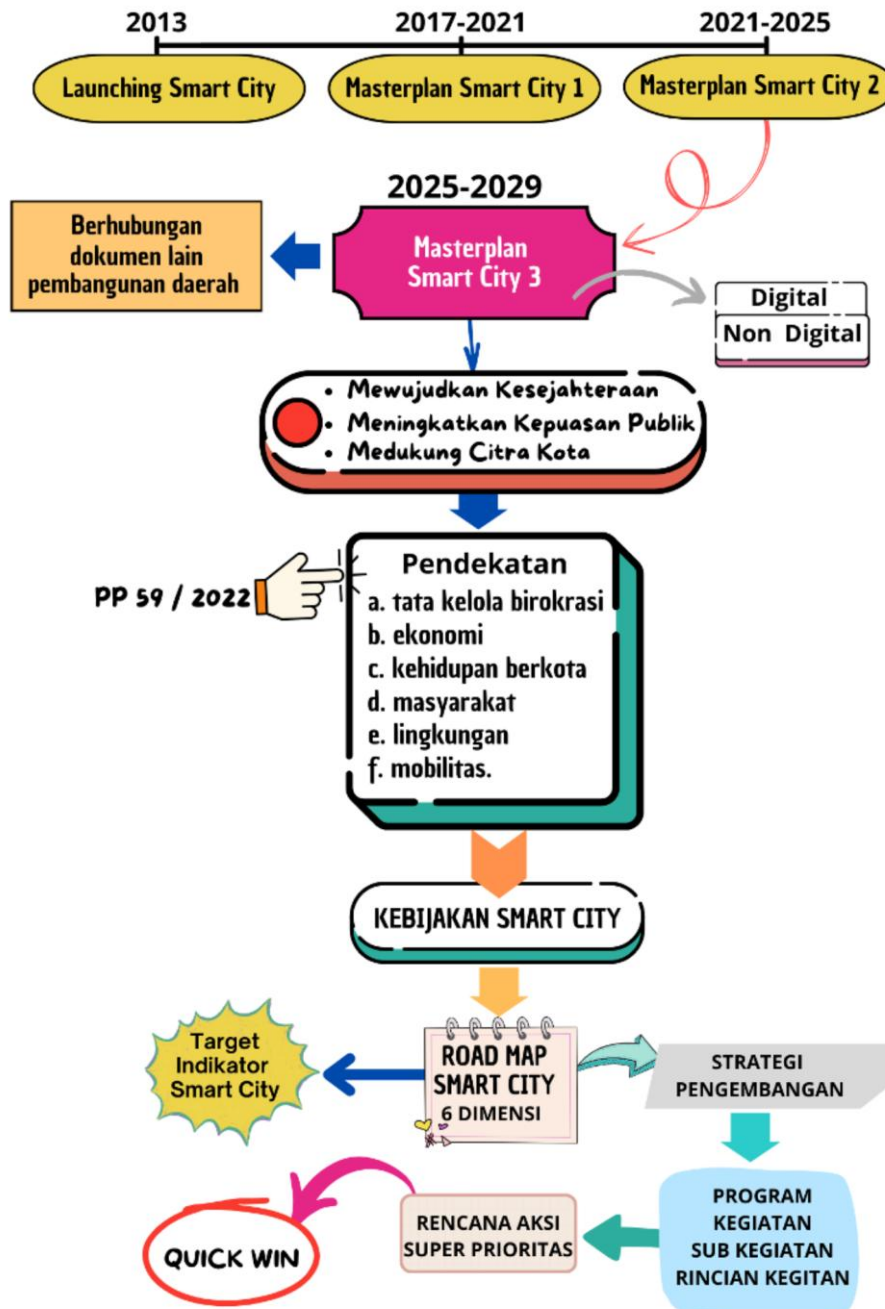
1.6 Landasan Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tTentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung Cerdas;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Semarang Kota Cerdas Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
23. Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

24. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Periode 2021 - 2026 (*Master Plan Smart City of Semarang*);
25. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/528 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kota Semarang;
26. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/241 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang;
27. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
28. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Indonesia;
29. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37122:2022 tentang Indikator Kota Cerdas;
30. Dokumen Visi Indonesia Digital 2045.
31. Peta Jalan Transformasi Digital Provinsi Jawa Tengah 2025-2045.

1.7 Dasar Pemikiran



Gambar 2
Dasar Penyusunan *Masterplan Smart City*

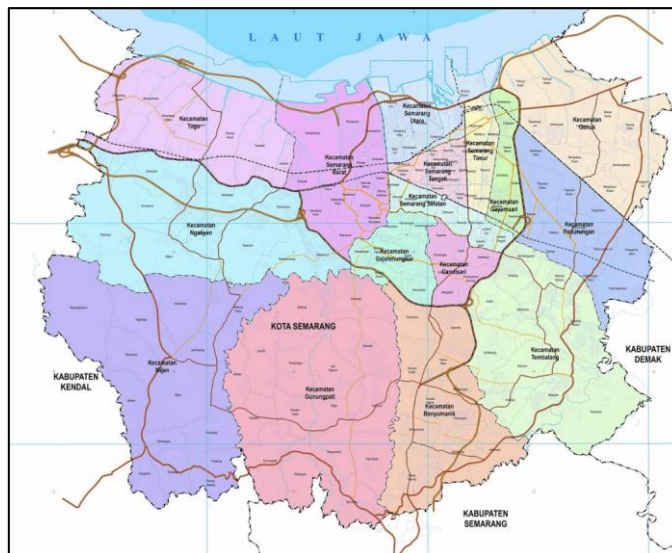
BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1 Profil Kota Semarang

2.1.1 Profil Umum

Kota Semarang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar : 373,70 Km² (BPS Kota Semarang) dengan lokasi sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Demak dan sebelah utara berbatasan Laut Jawa dengan panjang garis pantai berkisar : 13,6 Km. Kota Semarang dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara garis 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur dengan luas wiayah sebesar 373,70 km². Berdasarkan pembagiannya terdiri atas 37,90 Km² (10,14%) lahan sawah dan 335,81 Km² (89,86%) bukan lahan sawah.



Gambar 3
Peta Wilayah Administratif Kota Semarang

Secara administratif Kota Semarang meliputi 16 wilayah

Kecamatan dengan 177 wilayah Kelurahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 (dua) kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sementara itu wilayah kecamatan dengan mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Daerah yang berada di garis pantai utara Pulau Jawa memiliki ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dan untuk daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl dengan kemiringan 15-40%; yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan, Mijen, dan Gunungpati. Sedangkan untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl, dengan lokasi di daerah pantai 65,22%. Hal ini relatif berpengaruh pada karakteristik mata pencaharian penduduknya.

Kedudukan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah ditambah lokasi yang strategis pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa menjadikan Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Ditinjau dari posisi geografis Kota Semarang yang berada di bagian tengah Pulau Jawa, serta dilalui Jalur Pantura menempatkan Kota Semarang pada lokasi yang strategis dan potensial untuk dikembangkan. Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan sejumlah fasilitas transportasi

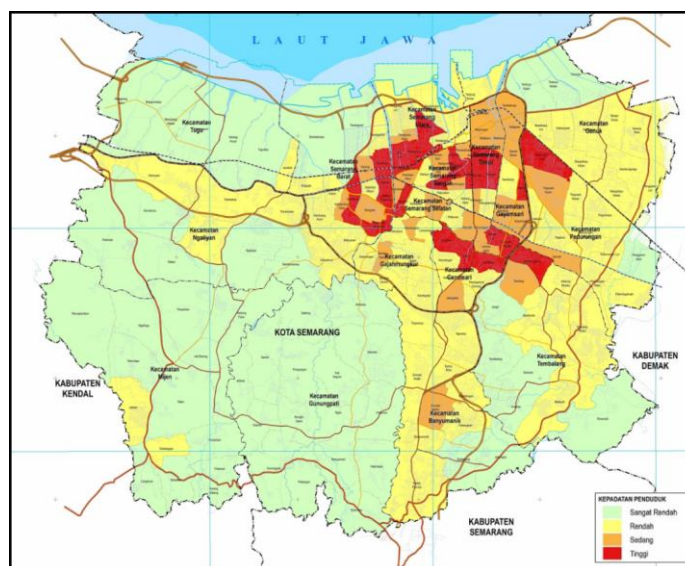
penting seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas dan Bandar Udara Ahmad Yani sebagai fasilitas berskala internasional, menjadikan Kota Semarang sebagai gerbang perekonomian utama bagi Jawa Tengah.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional Kedungsepur yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Selain itu, Kota Semarang juga merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional Joglosemar bersama dengan Yogyakarta dan Solo. Posisi strategis dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Hal inilah yang juga menjadikan daya tarik Kota Semarang bagi banyak penduduk pendatang untuk beraktivitas di dalamnya. Dalam perkembangannya, Kota Semarang berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa di mana perkembangan aktivitas perdagangan dan jasa menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Penduduk

Komposisi penduduk di Kota Semarang enam tahun terakhir (2017-2023) didominasi oleh penduduk berusia 15 tahun s/d 54 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan

lima tahun ke depan. Dapat dikatakan bahwa persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah sejak tahun 2017 hingga 2023. Dimana prosentase penduduk usia produktif (60,95%) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (*demographic dividend*). Oleh karena itu penduduk produktif dimaksud harus terserap pada pasar tenaga kerja dan lebih banyak masuk ke sektor formal agar lebih bernilai bagi pemerintah daerah Kota Semarang.



Gambar 4
Kepadatan Penduduk Kota Semarang

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tergolong lebih baik yaitu sebesar 85,25 pada tahun 2024. Kondisi ini didukung dari peningkatan akses pendidikan dan umur harapan hidup yang terus meningkat.

Umur harapan hidup, sebagai indikator utama kesejahteraan sosial, menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup penduduk.

Pada tahun 2024, angka umur harapan hidup masyarakat Kota Semarang mencapai 78,24 dan hal ini lebih tinggi dari angka umur harapan hidup pada tingkat provinsi dan nasional. Angka ini juga meningkat sebesar 1,07 tahun selama 10 tahun terakhir.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat akses dan partisipasi dalam pendidikan di Kota Semarang. Meskipun telah ada peningkatan dalam tingkat sekolah wajib dan aksesibilitas pendidikan, masih terdapat tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat. Kondisi ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di kota-kota negara maju. Di Tokyo, misalnya, rata-rata lama sekolah penduduknya bisa mencapai 12 hingga 15 tahun, Demikian pula, Singapura memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan berfokus pada pencapaian akademis, sehingga rata-rata lama sekolah penduduknya juga cenderung tinggi.

2.1.4 Pendidikan

Indeks Pendidikan dihitung dengan mempertimbangkan tiga indikator, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar 13,03 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 13,31. Indeks Pendidikan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat suatu wilayah. APS menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Angka partisipasi sekolah yang tinggi menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. AMH persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan, RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk

tahun yang mengulang). Capaian RLS yang tinggi menunjukkan sistem pendidikan berjalan semakin baik (UNESCO, 2009).

2.1.5 Kesehatan

Memasuki tahun 2024, status kesehatan keluarga di Kota Semarang semakin membaik. Pada tahun 2020, indeks mencapai 0,88 dan masuk ke dalam kategori "Sehat." Peningkatan ini terus berlanjut dengan indeks mencapai 0,90 pada tahun 2024. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam Indeks Keluarga Sehat di Kota Semarang. Perubahan status dari "Tidak Sehat" ke "Pra-Sehat" dan akhirnya menjadi "Sehat" menunjukkan bahwa program dan upaya peningkatan kesehatan keluarga di kota ini berhasil.

2.1.6 Disabilitas

Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjadi kota yang ramah bagi penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program inklusif. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan aksesibilitas fisik, penyediaan layanan publik yang inklusif, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi penyandang disabilitas. Dukungan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 menjadi landasan hukum yang menegaskan hak-hak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Semarang. Saat ini terdapat beberapa komunitas disabilitas yang bermitra dengan Pemerintah Kota Semarang dan komitmen kuat Kota Semarang juga ditunjukkan oleh berdirinya Rumah Inspirasi (Mijen) yang berfungsi sebagai pusat layanan terintegrasi bagi penyandang disabilitas, menyediakan akses ke berbagai layanan sosial dan pemberdayaan.

2.1.7 Gender

Pembangunan dan pemberdayaan gender di Kota Semarang merupakan bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara. Melalui berbagai kebijakan dan program, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Pada tahun 2023, dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 416/477 Tahun 2023, yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi implementasi PUG di setiap perangkat daerah. Bahkan pada tahun 2025, Walikota Semarang menerima penghargaan Puspa Adidaya dalam Anugerah Pupa Bangsa 2025 dari Kompas TV. Penghargaan ini mengukuhkan pengakuan terhadap pemimpin perempuan yang berhasil menginspirasi dan memberikan dampak besar bagi masyarakat serta ekonomi.

2.1.8 Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran Kota Semarang mencapai 5,82% dengan total angkatan kerja sebesar 946.618 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Semarang pun sudah tergolong baik, yaitu sebesar 69,88% walaupun ini perlu terus untuk ditingkatkan. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki memiliki kesempatan kerja yang lebih baik yaitu sebesar 95,09 jika dibandingkan perempuan di Kota Semarang.

2.1.9 Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB dilakukan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kisaran 6 – 5% dan sempat mendapatkan nilai minus pada tahun 2020. Pada periode 2020-2024, nilai pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tertinggi pada tahun 2014 yaitu mencapai 6,06%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu -1,85% dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang Kota Semarang. Pada tahun 2021 nilai pertumbuhan ekonomi Kota Semarang kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai 5,16% diikuti pada tahun 2022 meningkat kembali mencapai 5,73% serta pada tahun 2023 meningkat kembali mencapai 5,79%. Nilai pertumbuhan ini tidak terlepas dari adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi skala regional Jawa Tengah maupun skala nasional. Secara lengkap Laju Pertumbuhan PDRB ADHK pada kurun tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang
Tahun 2020-2024 (%)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,51	3,22	2,42	1,28	1,14
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,49	3,42	-4,95	37	1,48
3.	Industri Pengolahan	0,20	5,47	5,64	4,16	3,50
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	1,00	-1,21	7,50	7,94
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,48	6,12	1,17	2,61	2,18
6.	Konstruksi	-5,23	6,47	1,19	5,59	5,67
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,72	6,49	3,92	4,91	4,71
8.	Transportasi dan Pergudangan	-40,16	7,53	79,01	10,56	10,77
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-17,10	7,14	20,30	12,82	16,03
10.	Informasi dan Komunikasi	20,31	4,42	3,79	8,37	7,75
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,75	1,88	0,37	1,80	1,74
12.	Real Estate	-0,08	3,75	5,14	6,87	7,18
13.	Jasa Perusahaan	-7,94	3,06	6,32	7,31	6,69
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,24	-1,47	1,85	4,16	4,22
15.	Jasa Pendidikan	-2,51	0,12	1,95	6,35	7,43
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,09	1,26	2,77	5,41	7,38
17.	Jasa Lainnya	-14,80	0,71	9,20	7,51	7,15
Laju Pertumbuhan		-1,85	5,16	5,73	5,79	6,06

Sumber: BPS, data diolah

Nilai PDRB ADHK Kota Semarang pada tahun 2024 secara agregat mencapai 167.847,21 milyar rupiah, tumbuh 6,06% dari capaian tahun 2023 sebesar 161.849,11 milyar rupiah. Struktur perekonomian di Kota Semarang kurun waktu tahun 2020-2024 didominasi oleh 5 sektor lapangan usaha yaitu: industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi. Kontribusi kelima sektor lapangan usaha tersebut pada tahun 2024 menurut struktur PDRB ADHK adalah industri pengolahan sebesar 29,11%; konstruksi sebesar 26,33%; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,95%; informasi dan komunikasi sebesar 8,73%; jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,91%.

Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan tidak terlepas dari banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri di kawasan industri Kota Semarang, suasana yang kondusif serta infrastruktur yang memadai untuk mendukung kelancaran usaha menjadikan faktor pertimbangan pengusaha berinvestasi pada sektor industri pengolahan di Kota Semarang. Sektor konstruksi sebagai penyumbang kontribusi terbesar kedua tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di Kota Semarang, disamping itu banyak pula pembangunan properti berupa perumahan, hotel, apartemen dan perkantoran. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencerminkan bahwa Kota Semarang adalah kota perdagangan, banyaknya pusat-pusat perdagangan serta aktivitas perdagangan yang semakin menggeliat menjadikan Kota Semarang sebagai pusat dan distribusi pelayanan barang bagi daerah-daerah di sekitar Kota Semarang, dengan semakin banyaknya kepemilikan mobil dan sepeda motor pribadi banyak pula usaha-usaha reparasi atau bengkel mobil dan sepeda motor yang berdiri. Sektor Komunikasi dan informasi berada

pada urutan keempat sebagai penyumbang kontribusi mengindikasikan bahwa pada era digital ini ketersediaan informasi dan kelancaran komunikasi berbasis Teknologi Informasi sudah menjadi kebutuhan warga Kota Semarang. Penggunaan data untuk berinternet serta bertransaksi *on line* semakin meningkat termasuk juga penggunaan jasa transportasi berbasis *on line*. Pada urutan kelima penyumbang kontribusi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi hal ini mencerminkan pula bahwa Kota Semarang adalah kota jasa, sektor ini merupakan penunjang dari empat sektor di atas. Bank umum, BPR, penggadaian, perusahaan pembiayaan banyak terdapat di Kota Semarang. Secara lengkap Struktur PDRB ADHK pada kurun tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang
Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,85	0,84	0,81	0,78	0,77
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,19	0,18	0,16	0,16	0,16
3.	Industri Pengolahan	28,62	28,75	28,87	28,78	29,11
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
6.	Konstruksi	26,00	27,03	26,33	26,45	26,33
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,52	13,50	13,20	13,09	12,95
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,35	2,33	4,17	4,61	4,79
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,77	2,77	3,07	3,20	3,16
10.	Informasi dan Komunikasi	9,58	9,22	8,62	8,55	8,73

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,32	4,26	4,19	3,97	3,91
12.	Real Estate	2,87	2,77	2,68	2,64	2,60
13.	Jasa Perusahaan	0,70	0,67	0,68	0,69	0,68
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06	2,84	2,66	2,59	2,49
15.	Jasa Pendidikan	2,95	2,76	2,54	2,47	2,37
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,90	0,85	0,83	0,83
17.	Jasa Lainnya	1,06	0,99	1,01	1,01	0,96
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB		137.601,98	144.704,57	152.995,41	161.849,11	167.847,21

Sumber: BPS, data diolah

2.1.10 Inflasi

Sejak tahun 2016, secara umum inflasi Kota Semarang berada pada angka 1-3% dan tergolong stabil. Tingkat inflasi di Kota Semarang cenderung lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional dan Jawa Tengah, tren positif ini menunjukkan bahwa komitmen dan konsistensi Kota Semarang dalam mengendalikan laju inflasi cukup berhasil. Pada tahun 2024, tingkat inflasi Kota Semarang yaitu pada 1,69%.

Pada tahun 2020 Kota Semarang memiliki skor indeks daya saing daerah sebesar 3,898 selanjutnya pada tahun 2021 menjadi 3,8769, pada tahun 2022 sebesar 4,65, pada tahun 2023 sebesar 3,950 dan pada tahun 2024 sebesar 3,950. Dalam konteks pembangunan, Kota Semarang selalu meningkatkan kemampuan untuk bersaing.

2.1.11 Kemiskinan

Namun, tingkat kemiskinan di Kota Semarang selama 20 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walaupun garis kemiskinannya selalu meningkat. Pada tahun 2024, persentase kemiskinan di Kota Semarang sebesar 4,03% dari total penduduk atau sebesar 68.605 jiwa. Jumlah ini tergolong turun dari tahun sebelumnya yaitu 71.756 jiwa yang tergolong penduduk miskin. Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Semarang menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang tingkat kemiskinan, kita perlu melihat lebih jauh ke dalam konsep garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan direpresentasikan sebagai garis batas ukuran seseorang dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau tidak. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran per kapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok lebih tinggi (di atas) garis kemiskinan, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin, demikian pula sebaliknya. Dilihat dari perbandingan garis kemiskinan antara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, terlihat bahwa batas ukuran kemiskinan di Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

2.1.12 Daya Saing Rendah

Selain itu nilai Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2020 Kota Semarang memiliki skor indeks daya saing daerah sebesar 3,898 selanjutnya pada tahun 2021 menjadi 3,8769, pada tahun 2022 sebesar 4,65, pada tahun 2023 sebesar 3,950 dan pada tahun 2024 sebesar 3,950.

Dalam konteks pembangunan, Kota Semarang selalu meningkatkan kemampuan untuk bersaing.

2.1.13 Ketahanan Pangan

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Semarang sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan. Komponen kunci dari indeks ini untuk skala kota melibatkan aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, karena fungsi kota yang bukan sebagai produsen melainkan sebagai konsumen, sehingga mengandalkan pasokan pangan dari kabupaten- kabupaten di sekitarnya yang merupakan daerah penghasil pangan

Selama periode tahun 2018 hingga 2024, Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang mengalami tren peningkatan. Dimulai dari 85,93 pada tahun 2018, terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan indeks mencapai 84,66. Namun, kota ini mampu pulih dan bahkan mencapai tingkat indeks tertinggi sepanjang periode pada tahun 2024 dengan angka 87,73. Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2024. Melihat tren ini, pemerintah Kota Semarang menargetkan untuk terus meningkatkan indeks ini hingga tahun 2045. Berdasarkan target capaian, indeks diharapkan akan mencapai 91,64 pada tahun 2025, 92,30 pada tahun 2030, 91,31 pada tahun 2035, 93,96 pada tahun 2040, dan akhirnya mencapai 94,96 pada tahun 2045.

2.1.14 Lingkungan Hidup

Gambaran kondisi lingkungan hidup Kota Semarang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 yaitu sebesar 56,84 atau tergolong dalam kategori sedang. Berdasarkan indeks penyusunnya, diketahui bahwa IKA dan IKL merupakan aspek yang tergolong rendah atau kurang. Kualitas air sungai di Kota Semarang, pada

musim kemarau, dari 56 titik pemantauan kualitas air, 9 titik dalam kondisi cemar ringan, 22 titik dalam kondisi cemar sedang, dan 25 titik dalam kondisi cemar berat. Dengan semakin meningkatnya intensitas kegiatan di Kota Semarang, dikhawatirkan akan semakin banyak bahan pencemar dan limbah yang masuk ke saluran drainase dan berakhir di sungai. Sementara IKL mengukur persentase tutupan lahan hutan di suatu daerah. Tutupan hutan Kota Semarang yang tergolong rendah menjadi salah satu penyebab IKL rendah.

Sementara itu, IKU (Indeks Kinerja Utama) di Kota Semarang tergolong baik walaupun mengalami penurunan di tahun 2020. Indeks kualitas udara di Kota Semarang dihitung berdasarkan kualitas udara ambians di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO₂ dan NO₂. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyumbang tertinggi unsur pencemaran udara di Kota Semarang berada pada kawasan transportasi sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sepanjang jalur jalan perlu diperhatikan untuk menurunkan dampak pencemaran udara pada kawasan transportasi.

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2022 mengalami tren turun sebesar 0,41% atau 21,98 Gg CO₂eq. Tren penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan di sektor pengadaan dan penggunaan energi sebesar 5,84%. Proporsi sumber emisi terbesar dari sektor pengadaan dan penggunaan energi mencapai 69,03% atau setara dengan 3.646,39 Gg CO₂eq, dengan kategori kunci yaitu transportasi (31,03%), industri energi (20,59%), limbah cair industri (19,05%), industri manufaktur (10,37%), pembuangan sampah padat (5,39%), residential (5,16%), pelumas (3,26%) dan limbah cair domestik (3,14%).

Berdasarkan AKSARA (Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) oleh Bappenas, diketahui bahwa capaian Kota Semarang dalam penurunan emisi terus meningkat sampai tahun 2023. Pada tahun 2023, potensi penurunan emisi GRK Kota Semarang mencapai 86.538,4 TonCO₂eq atau meningkat sebesar 73.589 TonCO₂eq selama lima (5) tahun terakhir secara kumulatif. Sementara itu, penurunan emisi per tahunnya dikontribusi oleh sektor yang berbeda-beda. Tahun 2023, sektor hutan dan lahan merupakan kontributor terbesar yaitu mencapai 304,48 TonCO₂eq sedangkan penurunan emisi GRK paling besar yaitu terjadi pada tahun 2020 sebesar 41.370,30 TonCO₂eq.

Pada sisi *resilient City* (kota Tangguh), Kota Semarang masuk dalam kategori 100 kota dunia yang tangguh yaitu kota yang mampu bertahan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat dari berbagai guncangan dan tekanan. Guncangan dan tekanan ini dapat berupa bencana alam seperti banjir, longsor, krisis ekonomi, dan keadaan darurat kesehatan Masyarakat (pandemi). Tujuan membangun kota yang tangguh adalah untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan penduduknya, memastikan pembangunan berkelanjutan, mendorong lingkungan investasi yang positif, dan mendorong perubahan positif dalam menghadapi kesulitan.

2.1.15 Kelistrikan

Terkait energi listrik, ketersediaan listrik Kota Semarang selalu surplus, bahkan hampir mencapai 50% jika dibandingkan dengan konsumsi per tahunnya. Sektor rumah tangga selalu menjadi sektor yang paling banyak menggunakan listrik, diikuti dengan sektor industri dan sosial bisnis. Hal ini menandakan bahwa Kota Semarang merupakan kota yang memiliki banyak hunian yang tersebar, dan aktivitas hunian tersebut juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi Kota Semarang baik skala mikro maupun makro. Sebaran pelanggan listrik Kota Semarang sejak tahun 2016 telah

meningkat sebesar 40% hingga tahun 2024, walaupun kenaikan pasokannya tidak signifikan (hanya 10%). Di sisi lain, sejak tahun 2021 impor listrik di Kota Semarang terus meningkat, yang diakibatkan oleh naiknya permintaan listrik baik di Kota Semarang dan sekitarnya.

Saat ini, kondisi energi di Kota Semarang cukup untuk menghidupi aktivitas Kota Semarang, namun belum ada back-up dari sistem kelistrikan skala kota yang dapat digunakan apabila terjadi kondisi darurat. Hal ini adalah *concern* dari pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan energi perkotaan, yang dimulai dari ketahanan listrik kota. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang berada di Waduk Jatibarang sebesar 1,5 MW, dan telah banyak pembangkit listrik tenaga surya/solar panel untuk aktivitas perkantoran dan perumahan.

2.1.16 Gas dan BBM

Selain dari listrik, ada pula transisi energi dari gas LPG menuju gas CNG yang disalurkan melalui Jaringan Gas Rumah Tangga. Hingga tahun 2022, telah terdapat 13.854 sambungan rumah tangga yang terlayani, dan akan terus ditingkatkan dalam rangka transisi dan ketahanan energi perkotaan.

Ketahanan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi dan Gas Bumi untuk aktivitas rumah tangga dan industri juga meningkat dari tahun ke tahun, walaupun harga gas non-subsidi terus fluktuatif, sama halnya dengan harga BBM yang mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

2.1.17 Infrastruktur

Pada kualitas layanan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena infrastruktur yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, serta daya saing suatu kota. Untuk mengukur kinerja

infrastruktur dalam berbagai bidang, digunakan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sebagai alat evaluasi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas, efisiensi, serta tingkat keberlanjutan infrastruktur yang tersedia. Indeks ini terdiri dari berbagai aspek yang menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas layanan infrastruktur. Beberapa di antaranya mencakup aksesibilitas layanan, keandalan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, kapasitas yang tersedia, serta efisiensi biaya dalam pengelolaan dan operasionalnya. Selain itu, keberlanjutan lingkungan juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks ini, mengingat infrastruktur yang ramah lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pada tahun 2024 indeks kualitas layanan infrastruktur Kota Semarang mencapai 91,61, hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 84,73.

2.1.18 Banjir dan Rob

Tingkat kawasan yang terdampak banjir dan rob di Kota Semarang terus menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian bencana dan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif. Persentase kawasan yang RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 II-130 mengalami banjir dan rob cenderung mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh faktor curah hujan, kondisi drainase, penurunan muka tanah (*land subsidence*), serta pasang surut air laut. Wilayah pesisir utara Kota Semarang, seperti Semarang Utara, Genuk, dan Tugu, masih menjadi daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap rob akibat intrusi air laut yang semakin meluas. Sementara itu, daerah dengan topografi rendah di Semarang bagian tengah dan timur kerap menghadapi banjir saat curah hujan tinggi, terutama di wilayah yang memiliki sistem drainase kurang optimal. Adapun capaian persentase kawasan banjir dan rob di Kota

Semarang adalah pada tahun 2020 sebesar 3,73 % dan pada tahun 2024 menurun menjadi 3,29%.

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa persentase kawasan banjir dan rob di Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dan mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan berbagai pemangku kepentingan semakin efektif dalam mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Semarang. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program strategis, seperti pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan rob, perbaikan sistem drainase, serta peningkatan kapasitas polder dan pompa air di wilayah rawan genangan. Selain itu, proyek tanggul laut di pesisir utara, serta optimalisasi ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, juga turut berkontribusi dalam menekan risiko banjir dan rob di berbagai kawasan. Selain aspek infrastruktur, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan sistem drainase juga semakin meningkat, didukung oleh berbagai program edukasi dan partisipasi aktif dalam upaya pengelolaan air. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem perkotaan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama dalam keberlanjutan penurunan kawasan terdampak banjir dan rob. Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persentase kawasan terdampak banjir dan rob, seperti pembangunan tanggul laut dan sistem polder di kawasan pesisir, revitalisasi drainase di daerah perkotaan, serta percepatan pembangunan Tol Semarang-Demak yang berfungsi sebagai tanggul pengaman pantai. Selain itu, program konservasi lingkungan dan peningkatan kapasitas sistem peringatan dini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi untuk menekan dampak banjir dan rob. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan persentase kawasan terdampak banjir dan rob di Kota Semarang dapat

terus berkurang, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kenyamanan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan kota di masa depan.

2.1.19 Penurunan Tanah

Penurunan tanah di Kota Semarang terjadi di beberapa kecamatan dengan tingkat risiko amblesan yang berbeda-beda. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Gayamsari, Genuk, Semarang Timur dan Semarang Utara. Luasan risiko amblesan (8-9 cm/tahun) terluas 3.706,98 ha disusul Kecamatan Genuk dengan luas 1.009,59 ha. Lokasi yang mempunyai amblesan parah berada di wilayah pesisir utara, sementara terdapat 4 (empat) kecamatan yang tidak mengalami amblesan yaitu Kecamatan Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, dan Banyumanik.

Berdasarkan studi terbaru tentang penurunan muka tanah di Kota Semarang dalam program *Water Management* oleh Kerjasama *Witteveen Bos* dengan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2020, laju penurunan muka tanah di Kota Semarang selama periode April 2016 hingga Oktober 2019 sebesar 0-2 cm/tahun di sebelah barat daya hingga mencapai 13 cm/tahun di area timur laut Semarang. Terdapat beberapa penyebab penurunan muka tanah yang relevan dengan kondisi Kota Semarang yaitu pengambilan air tanah, tekanan objek di permukaan, aktivitas tektonik, dan konsolidasi alami.

Potensi dampak aktivitas tektonik terhadap penurunan tanah di Semarang sangat kecil jika dibandingkan dengan penurunan muka tanah yang diamati. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi fisiografi Jawa bagian utara serta adanya peningkatan jumlah penduduk dan permintaan air bersih untuk pembangunan dan aktivitas penduduk lainnya terutama untuk kegiatan industri yang memerlukan air dalam jumlah besar.

2.1.20 Ketahanan Daerah

IKD Kota Semarang berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kota Semarang, diketahui pada tahun 2022 nilainya mencapai 0,65 dengan kategori cukup baik. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indeks untuk mengukur ketahanan atau kapasitas dari suatu daerah dalam menanggulangi sebuah bencana. Nilai IKD berada pada rentang nol hingga satu. IKD Kota Semarang pada tahun 2021 berada di angka 0,64 dan pada tahun 2022 mencapai 0,65. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa ketahanan Kota Semarang dalam menanggulangi bencana berada pada kategori yang cukup baik, terlebih terdapat peningkatan nilai IKD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola kebencanaan juga semakin baik.

2.1.21 Indeks Pemerintahan Digital

Indeks Pemerintahan Digital (dulu SPBE) di Kota Semarang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam reformasi SPBE di Kota Semarang adalah digitalisasi berbagai layanan publik. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk menggantikan proses administratif konvensional dengan sistem berbasis elektronik yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir birokrasi yang rumit, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun capaian indeks SPBE dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar 3,30, pada tahun

2021 sebesar 2,98, pada tahun 2022 sebesar 3,38, pada tahun 2023 sebesar 3,89 dan pada tahun 2024 sebesar 3,95.

Peningkatan Indeks SPBE di Kota Semarang juga seiring dengan pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih handal. Pemanfaatan jaringan internet yang lebih luas dan platform digital yang *user-friendly* membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah, seperti permohonan izin, pembayaran pajak daerah, atau pengaduan publik. Dengan adanya sistem elektronik ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat, sehingga memudahkan warga dalam memenuhi berbagai kebutuhan administratif. Selain itu, peningkatan SPBE juga mendorong adanya integrasi antar instansi pemerintahan. Dengan sistem berbasis elektronik yang terhubung, data dan informasi antara dinas-dinas di Kota Semarang dapat dipertukarkan secara lebih cepat dan akurat. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pemerintah. Penerapan SPBE di Semarang juga didorong oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan. Pemerintah Kota Semarang terus melaksanakan pelatihan dan peningkatan keterampilan teknologi informasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mereka dapat lebih optimal dalam menggunakan sistem digital yang ada. Dengan demikian, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat sesuai dengan harapan masyarakat. Selain dari sisi efisiensi dan efektivitas pelayanan, penerapan SPBE juga memberikan dampak positif terhadap pemerintahan yang lebih transparan. Masyarakat dapat memantau proses pengelolaan anggaran, realisasi program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah secara lebih terbuka. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena semua proses dapat dipantau secara langsung melalui platform digital yang telah disediakan. Namun, meskipun

Indeks SPBE Kota Semarang menunjukkan tren positif, tantangan tetap ada, seperti perlunya penyempurnaan sistem yang terus berkembang, peningkatan keamanan data, serta mengatasi kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pengembangan sistem yang lebih baik agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari digitalisasi ini. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks SPBE di Kota Semarang menggambarkan kemajuan signifikan dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelayanan publik, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan pemerintahan yang lebih modern dan inovatif. Peningkatan SPBE ini tentu berperan penting dalam mempercepat transformasi digital di Kota Semarang, yang pada gilirannya mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan sejahtera.

2.1.22 Reformasi Birokrasi

Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) di Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2020 mendapatkan nilai sebesar 69,78 menjadi sebesar 84,14 pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 14,36 persen dari tahun 2020 – 2024. Indeks reformasi hukum adalah salah satu bagian dari proses monitoring dengan tujuan untuk melihat bagaimana regulasi berjalan dengan baik, tepat guna, dan tepat sasaran. Indeks Reformasi Hukum Kota Semarang tahun 2024 yaitu 97,24% masuk dalam kategori sangat baik.

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang dilakukan oleh sebuah instansi dalam melayani masyarakat menggunakan beberapa aspek yaitu aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, aspek SDM, aspek sarana prasarana,

aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,46, pada tahun 2021 sebesar 4,53, pada tahun 2022 sebesar 4,56, pada tahun 2023 sebesar 4,48 dan pada tahun 2024 sebesar 4,43.

2.1.23 Keamanan

Dalam rentang tahun 5 tahun terakhir (2020 – 2024) perkembangan angka kriminalitas di Kota Semarang mengalami fluktuasi yang beragam. Pada rentang 2020 hingga 2021 terjadi penurunan angka kriminalitas. Pada tahun 2021 angka kriminalitas sebesar 1253 kejadian, menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2020 yang sebesar 1.330 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat. Pada tahun 2024 mengalami penurunan angka kriminalitas menjadi 1.221 angka kriminalitas.

2.1.24 Inovasi Daerah

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, ID Kota Semarang terus mengalami peningkatan skor dan kategori pada tahun 2021, Kota Semarang mencapai skor 57,49 dengan kategori inovatif, sementara pada dua tahun berikutnya, kota ini berhasil meningkat menjadi kategori sangat inovatif dengan skor 60,79 pada tahun 2022, 65,8 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 67,92. Prestasi ini membawa Kota Semarang meraih penghargaan sebagai salah satu kota terinovatif dalam *Innovative Government Award* pada tahun 2022 dan 2023.

2.1.25 Transformasi Pemerintahan Digital

Potret pemerintah digital di Kota Semarang, pada awalnya digunakan untuk kebutuhan administrasi internal seperti gaji, data kepegawaian, serta

administratif lainnya. Namun saat ini Pemerintah Kota Semarang tidak hanya pada internal pemerintahan tetapi telah merealisasikan pada eksternal pemerintahan pada administrasi, perijinan, informasi, pengaduan, dan pemantauan serta lainnya.

Terkait dengan infrastruktur digital, Pemerintah Kota Semarang telah memulainya ketika dibentuknya Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kota Semarang pada sekitar tahun 2008. Dimana bagian ini telah mengelola beberapa infrastruktur yang digunakan untuk pemerintahan digital. Selanjutnya Pembangunan infrastruktur berkembang pesat, baik melalui internal maupun kerjasama dengan eksternal (seperti pemasangan ribuan *free wifi publik* tahun 2013). Saat ini infrastruktur digital yang ada sudah mencerminkan kota yang siap daya dukung infrastruktur digital, seperti telah terdapat jaringan internet di semua unit kerja, sudah ada fasilitas 5 G, sudah terdapat *ducting* untuk FO, data center beserta *cloud computing*, pemasangan CCTV RT dan lain-lain. Hingga sekarang Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti tren perkembangan digital masa kini, seperti penggunaan *IoT*, *metaverse*, AI, dan lainnya dalam layanan publik.

Pada sektor ekonomi digital, pada awalnya ekonomi digital digunakan pada perangkat daerah keuangan dan untuk UMKM. Pada tahun 2017 meluncurkan Semarang Digital Kreatif, untuk mendukung perkembangan *start up*. Saat ini berbagai dukungan untuk ekonomi digital telah berkembang pesat, seperti: penggunaan pajak dan retribusi *online*, parkir *online*, pembayaran melalui dompet digital / QRIS, perijinan UMKM *online*, ticketing *online*, dan berbagai dukungan ekonommi digital lainnya.

Masyarakat digital dapat ditelusuri sejak awal penggunaannya pada tahun 2007 ketika Pemerintah Kota Semarang membangun dan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan, digunakan dalam musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya hingga tingkat kelurahan. Pada tahapan selanjutnya

pemerintahan digital dioperasikan dalam penerimaan peserta didik, jauh sebelum ada regulasi dari pusat. Saat ini masyarakat telah dapat menikmati berbagai layanan digital dan telah partisipasi aktif dalam ruang digital dalam layanan publik, pengaduan, kegawatdaruratan, *free wifi* ruang publik, dan lainnya.

2.2 Potensi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki potensi untuk mengadopsi konsep *Smart City* dengan memanfaatkan kekuatan di bidang ekonomi, SDM, infrastruktur, lingkungan, sosial budaya dan tata kelola pemerintahan. *Masterplan Smart City* dapat dirancang dengan fokus pada pengembangan teknologi (baik yang berbasis digital atau non digital) yang dapat mendukung efisiensi dan keberlanjutan, dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kepuasan layanan publik dan pencitraan kota. Berdasar gambaran yang komprehensif tentang kondisi Kota Semarang, maka potensi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

2.2.1 Ekonomi

a. Sektor Unggulan

Kota Semarang memiliki sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Sektor-sektor ini dapat menjadi basis pengembangan ekonomi digital dan industri 4.0 dalam kerangka *Smart City*.

b. UKM dan Wirausaha

Proporsi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) yang tinggi (lebih dari 90%) menunjukkan potensi untuk pengembangan ekosistem digital dan inovasi berbasis UKM. Program pemberdayaan UKM melalui teknologi digital dapat menjadi fokus dalam *Smart City*.

c. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan investasi yang meningkat dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi di bidang teknologi dan infrastruktur *Smart City*.

d. Pariwisata Berbasis Teknologi

Kota Semarang memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi, seperti *Augmented Reality* (AR) untuk wisata sejarah dan budaya. Serta digitalisasi promosi pariwisata, integrasi sistem informasi wisata, dan pemanfaatan *big data* untuk analisis tren wisatawan.

e. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan konsep wisata berbasis *urban quality tourism* dengan pendekatan teknologi *Smart Tourism*, melalui penggunaan teknologi dalam semua lini desa wisata tersebut.

f. Ekonomi Kreatif

Potensi ekonomi kreatif dapat didukung dengan pengembangan platform digital untuk pemasaran dan distribusi produk kreatif lokal. Melalui dukungan ekonomi digital dengan infrastruktur digital yang kuat, literasi digital yang tinggi, dan ekosistem bisnis digital yang inovatif.

2.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Bonus Demografi

Kota Semarang diproyeksikan mengalami bonus demografi hingga tahun 2040, dengan dominasi penduduk usia produktif. Ini merupakan potensi besar untuk pengembangan SDM yang kompeten dalam teknologi dan inovasi.

b. Pendidikan dan Literasi

Rata-rata lama sekolah yang meningkat dan angka melek huruf yang tinggi menunjukkan potensi untuk pengembangan program pendidikan berbasis teknologi dan literasi digital.

c. *Telemedicine* dan Kesehatan Digital

Dengan meningkatnya harapan hidup dan tantangan kesehatan seperti stunting, pengembangan layanan kesehatan digital dan *telemedicine* dapat menjadi solusi dalam *Smart City*.

d. *Smart Healthcare*

Penggunaan teknologi untuk pemantauan kesehatan masyarakat, seperti *wearable devices* dan aplikasi kesehatan, dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

e. SDM Wirausaha

Penguatan kapasitas SDM dalam *e-commerce*, *fintech*, dan teknologi berbasis *AI* dan *IoT*.

2.2.3 Infrastruktur

a. Infrastruktur Transportasi

Kota Semarang memiliki infrastruktur transportasi yang cukup baik, termasuk terminal bus, pelabuhan penumpang dan peti kemas, bandara, serta dua stasiun kereta api. Pengembangan sistem transportasi cerdas (Smart Transportation) dapat menjadi fokus utama dalam *Masterplan Smart City*.

b. Konektivitas Digital

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, Kota Semarang dapat mengembangkan infrastruktur jaringan internet yang lebih cepat dan luas, termasuk 5G, untuk mendukung aplikasi *Smart City*.

c. Pengelolaan Air dan Energi

Potensi pengelolaan air secara terpadu dan peningkatan penggunaan energi terbarukan (seperti tenaga surya dan mikro hidro) dapat diintegrasikan dalam *Smart City* untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.

d. Pengembangan Konsep *Smart City*

Mewujudkan *Smart Living* dengan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kawasan permukiman dengan konsep kota yang ramah lingkungan dan bebas banjir.

e. Pengelolaan Drainase

Pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko banjir.

2.2.4 Lingkungan

a. Pengelolaan Lingkungan

Kota Semarang memiliki tantangan lingkungan seperti banjir, rob, dan penurunan kualitas air. Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan berbasis teknologi (seperti *IoT* untuk pemantauan banjir dan kualitas air) dapat menjadi solusi dalam *Smart City*.

b. Energi Terbarukan

Potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan mikro hidro, dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan RTH dan program penghijauan dapat diintegrasikan dengan teknologi untuk memantau dan mengelola kualitas lingkungan.

d. Sistem Peringatan Dini

Kota Semarang memiliki risiko bencana seperti banjir, rob, dan longsor. Pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi dapat meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana.

e. Manajemen Bencana

Integrasi teknologi dalam manajemen bencana, seperti penggunaan drone dan sensor untuk pemantauan, dapat meningkatkan respons dan mitigasi bencana.

2.2.5 Sosial dan Budaya

a. Toleransi

Kota Semarang memiliki indeks toleransi yang tinggi, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan program *Smart City* yang inklusif dan ramah terhadap semua kelompok masyarakat.

b. Pelestarian Budaya

Potensi budaya lokal dapat diintegrasikan dengan teknologi untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya dan edukasi digital.

c. Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan ekosistem digital, termasuk literasi digital masyarakat, inovasi teknologi, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan

d. Mewujudkan Kesenjangan

Melakukan transformasi sosial untuk menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang inklusif.

2.2.6 Tata Kelola Pemerintahan

a. Reformasi Birokrasi

Peningkatan indeks reformasi birokrasi dan integritas nasional menunjukkan potensi untuk pengembangan *e-government* dan pelayanan publik berbasis teknologi.

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kota Semarang telah mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang dapat ditingkatkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.

c. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan platform partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan *Smart City*.

d. Data Center

Kota Semarang dapat memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti, melalui pengembangan sistem *big data* dan analitik.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dapat menjadi inovasi dalam *Smart City*.

f. Inovasi Daerah

Kota Semarang telah menunjukkan peningkatan dalam Indeks Inovasi Daerah, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan inovasi teknologi dalam *Smart City*.

g. Penggunaan Teknologi Masa Kini

Implementasi *super app*, dashboard warga, sistem data terintegrasi, dan sistem otomatis berbasis *AI* dan *IoT* untuk mengatasi permasalahan kota.

h. Cyber Marketing

Pemerintah daerah memasarkan produk, jasa, event dan asset yang ada di kota, baik milik pemerintah maupun swasta. Melalui pemasaran integrative dengan menggunakan berbagai saluran media internet.

2.3 Tantangan Yang Dihadapi

Kota Semarang masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi yang diharapkan dapat teratasi dengan implementasi konsep *Smart City*. Beberapa tantangan yang dihadapi Kota Semarang ke depan yaitu sebagai berikut.

2.3.1 Ekonomi

- a. Indeks Gini yang meningkat menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang perlu diatasi melalui program inklusif berbasis teknologi.
- b. Tingkat pengangguran menurun, namun kualitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja berbasis teknologi.
- c. Sektor informal dan UKM memerlukan dukungan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

2.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Meskipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup baik, namun kesadaran tentang manfaat *Smart City* masih perlu ditingkatkan.
- b. Adanya kesenjangan akses dan kemampuan menggunakan teknologi antara kelompok masyarakat dapat menghambat implementasi *Smart City*.

- c. Angka melek huruf sudah tinggi, namun literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat teknologi *Smart City*.
- d. Meskipun rata-rata lama sekolah meningkat, masih ada kesenjangan akses Pendidikan bagi kelompok rentan dan disabilitas.
- e. Masih rendahnya daya saing SDM, terutama dalam bidang teknologi dan inovasi.

2.3.3 Infrastruktur

- a. Kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah, menimbulkan tekanan pada kebutuhan infrastruktur.
- b. Pertumbuhan penduduk yang tidak terencana ke wilayah pinggiran (*urban sprawl*) menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyediaan infrastruktur dan layanan dasar.
- c. Persentase RTH di Kota Semarang masih rendah (10,16%), yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan.
- d. Beberapa wilayah pinggiran kota, masih kurang terlayani oleh infrastruktur dasar seperti air bersih dan transportasi.
- e. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh. Program penataan permukiman kumuh perlu didukung oleh teknologi untuk pemantauan dan perbaikan.
- f. Kebutuhan perumahan meningkat pesat, memerlukan solusi inovatif seperti pembangunan perumahan vertikal dan penggunaan teknologi prefabrikasi.
- g. Mulai menghadapi masalah kemacetan, terutama di pusat kota. Pengembangan sistem transportasi cerdas (*smart transportation*) dan diperlukan penataan integrasi moda transportasi.
- h. Beberapa wilayah masih kurang terlayani oleh transportasi publik yang memadai.

- i. Ketersediaan infrastruktur digital seperti jaringan internet cepat dan 5G masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pinggiran.

2.3.4 Lingkungan

- a. Masih sering terjadi banjir dan rob, untuk banjir bahkan merebak tidak hanya daerah pesisir. Tantangan ini memerlukan solusi teknologi seperti sistem pemantauan banjir berbasis *IoT* dan pengelolaan drainase yang cerdas.
- b. Beberapa wilayah (utamanya di bagian utara) mengalami penurunan muka tanah. Hal ini memerlukan penanganan struktural dan non-struktural, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan mengatasi dampaknya.
- c. Peningkatan suhu, curah hujan ekstrem, dan kenaikan muka air laut merupakan tantangan serius yang memerlukan adaptasi dan mitigasi berbasis teknologi.
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang masih rendah, terutama terkait kualitas air dan tutupan lahan, memerlukan intervensi teknologi untuk pemantauan dan perbaikan.
- e. Perlu dikembangkan sistem peringatan dini dan manajemen bencana berbasis teknologi, karena kondisi wilayah rentan terhadap bencana seperti banjir, rob, dan longsor.
- f. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) meningkat, namun kapasitas mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan pada masyarakat.
- g. Peningkatan suhu, curah hujan ekstrem, dan kenaikan muka air laut merupakan tantangan serius yang memerlukan adaptasi dan mitigasi berbasis teknologi.

2.3.5 Sosial dan Budaya

- a. Prevalensi stunting dan masalah kesehatan lainnya memerlukan intervensi teknologi seperti *telemedicine* dan sistem pemantauan kesehatan berbasis data.
- b. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk lansia memerlukan persiapan infrastruktur dan layanan kesehatan yang ramah lansia.
- c. Meskipun indeks integritas nasional meningkat, korupsi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui teknologi seperti *blockchain* untuk transparansi.

2.3.6 Tata Kelola Pemerintahan

- a. Indeks reformasi birokrasi meningkat, namun masih terdapat gap yang perlu diatasi untuk mencapai tata kelola yang lebih efisien dan transparan.
- b. Kondisi infrastruktur digital belum merata disemua wilayah, terutama wilayah pinggiran kota.
- c. Tantangan dalam integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan koordinasi antar perangkat daerah perlu diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang terpadu.
- d. Meningkatnya penggunaan teknologi berisiko pada keamanan siber yang meningkat, memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan infrastruktur digital.
- e. Melakukan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pembiayaan bersama karena implementasi *Smart City* memerlukan investasi besar dan anggaran pemda terbatas.
- f. Pembiayaan pembangunan masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, yang dapat menghambat kemandirian dalam pembiayaan program *Smart City*.

Berdasarkan identifikasi tantangan yang dihadapi Kota Semarang yang bersifat multidimensi, maka diperlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan teknologi inovatif, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga dalam *Masterplan Smart City* mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan.

BAB III

LANDASAN *SMART CITY*

3.1 Pengertian *Smart City*

➤ **Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi)**

Smart City sebagai konsep pengembangan kota berbasis teknologi digital atau non digital secara inovatif, efektif, dan efisien. Tujuannya adalah menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam suatu wilayah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup Masyarakat.

➤ **Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)**

Smart City sebagai konsep pengembangan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing wilayah, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya.

➤ **Prof. Suhono Harso Supangat (SCCIC ITB)**

Smart City adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan melalui solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup warganya.

➤ **Citiasia Center for Smart Nation**

Smart City atau kota cerdas adalah kerangka kerja yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan tata kelola kota, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di area tersebut.

➤ **Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)**

Smart City atau kota cerdas adalah wilayah perkotaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan data dan mengoperasikan serta menyediakan layanan. Data ini dapat dikumpulkan dari warga, perangkat, bangunan, atau kamera, dan diaplikasikan dalam berbagai sektor seperti sistem transportasi, pembangkit listrik, utilitas, kehutanan kota, jaringan pasokan air, pengelolaan limbah, investigasi kriminal, sistem informasi, sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan layanan komunitas lainnya

Dari berbagai pengertian *Smart City* di atas maknanya bahwa *Smart City* merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis digital dan non digital guna meningkatkan efisiensi tata kelola, daya saing ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat melalui solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur fisik, ekonomi, sosial, transportasi, energi, lingkungan, serta layanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan pendekatan yang cerdas dan berbasis data, *Smart City* bertujuan menciptakan kota yang lebih layak huni, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

3.2 Komponen *Smart City*

Landasan *Smart City* mengacu pada kerangka dasar yang dapat mendukung pengembangan dan pengoperasian *Smart City*, yang melibatkan integrasi teknologi canggih, sistem data, dan tata kelola kolaboratif untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan layak huni. Komponen utama landasan *Smart City* secara umum meliputi:

1. Infrastruktur Teknologi

(*Internet of Things / IoT, 5 G, cloud computing*, pusat data, jaringan konektivitas)

2. Manajemen dan Analisis Data

(*Big data*, kecerdasan buatan / *AI*, pembelajaran mesin / *LM*, data terbuka)

3. Perencanaan dan Infrastruktur Kota

(Utilitas cerdas, mobilitas cerdas, bangunan berkelanjutan)

4. Layanan Publik

(SPBE, platform layanan digital, partisipasi publik, kesejahteraan sosial)

5. Keamanan dan Privasi

(Keamanan siber, perlindungan privasi, literasi digital)

6. Keberlanjutan dan Pengelolaan Lingkungan

(Manajemen energi dan pemantauan lingkungan)

7. Tata Kelola

(Kolaborasi / kemitraan dengan swasta, tata kelola digital, inklusif)

8. Ketahanan dan Manajemen Bencana

(Kesiapsiagaan daerah dan mitigasi bencana)

9. Keberlanjutan Finansial

(pendanaan dan investasi pihak ketiga)

3.3 Landasan Strategis *Smart City*

Landasan Program *Smart City* Kota Semarang didasarkan pada beberapa landasan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, aksesibilitas layanan publik yang efisien, keberlanjutan lingkungan dan pencitraan kota, kesemua landasan strategis tersebut dalam implementasinya akan didukung oleh digital maupun non digital.

Landasan strategis *Smart City* Kota Semarang dengan rumusan 5K

terdiri dari:

1. Keterpaduan Sosial.
2. Konektivitas.
3. Kreatifitas.
4. Keberlanjutan.
5. Kepuasan Publik.

Masing-masing poin dari 5K tersebut memiliki sub-sub poin yang menjadi tolak ukur untuk menuju *Smart City*.

3.4 Karakteristik *Smart Solution*

Karakteristik solusi cerdas yang dirancang untuk memenuhi tuntutan kompleksitas bisnis dan teknologi modern, yaitu:

1. Berkelanjutan

Solusi yang berkelanjutan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan pertumbuhan dan perubahan kebutuhan (skalabel, andal, terintegrasi).

2. Efisiensi Tinggi

Fokus pada optimalisasi sumber daya dan kecepatan respons dan responsif dalam memberikan umpan balik cepat kepada pengguna, seperti aplikasi yang memuat data dalam hitungan detik.

3. Terintegrasi dengan Aspek EA+ (*Extended Enterprise Architecture*)

➤ Proses bisnis

Menyelaraskan alur kerja dengan tujuan organisasi.

➤ Data

Memastikan konsistensi dan aksesibilitas data lintas bagian atau unit kerja.

➤ Aplikasi

Interoperabilitas antar system (integrasi ERP dengan CRM).

➤ **Infrastruktur TI**

Pengelolaan server, jaringan, dan penyimpanan yang terkoordinasi (*hybrid cloud*).

➤ **Infrastruktur Non-TI**

Integrasi aset fisik dengan sistem digital.

3.5 Dimensi *Smart City*

Dimensi yang dipakai dalam *Masterplan Smart City* Kota Semarang terdiri dari 6 dimensi kota cerdas nasional (Kemenkomdigi):

1. ***Smart Governance*** adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
2. ***Smart Economy*** adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
3. ***Smart Society*** adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
4. ***Smart Living*** adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang;
5. ***Smart Environment*** adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
6. ***Smart Branding*** adalah inovasi memasarkan daerah, sehingga

mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan citra kota.

3.6 Indikator Dimensi *Smart City*

1. *Smart Governance*

- *Publik Service*, meningkatkan kinerja pelayanan publik
- *Bureaucracy*, meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah
- *Publik Policy*, peningkatan efisiensi kebijakan publik

2. *Smart Economy*

- *Industry*, penataan industri primer, skunder, tersier
- *Welfare*, peningkatan kesejahteraan masyarakat
- *Transaction*, membangun ekosistem keuangan

3. *Smart Living*

- *Harmony*, harmonisasi lingkungan yang nyaman
- *Health*, menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan
- *Mobility*, membangun transportasi dan logistik

4. *Smart Society*

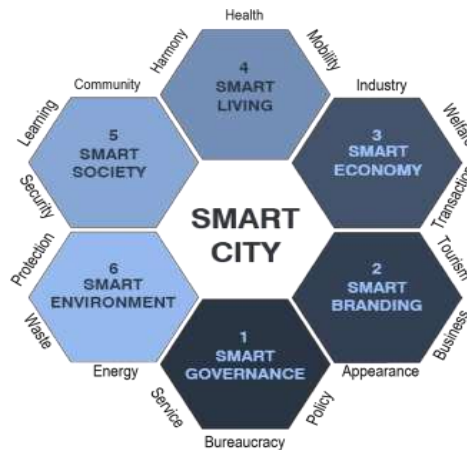
- *Community*, membangun masyarakat yang *smart*
- *Learning*, membangun sistem edukasi
- *Security*, menjamin keamanan dan keselamatan

5. *Smart Environment*

- *Protection*, perlindungan lingkungan
- *Waste*, tata kelola sampah dan limbah energy
- Membangun daya saing energi yang berkelanjutan

6. *Smart Branding*

- *Tourism*, membangun ekosistem pariwisata
- *Business*, membangun daya saing bisnis
- *City Appearance*, penataan wajah kota



Gambar 5
Dimensi *Smart City* Beserta Indikatornya

3.7 Azas *Smart City*

Azas dalam konsep *Smart City* Kota Semarang:

1. Terpadu,
2. Efektif,
3. Efisien,
4. Inklusif,
5. Transparansi,
6. Berkelanjutan
7. Partisipatif.

3.8 Pendekatan *Smart City*

Pendekatan *Smart City* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan, meliputi:

1. Tata kelola birokrasi;
2. Ekonomi;
3. Kehidupan berkota;
4. Masyarakat;
5. Lingkungan;
6. Mobilitas.

3.9 Sektor-Sektor Yang Terintegrasi

Smart City tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi, tetapi juga pada integrasi berbagai sektor kehidupan yang saling mendukung, seperti:

1. Energi Terbarukan (*Renewable Energy*)
2. Pelibatan Warga (*Engaging the Residents*)
3. Pertahanan Siber (*Cyber-Deffense*)
4. Ketahanan Teknologi (*Technological Resiliency*)
5. Transportasi Elektronik (*e-Transportation*)
6. Pemerintahan Elektronik (*e-Government*)
7. Jaringan Wi-Fi
8. Hackathon
9. Mobilitas (*Mobility*)
10. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
11. Kebijakan (*Policy*)

3.10 Pengembangan *Smart City*

Pengembangan *Smart City* oleh Kemendagri diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar terlebih dahulu, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, trantiblinmas dan sosial (pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Setelah hal tersebut baru ditambahkan urusan sesuai daya saing pemda.

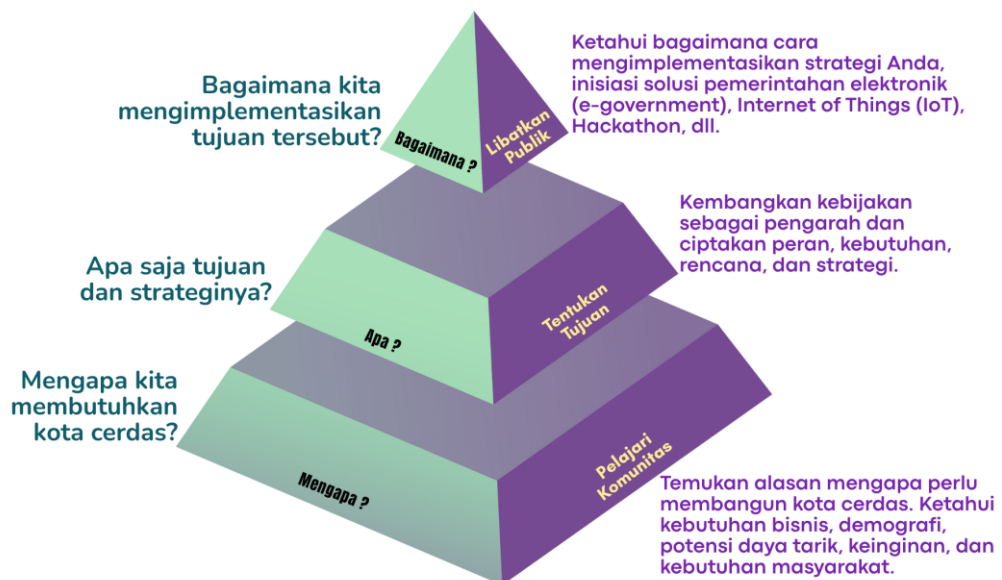
Implementasi pengembangan *Smart City* dirancang secara berkesinambungan, dengan maksud:

- Membantu dan memudahkan berbagai kegiatan masyarakat.
- Mengelola sumber daya yang ada dengan efisien.

- Memberikan peningkatan pelayanan publik yang menunjang peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.
- Mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
- Memberi kepuasan publik dan meningkatkan kesejahteraannya.
- Meningkatkan citra kota secara positif.

Masih banyak hal yang masih harus dikembangkan untuk sebuah kota yang dapat mendukung ekonomi yang maju dan mewujudkan Masyarakat Sejahtera. Hal ini dikarenakan banyaknya perubahan yang terjadi (dinamis), baik dari sisi regulasi, perkembangan global dan tuntutan publik yang semakin tinggi, serta meningkatkan daya saing daerah. Masa lima tahun ke depan, pengembangan *Smart City* harus komprehensif pada semua sektor walaupun terdapat fokus prioritas program pengembangan Pembangunan. Sehingga kota masa depan dapat mewujudkan ekosistem *Smart City* yang berkelanjutan, sesuai tahapan Pembangunan jangka Panjang daerah.

3.11. Peta Jalan Pengembangan *Smart City*



Gambar 6
Piramida Proses Pengembangan *Smart City*

BAB IV

KONSEP *SMART CITY*

4.1 *Smart City* di Dunia

Konsep kota cerdas telah diadopsi oleh beberapa negara dengan menerapkan sistem informasi untuk mengintegrasikan pengoperasian infrastruktur, layanan perkotaan serta keselamatan publik (Sarkar, 2019). Sejak saat itu, konsep tersebut berkembang menjadi hampir semua bentuk inovasi berbasis teknologi (walaupun ada yang berbasis TIK dan non TIK) dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan kota. Dengan demikian, konsep tersebut diharapkan pada kota besar di dunia dapat menghubungkan pemerintahan menjadi lebih dekat dengan masyarakatnya. Dimana pemerintah dapat memberikan layanan baru untuk mengatasi berbagai tantangan perkotaan, pertumbuhan ekonomi dan permasalahan lingkungan.

Pembangunan kota cerdas tidak sekedar mengedapankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan Digitalisasi pemerintahan namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan sarana digital dan non digital sebagai faktor pendukung atau *enabler*. Sehingga era baru pembangunan dan pengembangan perkotaan di dunia pada beberapa tahun terakhir telah memunculkan program kota cerdas atau *Smart City* sebagai konsep dalam pengelolaan perkotaan. Konsep *Smart City* di dunia berkembang pesat dengan penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan warganya. Namun *Smart City* bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga bagaimana kota dapat menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan bagi warganya. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan tantangan masing-masing negara.

1. Singapura

Telah lama dikenal sebagai salah satu *Smart City* terdepan. Kota ini menggunakan teknologi canggih untuk pengelolaan lalu lintas, pengawasan keamanan, pengelolaan energi, dan pengelolaan limbah. Singapura juga memiliki sistem transportasi publik yang sangat efisien dan aplikasi yang memudahkan warga dalam mengakses berbagai layanan publik secara digital.

2. Dubai (Uni Emirat Arab)

Memiliki visi yang ambisius untuk menjadi *Smart City* global, dengan inisiatif seperti "*Smart Dubai*" yang mencakup penggunaan data besar untuk meningkatkan layanan publik, *e-government*, serta pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur secara *real-time*.

3. Seoul (Korea Selatan)

Mengembangkan konsep *Smart City* yang komprehensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup warganya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

4. Tokyo (Jepang)

Menggunakan teknologi untuk manajemen energi yang efisien, termasuk smart grid dan sistem penyimpanan energi. Selain itu menerapkan sistem kereta api dan transportasi umum yang sangat efisien dan terintegrasi. Hal lain yaitu adanya Sistem peringatan dini dan manajemen bencana yang canggih, karena Jepang salah satu Kawasan yang sering dilanda bencana.

5. Barcelona (Spanyol)

Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, seperti sensor pintar di jalan-jalan untuk mengoptimalkan parkir dan penggunaan energi. Barcelona juga memiliki sistem manajemen air pintar dan berbagai inisiatif ramah lingkungan.

6. Amsterdam (Belanda)

Memfokuskan upayanya pada keberlanjutan dan inovasi dengan memperkenalkan konsep "*Smart Grid*" untuk distribusi energi, serta menggunakan aplikasi dan data besar untuk memantau polusi udara, transportasi, dan efisiensi energi. Amsterdam juga mendukung berbagai startup teknologi untuk solusi urban.

7. Copenhagen (Denmark)

Memiliki komitmen kuat untuk menjadi kota yang netral karbon dengan menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan energi dan pengelolaan limbah. Mereka juga fokus pada keberlanjutan dengan infrastruktur hijau dan pengurangan jejak karbon.

8. New York City (USA)

Kota ini menggunakan *big data* untuk meningkatkan layanan publik, seperti pemadam kebakaran, Kesehatan, Penerangan jalan yang cerdas dan hemat energi. Dalam Inovasi Urban menyediakan Wi-Fi gratis dan layanan digital di seluruh kota.

9. Gold Coast (Queensland Australia)

Menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan wisatawan melalui aplikasi wisata pintar dan sistem informasi *real-time*. Kota ini juga menerapkan transportasi umum terintegrasi dan penggunaan teknologi pada manajemen lalu lintas. Serta untuk mendukung penguatan lingkungan dengan program pengelolaan limbah cerdas dan penggunaan energi terbarukan.

4.2 Konsep Implementasi *Smart City*

Berdasarkan uraian di atas maka beberapa kota dunia untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan perkotaan tersebut melalui strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien melalui pendekatan konsep *Smart City*. Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di berbagai wilayah dunia dan sudah diadopsi oleh kota/kabupaten di Indonesia, termasuk dalam hal ini Kota Semarang.

Konsep *Smart City* secara global adalah tentang menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan layak huni melalui integrasi strategis teknologi, data dan partisipasi publik. Tiap kota akan berfokus pada aspek berbeda berdasarkan tantangan dan prioritas unik masing-masing kota.

Konsep *Smart City* berkembang pesat di seluruh dunia, didorong oleh kemajuan teknologi, urbanisasi, dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan. Berikut ini gambaran umum tentang bagaimana konsep *Smart City* berkembang secara global:

1. Melalui *Smart City* semakin mengkolaborasikan *Internet of Things (IoT)*, kecerdasan buatan (*AI*), dan *big data* untuk meningkatkan manajemen perkotaan dan mengoptimalkan sumber daya. Teknologi masa kini tersebut untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor seperti manajemen lalu lintas, konsumsi energi, dan pengelolaan limbah dan lainnya.
2. Banyak konsep *Smart City* yang berfokus pada peningkatan sistem transportasi umum melalui integrasi data *real time*, yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan polusi.
3. Konsep *Smart City* mengadopsi solusi energi hijau, seperti tenaga surya dan angin, dan menggunakan data untuk meningkatkan

pengelolaan sumber daya seperti air dan energi. Kota-kota besar di dunia berinvestasi dalam jaringan pintar dan bangunan hemat energi untuk mengurangi jejak karbon untuk mendorong dalam keberlanjutan lingkungan.

4. Konsep *Smart City* dapat meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik secara *online* tanpa mengenal waktu dan tempat. Sehingga membuat administrasi publik lebih efisien dan transparan.
5. Dalam konsep *Smart City* penggunaan teknologi canggih (sistem pengawasan berbasis *AI*) akan dapat menghasilkan keluaran prediktif dan prespektif dalam membantu pengelolaan kota.
6. Program *Smart City* akan mendorong keterlibatan warga yang lebih besar melalui aplikasi seluler dan platform *online* yang memungkinkan warga melaporkan masalah, berpartisipasi dalam perencanaan kota, dan mengakses data kota secara langsung. Dengan seperti itu memungkinkan transparansi dan respons yang masyarakat akan lebih baik.
7. Kota-kota dunia melalui konsep *Smart City* mengembangkan strategi ketahanan iklim, menggunakan teknologi untuk bersiap menghadapi peristiwa cuaca ekstrem dan bencana alam. Dengan menggunakan sensor dan analisis data untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir, gelombang panas, badai dan bencana lain.

4.3 Konsep Operasional

4.3.1 *Smart City*

Operasional *Smart City* dimaksudkan sebuah kota yang memiliki daya saing yang tinggi dan mampu mengkolaborasikan segala sumber daya yang dimilikinya sesuai kearifan lokal wilayah untuk pengelolaan dan penyelenggaraan penuntasan isu-isu strategis kota secara efektif dan

efisien, melalui solusi inovatif, berjalan integratif, sinkronisasi beberapa pihak dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Operasional *Smart City* mengacu pada penerapan teknologi digital, sistem informasi, dan analitik data dalam pengelolaan berbagai aspek perkotaan guna meningkatkan efisiensi layanan publik, kenyamanan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Operasional *Smart City* memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Perlu dipahami bahwa konsep *Smart City* diimplementasikan bukan untuk mempersempit ruang inovasi dan eksplorasi, *Smart City* harus dipahami sebagai disiplin yang luas, berangkat dari tantangan dan potensi yang dimiliki setiap daerah bisa menentukan inovasi dan program prioritas masing-masing.

Pada dasarnya konsep *Smart City* berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. Jadi melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi-inovasi demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman dan aman. Konsep *Smart City* hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. Pada konsep *Smart City* memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. Dalam konsep *Smart City* juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang holistic, terintegrasi dan komprehensif.

Operasional pengembangan *Smart City* di masing-masing daerah bukan dengan menjadikan teknologi informasi dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir, misal penggunaan sarpras sistem informasi yang mahal atau mewah namun kenyataannya miskin fungsi. Pengembangan *Smart City* lebih difokuskan pada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah

prioritas daerah atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan kolaboratif antar sektor. Pembangunan berbasis *Smart City* secara simultan harus bisa menghasilkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakatnya.

4.3.2 Evaluasi *Smart City*

Penerapan *Smart City* perlu direncanakan dengan baik dan dimaknai sebagai sebuah program yang terarah dan berkesinambungan, tidak hanya menjadi sebuah trend sesaat kemudian selesai. Sehingga program tersebut diperlukan refleksi dan evaluasi dari apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah dilaksanakan dalam program *Smart City* tersebut

Evaluasi program *Smart City* disusun menggunakan pendekatan evaluasi berbasis hasil dengan fokus pada pencapaian hasil-hasil utama, bukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat mikro atau rutin. Beberapa faktor utama yang dinilai adalah tindak lanjut dari pelaksanaan *masterplan* serta *Roadmap Smart City*, baik dari segi regulasi maupun anggaran, hingga dokumentasi yang terverifikasi dari implementasi lapangan

Evaluasi dilakukan melalui pengukuran parameter pembangunan kota sebelum dan sesudah ada program *Smart City* atau dalam perodesasi tertentu (misalnya: sesuai RPJMD di Indonesia kurun waktu 5 tahun). Yaitu membandingkan hasil dari adanya program *Smart City* melalui target yang diharapkan. Dalam konteks ini, evaluasi yang dilakukan yaitu membandingkan parameter-parameter tahun pijakan awal *Masterplan Smart City* dan setelah akhir masa tahun target.

BAB V

KEBIJAKAN *SMART CITY*

5.1 Kebijakan Pusat

5.1.1 Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam kebijakan *Smart City* di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri telah menetapkan beberapa kebijakan dan inisiatif untuk mendorong penerapan *Smart City* yang efektif dan berkelanjutan. Termasuk menginisiasi keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang perkotaan, yang telah mencantumkan pendekatan *Smart City* di Indonesia. Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk menyusun *Masterplan Smart City* yang komprehensif, mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu Kemendagri mendorong penggunaan standar internasional seperti SNI ISO 37120:2018 dan SNI ISO 37122:2019 sebagai acuan dalam pengembangan *Smart City*. Standar ini menyediakan indikator untuk layanan perkotaan dan kualitas hidup, serta indikator untuk kota cerdas, yang membantu dalam penilaian dan perencanaan kota cerdas. Kemendagri aktif berpartisipasi dalam ASCN, yang merupakan platform kolaborasi antar kota di ASEAN untuk mencapai tujuan pembangunan kota cerdas dan berkelanjutan. Dalam penerapan Smart Governance, Kemendagri menekankan pentingnya penerapan Smart Governance sebagai elemen kunci dalam pengembangan *Smart City*. Hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Kebijakan dan inisiatif tersebut, berkomitmen untuk mendorong pengembangan *Smart City* yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.1.2 Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan *Smart City* di Indonesia. Melalui program Gerakan Menuju 100 *Smart City*, Kemkomdigi berupaya mendampingi 100 kota/kabupaten dalam menyusun rencana induk (*masterplan*) dan implementasi *Smart City*. Kemkomdigi mengidentifikasi 6 pilar utama dalam pengembangan *Smart City*, yaitu: *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Environment*, *Smart Society*, *Smart Living* dan *Smart Branding*. Kemkominfo telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung implementasi *Smart City*, antara lain:

- Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk *Smart City* yang komprehensif.
- Memberikan pendampingan teknis dan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi *Smart City* untuk memastikan kesesuaian dengan rencana induk dan tujuan yang ditetapkan.

5.1.3 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan kebijakan dan pedoman yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan *Smart City*. Bappenas menetapkan siklus pengembangan *Smart City* yang terdiri dari:

- Perencanaan: penyusunan master plan yang komprehensif.
- Implementasi: pelaksanaan program dan proyek sesuai rencana.
- Evaluasi: penilaian kinerja dan dampak dari implementasi.
- Sustainability: upaya memastikan keberlanjutan dan pengembangan berkelanjutan.

Siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan *Smart City* dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Bappenas

menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, setiap kota atau kabupaten diharapkan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi lokal sebelum merumuskan rencana *Smart City* yang terintegrasi dengan program nasional.

5.1.4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan kota cerdas berkelanjutan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Konsep ini bertujuan menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Atribut utama kota cerdas berkelanjutan:

- Perencanaan dan desain pembangunan cerdas.
- Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) minimal 20%.
- Infrastruktur transportasi.
- Pengelolaan sampah terpadu.
- Bangunan cerdas.
- Energi terbarukan.
- Komunitas cerdas.

5.1.5 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berperan dalam pengembangan kota cerdas berkelanjutan, dengan fokus pada integrasi teknologi dan pelestarian lingkungan. Kebijakan dan inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengembangan kota cerdas: setiap penyusunan RPJMD Kabupaten / Kota diawali dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan penyusunan. Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong kabupaten / kota untuk meningkatkan anggaran pengelolaan lingkungan hidup serta mendukung penerapan Smart Environment, yang

melibatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wilayah perkotaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui kebijakan dan inisiatif tersebut, untuk memastikan bahwa pengembangan *Smart City* di Indonesia tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada pelestarian dan pemulihan lingkungan, menciptakan kota yang berkelanjutan dan layak huni bagi masyarakat.

5.2 Kebijakan Kota Semarang

5.2.1 Visi Misi

Kebijakan *Smart City* dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 menjadi bagian dari strategi pembangunan berbasis teknologi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat kebijakan *Smart City* di Kota Semarang perlu diketahui terlebih dahulu visi dan misi. Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari Dan Inklusif”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan rasio gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob, serta indikator terkait lainnya.

Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.

Misi 2. Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Misi 3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.

Misi 4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global.

Misi 5. Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.

Misi 6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat.

Misi 7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

Sedangkan tema pembangunan tahunan dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2025 – 2029, akan digunakan dalam setiap tahapan

pembangunan *Smart City* yang akan mengadopsi semangat dan prioritas dari tema RPJMD tahunan tersebut.

1. Tahun 2025

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM):

Tema pembangunan pada tahun ini adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Strategi *Smart City* akan difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung *e-education*, *e-health*, serta layanan sosial adaptif berbasis data dan kebutuhan warga.

2. Tahun 2026

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan:

Program smart environment akan difokuskan pada penerapan sistem monitoring kualitas udara dan air, digitalisasi sistem persampahan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan berbasis data spasial dan sensor lingkungan.

3. Tahun 2027

Penguatan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Pariwisata

Pada fase ini, Smart Economy dan Smart Branding menjadi prioritas. Pengembangan ekosistem digital UMKM, digitalisasi produk unggulan daerah, serta promosi destinasi pariwisata berbasis aplikasi dan media digital menjadi strategi utama.

4. Tahun 2028

Peningkatan Infrastruktur Strategis Kota

Tahun ini menjadi momentum penguatan infrastruktur digital secara lebih masif, baik dari sisi jaringan internet, pusat data kota, maupun infrastruktur pendukung layanan publik berbasis digital. Fase ini sejalan dengan fase pengembangan dan konsolidasi transformasi digital.

5. Tahun 2029:

Penguatan Daya Saing Kota

Seluruh sistem *Smart City* yang telah dibangun dan dioptimalkan pada tahun-tahun sebelumnya akan diarahkan untuk meningkatkan daya saing Kota Semarang secara nasional dan global. Fokusnya adalah pada kualitas layanan publik digital, efisiensi birokrasi, kualitas hidup masyarakat, serta reputasi kota dalam kancah nasional dan internasional.

5.2.2 Keterkaitan *Smart City* pada RPJMD Kota Semarang

Visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *Smart City*, yang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Transformasi Digital dan SPBE

RPJMD menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Indeks SPBE Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih modern dan responsif.

2. Integrasi *Big Data* dan *Smart Governance*

Dalam RPJMD, *Smart City* dikembangkan dengan integrasi *big data* untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik melalui platform terintegrasi juga menjadi bagian dari strategi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

3. Digitalisasi Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Semarang menargetkan 100% perangkat daerah memiliki aplikasi yang sesuai standar, serta mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai ketentuan

perundang-undangan. Selain itu, semua layanan publik dan administrasi pemerintahan ditargetkan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.

4. Peningkatan Ekonomi Kota

Smart City dalam RPJMD berperan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, mendorong inovasi bisnis, serta meningkatkan daya saing UMKM dan industri lokal. Digitalisasi di berbagai aspek ekonomi akan menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, melalui dukungan platform yang memantau pertumbuhan ekonomi secara real-time.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan *Smart City* di sektor sosial pada RPJMD, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan program *Smart City* memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan kesejahteraan sosial.

6. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Dalam RPJMD juga mencakup pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung konsep kota cerdas, termasuk perluasan jaringan internet, sistem transportasi cerdas, dan layanan publik berbasis teknologi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih efisien, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

7. Partisipasi Masyarakat dalam *Smart City*

Pada RPJMD menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan melalui kanal digital serta forum musrenbang inklusif. Ini sejalan dengan konsep *Smart City* yang mengutamakan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

8. Keamanan Data dan Privasi

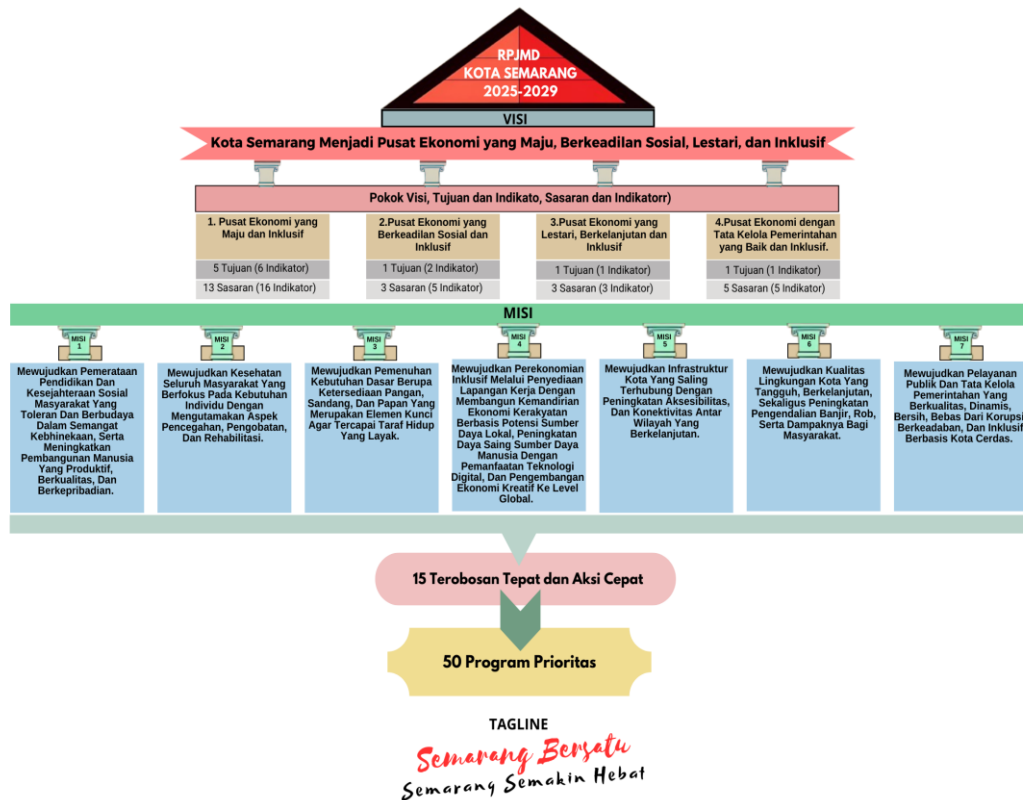
Seiring dengan digitalisasi layanan, tantangan seperti perlindungan data dan kesenjangan digital menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, dalam RPJMD juga mencakup upaya peningkatan keamanan data dan penguatan regulasi terkait pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan.

5.2.3 Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

Tabel 3
Tagline Visi dan Misi

<i>Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!</i>	
<i>Bangun Infrastruktur Berkualitas</i>	<i>Humanis dalam Melayani</i>
<i>Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan</i>	<i>Ekonomi Inklusif</i>
<i>Ramah Lingkungan</i>	<i>Budaya yang Dilestarikan</i>
<i>Sosial Harmonis Tanpa Konflik</i>	<i>Aksesibilitas Meningkat</i>
<i>Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin</i>	<i>Tangguh menghadapi Tantangan</i>
<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</i>	
<i>Utamakan Kesejahteraan Bersama</i>	

5.2.4 Framework RPJMD Kota Semarang



Gambar 7
Framework RPJMD Kota Semarang 2025-2029

Berdasarkan *framework* di atas dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dengan prinsip keberlanjutan, pemerataan, dan inklusivitas. Melalui pendekatan yang berbasis data dan indikator kinerja, Kota Semarang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang adil, lingkungan yang lebih lestari, serta pelayanan publik yang semakin efisien dan berbasis teknologi.

Dalam pembangunan kota lima tahun ke depan dalam RPJMD tersebut berlandaskan pada visi dan misi, serta program prioritas yang mencerminkan arah pembangunan Kota Semarang yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Visi Kota Semarang “**Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif**”, mencerminkan

komitmen Kota Semarang untuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pembangunan yang adil, berkelanjutan, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam rangka mencapai visi tersebut, RPJMD Kota Semarang dibagi menjadi empat aspek utama dengan tujuan visi, sasaran visi dan indikator yang terukur. Untuk mewujudkan visi dijabarkan dalam 7 misi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi kebijakan dan program.

Dukungan untuk memastikan implementasi yang efektif, pada RPJMD menetapkan 15 terobosan tepat dan aksi cepat serta 50 program prioritas yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Sebagai bentuk semangat untuk mengimplementasikannya mengusung tagline: **Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat**. Tagline ini menggambarkan persatuan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan Pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan visi Kota Semarang pada tahun 2029.

5.2.5 Implikasi Kebijakan

Dalam penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029 yang fokus pada "Penguatan Fondasi Transformasi", implikasi kebijakan terhadap *Smart City* dalam RPJMD Kota Semarang 2025-2029 mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Penguatan Data dan Tata Kelola Pemerintahan Digital
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan pemerintahan.
 - Integrasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
 - Penggunaan *big data* untuk pengambilan keputusan berbasis bukti
 - Implementasi aplikasi layanan publik yang sesuai dengan standar perundang-undangan

- Peningkatan jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah

2. Ekonomi Digital

- Pengembangan ekosistem ekonomi yang inovatif dan inklusif berbasis teknologi
- Penguatan ekonomi kreatif berbasis teknologi
- Penerapan sistem pembayaran digital pada berbagai usaha untuk mendukung transaksi yang efektif dan efisien (termasuk hubungannya dengan pajak daerah)
- Mendorong usaha kecil dan menengah untuk mengadopsi teknologi digital dalam operasional dan pemasaran
- Peningkatan akses terhadap platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas
- Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan digital agar mampu beradaptasi dengan ekonomi digital
- Kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan *start up* yang lebih berkembang

3. Pendidikan dan Kesehatan Cerdas (*Smart Education & Smart Health*)

- Digitalisasi layanan pendidikan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan.
- Program sekolah swasta gratis bagi siswa TK, SD, dan SMP dari keluarga kurang mampu
- Penguatan muatan lokal dan pendidikan karakter dalam kurikulum
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan BPJS dan fasilitas kesehatan berbasis *smart system*
- Penerapan *Universal Health Coverage (UHC)* untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan Kesehatan.

4. Smart Living dan Jaminan Sosial

- Penggunaan teknologi dalam program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem
- Pemanfaatan kecerdasan buatan (*AI*) dalam pemetaan wilayah rawan sosial
- Pengembangan sistem pendataan pelayanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi
- Revitalisasi permukiman kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- Pengembangan sistem drainase perkotaan untuk mengatasi banjir dan rob

5. Mobilitas Cerdas

- Penerapan integrasi transportasi berbasis digital untuk konektivitas antar moda.
- Pengembangan infrastruktur berbasis *IoT (Internet of Things)* untuk pemantauan lingkungan.
- Pengembangan sistem transportasi berbasis *Smart City*, seperti eco-driving dan monitoring emisi kendaraan
- Implementasi teknologi untuk peningkatan keselamatan jalan
- Implementasi sistem parkir elektronik dan manajemen lalu lintas berbasis teknologi

6. Pemberdayaan Masyarakat

- Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan literasi digital dan *entrepreneurship* berbasis digital
- Pemanfaatan kanal aduan digital dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) inklusif
- Penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah melalui komunitas masyarakat dan mitra strategis

- Masyarakat aktif berkontribusi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek
- Implementasi *Smart City* mendukung masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik secara daring.

7. Citra Kota

- Penguatan identitas Kota Semarang sebagai kota cerdas dan inovatif
- Peningkatan promosi kota, untuk menarik investasi, memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
- Penguatan tagline dan identitas visual kota dengan konsep *Smart City* yang inovatif dan inklusif
- Pengembangan *Smart Tourism* secara inovatif
- Pembangunan citra kota yang ramah investasi
- Pelibatan komunitas kreatif, *influencer*, dan pelaku industri digital untuk memperkuat branding kota secara masif

5.2.6 Cakupan *Smart City* pada Dokumen RPJMD

Beberapa hal yang telah tertera pada Dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, yaitu:

- Utamanya pada misi 7 (mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas) telah memunculkan *Smart City* dalam rangka bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi
- Tertuang juga bahwa *Smart City* akan dikembangkan dengan integrasi *big data* untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

- Pada bagian Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah tertuang persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung *Smart City*
- Penilaian kinerja pada urusan komunikasi dan informatika menyebutkan kinerja yang positif, terkait akses internet di OPD, integrasi sistem, cakupan penyebaran dan penyediaan informasi publik serta implementasi *Masterplan Smart City*
- Pengembangan Teknologi Kendaraan, melalui penetapan teknologi *Smart/Eco Driving* dan penerapan *Smart City* pada program keselamatan jalan
- Penerapan konsep kota cerdas (*Smart City*) dalam tata kelola kota, dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transportasi, dan pengelolaan lingkungan
- Mengupayakan revitalisasi ruang publik dan ruang hijau untuk menciptakan kota yang lebih nyaman, sehat, dan ramah lingkungan
- Dengan pengembangan kawasan strategis yang optimal, harapannya potensi ekonomi tinggi dapat berkembang secara maksimal, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, serta mendorong pembangunan yang lebih merata dan inklusif

Inti dari keseluruhan cakupan *Smart City* dalam RPJMD tersebut, berfokus pada digitalisasi, efisiensi layanan publik, peningkatan daya saing ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota. Sehingga dalam membangun kota bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kota dan generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya dapat menciptakan kota yang lebih efisien, inklusif, inovatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi yang

akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat di segala bidang.

5.2.7 Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029

Pembangunan Kota Semarang pada tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Kota, yang disusun berdasarkan keterkaitan antara pokok visi, misi, tujuan serta indikator yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan pembangunan Kota Semarang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, untuk mencapai target indikator setiap tahun dan lima tahun ke depan. Berikut pokok Visi, Misi, Tujuan dan Indikator tersebut.

Tabel 4
Pokok Visi, Misi, Tujuan dan Indikator

No	Pokok Visi	Misi	Tujuan	Indikator
1	Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	MISI 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
			Menurunkan pengangguran secara inklusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		MISI 5: Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas serta inklusif bagi seluruh masyarakat.	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis

No	Pokok Visi	Misi	Tujuan	Indikator
		MISI 2: Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan	Indeks Kesehatan
		MISI 1: Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif di masyarakat	Indeks Pendidikan
			Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif	Indeks pembumihpan Pancasila dan wawasan kebangsaan
2	Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusi	MISI 3: Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.	Menurunkan angka kemiskinan Kota Semarang	Tingkat Kemiskinan
3	Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif	MISI 6: Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh dan berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota
4	Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif	MISI 7: Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadilan, dan inklusif berbasis kota cerdas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi

BAB VI ANALISIS SITUASI

6.1 Pelaksanaan *Smart City* Kota Semarang

6.1.1 Periode Tahun 2013-2016

Smart City Semarang telah mengalami perkembangannya dari tahun ke tahun. Konsep Kota Cerdas (*Smart City*) telah diadopsi oleh Kota Semarang sejak tahun 2013 sebelum ada Program *Smart City* secara nasional. Pada awalnya konsep *Smart City* digunakan untuk pembangunan perkotaan yang berbasis TIK saja. Tindak lanjut launching *Smart City* pada tahun 2013, Pemkot Semarang bekerjasama dengan PT Telkom diawali dengan pemasangan jaringan internet untuk 2.300an titik *free wifi* pada lokasi kantor pemerintahan dan swasta. Sehingga sejak saat itu Pemkot Semarang telah mengenalkan berbagai manfaat internet baik bagi birokrasi pemerintahan maupun masyarakat. Walaupun sebelumnya Pemkot Semarang telah menggunakan beberapa program berbasis internet atau online system, seperti: Penerimaan Peserta Didik (PPD *on line*) pada sekolah, Penggunaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simperda), Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5), dan lainnya.

Pada Tahun 2014 menetapkan kebijakan pengembangan *Smart City* melalui dua tahapan, yaitu: Tahapan pertama tahun 2014-2015 untuk pengembangan manajemen internal *Cyber Government* melalui penguatan portal www.semarangkota.go.id terpadu dan untuk Tahap Kedua tahun 2016-2017 melalui penguatan layanan eksternal atau publik *Cyber Society* dengan pembangunan berbagai aplikasi layanan publik.

Hingga tahun 2016, program *Smart City* berkembang dengan meluncurkan 148 sistem atau aplikasi untuk manajemen internal dan layanan publik, serta diadakan penandatanganan komitmen seluruh

perangkat daerah di lingkungan Pemkot Semarang melalui pakta integritas mewujudkan *Smart Government*. Pada tahun ini juga untuk mendukung program *Smart City* juga membuat gebrakan program layanan melalui dibukanya Gedung Pusat Informasi Publik (PIP) yang menyediakan 3 in 1 layanan gratis (penggunaan fasilitas, internet dan pusat informasi). Selain hal tersebut tahun 2016 juga melakukan Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung.

6.1.2 Periode Tahun 2017-2020

Tahun 2017 Kemenkominfo (sekarang Kemenkomdigi) mulai meluncurkan Program *Smart City*. Adapun inisiasi pengembangan kota cerdas tersebut melalui program percepatan kota cerdas melalui gerakan menuju 100 kota cerdas dan Kota Semarang menjadi salah satu kota (25 kabupaten/kota) tahap pertama terpilih dalam program ini. Untuk memenuhi program tersebut, salah satunya mewajibkan daerah memiliki peraturan tentang *Smart City*.

Pada tahun 2017 mengawali program *Smart City* dari pusat, Pemkot Semarang mengintegrasikan berbagai system dari lintas perangkat daerah dalam *situation room*. Pada ruang ini tersedia *command center*, ruang pantau CCTV seluruh kota, ruang Call Center kegawatdaruratan 24/7 dan ruang pengelolaan laporan layanan publik.

Tahun 2018, Dokumen *Masterplan* Semarang *Smart City* yang telah disusun pada tahun 2016 ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Semarang Kota Cerdas. *Masterplan* ini sudah mengacu pada 6 dimensi *Smart City* arahan dari Kemenkominfo. Namun karena pada waktu itu belum ada indikator *Smart City* yang dapat dijadikan pedoman, maka dalam *masterplan* tersebut menggunakan konsep indikator dari Universitas Navarra Spanyol.

Selanjutnya pada tahun 2019 berkaitan perkembangan kota cerdas,

Pemkot Semarang mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama melalui Program Pentahelix dengan pelibatan Akademisi, Bisnis, *Community*, *Government* dan Media (ABCGM), karena disadari bahwa untuk mewujudkan pembangunan kota memerlukan banyak tangan yang harus dilibatkan. Sehingga diluncurkan slogan “Bergerak Bersama” untuk menjadikan kota lebih Baik dan Hebat. Implementasinya Pemerintah Kota Semarang mewujudkan ruang publik melalui Semarang Digital Kreataif (SDK), Semarang Kreatif Galeri (SKG), Co-Working Space TLJ, Co-Working Disabilitas Semarang Barat, dan Co-Working Space di Semarang Selatan serta lainnya

Berbeda dengan kondisi di tahun-tahun sebelumnya, awal tahun 2020 tepatnya dimulai dari bulan Maret terdapat beberapa kondisi dan perubahan yang dirasakan yaitu adanya pandemi Covid 19. Sehingga segala kebijakan Pemkot Semarang diarahkan untuk menghadapi pandemi Covid 19. Berbeda dengan daerah lain, Semarang menjadi salah satu kota yang tidak menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memerangi penyebaran Covid 19, tetapi menggulirkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM. Beberapa program *Smart City* yang digulirkan pada masa pandemi, sebagai kota cerdas dalam menghadapi Covid 19 atau lebih dikenal dengan era tatanan baru (*new normal*) antara lain: memberlakukan Relaksasi Pajak & Retribusi, membentuk kampung siaga, penggunaan absensi daring lewat Handphone, pengukuran termal suhu badan melalui CCTV, pedal injak untuk lift, layanan publik seperti perijinan, permohonan dokumen, rapat koordinasi, kegiatan pembahasan di DPRD berbasis daring, dan lain-lainnya.

6.1.3 Periode Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021 pandemi covid 19 masih belum hilang, sehingga program-program *Smart City* masih diprioritaskan untuk penanganan

pandemi tersebut, seperti misalnya Penggunaan robot layanan publik. Selain itu pada tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung program digitalisasi pemerintahan.

Sehubungan berakhirnya Rencana Induk Semarang Kota Cerdas pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Periode 2021-2026 (*Master Plan Smart City of Semarang*). Pada *masterplan* ini tetap menggunakan 6 dimensi *Smart City* dari Kemenkomdigi, tetapi sudah tidak menggunakan indikator *Smart City* dari Universitas Navara Spanyol (periode 2016-2021). Pada periode 2021-2025 menggunakan indikator dari *Garuda Smart City Model* (GSCM) ITB yang merupakan sebuah konsep yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kematangan pengembangan *Smart City* dengan target penentuan kondisi existing, pengembangan rekomendasi, roadmap dan pemeringkatan.

Selain itu pada tahun tersebut juga memprioritaskan permasalahan utama perkotaan dengan Pengembangan Sistem Penanggulangan Banjir Berbasis *Smart City* untuk menghadapi tantangan banjir dengan teknologi Sistem Peringatan Dini Bencana (*Early Warning System / EWS*). Inisiatif ini merupakan bagian dari penerapan indikator *Smart City* dalam aspek infrastruktur cerdas, teknologi, dan lingkungan, dengan cakupan 12 stasiun EWS yang mencakup 86,74% dari sub-sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada.

Pada tahun 2023 untuk memperkuat program *Smart City* diterbitkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/241 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang. Tim ini bertugas mengoordinasikan dan mengimplementasikan berbagai program *Smart City* di kota tersebut. Selanjutnya pada tahun tersebut Kota Semarang juga

terpilih sebagai *Pilot Project Smart Water* sebagai kota percontohan oleh *International Water Resources Association (IWRA)*, *Korea Water Resources Corporation (K-water)*, dan *Asia Water Council (AWC)*. Kota Semarang berhasil mengalahkan 24 kota lain dari 18 negara untuk mendapatkan kesempatan ini. Tujuan utama proyek ini adalah memperkenalkan sistem manajemen air cerdas guna meningkatkan efisiensi pasokan air dan kualitas pengelolaan air di perkotaan.

Tahun 2024 telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan yang memberikan pendekatan kota cerdas berdasar: tata kelola birokrasi, ekonomi, kehidupan berkota, masyarakat, lingkungan dan mobilitas yang diimplementasikan pada portal khusus *Smart City* Kota Semarang. Selain itu, untuk memperluas jaringan internet broadband dan 5G telah berkolaborasi dengan penyedia jasa internet di Kota Semarang. Beberapa jaringan internet juga telah berubah dari kabel udara kedalam ducting, dimana telah ada delapan ruang jalan dan satu kawasan telah memiliki ducting.

6.2 Evaluasi Program *Smart City* Sebelumnya

Kota Semarang seperti telah disebutkan sebelumnya setelah melaunching *Smart City* pada tahun 2013 dan terpilih menjadi 25 bagian pertama program gerakan menuju 100 *Smart City* oleh Kemenkomdigi pada tahun 2017. Selanjutnya Kota Semarang telah memiliki *Masterplan Smart City* I periode Tahun 2018-2021 berdasar Peraturan Wali Kota Semarang No. 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Kota Cerdas (*Master Plan Semarang Smart City*) dan *Masterplan Smart City* II periode tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Periode 2021 - 2026 (*Master Plan Smart City of Semarang*).

6.2.1 Evaluasi *Smart City* Periode 2017 – 2020 (*Masterplan I*)

Kota Semarang yang terpilih menjadi peserta Gerakan Menuju 100 *Smart City*, menjalani serangkaian proses bimbingan dan pendampingan dari para Pembimbing dari Tim Kemenkomdigi untuk memperkuat aspek fundamental menuju *Smart City* sesuai dengan keunggulan dan potensi serta tantangan Kota Semarang. Bentuk pendampingan yang dilakukan adalah dengan membantu Kota Semarang menyusun perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program *Smart City*.

Dalam evaluasi tahap ini Kota Semarang telah memiliki masterplan yang di dalamnya terdapat *milestone* dan *roadmap Smart City* yang jelas tertuang pada *Masterplan Smart City*, serta telah menetapkan *quick wins*. Berbagai bentuk implementasi inovasi yang diwujudkan dalam Pembangunan jangka pendek menunjukkan komitmen Kota Semarang untuk menjadi *Smart City*. Pada akhir pendampingan, Kota Semarang berhasil menjalani proses dengan baik, dengan hasil yang sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Wali Kota Semarang dan Kementerian Komunikasi Digital (dahulu Kemenkominfo). Kota Semarang mendapatkan apresiasi dari Pemerintah serta mendapat kesempatan untuk dapat berbagi tentang praktik dan implementasi *Smart City* dengan daerah lain.

Sedangkan untuk menjaga komitmen dan pelaksanaan *Masterplan Smart City I*, untuk tahun-tahun berikutnya tetap dilaksanakan mekanisme evaluasi dan konsultasi setelah proses pendampingan berakhir. Dengan demikian, capaian dan kesinambungan program *Smart City* di Kota Semarang yang telah direncanakan dapat terukur dengan baik.

6.2.2 Evaluasi *Smart City* Periode 2021 – 2026 (*Masterplan II*)

Evaluasi periode ini dilakukan sebelum Menyusun *Masterplan Smart City* yang ketiga (2025-2029), yang dilakukan secara mandiri untuk

kepentingan penyusunan *Masterplan Smart City* periode tahun 2025-2029.

Secara umum dari evaluasi *masterplan* II menunjukkan bahwa:

- Telah ada sinkronisasi *Masterplan Smart City* dengan RPJMD. Tindak lanjut penyusunan peraturan daerah tentang *Smart City*;
- Penyusunan dokumentasi *Masterplan Smart City* telah melibatkan pemangku kepentingan Pembangunan daerah dengan konsep 5 P (penduduk, pengusaha, perguruan tinggi, pewarta dan pemerintah daerah);
- Dalam dokumentasi *masterplan* menguraikan tentang perubahan kondisi sebelum dan sesudah implementasi *Smart City*, serta target / sasaran;
- Tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun beserta pagu anggaran indikatifnya untuk program di tahun berjalan;
- Tindak lanjut pelaksanaan *quick wins* telah terealisasi pada tahun berjalan;
- Dalam *masterplan* juga memuat rencana keberlanjutan program *Smart City* di Kota Semarang pada tahap selanjutnya.

Sedangkan secara teknis evaluasi mandiri dari *Masterplan Smart City* Kota Semarang Tahun 2021-2026 mengikuti Buku Pedoman *Smart City* 2018 dari Kemenkomdigi, menunjukkan hasil berikut:

Tabel 5
Hasil Evaluasi Berdasarkan Pedoman Kemenkomdigi

DIMENSI	BASELINE		KETERANGAN
Indikator	1	Ketersediaan <i>Masterplan Smart City</i>	Ada
	2	Keberadaan Dewan <i>Smart City</i>	Ada
	3	Keberadaan Lembaga Pengelola <i>Smart City</i>	Ada
	4	Keberadaan Program <i>Smart City</i>	Ada
	5	Ketersediaan Roadmap <i>Smart City</i>	Ada
	6	Ketersediaan Rencana Aksi <i>Smart City</i>	Ada
DIMENSI	OUTPUT		HASIL
Elemen	Kebijakan <i>Smart City</i>		
Indikator	7	Ketersediaan Peraturan <i>Smart City</i>	Ada

DIMENSI	BASELINE		KETERANGAN
	8	Ketersediaan RPJMD Yang Sinkron Dengan <i>Masterplan Smart City</i>	Ya
Elemen	Kelembagaan <i>Smart City</i>		
Indikator	9	Keberlangsungan Fungsi Dewan <i>Smart City</i>	Aktif
	10	Keberlangsungan Fungsi Pelaksana <i>Smart City</i>	Aktif
	11	Keterlibatan OPD dalam Program <i>Smart City</i>	Aktif
	12	Keberlangsungan Fungsi Forum <i>Smart City</i> Daerah	Aktif
Elemen	Anggaran <i>Smart City</i>		
Indikator	13	Ketersediaan Anggaran dari APBD untuk Program <i>Smart City</i>	Ada
	14	Ketersediaan Anggaran dari Sumber Pembiayaan Alternatif Program <i>Smart City</i>	Ada
DIMENSI	OUTCOME		HASIL
Elemen	Program		
Indikator	15	Program <i>Smart Governance</i> di tahun berjalan	Berjalan
	16	Program <i>Smart Branding</i> di tahun berjalan	Berjalan
	17	Program <i>Smart Economy</i> di tahun berjalan	Berjalan
	18	Program <i>Smart Living</i> di tahun berjalan	Berjalan
	19	Program Smart Society di tahun berjalan	Berjalan
	20	Program <i>Smart Environment</i> di tahun berjalan	Berjalan
Elemen	Roadmap		
Indikator	21	Pelaksanaan Roadmap <i>Smart City</i>	Terlaksana
Elemen	Rencana Aksi		
Indikator	22	Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas SDM	Ada
	23	Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>	Ada
	24	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung <i>Smart City</i>	Ada
	25	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Literasi <i>Smart City</i>	Ada
DIMENSI	IMPACT		HASIL
Elemen	Perbaikan		
Indikator	26	Perubahan sebelum dan sesudah implementasi <i>Smart City</i>	Berdampak
Elemen	Keterlibatan Masyarakat		
Indikator	27	Peran serta masyarakat dlm program <i>Smart City</i>	Terlibat
Elemen	Keberlanjutan		
Indikator	28	Tindak lanjut <i>quick wins</i> tahun sebelumnya	Terealisasi
	29	Pelaksanaan <i>quick wins</i> tahun berjalan	Terealisasi

Dari hasil evaluasi mandiri implementasi *Smart City* Kota Semarang berdasarkan *Masterplan Smart City* Tahun 2021-2026 dan Buku Pedoman *Smart City* 2018 yang mencakup empat dimensi utama: *baseline*, *output*, *outcome*, dan *impact*, telah menggambarkan perkembangan dari tahap

awal hingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Secara umum, dari evaluasi mandiri menunjukkan bahwa *Smart City* Kota Semarang telah memiliki landasan yang kuat, baik dalam aspek perencanaan, kelembagaan, hingga implementasi program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Hasil evaluasi yang positif tersebut disebabkan berbagai potensi dan dukungan pada implementasi *Smart City* di Kota Semarang diantaranya:

1. Pada tahap awal penyusunan *Masterplan Smart City* Tahun 2021-2026, Kota Semarang telah memiliki infrastruktur teknologi yang cukup baik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terus berkembang. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi perlu diselesaikan pada *Masterplan Smart City* berikutnya, diantaranya mencakup:
 - Fragmentasi layanan digital antar perangkat daerah
 - Belum optimalnya integrasi data menyeluruh dalam sistem pemerintahan
 - Kesenjangan digital di beberapa sektor pelayanan publik
 - Keterbatasan anggaran dan regulasi yang mendukung percepatan transformasi digital
 - Penguatan keamanan data dan privasi
2. Capaian Implementasi Program
 - Sejak implementasi *Masterplan Smart City*, Kota Semarang telah mencapai beberapa hasil konkret yang menunjukkan kemajuan signifikan
 - Dimana telah memiliki sistem layanan digital yang terhubung dalam satu platform terpadu
 - Penggunaan *Big Data* dan *AI* pada integrasi data kependudukan dan beberapa layanan publik yang berbasis analitik telah diterapkan, termasuk untuk mendukung pengambilan keputusan

- Mewujudkan transportasi cerdas melalui implementasi *BRT* yang didukung digitalisasi dan sistem informasi lalu lintas melalui *ATCS* telah meningkatkan efisiensi transportasi publik
- Digitalisasi administrasi pemerintahan telah meningkatkan efektivitas layanan publik dengan tingkat kepuasan masyarakat yang terus meningkat
- Penggunaan teknologi untuk monitoring kualitas udara dan pengelolaan sampah berbasis digital atau *AI* telah diterapkan secara bertahap

3. Peningkatan akses pada masyarakat

Dengan adanya berbagai program *Smart City*, dampak yang mulai dirasakan oleh masyarakat dan pemerintahan Kota Semarang meliputi:

- Digitalisasi layanan publik dapat mengurangi birokrasi manual dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan
- Berbagai sistem terintegrasi menjadikan respons menjadi cepat terhadap berbagai keluhan atau permasalahan perkotaan, termasuk manajemen bencana dan layanan darurat
- Adanya aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital mempermudah komunikasi antara warga dan pemerintah dan kepastian respon dan tindak lanjut
- Meningkatnya UMKM berbasis digital menunjukkan adopsi teknologi yang lebih luas di sektor ekonomi lokal

4. Dampak dan Keberlanjutan *Smart City*

Dampak jangka Panjang, implementasi *Smart City* di Kota Semarang diharapkan dapat membawa transformasi kota menuju kota yang inklusif, resilien, efisien, modern dan berkelanjutan, dalam arti capaian dapat konsisten dari baseline hingga impact maka diperlukan:

- Keberlanjutan *Smart City* dalam jangka panjang akan mendukung terciptanya kota yang lebih layak huni
- Keberlanjutan Sistem Digital melalui penguatan regulasi dan kebijakan akan memastikan bahwa transformasi digital dapat terus berjalan seiring perkembangan teknologi yang selalu dinamis
- Penerapan teknologi yang lebih luas dan berkelanjutan, akan meningkatkan daya saing Kota Semarang dan dapat menjadi contoh penerapan *Smart City* yang sukses di Indonesia (*best practice*)
- Komitmen sinergi dan kemitraan pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat, akan mewujudkan pengembangan inovasi teknologi berkelanjutan.
- Keberlanjutan pengambilan keputusan berbasis teknologi, akan terus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan evaluasi terakhir yang dilakukan Kemenkomdigi pada evaluasi *Smart City* 2024 Tahap II bulan November Tahun 2024, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana perkembangan *Smart City* di Kota Semarang dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta efisiensi tata kelola pemerintahan. Hasilnya Kemenkomdigi memberikan masukan mengenai berbagai indikator yang harus dipenuhi agar implementasi lebih optimal, dalam hal infrastruktur, inovasi digital, tata kelola data, serta kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya lebih meningkatkan capaian dan implementasi program *Smart City* di Kota Semarang.

Selain evaluasi mandiri berdasar panduan Kemenkomdigi (2018) dan evaluasi asesor dari Kemenkomdigi, maka Pemerintah Kota Semarang juga melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi *Smart City* di Kota Semarang Tahun 2022-2024 (tahun 2022 *baseline Masterplan Smart City*

Tahun 2022-2026). Berdasar implementasi rencana aksi dua tahun terakhir (2023-2024), hasilnya sebagai berikut.

Tabel 6
Hasil Implementasi Rencana Aksi *Smart City*
Tahun 2023-2024

No	Dimensi	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase
Tahun 2023					
1	<i>Smart Governance</i>	141	84.783.736.073	141	100%
2	<i>Smart Economy</i>	19	13.529.342.620	19	100%
3	<i>Smart Environment</i>	50	505.566.535.935	50	100%
4	<i>Smart Living</i>	127	306.984.960.643	127	100%
5	<i>Smart Branding</i>	16	12.637.833.898	16	100%
6	<i>Smart Society</i>	77	501.864.693.671	77	100%
Jumlah		430	1.425.367.102.840	430	100%
Tahun 2024					
1	<i>Smart Governance</i>	76	42.688.176.054	76	100%
2	<i>Smart Economy</i>	16	3.448.409.745	16	100%
3	<i>Smart Environment</i>	39	253.287.409.450	39	100%
4	<i>Smart Living</i>	88	49.904.702.196	88	100%
5	<i>Smart Branding</i>	13	12.637.884.120	13	100%
6	<i>Smart Society</i>	63	519.273.089.241	63	100%
Jumlah		295	881.239.670.806	295	100%

Dari data hasil pada tabel tersebut dapat disampaikan bahwa:

1. Tingkat Realisasi

Semua kegiatan di tahun 2023 dan 2024 terealisasi 100%, baik dari sisi jumlah kegiatan maupun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa adanya

komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Semarang dalam mengeksekusi program *Smart City* sesuai dengan rencana

2. Kegiatan

Tahun 2023 sebanyak 430 kegiatan dan tahun 2024 sebanyak 295 kegiatan. Penurunan jumlah kegiatan sebesar 31,4% (dari 430 ke 295). bukan karena komitmen yang kurang tetapi fokus kegiatan dipersempit untuk meningkatkan kualitas output dan banyak program yang telah terealisasi sebelumnya (sebagai proses keberlanjutan)

3. Anggaran

Jumlah anggaran tahun 2023 Rp 1.425.367.102.840,00 dan tahun 2024 Rp 881.239.670.806,00. Terjadi penurunan anggaran sekitar 38,2%, namun penghematan anggaran tersebut dengan tetap mempertahankan *output* (100% realisasi). Serta karena sebagian infrastruktur dasar yang anggarannya besar (Data center, command center, berbagai aplikasi, dll) sudah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya sehingga kebutuhan dana di 2024 berkurang, tetapi program-program tersebut tetap berjalan atau tetap berkelanjutan

4. Temuan

Temuan pada 6 Dimensi: *Smart Governance* fokus ke integrasi layanan, *Smart Economy* prioritas pada sektor-sektor tertentu. *Smart Living shifting* dari pembangunan fisik ke layanan, *Smart Environment* masih jadi fokus besar tetapi dengan efisiensi biaya, *Smart Society* anggaran meningkat menandakan prioritas ke penguatan layanan masyarakat dan *Smart Branding* relatif stabil dan *branding* tetap dipertahankan

5. Kesimpulan

- Implementasi *Smart City* Kota Semarang berjalan efektif dengan realisasi penuh

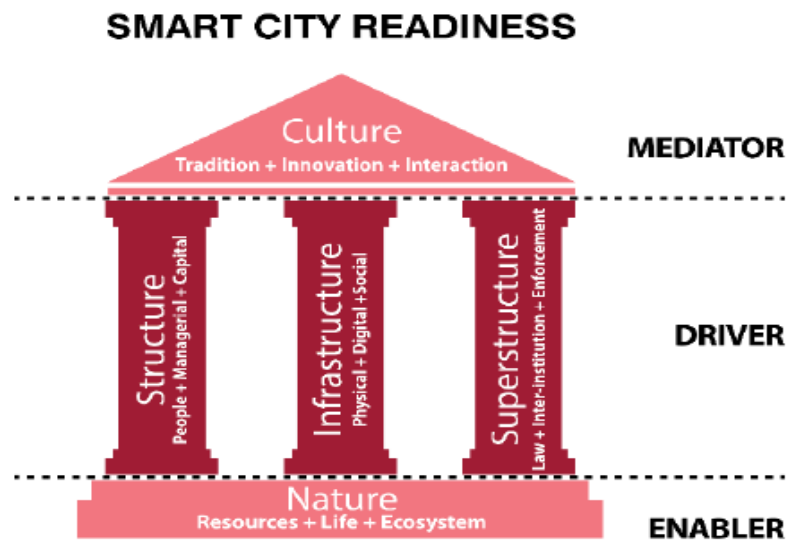
- Ada pergeseran prioritas dari pembangunan infrastruktur (*environment, living*) ke penguatan masyarakat (*society*). *Smart Society* menjadi fokus utama di 2024 (dana terbesar, Rp 519 M)
- Penurunan di dimensi *Smart Governance, Smart Economy*, dan *Smart Living*, karena Pemkot Semarang sudah mulai masuk ke fase pemeliharaan, pengembangan dan optimalisasi
- Meski anggaran berkurang, output tetap terjaga, hal ini mengindikasikan efisiensi meningkat
- Kota Semarang terlihat bertransisi dari pembangunan (walaupun masih ada pembangunan) ke penguatan layanan dan pemberdayaan

6.3 Kesiapan (*Readiness*) Dalam Pengembangan *Smart City*

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam mewujudkan pengembangan *Smart City* yang telah berjalan beberapa tahun guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih baik ke depannya, maka berikut kondisi eksisting untuk kesiapan Kota Semarang dalam implementasi *Smart City* periode Tahun 2025-2029.

6.3.1 Elemen *Smart City*

Dalam *Masterplan Smart City* ini, Kesiapan / *Readiness Smart City* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan *Smart City* dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 8
Elemen *Smart City*

1. Struktur

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksana (people) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata laksana.

2. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau non digital, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum.

3. Suprastruktur

Penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

Berdasarkan tiga elemen *Smart City* tersebut, dilakukan analisa kesenjangan kesiapan *Smart City* Kota Semarang melalui analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) pada masing-masing elemen dan hasilnya, sebagai berikut.

6.3.2 SWOT Analysis dalam Kesiapan (*Readiness*) Pengembangan *Smart City*

6.3.2.1 Analisis SWOT pada Elemen Struktur *Smart City*

Tabel 7
Hasil Analisis SWOT pada Elemen Struktur

Aspek	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Tantangan)
SDM & Kapasitas Aparatur	Tersedianya SDM ASN yang telah melaksanakan dan mendapatkan pelatihan <i>Smart City</i>	Kurangnya tenaga ahli yang memiliki spesialisasi di bidang teknologi digital.	Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan swasta dalam meningkatkan kapasitas SDM.	Adanya resistensi dari sebagian aparatur terhadap perubahan digitalisasi
Literasi Digital Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi <i>Smart City</i> dalam layanan publik.	Masih terdapat kesenjangan digital di beberapa kelompok masyarakat	Program pelatihan dan edukasi digital bagi masyarakat yang didukung oleh pemerintah dan swasta.	Kurangnya aksesibilitas infrastruktur digital bagi kelompok rentan
Kesiapan Anggaran & Pendanaan	Adanya alokasi APBD yang mendukung implementasi <i>Smart City</i>	Ketergantungan terhadap anggaran daerah yang terbatas	Peluang pendanaan dari investor, hibah, atau skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).	Ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran <i>Smart City</i> .
Tata Kelola & Regulasi	Sudah terdapat kebijakan daerah yang mengarah pada pengembangan <i>Smart City</i>	Data dan SOP masih belum sepenuhnya terintegrasi antar OPD	Penyelarasan kebijakan dengan regulasi nasional mengenai <i>Smart City</i> .	Regulasi yang sering berubah dapat menghambat implementasi program

Berdasarkan analisis SWOT terhadap struktur dalam kesiapan pengembangan *Smart City* Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa kesiapan struktural memiliki fondasi yang cukup kuat, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu segera diatasi untuk

memastikan pengembangan implementasi *Smart City*. Dari sisi kekuatan, Kota Semarang telah memiliki tenaga aparatur yang terlatih, tingkat literasi digital masyarakat yang semakin meningkat, serta adanya alokasi anggaran daerah yang mendukung pengembangan *Smart City*. Selain itu, sudah terdapat berbagai kebijakan daerah dan dukungan dari pemerintah kota yang berperan dalam mempercepat implementasi *Smart City*.

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang masih menjadi kendala, seperti kurangnya tenaga ahli aparatur di bidang teknologi digital, masih adanya kesenjangan digital di beberapa kelompok masyarakat, serta ketergantungan pada anggaran daerah yang terbatas. Tata kelola antar OPD masih belum sepenuhnya terintegrasi, yang dapat memperlambat efektivitas kebijakan *Smart City*.

Dari sisi peluang memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi, industri, serta sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas SDM dan inovasi teknologi. Perlu dioptimalkan peluang pendanaan dari investor, hibah, maupun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat implementasi *Smart City*. Penyelarasan kebijakan dengan regulasi nasional untuk semakin memperkuat ekosistem *Smart City* di Kota Semarang.

Sedangkan beberapa tantangan yang harus diantisipasi, seperti resistensi aparatur terhadap perubahan digitalisasi, kurangnya aksesibilitas infrastruktur digital bagi kelompok rentan, serta mitigasi yang dapat mempengaruhi anggaran *Smart City*. Selain itu, perubahan kepemimpinan (OPD) juga dapat mempengaruhi kesinambungan program *Smart City*.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam struktur kesiapan *Smart City* Kota Semarang, berbagai peluang dan kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang fokus pada peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, serta optimalisasi kolaborasi dengan berbagai pihak

agar implementasi *Smart City* dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan hingga tahun 2029.

6.3.2.2 Analisis SWOT pada Elemen Infrastruktur *Smart City*

Tabel 8
Hasil Analisis SWOT pada Infrastruktur

Aspek	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Tantangan)
Infrastruktur Digital & Non Digital	Semarang memiliki jaringan internet yang cukup luas dengan inisiatif <i>Wi-Fi</i> publik.	Kualitas jaringan internet belum merata di seluruh wilayah, terutama di pinggiran kota.	Potensi kerja sama dengan penyedia layanan internet dan pengembangan 5G.	Serangan siber yang meningkat dengan digitalisasi layanan publik.
Sistem Transportasi Cerdas	Sudah mulai diterapkan sistem transportasi berbasis digital seperti <i>e-ticketing</i> dan <i>ATCS</i> .	Belum seluruh sistem transportasi terintegrasi dalam satu platform digital.	Pengembangan <i>smart mobility</i> dengan transportasi berbasis <i>IoT</i> dan AI.	Kemacetan dan ketidakseimbangan infrastruktur transportasi dengan pertumbuhan kendaraan.
Infrastruktur Kota Berbasis <i>IoT</i>	Adanya inisiatif <i>smart lighting</i> dan sensor lingkungan untuk pemantauan kualitas udara dan banjir.	Pemanfaatan <i>IoT</i> masih terbatas dan belum terintegrasi dengan sistem manajemen kota.	Potensi pengembangan lebih lanjut dengan konsep digital twin untuk perencanaan kota.	Ketergantungan terhadap vendor untuk teknologi <i>IoT</i> dan AI serta perangkat lunak tertentu.
Sarana & Prasarana Publik	Sudah tersedia command center sebagai pusat kendali layanan publik berbasis digital.	Beberapa infrastruktur fisik kota masih perlu modernisasi dan adaptasi dengan teknologi baru.	Pengembangan ruang publik berbasis <i>Smart City</i> , seperti <i>smart park</i> dan <i>coworking space</i> .	Cepatnya perubahan infrastruktur untuk mendukung <i>Smart City</i>
Keamanan Infrastruktur Digital	Adanya regulasi perlindungan data dalam pelayanan publik digital.	Kesadaran akan keamanan siber di masyarakat masih kurang.	Peningkatan keamanan data dengan enkripsi dan <i>blockchain</i> , serta lainnya.	Peretasan dan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan digital.

Kesimpulan Analisis SWOT pada infrastruktur dalam kesiapan pengembangan *Smart City* Kota Semarang 2025-2029, bahwa kesiapan infrastruktur digital dan fisik sudah cukup berkembang, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung implementasi *Smart City* secara optimal.

Kota Semarang telah memiliki beberapa kekuatan, seperti jaringan internet yang cukup luas, terutama dengan adanya inisiatif Wi-Fi publik yang mendukung akses digital bagi masyarakat. Sudah menerapkan sistem transportasi berbasis digital, seperti e-ticketing dan *Area Traffic Control System* (ATCS) untuk mengatur lalu lintas kota secara lebih efisien. Tersedia *command center* yang menjadi pusat kendali layanan publik berbasis digital yang mendukung transparansi dan efektivitas pelayanan pengaduan, kegawat daruratan dan layanan monitoring CCTV.

Kelemahan yang masih harus dibenahi adalah kualitas penggunaan internet kuat yang belum merata, terutama di daerah pinggiran kota. Selain itu belum memiliki platform digital untuk sistem transportasi cerdas yang sepenuhnya terintegrasi. Infrastruktur berbasis *IoT* dan *AI* sudah ada, namun masih dalam tahap pengembangan berkelanjutan.

Kota Semarang memiliki peluang potensi besar dalam mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta dan penyedia layanan teknologi untuk mempercepat transformasi digital. Serta dalam penerapan teknologi seperti *5G*, *IoT*, dan *AI* untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan dalam mendukung konsep *smart mobility* serta *smart environment*. Tidak kalah penting yaitu peluang Kota Semarang dapat menggunakan konsep digital twin yang diterapkan untuk perencanaan tata kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Terdapat tantangan dalam pengembangan infrastruktur *Smart City* yang perlu dikendalikan, utamanya ancaman serangan siber yang berdampak pada keamanan data dalam sistem layanan publik digital. Disisi

lain masih terjadi banyak kemacetan pada beberapa ruas jalan pada jam tertentu dan juga perlu antisipasi terhadap ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan bermotor dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan sistem transportasi berbasis digital.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam infrastruktur kesiapan *Smart City* Kota Semarang, berbagai peluang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang memprioritaskan pemerataan infrastruktur digital, peningkatan keamanan data, serta penguatan kerja sama dengan sektor teknologi dan industri agar implementasi *Smart City* dapat berjalan optimal.

6.3.2.3 Analisis SWOT pada Elemen Suprastruktur *Smart City*

Tabel 9
Hasil Analisis SWOT pada Suprastruktur

Aspek	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Tantangan)
Regulasi & Kebijakan	Sudah ada regulasi daerah yang mendukung implementasi <i>Smart City</i> .	Sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan.	Penyelarasan dengan kebijakan nasional mengenai <i>Smart City</i> .	Perubahan regulasi yang cepat dapat menghambat kesinambungan program.
Kelembagaan & Koordinasi	Terdapat tim Pelaksana <i>Smart City</i> di Pemkot Semarang.	Masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar OPD dalam implementasi program.	Penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit khusus <i>Smart City</i> .	Resistensi birokrasi terhadap perubahan sistem digitalisasi layanan publik.
SOP & Tata Kelola Layanan	Beberapa layanan publik telah berbasis digital dengan SOP yang jelas.	Belum semua SOP terintegrasi secara digital, masih ada layanan manual.	Pengembangan SPBE untuk pelayanan yang lebih efektif.	Adopsi teknologi yang cepat memerlukan revisi SOP secara berkala.
Partisipasi & Keterlibatan Stakeholder	Sudah ada kerja sama dengan	Belum semua pemangku kepentingan	Meningkatkan sinergi dengan sektor swasta	Ketidakseimbangan peran antar pemangku

Aspek	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Tantangan)
	akademisi, penyedia jasa & komunitas dalam <i>Smart City</i> .	memiliki peran yang jelas dalam pengelolaan <i>Smart City</i> .	dan komunitas untuk inovasi <i>Smart City</i> .	kepentingan dapat menghambat program.
Monitoring & Evaluasi	Adanya mekanisme evaluasi terhadap capaian <i>Smart City</i> .	Indikator dampak masih perlu diperjelas.	Penggunaan <i>big data</i> dan <i>AI</i> untuk Monnev secara <i>real-time</i> .	Kurangnya transparansi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat

Dari hasil analisis SWOT terhadap suprastruktur dalam kesiapan pengembangan *Smart City* Kota Semarang, diketahui bahwa kesiapan dari sisi regulasi, kelembagaan, serta tata kelola telah memiliki dasar yang cukup kuat. Masih terdapat tantangan yang perlu segera diatasi agar implementasi *Smart City* dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dari sisi kekuatan telah memiliki regulasi daerah yang mendukung implementasi *Smart City*, serta tim pelaksana yang mengkoordinasikan pengembangan teknologi digital dalam layanan publik. Beberapa layanan publik juga sudah memiliki SOP yang jelas dan berbasis digital, sehingga mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Saat ini sudah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, Lembaga non pemerintahan dan swasta dalam rangka memperkuat ekosistem *Smart City*.

Beberapa kelemahan yang masih perlu ditingkatkan adalah belum semua regulasi daerah mendukung kebijakan nasional dan pengembangan *Smart City* global. Selain itu masih terdapat inkonsistensi kewenangan antar perangkat daerah, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program *Smart City*. Kelemahan lainnya yaitu belum semua layanan digital memiliki perencanaan dan mekanisme pengajuan program digital yang jelas, sehingga sulit mengukur keberhasilan program secara konkret.

Sedangkan untuk peluang cukup besar, karena Kota Semarang memiliki kesempatan untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah

pusat, serta mengadopsi kebijakan *best practice* dari kota-kota lain (nasional maupun internasional) yang telah sukses dalam penerapan *Smart City*. Peluang yang sangat berarti bahwa saat ini telah meningkat kesadaran akan digitalisasi, pada manajemen internal maupun dukungan dari masyarakat dan dunia usaha. Penggunaan *big data* dan *AI* yang sudah digunakan dapat untuk evaluasi kebijakan atau pengambilan keputusan berbasis bukti data.

Tantangan yang perlu dihadapi, masih belum semua aparatur maupun masyarakat siap perubahan dan masih resisten terhadap perubahan sistem digitalisasi, yang dapat memperlambat adopsi kebijakan baru. Penguatan transparansi dalam penerapan kebijakan *Smart City* menjadi tantangan yang perlu diantisipasi, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tidak menghambat partisipasi publik dalam pengembangan *Smart City*.

Secara keseluruhan pada suprastruktur walaupun masih terdapat tantangan dalam kesiapan *Smart City* Kota Semarang, dengan melihat berbagai peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan yang muncul. Oleh karenanya diperlukan strategi yang memastikan implementasi *Smart City* dapat berjalan efektif dan optimal.

6.3.3 Hubungan Hasil Analisis SWOT dari Elemen *Smart City* dengan Kemajuan Ekonomi Kota

Dari hasil analisis SWOT ketiga elemen *Smart City* yaitu struktur, infrastruktur dan suprastruktur, tentunya sangat berkaitan dengan kemajuan ekonomi kota. Hal ini disebabkan bahwa ketiganya saling mempengaruhi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif.

➤ Struktur

Kekuatan pada struktur *Smart City* yang efisien dan transparan memberikan pondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi. Struktur yang baik memastikan proses pengambilan keputusan yang cepat, alokasi sumber daya yang tepat, dan pelayanan publik yang lebih responsif. Pada analisis SWOT menunjukkan bahwa struktur yang kuat bisa menjadi kekuatan yang mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta mendukung kebijakan yang pro investasi yang dapat mempercepat kemajuan ekonomi.

➤ Infrastruktur

Infrastruktur *Smart City* yang canggih dan efisien (misalnya pada transportasi, energi, komunikasi dan teknologi informasi), merupakan faktor penting dalam kemajuan ekonomi kota. Keunggulan infrastruktur fisik yang baik memungkinkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta menarik investor yang membutuhkan aksesibilitas. Kekuatan dalam infrastruktur *Smart City* dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi.

➤ Suprastruktur

Suprastruktur *Smart City* mencakup berbagai aspek dapat mendukung terciptanya kota modern. Kekuatan dalam suprastruktur, seperti inovasi, kebijakan yang mendukung pengembangan digitalisasi dan partisipasi aktif masyarakat tentu dapat mempercepat adopsi teknologi dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan Pembangunan kota. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya perlu diantisipasi kelemahan dalam suprastruktur, seperti kurangnya literasi digital, ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar dan masalah sosial kemasyarakatan, agar terwujud masyarakat yang inklusif dan mendukung perekonomian.

Pada dasarnya ketiga elemen *Smart City* tidak bisa berjalan sendiri-sendiri (struktur, infrastruktur dan suprastruktur). Ketiganya harus secara bersama diimplementasikan secara simultan, untuk menciptakan ekosistem *Smart City* yang mendukung kemajuan ekonomi. Melalui penguatan ketiga elemen *Smart City* maka kota dapat lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini dan masa depan, serta dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6.4 Aspek-Aspek Dukungan *Smart City*

6.4.1 Aspek Kebijakan

Kota Semarang telah menunjukkan komitmen kuat menerapkan kebijakan untuk mewujudkan konsep *Smart City* pada periode tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi pijakan keberlanjutan program *Smart City* ke depan. Kebijakan yang sudah berjalan, antara lain:

- Kota Semarang telah mengadopsi konsep *Smart City* sejak 2013, dengan fokus pada enam pilar utama: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*
- Telah memiliki *website* khusus *Smart City* dengan Alamat *smartcity.semarangkota.go.id*. *Website* ini berisi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan program atau kegiatan *Smart City* di Kota Semarang
- Menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan ini untuk mendukung efektifitas dan efisiensi proses bisnis dalam administrasi persuratan
- Menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang No. 49 Tahun 2020 Tentang Roadmap *Big Data Analytics*. Kebijakan *Roadmap Big Data Analytics* bertujuan untuk memberikan arah strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan data di Pemkot Semarang, serta untuk memudahkan interoperabilitas data dalam pembuatan aplikasi layanan publik

- Menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah
- Menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital maupun non digital
- Dalam menjamin keamanan informasi dalam layanan berbasis elektronik, telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Pemerintah Berbasis Elektronik. Kebijakan ini memastikan agar data dan informasi pemerintah terlindungi dengan baik
- Mengeluarkan edaran Nomor B/6941/048/XII/2022 Tentang Pendataan Aplikasi yang ada di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Nomor 050/241 Tahun 2023. Tim ini bertugas mengoordinasikan dan mengimplementasikan berbagai inisiatif terkait pengembangan *Smart City* di Kota Semarang.
- Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Semarang berhasil masuk dalam 10 besar kota dengan Indeks SPBE tertinggi di Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Kota Semarang dalam menerapkan layanan publik berbasis elektronik, manajemen SPBE, dan kebijakan internal terkait tata kelola SPBE.

6.4.2 Aspek Infrastruktur

Sejak pertama *Smart City* diluncurkan di Kota Semarang, menunjukkan perkembangan yang baik dalam pembangunan infrastruktur teknologi untuk mewujudkan konsep *Smart City*. Berikut adalah beberapa pencapaian yang telah dilakukan:

- Pemkot Semarang telah memiliki *Data Center & Cloud Computing*.
- Memiliki jaringan *fiber optic* yang telah terhubung di seluruh OPD maupun unit kerja lingkup Pemkot Semarang, serta tersambung juga ke beberapa area publik
- Beberapa jalan utama kota telah terpasang ducting, yang digunakan untuk pengalihan kabel udara masuk kedalam tanah
- Mempunyai Command Center yang disebut Situation Room, Dimana di dalamnya terdapat ruang pusat kendali (pantauan CCTV: RT, Lalin, Banjir, dan lainnya). Pada Situation Room juga tersedia pusat pengaduan dan panggilan kegawatdaruratan Call Center 112
- Memanfaatkan *IoT* dalam sistem transportasi, *Smart Lighting*, pemantauan lingkungan, pemantauan banjir / sungai, sektor pertanian dan lainnya
- Pada Infrastruktur Transportasi Cerdas (*Smart Mobility*) telah melalui Sistem Transportasi Terintegrasi dan penggunaan CCTV dan ATCS (*Area Traffic Control System*) untuk pemantauan lalu lintas
- Pada infrastruktur Lingkungan telah mewujudkan *Smart Lighting* pada Penerangan Jalan Umum, yaitu Lampu jalan *LED* dengan sensor otomatis (solar sel untuk efisiensi energi)
- Pada pengelolaan sampah berbasis Teknologi melalui *system Smart Waste management* dilakukan pemantauan volume sampah dengan penggunaan AISSA, yang merupakan inovasi Kota Semarang dalam penggunaan AI untuk mendeteksi sampah otomatis melalui CCTV di 23 titik TPS. Sistem ini memantau kontainer, mendeteksi overload, dan

sampah yang berserakan. Notifikasi dikirimkan langsung via WhatsApp ke petugas kebersihan. Dengan Pantausampah, Kota Semarang meningkatkan kebersihan dan mempercepat penanganan sampah secara efisien.

- Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana dengan pemanfaatan sensor cuaca dan banjir untuk mitigasi bencana yang terintegrasi dengan aplikasi peringatan dini kepada Masyarakat
- Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program rehabilitasi rumah warga miskin agar memenuhi standar kelayakan, terutama terhadap risiko iklim
- Program Semarang *Urban Flood Resilience Project* (SUFRP), merupakan bagian dari skema *Develop2Build* (D2B) yang didanai oleh Kerajaan Belanda. Program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem drainase perkotaan dan meningkatkan ketahanan terhadap banjir di Kota Semarang
- Melalui program *Blue Deal*, Pemerintah Kota Semarang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Belanda untuk mempercepat penyelesaian penanganan banjir secara paralel. Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif pengendalian banjir yang terjadi di Kota Semarang
- Dalam mendukung energi berkelanjutan, telah menggunakan Pemanfaatan solar panel pada gedung pemerintahan, serta penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon

6.4.3 Aspek Layanan Publik

Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik dalam berbagai bentuk aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kemudian berkembang dengan dukungan berbagai teknologi modern seperti: teknologi mobile berbasis Android dan *IOS, AI, IoT, Metaverse*,

Augmented Reality, Virtual Reality, 3D, Blockchain, Barcode, Digital Signature dan lainnya.

- Pembangunan Dashboard Eksekutif Manajemen, yang digunakan untuk pimpinan
- BRT Trans Semarang telah menggunakan sistem pembayaran digital, serta menyediakan angkutan *feeder* untuk konektivitas antar moda
- Penggunaan Sistem parkir elektronik dan pembayaran digital di lokasi strategis
- Pengembangan platform digital seperti *Website Smart Tourism* dan aplikasi pemandu wisata Wis Semar. Inisiatif ini memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi destinasi wisata dan layanan terkait
- Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui, antara lain: SIUMI (Sistem Informasi Usaha Mikro) untuk mengembangkan pelaku usaha mikro kecil dengan memberikan kemudahan akses perbankan.
- Meluncurkan program seperti Semarang Digital Kreatif dan Semarang Kreatif Galery untuk fasilitas *co-working space* dan *startup incubator*
- Digitalisasi layanan pendidikan melalui *e-learning*, sistem manajemen sekolah dan Penerimaan Peserta Didik *Online*
- Pada sektor Kesehatan meluncurkan *Universal Health Coverage (UHC)*, *telemedicine*, layanan Ambulance Hebat dan Sistem informasi manajemen stunting. Program ini memastikan akses layanan kesehatan dan fasilitas publik yang lebih baik bagi masyarakat
- Menyediakan saluran komunikasi interaktif seperti pengaduan melalui lapor semar, informasi publik melalui PPID, *call center* 112 dan *chatbot* layanan publik melalui SAVIRA.
- Pembangunan SIM Kemiskinan Ekstrem, untuk pemantauan dan evaluasi kemiskinan ekstrem serta intervensinya

6.4.4 Pengembangan SDM

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) teknologi informasi di pemerintah Kota Semarang memainkan peran penting dalam mendukung implementasi *Smart City*. Secara umum SDM aparatur telah siap mengimplementasikan program *Smart City*, karena program ini telah berjalan sejak lebih dari sepuluh tahun di Kota Semarang. Selain itu dukungan SDM baru yang kompeten di bidang IT lebih banyak serta banyak juga yang memiliki Pendidikan berbasis IT.

- Pemerintah Kota Semarang mengadakan bimbingan teknis untuk staf IT kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola website. Langkah ini bertujuan mempercepat proses digitalisasi informasi di berbagai instansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan
- Pelatihan penggunaan *Big Data*, *IoT*, *AI*, dan *Cloud Computing* untuk pegawai
- Sertifikasi *cyber security*, *data analytics*, dan *digital leadership* bagi pegawai terkait
- Pengiriman pegawai ke luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas IPTEK (Korea Selatan, Beberapa negara Eropa, Kanada, dan lainnya)
- Program edukasi ke internal dan Masyarakat untuk mengurangi penyebaran berita palsu (*hoax*) dan meningkatkan pemahaman digital yang sehat
- Pelatihan dan alih teknologi dari perusahaan IT (PT. Dinustek, PT. Telkom, Inixindo, *Microsoft*, *Google*, dan lainnya)
- Pelatihan *e-commerce* dan pemasaran digital bagi UMKM
- Kolaborasi antara Pemkot Semarang, SMA/SMK, industri, dan akademisi dalam program magang berbasis teknologi
- Sosialisasi pemanfaatan aplikasi layanan publik berbasis digital pada Masyarakat dan pengguna lainnya

- Akses internet gratis di ruang publik untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam digitalisasi.

6.5 Harapan Pengembangan *Smart City* Kota Semarang

Berdasar dokumen yang ada menunjukkan bahwa target indikator tujuan pembangunan daerah, yang merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 telah menetapkan 10 indikator tujuan. Indikator tersebut harus memenuhi prinsip *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi.

Tabel 10
Indikator Tujuan Visi (*Baseline* dan Target)

No	Indikator Tujuan	<i>Baseline</i> 2024	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,62	6,30
2	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	0,51	0,63
3	Indeks Kesehatan	0,90	0,9356
4	Indeks Pendidikan	13,31	13,59
5	Indeks pembumian pancasila dan wawasan kebangsaan	84,34	85,,55
6	Indeks Harmoni Indonesia		
7	Tingkat Kemiskinan	4,,03	2,99
8	Rasio Gini	0,425	0,386
9	Nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota	0,295	0,397
10	Indeks Reformasi Birokrasi	88,32	90,00

Program *Smart City* diharapkan hingga tahun 2029 dapat mencapai kemajuan signifikan dalam mencapai target indikator tujuan yang mendukung terwujudnya RPJMD Kota Semarang. Dengan menerapkan konsep *Smart City* untuk pengelolaan perkotaan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital dan non digital untuk berbagai aspek, mulai dari pemerintahan hingga kehidupan Masyarakat yang manfaatnya adalah :

- Peningkatan efisiensi
Mengurangi biaya dan waktu dalam pengelolaan kota
- Peningkatan kualitas hidup
Meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan publik yang lebih baik
- Peningkatan daya saing
Meningkatkan daya saing kota dalam menarik investasi dan wisatawan
- Peningkatan keberlanjutan
Mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik

Dimensi *Smart City*, harapan dan aspek yang mendukung meliputi:

Tabel 11
Dimensi, Harapan, Aspek dan Tujuan

Dimensi	Harapan	Aspek	Tujuan
<i>Smart Economy</i> Dan <i>Smart Branding</i>	Pemerataan akses ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan dan inklusif.	• Ekonomi Digital Berkembang Pesat • UMKM mudah mengakses pasar dan pembiayaan melalui platform digital • UMKM Terhubung dengan ekosistem e-commerce dan fintech. • Sebagai Pusat Inovasi yang mendorong munculnya startup baru • Mempermudah investasi dengan proses perizinan cepat dan transparan. • Digitalisasi sektor pariwisata dengan aplikasi wisata, VR, dan Augmented Reality (AR). • Platform Pencarian Kerja Digital, untuk mempermudah link and match tenaga kerja dengan industri.	Laju Pertumbuhan Ekonomi
<i>Smart Living</i> Dan <i>Smart branding</i>	Pengembangan Sistem Infrastruktur Strategis berbasis teknologi	• Meningkatkan Konektivitas Digital • Sistem Transportasi Cerdas dan Terintegrasi	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis

Dimensi	Harapan	Aspek	Tujuan
		• Dukungan terhadap kota yang lebih modern, inklusif, dan efisien • Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan • Modernisasi infrastruktur penanganan banjir / rob	
<i>Smart Living</i>	Peningkatan kualitas layanan kesehatan, dengan memperluas aksesibilitas, dan mempercepat respons layanan Kesehatan.	• Akses Layanan Kesehatan yang Merata, termasuk rujukan pasien antar fasilitas kesehatan dengan sistem berbasis data. • Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi, seperti <i>smart healthcare</i> dengan telemedicine • Sistem peringatan dini kesehatan Masyarakat • Integrasi sistem kesehatan antar unit Kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan terhubung dalam satu sistem terintegrasi). • Respons Cepat terhadap Darurat Medis, dengan sistem deteksi otomatis dan respon cepat ambulan. • Pemantauan status gizi masyarakat berbasis data (utamanya <i>Stunting</i>)	Indeks Kesehatan
<i>Smart Society</i>	Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pendidikan dengan memanfaatkan digitalisasi dan inovasi pembelajaran	• Akses pendidikan berbasis teknologi digital (penerimaan siswa baru, pembelajaran, pendataan, dll) • <i>E-Learning</i> dan Kelas <i>Virtual</i>, agar peserta didik tetap bisa belajar kapan saja dan di mana saja. • Kurikulum yang lebih interaktif dengan pemanfaatan <i>Augmented Reality (AR)</i> dan <i>Virtual Reality (VR)</i>. • Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi. • Beasiswa & Subsidi Teknologi / Inklusi Digital bagi peserta didik kurang mampu • Literasi Digital untuk semua, dengan keterampilan digital di era industri 4.0 dan <i>society 5.0</i>.	Indeks Pendidikan

Dimensi	Harapan	Aspek	Tujuan
		• Optimalisasi Sekolah Ramah Disabilitas, dengan teknologi bantu bagi peserta didik berkebutuhan khusus. • Pembelajaran yang berbasis kebutuhan masa depan	
<i>Smart Living Dan Smart Society</i>	Pemahaman & pengamalan Pancasila di semua lapisan Masyarakat, serta Peningkatan rasa nasionalisme & kebangsaan	• <i>E-Learning</i> Pendidikan Pancasila & Kebangsaan, dengan modul yang interaktif. • Memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembelajaran formal dan non-formal. • Platform Diskusi Digital, khusus untuk membahas wawasan kebangsaan secara interaktif. • Penyebaran Berita Positif & Anti-<i>Hoax</i>, menggunakan <i>AI</i> dan <i>Big Data</i> untuk menangkal disinformasi dan radikalisme. • Pelibatan Generasi Muda dalam Program kegiatan kebangsaan dan Aplikasi edukasi berbasis game untuk meningkatkan pemahaman Pancasila.	Indeks pembumian pancasila dan wawasan kebangsaan
<i>Smart Economy, Smart Society Dan Smart Living</i>	Peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin atau yang berada di daerah kurang berkembang.	• Meningkatkan akses layanan pendidikan kesehatan berkualitas dan inklusif • Memperluas peluang kerja dan penciptaan lapangan kerja bagi • Menyediakan infrastruktur yang mendukung kehidupan layak (rumah, lingkungan, sanitasi) • Menyediakan akses transportasi yang terjangkau bagi keluarga miskin • Memperluas intervensi layanan bagi keluarga miskin • Mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin	Tingkat Kemiskinan
<i>Smart Environment Dan Smart Living</i>	Terwujudnya lingkungan kota yang aman, nyaman, toleran, dan berkeadilan.	• Mendeteksi potensi konflik atau intoleransi sejak dini melalui analisis data sosial. • Forum <i>Virtual</i> sebagai fasilitas diskusi <i>online</i> untuk membangun komunikasi lintas kelompok masyarakat.	Indeks Harmoni

Dimensi	Harapan	Aspek	Tujuan
		• Pembentukan forum relawan untuk membantu kelompok rentan. • Aplikasi Pelaporan Masalah Sosial, yang memudahkan masyarakat melaporkan isu sosial dengan cepat agar mendapat respon cepat. • Optimalisasi CCTV pemantau kota, yang memberi notifikasi otomatis untuk mencegah kriminalitas. • Pembangunan ruang publik yang mendukung interaksi lintas komunitas. • Penguatan Keadilan Sosial melalui penyaluran bantuan sosial berbasis data yang lebih akurat dan adil.	
<i>Smart Economy Dan Smart Society</i>	Penurunan ketimpangan sosial dan rasio Gini, untuk mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata.	• Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah • Keluarga berpenghasilan rendah memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan berkualitas. • Pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat memberi manfaat langsung bagi keluarga miskin. • Peningkatan kualitas infrastruktur dasar di Kawasan kumuh • Program jaminan sosial yang inklusif • Pemberdayaan masyarakat lokal dalam bidang ekonomi, seperti akses ke pasar dan modal usaha.	Rasio Gini
<i>Smart Environment</i>	Sistem perlindungan lingkungan perkotaan yang Adaptif	• Pengurangan tingkat polusi udara, air, dan tanah • Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau. • Sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. • Peningkatan penggunaan energi terbarukan.	Nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota

Dimensi	Harapan	Aspek	Tujuan
		• Tata ruang kota yang mendukung keberlanjutan lingkungan. • Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	
<i>Smart Governance</i> Dan <i>Smart Branding</i>	Peningkatan efisiensi dan transparansi layanan pemerintahan	• Layanan pemerintahan yang responsif dan cepat. • Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan • Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan • Peningkatan Partisipasi Publik • Pengembangan kompetensi SDM Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi

6.6 Faktor Yang Berpengaruh Pada *Smart City* Ke Depan

Implementasi *Smart City* di Kota Semarang di masa depan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berpengaruh:

6.6.1 Faktor Internal

1. Kebijakan Pemerintahan

Adanya komitmen kuat dalam mendukung pengembangan *Smart City*, akan dapat memastikan kelancaran implementasi program *Smart City*.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan keterampilan SDM aparatur kompeten di bidang teknologi digital dan non digital, yang akan mempengaruhi keberhasilan *Smart City*.

3. Anggaran

Ketersediaan anggaran yang memadai menjadi faktor kunci untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi serta biaya untuk riset dan inovasi, secara berkelanjutan untuk program *Smart City*.

4. Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan infrastruktur teknologi yang handal dan mengikuti

teknologi masa depan akan mendukung terwujudnya *Smart City*.

5. Kolaborasi Antar Perangkat Daerah dan Dengan Pemangku Lainnya.
Kerja sama antar perangkat daerah dan antara daerah dengan pemerintahan lainnya (pusat, provinsi, kabupaten, kota), sektor swasta, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya ekosistem *Smart City*.
6. Regulasi
Adanya regulasi daerah yang mendukung pengembangan *Smart City*, akan sangat mempengaruhi kelancaran implementasi.
7. Kesiapan Masyarakat
Tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat dan kesediaan mereka untuk beradaptasi dengan sistem baru seperti layanan berbasis digital akan menjadi faktor penting.
8. Keamanan dan Privasi Data
Keamanan data dan perlindungan privasi menjadi perhatian besar dalam pengelolaan sistem *Smart City*. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga data pribadi masyarakat atau pengguna layanan agar tetap aman.

6.6.2 Faktor Eksternal

1. Perkembangan Teknologi Global
Perkembangan pesat dalam teknologi informasi, komunikasi, dan inovasi digital di tingkat global mempengaruhi kebijakan dan implementasi *Smart City*
2. Tantangan Lingkungan dan Perubahan Iklim
Dampak perubahan iklim dan kebutuhan akan pengelolaan lingkungan yang lebih baik akan mempengaruhi perencanaan dan penerapan *Smart City*
3. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat
Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik

dalam hal pendanaan, standar teknologi, maupun kebijakan transformasi digital, akan sangat mempengaruhi implementasi *Smart City* di daerah

4. Tren Ekonomi dan Pasar

Perubahan dalam tren ekonomi nasional dan global, serta permintaan pasar terhadap solusi digital, dapat mempengaruhi daya tarik investasi dan penerapan teknologi di daerah. Ekonomi yang stabil dan berkembang mendukung implementasi *Smart City*

5. Kerja Sama Antar Daerah dan Internasional

Adanya kerja sama antara suatu daerah dengan kota-kota lain baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat memberikan akses pada teknologi dan sumber daya yang lebih baik

6. Perubahan Demografi dan Isu Sosial

Perubahan demografi dan kondisi sosial masyarakat, seperti tingkat urbanisasi, kebutuhan layanan publik yang lebih efisien, dan akses teknologi bagi masyarakat luas, akan mempengaruhi kebutuhan dan penerimaan *Smart City* oleh masyarakat

7. Ancaman Keamanan Siber

Ancaman terhadap keamanan siber (*hacker* atau pelanggaran data), merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dalam implementasi *Smart City*

8. Krisis Global

Peristiwa global atau krisis ekonomi akan berimbas pada kondisi nasional yang dapat mempengaruhi prioritas pembangunan *Smart City*

9. Bencana Alam

Dampak terjadinya bencana alam akan dapat merubah infrastruktur dan kehidupan Masyarakat, sehingga dapat mengganggu implementasi *Smart City* di daerah

10. Partisipasi Masyarakat

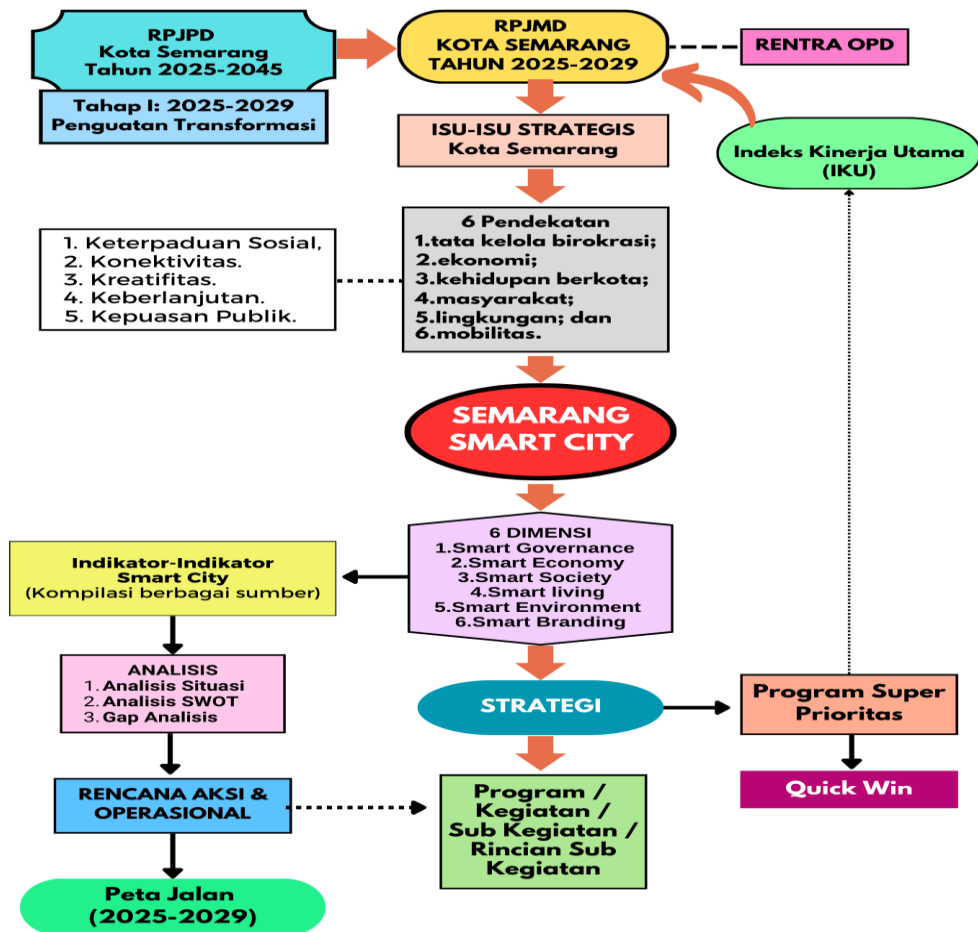
Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program *Smart City* sangat berpengaruh pada keberhasilan program. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam implementasi proyek *Smart City*.

BAB VII

RENCANA STRATEGIS

7.1 Landasan Pemikiran *Masterplan Smart City*

Landasan pemikiran *Masterplan Smart City* merupakan fondasi konseptual dan strategis yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi *Smart City* yang mencerminkan bagaimana isu strategis, perencanaan, kebijakan, pendekatan dan strategi dapat bersinergi untuk menciptakan tata kelola *Smart City* yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Gambar 9
Landasan Pemikiran *Masterplan Smart City*

7.2 Isu Strategis *Smart City* Kota Semarang

Berdasar RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat diidentifikasi isu-isu strategis *Smart City* Kota Semarang berdasarkan enam dimensi *Smart City*. Dalam membangun ekosistem Smart City, infrastruktur digital merupakan fondasi utama yang tidak dapat diabaikan. Tanpa infrastruktur digital yang kuat dan merata seperti jaringan internet, data center, serta sistem komunikasi dan keamanan digital, maka seluruh program dan layanan berbasis teknologi tidak akan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, **penguatan infrastruktur digital menjadi isu strategis lintas dimensi (6 Dimensi) yang mendasari seluruh pilar pembangunan *Smart City* di Kota Semarang**. Berikut isu strategis berbasis digital dan non digital pada masing-masing dimensi, seperti terlihat pada tabel 12.

Tabel 12
Isu Strategis *Smart City*

No	Dimensi	Isu Strategis	
		Berbasis Digital	Berbasis Non-Digital
1	<i>Smart Governance</i>	• Sistem infrastruktur layanan publik digital • Implementasi SPBE secara optimal • Integrasi layanan publik berbasis digital. • Penguatan <i>big data</i> dan <i>AI</i> dalam perumusan kebijakan kota. • Peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. • Optimalisasi <i>Command Center 24/7</i>. • Penggunaan teknologi digital masa kini.	• Reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. • Data center & cloud untuk pengelolaan layanan • Peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam implementasi kebijakan. • optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan • Infrastruktur digital merata di semua wilayah (Jaringan internet). • SDM birokrasi handal teknologi digital

No	Dimensi	Isu Strategis	
		Berbasis Digital	Berbasis Non-Digital
2	Smart Economy	• Penguatan infrastruktur ekosistem ekonomi digital dan <i>e-commerce</i> • Pengembangan <i>startup</i> berbasis teknologi. • Pengembangan platform digital untuk UMKM- • Pemanfaatan teknologi finansial (<i>fintech</i>) dalam pemberdayaan ekonomi • Implementasi sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah.	• Peningkatan daya saing industri kreatif dan pariwisata berbasis ekonomi lokal. • Pengembangan kebijakan insentif bagi pelaku usaha untuk inovasi dan keberlanjutan. • Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan permodalan • Masih rendahnya literasi digital bagi pelaku UMKM.
3	Smart Society	• Penguatan infrastruktur digital untuk aksesibilitas Masyarakat. • Pemanfaatan teknologi dalam layanan pendidikan seperti <i>e-learning</i>, <i>smart school</i>, dan digitalisasi kurikulum. • Penguatan literasi digital dan pelatihan teknologi bagi masyarakat. • Peningkatan akses layanan sosial berbasis aplikasi digital.	• Penguatan peran komunitas dalam pembangunan berbasis budaya dan sosial. • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan pembangunan daerah. • Ketimpangan sarpras antar wilayah. • Penguatan jaringan sosial komunitas • Pelatihan pengembangan SDM di semua wilayah.
4	Smart Living	• Pengembangan sistem infrastruktur transportasi cerdas, berbasis <i>IoT</i>, <i>real-time tracking</i>, dan sistem navigasi. • Digitalisasi layanan kesehatan berbasis digital (<i>telemedicine</i>, rekam medis elektronik). • Implementasi teknologi <i>Smart City</i> untuk respons cepat dalam keadaan darurat.	• Pengembangan infrastruktur transportasi publik mendukung konektivitas wilayah • Peningkatan jalur hijau perkotaan. • Penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat berpenghasilan rendah. • Kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi umum

No	Dimensi	Isu Strategis	
		Berbasis Digital	Berbasis Non-Digital
		• Penanganan kasus <i>Stunting</i> dan kemiskinan ekstrem berbasis digital.	• Penyediaan Jaringan air bersih di perkotaan • Kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat
5	Smart Environment	• Pembangunan infrastruktur digital untuk pemantauan lingkungan dan bencana. • Implementasi <i>smart waste management</i> dengan sensor pemantauan sampah. • Penggunaan teknologi <i>IoT</i> dalam pemantauan kualitas udara dan lingkungan. • Digitalisasi pengelolaan sumber daya energi dan air bersih.	• Penguatan mitigasi bencana • Kesiapsiagaan terhadap perubahan iklim. • Konservasi lingkungan berbasis ekosistem pesisir • Peningkatan penghijauan kota, sesuai jenis tanaman dan estetika kota. • Sistem pengelolaan limbah. • Mempertahankan ruang terbuka hijau
6	Smart Branding	• Penguatan platform Infrastruktur Digital untuk branding. • Pemanfaatan pemasaran digital dalam promosi wisata dan investasi kota. • Optimalisasi platform media sosial dan aplikasi wisata berbasis AI. • Penguatan branding kota melalui teknologi <i>AR/VR</i> dalam promosi budaya dan sejarah. • Penguatan <i>Cyber Marketing</i> produk, jasa dan asset kota.	• Infrastruktur untuk promosi non digital (galeri, pusat informasi wisata, pameran, festival, dll) • Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan sejarah. • Peningkatan daya tarik kawasan <i>heritage</i> dan produk lokal sebagai ikon Kota Semarang. • Kolaborasi branding kota, Bersama berbagai komunitas. • Optimalisasi wisata religi dan desa wisata. • Promosi Bersama dengan daerah wilayah Kedungsapur.

7.3 Perumusan Tujuan Strategis *Smart City*

Tujuan strategis *Smart City* memunculkan pertanyaan, untuk apa *Smart City*?. Secara praktis dapat disampaikan bahwa *Smart City* untuk membuat kehidupan perkotaan lebih layak huni, efisien, inklusif, dan siap menghadapi masa depan. *Smart City* merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis teknologi (digital dan non digital) guna meningkatkan efisiensi tata kelola, daya saing ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat melalui solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai gambaran dapat dilihat pola pemikiran berikut



Gambar 10
Skema Perumusan Program *Smart City*

Dalam merumuskan tujuan strategis Pembangunan *Smart City* Kota Semarang perlu mempertimbangkan beberapa faktor strategis dan tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, agar nantinya dapat mewujudkan rumusan tujuan strategis yang sesuai dengan yang diharapkan lima tahun ke depan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan strategis *Smart City* Kota Semarang sebagai berikut:

- Kondisi eksisting dan tren pembangunan daerah
- *Perkembangan Smart City* dari awal diluncurkan hingga sekarang.
- Pokok visi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah lima tahun ke depan
- Relevan dengan kebutuhan program prioritas yang dapat didukung melalui program *Smart City*
- Optimalisasi potensi yang ada untuk mendukung pengembangan *Smart City*
- Mempedomani program *Smart City* nasional dan melihat referensi program *Smart City* terbaru
- Memperhatikan perkembangan teknologi masa depan dan prediksi *Smart City* ke depan.

Berdasarkan profil Pembangunan daerah dan gambaran umum *Smart City* yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan tujuan strategis *Smart City* Kota Semarang meliputi:



Gambar 11
Rumusan Tujuan Strategis

1. Smart Governance

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, kolaboratif, transparan, dan akuntabel berbasis pemanfaatan infrastruktur digital yang handal.
- Mewujudkan system pemerintahan terintegrasi, dan dapat diakses maksimal seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah
- Semua layanan publik terhubung pada satu platform digital, yang mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan lebih cepat
- Penggunaan *big data* dan *AI* dalam menganalisis kebutuhan, memprediksi permasalahan, dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti
- Menjamin perlindungan data pribadi dan meningkatkan keamanan siber untuk menghindari potensi kebocoran data dan ancaman siber
- Memastikan *command center* beroperasi selama 24 jam / 7 hari, agar pengawasan dan penanganan masalah cepat dan responsif
- Penggunaan teknologi digital terkini seperti *cloud computing*, *IoT*, *blockchain* dan lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memonitor dan melaporkan kinerja pemerintahan daerah
- Memastikan adanya kerjasama yang lebih efektif dan terkoordinasi antar perangkat daerah berbasis digital
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui platform digital (dua arah)
- Menyediakan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh wilayah untuk mendukung SPBE yang berbasis digital dan inklusif.

2. *Smart Economy*

- Mengembangkan penggunaan infrastruktur digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung UMKM, ekonomi kreatif, dan industri lokal.
- Meningkatkan daya saing perekonomian kota melalui pemanfaatan teknologi digital untuk sektor-sektor ekonomi utama (UMKM, industri kreatif, dan sektor perdagangan)
- Mengalihkan kegiatan ekonomi ke dalam sistem digital, termasuk *e-commerce*, transaksi digital, dan layanan berbasis aplikasi
- Memperkuat infrastruktur digital yang dapat diakses oleh pelaku ekonomi di setiap wilayah
- Mendorong pengembangan produk dan layanan yang inovatif, berbasis teknologi, serta mendukung sektor ekonomi kreatif dan *start up* lokal
- Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang ekonomi digital, khususnya dalam analisis data dan manajemen teknologi
- Meningkatkan penggunaan *big data* dan *AI* agar analisis, dan pengambilan keputusan ekonomi dapat menciptakan kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika pasar
- Meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan berbasis digital, seperti *platform crowdfunding* atau *fintech*
- Membentuk ekosistem digital yang mendukung pengembangan ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk pengembangan ekonomi hijau berbasis teknologi
- Menyusun kebijakan ekonomi digital dan inovasi, termasuk insentif untuk investasi di bidang teknologi, *startup*, dan industri kreatif
- Meningkatkan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademik dalam mendukung pengembangan ekonomi digital dan inovasi.

3. *Smart Society*

- Mewujudkan masyarakat yang melek digital, serta memiliki literasi digital yang baik dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai di seluruh wilayah.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi digital, serta memastikan setiap individu dapat terhubung dengan berbagai layanan publik dan peluang ekonomi secara efisien
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi serta teknologi digital untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan pengembangan diri
- Memastikan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik melalui platform digital dan sistem partisipasi berbasis teknologi
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang memberikan akses kepada peluang ekonomi, pekerjaan, dan kewirausahaan berbasis digital
- Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya
- Menjaga keberagaman dan kebudayaan lokal dalam masyarakat digital serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya dalam penggunaan teknologi
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan siber dan perlindungan data pribadi serta memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi digital
- Menyediakan platform digital yang transparan dalam penyelenggaraan program sosial, pelayanan publik, dan distribusi bantuan untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial

- Memastikan akses teknologi dan infrastruktur digital tersedia merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal konektivitas
- Mendorong terciptanya inovasi sosial yang menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan.

4. *Smart Living*

- Meningkatkan fasilitas infrastruktur digital untuk mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi digital.
- Meningkatkan kualitas hidup dengan mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari (perumahan, transportasi, energi, kesehatan dan lainnya)
- Menerapkan solusi teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung kehidupan yang lebih berkelanjutan
- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan, melalui aplikasi kesehatan, *telemedicine*, dan pemantauan kesehatan berbasis teknologi
- Meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan teknologi digital (misalnya: *Smart Healthcare* dan *smart transportation*, dll)
- Memperkuat infrastruktur cerdas yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat
- Meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat beradaptasi dengan berbagai kemajuan teknologi yang terus berkembang
- Penggunaan teknologi yang dapat mengurangi polusi, baik dari sektor industri, transportasi, maupun limbah rumah tangga.

5. *Smart Environment*

- Mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan berbasis teknologi digital untuk mitigasi bencana, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya.
- Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, melalui penerapan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan konservasi
- Mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan polusi air dengan menerapkan teknologi bersih yang mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan manusia
- Meningkatkan pengelolaan sampah melalui program 3R, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah sampah secara berkelanjutan
- Menggunakan teknologi untuk memantau dan meningkatkan kualitas udara dan air, menerapkan solusi berbasis sensor dan data real-time
- Mendorong penggunaan energi terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi dalam sektor rumah tangga dan industri
- Memperkuat ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dengan menggunakan teknologi untuk memprediksi, mengelola, dan mengurangi dampak perubahan iklim
- Kolaborasi antar sektor untuk bersama-sama menciptakan solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan lingkungan
- Menggunakan teknologi untuk merencanakan dan mengelola ruang terbuka hijau, guna menciptakan kota hijau dan ramah lingkungan
- Memperkuat manajemen bencana mencakup berbagai tahapan yang dirancang untuk mengurangi risiko, menangani keadaan darurat, serta memastikan pemulihan dan rehabilitasi setelah bencana terjadi (Pra Bencana, Bencana, dan Pasca Bencana).

6. Smart Branding

- Pengembangan infrastruktur digital untuk mempromosikan potensi lokal secara kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan daya saing dan citra Kota Semarang.
- Promosi kota melalui kampanye branding yang berbasis pada kekuatan teknologi dan perkembangan industri digital
- Menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman konsumen yang lebih personal dan relevan melalui digital marketing, analisis perilaku, dan interaksi berbasis media sosial
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun merek kota melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi cerita, pengalaman, dan ide terkait perkembangan kota
- Mengembangkan kampanye pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan dan investor dengan menonjolkan keunggulan lokal, fasilitas unggulan, serta potensi yang dimiliki kota
- Menggunakan teknologi canggih, seperti *augmented reality (AR)*, *virtual reality (VR)*, dan *storytelling digital*, untuk menciptakan pengalaman yang menarik bagi *audiens* nasional / internasional
- Membangun kemitraan dengan sektor swasta, organisasi nasional, dan komunitas global untuk memperkuat citra kota dan meningkatkan posisi kota
- Penggunaan alat analisis data untuk memantau kinerja promosi secara terus-menerus dan menyesuaikan strategi branding agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan audiens yang berkembang
- Memfasilitasi kampung tematik dan desa wisata dengan infrastruktur digital dan penguatan literasi digital

7.4 Tema Pengembangan *Smart City*

Dalam mewujudkan visi Kota Semarang Tahun 2029, terdapat 7 misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, salah satunya pada Misi 7 adalah:

Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh tersebut bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Hal tersebut bermakna bahwa:

- a. Konsep *Smart City* dalam tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks ini penyelenggaraan layanan publik tersirat pada tujuh misi tersebut, sehingga semua misi diharapkan berbasis kota cerdas.
- b. Kota Semarang sebagai kota cerdas harus menerapkan teknologi digital dan non digital yang berkelanjutan guna memastikan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan melayani kebutuhan warganya secara inklusif. Pada konteks ini semua misi dalam implementasinya akan didukung oleh program yang menerapkan teknologi digital dan non digital. Dalam hal ini digital bisa merupakan *enabler* dari program-program yang ada.

Berdasar uraian di atas diperlukan suatu tema *Smart City* yang dapat mendukung visi dan misi Kota Semarang Tahun 2025-2029. Tema *Smart City* Kota Semarang diperlukan agar implementasi *Smart City* dapat berjalan dengan lebih terarah, efektif, dan signifikan menuju fokus yang sama, serta selaras dengan visi misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-

2029. Oleh karenanya tema *Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

Mewujudkan Kota Semarang Sebagai Kota Cerdas Yang Inovatif, Inklusif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Menuju Pusat Ekonomi Yang Maju.

Untuk mendukung tema tersebut maka dijabarkan dalam sub tema – sub tema pokok, yang nantinya sebagai asupan / acuan dalam menyusun program / kegiatan *Smart City*. 11 Sub tema tersebut sebagai berikut:

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi
- Pengembangan sektor ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi
- Penciptaan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan perkotaan
- Peningkatan SDM secara inklusif bagi semua lapisan masyarakat
- Penerapan praktik berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan kota
- Pengembangan infrastruktur merata di semua wilayah
- Penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan Keputusan, perencanaan dan pembangunan kota
- Pelibatan Pembangunan melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan daerah
- Perwujudan kepuasan Masyarakat dalam layanan publik
- Peningkatan citra kota di Tingkat nasional dan internasional

Tema yang dijabarkan dalam sub tema tersebut mencerminkan komitmen yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam membangun dan mengembangkan program *Smart City* yang mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam pembangunan kota secara komprehensif, pada semua lapisan masyarakat dan semua wilayah perkotaan dengan dukungan inovasi dan keberlanjutan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kepuasan publik dan membangun citra kota.

Tema dan subtema *Smart City* Kota Semarang tersebut, tidak akan dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya infrastruktur digital yang memadai dan handal, baik dari sisi jaringan, perangkat keras, sistem aplikasi, maupun sumber daya manusia pendukung. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital harus menjadi pondasi utama yang terintegrasi dalam isu strategis, perumusan tujuan, kebijakan, tahapan implementasi, dan indikator keberhasilan.

7.5 Potensi Dan Peluang Investasi Sebagai Pusat Ekonomi

Kota yang memiliki pertumbuhan dinamis, infrastruktur yang berkembang pesat, dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro-investasi akan menjadi magnet baru bagi para pelaku usaha dan investor. Sebagai pusat ekonomi yang strategis, kota ini menyimpan potensi luar biasa di berbagai sektor, mulai dari industri kreatif, teknologi, perdagangan, pariwisata, hingga sektor jasa dan logistik.

Letak geografis yang strategis, konektivitas transportasi yang baik, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadikan kota ini sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional. Keunggulan ini diperkuat oleh komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan, insentif investasi, serta pembangunan kawasan ekonomi baru yang terintegrasi dengan kebutuhan industri masa depan. Dengan segala potensinya, peluang investasi di Kota Semarang sangat terbuka lebar, baik bagi investor lokal maupun global. Kolaborasi lintas sektor, kemitraan publik-swasta, dan dukungan masyarakat menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Tema *Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Kota Semarang Sebagai Kota Cerdas Yang Inovatif, Inklusif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Menuju Pusat Ekonomi Yang Maju. Tema tersebut diangkat untuk mendukung visi pembangunan Kota Semarang, yaitu Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif. Salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tujuan investasi dari kepentingan investor berorientasi ekonomis, yaitu kesempatan berusaha untuk memperoleh keuntungan, menanamkan modal dengan harapan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari modal yang ditanamkan. Sedangkan dari kepentingan pemerintah adalah melibatkan kepentingan masyarakat luas, baik individu maupun swasta nasional maupun swasta asing. Fungsi investasi adalah menghasilkan tambahan yang lebih besar secara berganda pada hasil produksi dan pendapatan. Teori pusat pertumbuhan (*The Growth Pole Theory*) dianggap paling sesuai dalam pengembangan investasi di suatu daerah. Suatu daerah sebagai pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat permukiman atau daerah modal, sedangkan wilayah di luarnya dijadikan sebagai wilayah hinterland, daerah pertanian, daerah perdesaan yang umumnya dijadikan sebagai pemasok barang baku, pemasok SDM, dan sebagai penyalur atau penjual hasil produksi.

Pendekatan strategi promosi dilakukan untuk memudahkan calon investor mengidentifikasi dan memilih potensi dan peluang investasi daerah yang sesuai dengan tujuan investor, serta tindakan yang harus dilakukan dari investor yang dipromosikan. Strategi promosi dilakukan dengan cara mengelompokkan potensi investasi daerah ke dalam 3 kelompok, yaitu :

1. *Potensial Investment* (Kelompok Investasi Yang Potensial Untuk Dilakukan)

Kriteria investasi pada kelompok ini adalah :

- Kesesuaian dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Kesesuaian dengan Rencana Strategis (Renstra) sektor-sektor, baik nasional maupun daerah khususnya bidang pangan, energi, dan infrastruktur
- Kesesuaian lokasi investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Keterkaitan antara sektor pangan, energi, infrastruktur dengan wilayah kabupaten/provinsi
- Berpotensi untuk menutup biaya (*Cost Recovery*)

2. *Priority Investment* (Kelompok Investasi Yang Diprioritaskan Untuk Dilakukan)

Kriteria investasi pada kelompok ini adalah :

- Usaha penanaman modal berasal dari Pemerintah Daerah atau investor yang benar-benar serius hendak menanamkan investasi di daerah
- Berdasarkan kajian pra kelayakan (*Pre-Feasibility*) yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, kegiatan penanaman modal dinyatakan layak, baik dari segi hukum, teknis, dan financial
- Resiko dan pengalokasian resiko telah teridentifikasi
- Termasuk dalam usulan prioritas program Kementerian Pemerintah Swasta (KPS) dan bentuk KPS telah teridentifikasi
- Pemerintah membantu pengidentifikasian investasi untuk kegiatan pengentasan kemiskinan

3. *Investment Ready For Offer* (Kelompok Investasi Yang Siap Ditawarkan)

Kriteria investasi pada kelompok ini adalah :

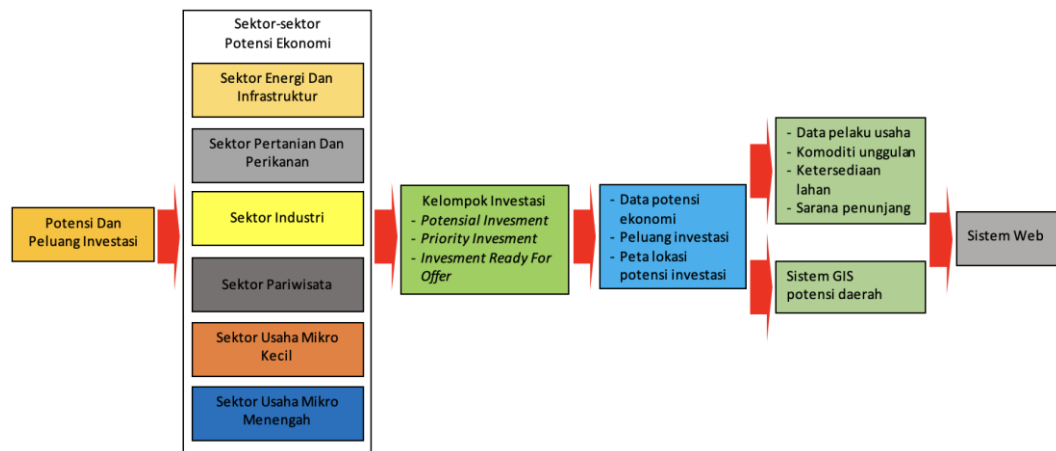
- Dokumen pendukung investasi sudah lengkap
- Dukungan pemerintah telah disetujui (jika diperlukan)

- Apabila termasuk dalam program KPS yang ditawarkan oleh pemerintah, setidaknya tersedia dalam dokumen lelang, tim panitia pengadaan sudah terbentuk dan jadwal pelelangan sudah terdefinisi

Tabel 13
Tujuan Dan Sasaran Potensi Dan Peluang Investasi

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Sasaran Meningkatnya Investasi di Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat	Investasi akan meningkat 15% - 20% dari tahun sebelumnya	Data perijinan dan nilai investasi yang akan ditawarkan	Potensi investasi sudah didukung oleh : - Infrastruktur fisik - Kondisi sosial politik - Institusi dan birokrasi Kota Semarang - Pengaturan dan kebijakan Kota Semarang - Kondisi ekonomi Kota Semarang - Produktivitas tenaga kerja
Tujuan Calon investor mudah mendapatkan data yang akurat dan menentukan pilihan investasi	- Data dan informasi tersedia di OPD terkait - Peluang investasi dikelompokkan berdasarkan kesiapan untuk ditawarkan kepada swasta/publik	Buku profile investasi dan peta potensi daerah	- Pemerintah daerah memberikan akses yang luas terhadap kemungkinan kerjasama - OPD dan Kementrian terkait memberikan kemudahan bagi calon investor untuk mendalami pilihan investasi
Keluaran 1. Tersedianya data dan informasi tentang : - Potensi daerah - Peluang investasi - Peta potensi investasi 2. Kajian tentang ketersediaan lahan, sarana dan prasarana, peluang pasar dan data lainnya	Data terbaru tentang : 1. Potensi daerah 2. Peluang investasi 3. Peta lokasi potensi investasi 4. Kajian awal terkait faktor penentu dan pendukung investasi	5. RPJM Kota Semarang 6. RTRW Kota Semarang 7. Renstra SKPD 8. Peta dasar bakosurtanal 9. Data-data pendukung lainnya (BPS, Litbang, lainnya)	Sumber-sumber data memberikan akses dan kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan

Tujuan dan sasaran penyusunan peta potensi dan peluang investasi di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 12
Kerangka Peta Potensi Dan Peluang Investasi

7.6 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi *Smart City* merupakan pendekatan yang holistik untuk pembangunan perkotaan yang memanfaatkan teknologi digital dan non digital, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi operasional, kepuasan publik dan daya saing ekonomi. Namun strategi dan arah kebijakan dalam pengembangan *Smart City* Kota Semarang dirumuskan dengan mempertimbangkan keterkaitan lintas dimensi dan kebutuhan implementatif di lapangan. Dalam konteks ini, infrastruktur digital memegang peranan kunci sebagai fondasi utama yang memungkinkan integrasi dan operasionalisasi seluruh program berbasis teknologi di semua dimensi. Oleh karena itu, setiap strategi dan kebijakan pada tiap dimensi tetap harus memperhatikan ketersediaan, pemerataan, dan kehandalan infrastruktur digital (jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data terpadu, platform layanan digital, serta sistem keamanan informasi, dll). Sehingga dapat mendukung keberhasilan transformasi menuju kota cerdas yang inovatif, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

1. *Smart Government*

Strategi:

Menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif dengan memanfaatkan teknologi digital.

Arah Kebijakan:

- Mewujudkan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi SPBE secara optimal
- Mendorong kualitas layanan publik melalui integrasi digitalisasi dalam sistem pemerintahan, serta menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel
- Pengembangan platform untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara digital
- Pemanfaatan *big data* dan *AI* untuk mendukung analisis kebijakan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan layanan publik
- Penyusunan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan siber bagi pegawai pemerintah.

2. *Smart Economy*

Strategi:

Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan inovasi, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang inklusif.

Arah Kebijakan:

- Fokus pada transformasi ekonomi berbasis teknologi, inovasi, dan keberlanjutan

- Mendorong transformasi digital di sektor industri, dengan menerapkan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan daya saing
- Memberikan pendampingan dan pelatihan digital untuk para pelaku UMKM agar mereka bisa memanfaatkan teknologi dalam pemasaran, operasional, dan pengelolaan keuangan
- Mewujudkan smart agriculture untuk meningkatkan hasil pertanian yang lebih ramah lingkungan dan efisien
- Memfasilitasi akses layanan perbankan mudah, cepat dan biaya murah, untuk mendukung inklusi keuangan masyarakat kurang mampu dan sektor UMKM
- Memfasilitasi platform wisata pintar, yang mempermudah pengelola wisata maupun wisatawan
- Menyediakan akses ruang inkubasi dan akselerator untuk mendukung pengembangan bisnis

3. *Smart Society*

Strategi:

Menciptakan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai sektor kehidupan sosial.

Arah Kebijakan:

- Penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan akses yang lebih baik terhadap layanan sosial dengan memanfaatkan teknologi
- Menyediakan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan masyarakat, bagi generasi muda, perempuan, lansia, dan masyarakat yang kurang mampu

- Mendorong penguatan platform partisipasi online untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, dan ide masyarakat terkait kebijakan publik
- Mengintegrasikan layanan sosial berbasis digital (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial) agar mudah diakses oleh masyarakat
- Mendorong kolaborasi antar komunitas untuk menciptakan solusi perkotaan dan masalah sosial yang dihadapi Masyarakat.

4. *Smart Living*

Strategi:

Menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dalam aspek kehidupan sehari-hari agar menjadi kota layak huni dan tangguh.

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan melalui penggunaan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan
- Mengembangkan infrastruktur kota cerdas (Smart Street Lighting, sistem pengelolaan sampah pintar dan sistem manajemen lalu lintas) untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kehidupan kota
- Mengembangkan Smart Surveillance yang terintegrasi untuk meningkatkan keamanan kota
- Menyediakan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di berbagai titik strategis
- Membangun Smart Parks yang dilengkapi dengan berbagai inovasi teknologi dan digital terbuka untuk umum.

5. *Smart Environment*

Strategi:

Menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan efisien melalui penerapan teknologi canggih yang membantu pengelolaan sumber daya alam, kualitas udara, pengurangan polusi, dan perlindungan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan:

- Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mempromosikan pembangunan yang ramah lingkungan
- Menerapkan sistem pemantauan kualitas udara pintar yang menggunakan sensor untuk mengukur tingkat polusi udara di berbagai titik kota
- Mengimplementasikan sistem pemantauan iklim dan cuaca berbasis teknologi untuk mengantisipasi perubahan iklim dan bencana alam (banjir dan rob)
- Menerapkan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
- Menerapkan teknologi pemantauan sampah dan smart waste management system berbasis *AI* yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah dan merespons dengan cepat jika ada masalah
- Mengimplementasikan teknologi *Smart Water management* untuk mengoptimalkan penggunaan dan distribusi air bersih perkotaan
- Mitigasi dan kesiapsiagaan mengurangi risiko bencana dan menghadapinya dengan tanggap darurat untuk penyelamatan dan, mengurangi dampak buruk, serta memulihkan dan membangun kembali daerah yang terkena bencana dan lebih tahan terhadap bencana di masa depan.

6. *Smart Branding*

Strategi:

Membangun citra kota sebagai daerah yang modern, inovatif, maju dan inklusif untuk meningkatkan citra positif nasional atau internasional.

Arah Kebijakan:

- Penguatan identitas kota melalui branding yang memanfaatkan teknologi digital, memperkuat daya tarik investasi, serta mempromosikan potensi Kota di tingkat nasional dan internasional
- Membangun platform digital branding yang mengintegrasikan *website*, aplikasi dan media sosial serta media lainnya untuk menyampaikan pesan dan identitas kota secara konsisten
- Promosi wisata kota berbasis teknologi kekinian, seperti virtual tours, *augmented reality* dan *metaverse* untuk pengalaman wisata yang lebih interaktif
- Menggunakan kampanye berbasis influencer digital untuk daya tarik kalangan millennial dan gen Z dengan bekerja sama dengan influencer yang memiliki audiens global
- Mengembangkan sistem analisis data untuk memantau citra kota melalui media sosial, berita dan platform *on line* lainnya guna mengidentifikasi sentimen publik terhadap kebijakan dan program yang diterapkan
- Menyelenggarakan kompetisi kreatif dan inovatif dalam menciptakan konten-konten digital tentang kota.

Setiap strategi dimensi *Smart City* hanya dapat dijalankan secara efektif dan optimal, jika didukung oleh infrastruktur digital yang memadai dan handal, sebagai tulang punggung transformasi layanan publik, ekonomi digital, dan tata kelola kota.

BAB VIII

IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAN OPERASIONAL

8.1 Rencana Aksi dan Rencana Operasional Ke Depan

8.1.1 Rencana Aksi

Dalam implementasinya *Smart City* di Kota Semarang seperti *masterplan* City sebelumnya (pertama tahun 2018-2021 dan kedua tahun 2021-2026), yaitu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan strategis perkotaan yang tertera pada RPJMD. Dimana pada RPJMD dirumuskan melalui Indikator Tujuan Pembangunan. Target-target Indikator untuk 5 tahun ke depan tersebut yang akan didukung penyelesaiannya melalui Program *Smart City*.

Dalam mewujudkan pengembangan *Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 menggunakan skema berikut:

Pada RPJMD, Visi Kota Semarang (V) dijabarkan dalam 7 Misi (M). Untuk mengimplementasikan Misi melalui 5 Konsep (K) dan konsep tersebut menggunakan 6 pendekatan (P) berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan. Selanjutnya tiap pendekatan dikelompokkan dalam 6 Dimensi *Smart City* (D) berdasar pedoman dari Kemkomdigi tentang Dimensi *Smart City* Tahun 2017, Dimensi ini beserta indikator *Smart City*.

Pada tahap berikut setiap dimensi beserta indikatornya digunakan menghubungkan dengan Indikator Tujuan Visi (T) terdiri 10 indikator. Setiap Indikator Tujuan Visi didukung dengan Indikator Sasaran Visi (S) terdiri 29 indikator. Untuk mewujudkan Indikator Sasaran Visi melalui 15 Terobosan Tepat dan Aksi Cepat (TC) dan penanganannya didukung melalui 50 program prioritas.



Gambar 13
Skema Rencana Aksi *Smart City*

Tahap selanjutnya Program Prioritas (PP) adalah merupakan pilihan dari program, kegiatan, sub kegiatan dan rincian kegiatan pada tiap urusan pemerintahan (Kepmendagri No 900.1.15.5-3406/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) yang merupakan program / kegiatan prioritas dari perangkat daerah untuk menyelesaikan isu-isu strategis kota.

Pada tahap akhir seluruh program prioritas terpilih dijadikan Super Prioritas Program (*Game Changers*). Dari Super Program Prioritas dipilih menjadi *Quick Win* (QW) dari masing-masing Dimensi dengan satu program digital dan satu program non digital. Selanjutnya dipilih *Quick Win* yang menjadi fokus utama tanpa memperhatikan bagian dari 6 dimensi *Smart City* yang digunakan.

8.1.2 Rencana Operasional

Rencana operasional adalah program / kegiatan / sub kegiatan / rincian kegiatan yang dapat mendukung pencapaian *Smart City* yang telah ditargetkan. Acuan yang digunakan untuk program / kegiatan / sub kegiatan adalah Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tantangan terbesar dari semua operasionalisasi adanya koordinasi, integrasi, sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

Rencana aksi dan rencana operasional adalah implementasi riil untuk mendukung dua target sasaran:

1. Target pencapaian Sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.
2. Target pencapaian Dimensi *Smart City*, yang diukur berdasar capaian kinerja program / kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan target indikator tujuan visi.

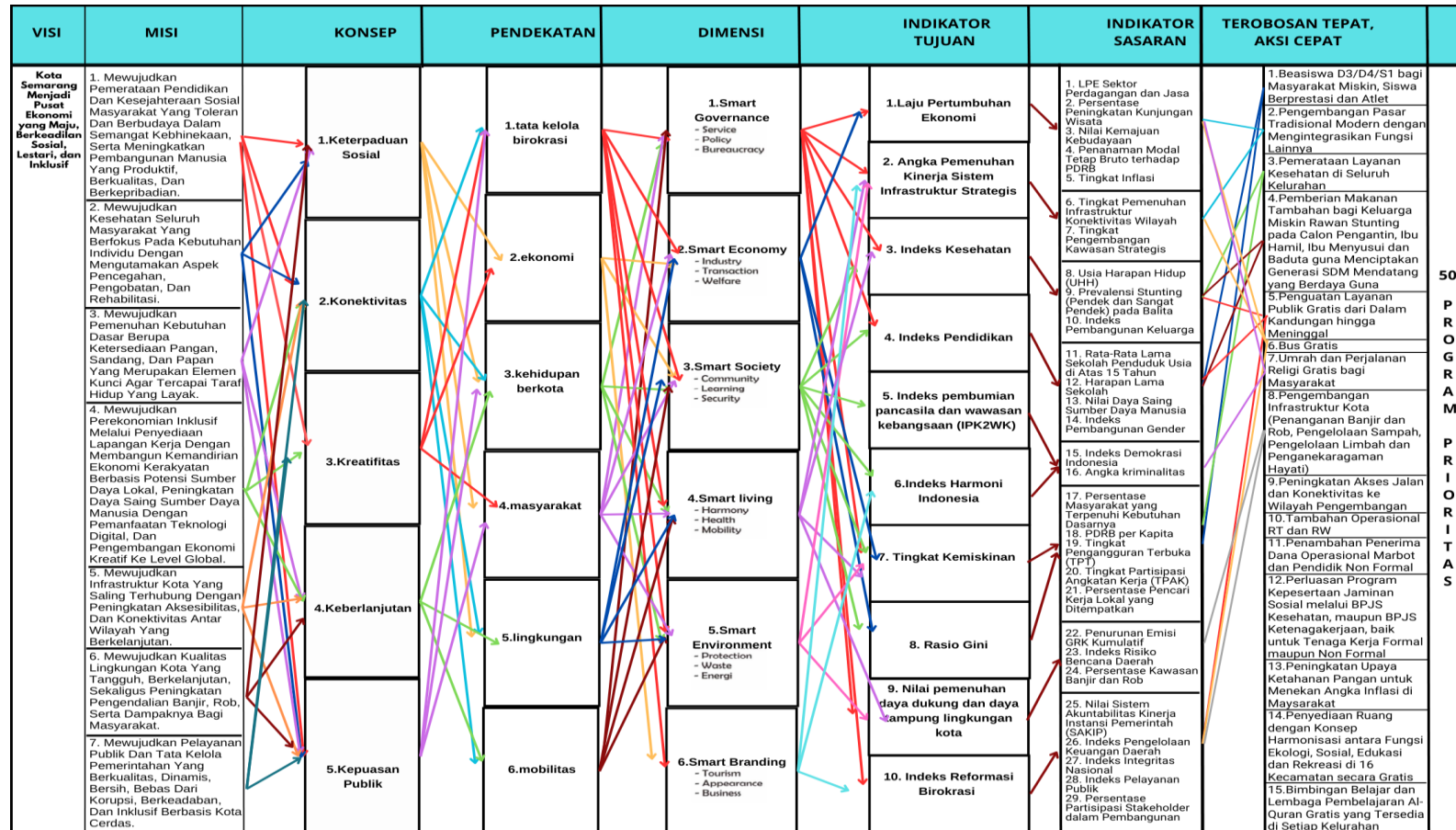
8.2 Kerangka Kerja Rencana Aksi dan Operasional *Smart City*

Kerangka kerja rencana aksi dan operasional *Smart City* Kota Semarang merupakan sebuah rancangan yang berisi langkah-langkah strategis dan operasional yang komprehensif untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai *Smart City* dalam rangka menuntaskan isu strategis perkotaan. Kerangka kerja ini merupakan kumpulan konsep, arsitektur, metoda, untuk merepresentasikan, mengembangkan, mengelola dan mengukur program *Smart City* dengan tujuan untuk memudahkan dalam merealisasikan program serta menyediakan panduan yang terarah.

Kerangka ini dibutuhkan untuk memudahkan cara pandang dan menyamakan interpretasi dalam menyusun *Masterplan Smart City*

mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari visi dan misi, konsep dan pendekatan, dimensi-dimensi *Smart City*, hingga indikator tujuan visi, indikator sasaran visi, dan program-program aksi yang konkret. Karena referensi yang digunakan merupakan kompilasi referensi dari berbagai sumber. Oleh karena itu skema kolaborasi dilakukan untuk mensinergikan berbagai regulasi dan rujukan *Smart City*, dan seluruh inisiatif Pembangunan daerah yang melibatkan banyak elemen dan komponen kota. Melalui skema diagram rencana strategis ini diharapkan program *Smart City* secara terstruktur dan terukur dapat mendukung terwujudnya Pembangunan Kota Semarang lima tahun ke depan.

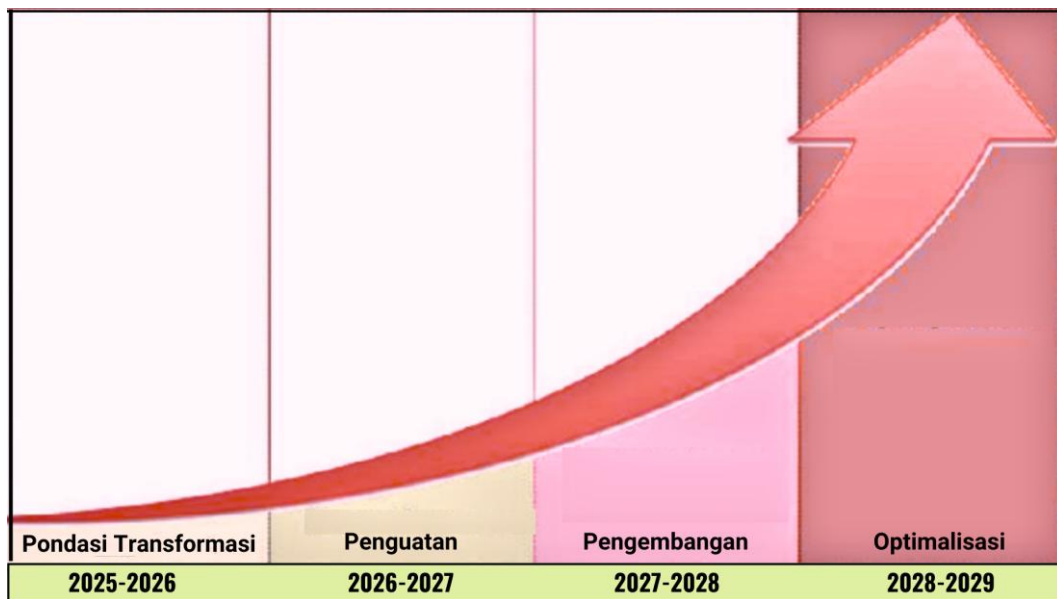
Tabel 14
Alur Kerangka Rencana Aksi *Smart City*



Sumber: Berbagai Referensi yang diolah

8.3 Peta Jalan Implementasi *Smart City*

Pada periode Tahun 2025-2029, Kota Semarang berkomitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *Smart City* sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kota yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing, Menuju Pusat Ekonomi yang Maju. Pengembangan *Smart City* Kota Semarang lima tahun ke depan dalam implementasinya memerlukan peta jalan (roadmap). Program ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun, karena program *Smart City* bersifat dinamis. Namun demikian agar perencanaan dalam *masterplan* ini dapat lebih terarah, maka berikut digambarkan peta jalan dari tahun 2025-2029. Sehingga peta jalan ini melalui program *Smart City* dapat menciptakan ekosistem *Smart City* yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong efisiensi pemerintahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk solusi masalah perkotaan.



Gambar 14
Peta Jalan *Smart City* Kota Semarang
Tahun 2025-2029

Peta jalan implementasi *Smart City* Kota Semarang digambarkan dalam tahapan sistematis, yang terdiri empat tahapan. Peta jalan ini untuk

menunjukkan bahwa untuk mewujudkan *Smart City* Kota Semarang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Setiap fase memiliki fokus yang berbeda dan penetapan strategi secara bertahap dalam membangun *Smart City* lima tahun ke depan (2025-2029). Tahapan peta jalan tersebut diuraikan pada table berikut.

Tabel 15
Tahapan Periode *Smart City* Kota Semarang

No	Tahapan	Periode	Fokus	Prioritas
1	Fase 1: Fondasi Transformasi	2025-2026	Melanjutkan program <i>Smart City</i> terdahulu dan pemenuhan kebutuhan dasar implementasi <i>Smart City</i> serta regulasi pendukung untuk masa depan.	• Pembuatan roadmap dan <i>Masterplan Smart City</i> • Penguatan regulasi dan kebijakan <i>Smart City</i> • Identifikasi inovasi-inovasi baru program <i>Smart City</i> • Pengembangan infrastruktur jaringan internet dan pusat data. • Peningkatan kapasitas SDM pemerintahan, digital dan non digital • Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan <i>Smart City</i>
2	Fase 2: Penguatan	2026-2027	Implementasi awal layanan digital baru di berbagai layanan publik dan pemenuhan standarisasi kota layak huni	• Penguatan infrastruktur digital untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan meningkat • Penguatan sistem cloud lokal dan backup • Digitalisasi layanan publik dan pemerintahan • Penguatan integrasi sistem dan satu data. • Implementasi penggunaan teknologi masa kini (<i>IoT, AI, Metaverse</i>, dll) • Penguatan berbagai sektor ekonomi pada masyarakat dan usaha. • Penguatan kebutuhan layanan dasar • Peningkatan penanganan banjir dan rob serta kemacetan. • Pemberdayaan kompetensi SDM Masyarakat.

No	Tahapan	Periode	Fokus	Prioritas
				• Pengembangan daya dukung lingkungan di semua wilayah • Penguatan literasi kebangsaan dan harmonisasi kehidupan
3	Fase 3: Pengembangan	2027-2028	Perluasan layanan berbasis digital dan layanan kesejahteraan sosial	• Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur digital sesuai eksisting • Pengembangan AI untuk prediksi layanan publik dan mitigasi bencana • Pengembangan sistem keamanan siber kota • Penguatan integrasi platform layanan publik berbasis teknologi masa kini. • Peningkatan kebutuhan layanan dasar. • Memperluas ekosistem <i>Smart City</i> dengan keterlibatan masyarakat dan sektor ekonomi. • Implementasi Smart Economy untuk UMKM dan industri kreatif. • Perluasan penggunaan <i>smart environment</i> dan sistem pemantauan lingkungan. • Peningkatan partisipasi masyarakat melalui <i>Smart Society</i>. • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal. • Pengembangan layanan untuk meningkatkan indikator tujuan dan sasaran visi
4	Fase 4: Optimalisasi	2028-2029	Penyempurnaan sistem dan peningkatan efisiensi <i>Smart City</i>	• Optimalisasi analitik <i>big data</i> untuk kebijakan berbasis data. • Implementasi sistem mitigasi risiko serangan siber dan kebocoran data. • Penerapan konsep Single Digital Identity untuk akses layanan publik. • Eksplorasi penerapan teknologi baru (5G, AI

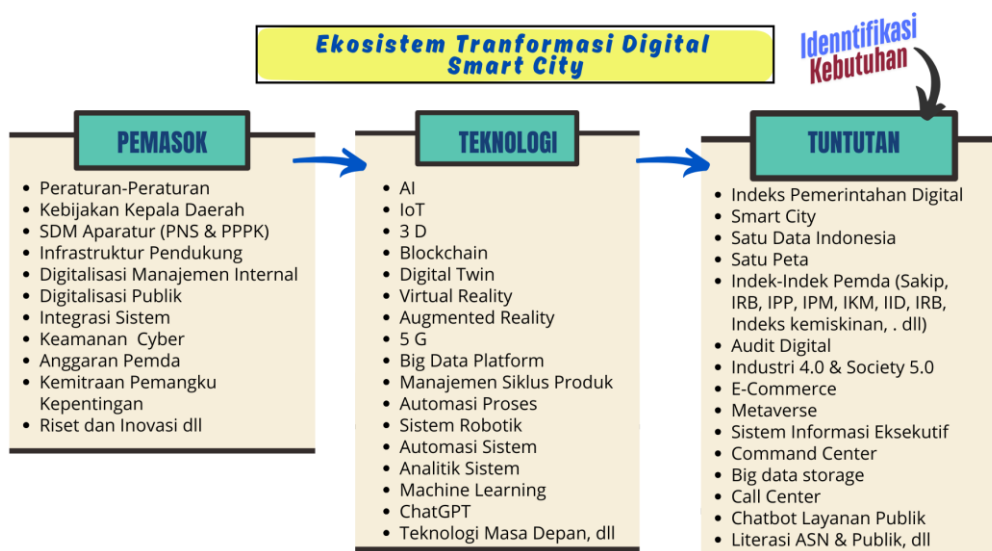
No	Tahapan	Periode	Fokus	Prioritas
				Generatif, <i>digital twin</i> , kuantum, dll). • Penguatan riset dan inovasi teknologi untuk mendukung tata kelola kota yang lebih cerdas. • Operasionalisasi penuh sistem <i>Smart City</i> terpadu • Penyempurnaan model bisnis <i>Smart City</i> untuk keberlanjutan

8.4 Daya dukung Transformasi Digital

Dalam program *Smart City* tidak hanya penggunaan teknologi digital tetapi juga non digital, namun transformasi digital merupakan proses penting dalam membangun *Smart City*. Keberhasilan implementasi *Smart City* sangat bergantung pada seberapa kuat dan siap daya dukung transformasi digital yang dimiliki. Daya dukung ini mencakup berbagai faktor yang saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam mendorong efektivitas, efisiensi, dan inovasi layanan publik berbasis teknologi.

Dalam konteks transformasi digital, Kota Semarang sebagai *Smart City* maka infrastruktur digital berperan sebagai daya dukung utama yang menjadi tulang punggung seluruh proses transformasi. Infrastruktur ini mencakup jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data terpadu, perangkat keras dan lunak pendukung layanan digital, sistem keamanan informasi, serta perangkat sensor dan teknologi berbasis *Internet of Things (IoT)*. Tanpa fondasi infrastruktur digital yang memadai, maka seluruh inisiatif digital baik dalam pemerintahan, layanan publik, sosial, lingkungan maupun pencitraan kota, maka digitalisasi dalam mendukung *Smart City* tidak akan mampu berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital harus menjadi prioritas pada setiap fase pembangunan *Smart City*, mulai dari fondasi transformasi, penguatan, pengembangan, hingga optimalisasi layanan.

Pada program *Smart City*, digital bukan hanya sekadar alat bantu / *tools*, tetapi bertindak sebagai enabler yaitu elemen penggerak utama yang memungkinkan berbagai inovasi, efisiensi, dan transformasi dalam tata kelola kota dan pelayanan masyarakat. Sehingga digital berperan sebagai pendukung yang memungkinkan perubahan struktural pada tata kelola kota, memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka peluang baru untuk inovasi sosial dan ekonomi. Oleh karena infrastruktur digital, literasi digital, dan penguatan ekosistem digital menjadi syarat mutlak dalam membangun kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 15
Ekosistem Transformasi Digital Pada *Smart City*

8.5 Rencana Operasional Kegiatan

Smart City adalah inovasi yang terus berkembang, bukan sekadar implementasi teknologi. Oleh sebab itu sebelum menetapkan program *Smart City*, langkah yang dilalui harus mengetahui dahulu tentang kondisi eksisting sektor atau bidang Pembangunan dan permasalahannya. Sehingga sebuah kota dapat menciptakan terobosan nyata yang

memberikan manfaat bagi warganya, menjadikan kota lebih efisien, inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing.

Langkah-langkah sebelum menetapkan inovasi program *Smart City* tidak sekedar berdasar usulan program, tetapi melalui tahapan berikut:

1. Melihat permasalahan atau apa yang akan dikembangkan dari kondisi nyata di lapangan, dengan memahami fakta atau realitas yang ada
2. Memikirkan solusi pemecahan untuk perbaikan atau pengembangan (berbasis teknologi), bukan sekedar mengikuti tren tetapi harus mampu memecahkan masalah nyata dengan efisien
3. Melakukan analisa berbasis data untuk mendeteksi pola atau intervensi penyelesaiannya (dapat menerapkan *big data analysis*)
4. Mengusulkan intervensi penyelesaian masalah dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (bukan sekedar modernisasi teknologi)
5. Memperhatikan potensi dan peluang, agar dapat berkembang lebih jauh dan berkelanjutan
6. Menetapkan terobosan program *Smart City* yang riil bisa menyelesaikan masalah atau melakukan pengembangan yang sudah ada
7. Memastikan bahwa program *Smart City* tersebut berguna dalam arti konkret dapat diterapkan

Berdasarkan tahapan tersebut di atas berikut Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan *Smart City* berdasar dimensi *Smart City* yang dikeluarkan oleh Kemenkomdigi, yaitu *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Living*, *Smart Environment* Dan *Smart Branding*.

1. Rencana Operasional *Smart Governance* (Layanan, Kebijakan, Birokrasi)

Tabel 16
Rincian Kegiatan *Smart Governance*

NO	Rincian Kegiatan	Indikator Tujuan Visi	Anggaran Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
a	Digital							
1	Pengambilan keputusan berdasarkan <i>big data</i>							
2	Pengembangan Data Center dengan kapasitas besar							
3	Penguatan Command Center							
4	Perluasan 5 G dan FO ke seluruh wilayah							
5	Pembangunan Integrasi Layanan Publik dalam Satu Platform Digital							
6	Pembuatan Sistem login tunggal (<i>Single Sign-On</i>) untuk akses layanan publik							
7	Penguatan <i>cloud computing</i>							
8	Pemanfaatan blockchain dalam administrasi pemerintahan dan publik							
9	Pengembangan Implementasi asisten virtual berbasis <i>AI (chatbot)</i>							
10	Pengembangan <i>dashboard Smart City</i>							
11	Pembangunan <i>Smart Processing Data</i>							
12	Penguatan Keamanan siber							
13	Pengadaan dashboard penduduk kota Semarang yang terhubung ke semua layanan digital pemerintah kota Semarang, sampai tingkat RT							
	gamifikasi aktivitas penduduk kota Semarang di layanan digital pemerintah kota Semarang							
	Dst							
b	Non Digital							
1	Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.							
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.							
3	Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.							

4	Membangun sistem pemerintahan yang fleksibel, gesit, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.							
5	Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah.							
	Dst							

2. Dimensi *Smart Economy* (Industri, Transaksi, Kesejahteraan)

Tabel 17
Rincian Kegiatan *Smart Economy*

NO	Rincian Kegiatan	Indikator Tujuan Visi	Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
a	Digital							
1	Pengembangan Metaverse untuk UMKM / layanan publik lainnya							
2	Platform Siber Marketing Terpadu (transaksi, promosi, dan kolaborasi usaha)							
3	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau <i>start up</i> lokal pembangunan aplikasi dunia usaha							
4	Platform crowdfunding lokal untuk mendukung pendanaan UKM dan IKM							
5	Pembangunan Dashboard Kinerja Ekonomi Kota							
b	Non Digital							
1	Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya							
2	Peningkatan Upaya Ketahanan Pangan untuk Menekan Angka Inflasi di Masyarakat							
3	Memastikan tidak ada tenaga guru honorer yang memperoleh honor di bawah UMK dan memastikan adanya kesejahteraan yang lebih baik.							
4	Peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semarang melalui bantuan ekonomi							
5	Meringankan pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya							
6	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya							
7	Optimalisasi pintu masuk di Kota Semarang sebagai simpul utama yang mendukung perdagangan, jasa dan logistik.							
8	Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.							

9	Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang.							
10	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan							
11	Peningkatan angka investasi di Kota Semarang.							
12	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif							
	Dst							

3. Dimensi *Smart Living* (Harmoni, Kesehatan, Mobilitas)

Tabel 18
Rincian Kegiatan *Smart Living*

NO	Rincian Kegiatan	Indikator Tujuan Visi	Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
a	Digital							
1	<i>Smart Report System</i> dengan Geotaging							
2	Pengembangan <i>ATCS</i> berbasis AI							
3	Perluasan penggunaan <i>E-Parking System</i>							
4	Pengembangan <i>Telemedicine</i>							
5	Pengembangan <i>Call Center</i> Kegawatdaruratan							
6	Perkuasan Akses WiFi gratis di ruang publik							
	Dst							
b	Non Digital							
1	Pemerataan Layanan Kesehatan di Seluruh Kelurahan							
2	Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna							
3	Bus Gratis							
4	Umrah dan Perjalanan Religi Gratis bagi Masyarakat							
5	Peningkatan Akses Jalan dan Konektivitas ke Wilayah Pengembangan							
6	Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Kesehatan, maupun BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk Tenaga Kerja Formal maupun Non Formal							
7	Melindungi dan menjamin semua kelompok agama dan budaya untuk bebas menjalankan ibadah dan praktek budayanya sesuai dengan ideologi Pancasila.							
8	Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak.							
9	Mengintegrasikan literasi kesehatan mental							
10	Pemerataan akses fasilitas kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas dan membantu tenaga medis untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.							
11	Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.							
12	Mendorong implementasi tanaman obat dan produksi tanaman obat yang bekerjasama dengan perusahaan farmasi nasional.							

13	Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.							
14	Peningkatan konektivitas wilayah							
	Dst							

4. Dimensi *Smart Society* (Komunitas, Pembelajaran, Keamanan)

Tabel 19
Rincian Kegiatan *Smart Society*

NO	Rincian Kegiatan	Indikator Tujuan Visi	Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
a	Digital							
1	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.							
2	<i>E-Voting</i> dalam Pemilihan RT/RW							
3	Semarang <i>Digital Academy</i>							
4	Literasi digital dan keamanan data pribadi							
5	Kerja sama dengan perguruan tinggi dan startup lokal peningkatan kapasitas SDM digital							
6	Pengembangan <i>CCTV AI</i> pada <i>CCTV RT</i>							
	Dst							
b	Non Digital							
1	Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin, Siswa Berprestasi dan Atlet							
2	Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal							
3	Tambahan Operasional RT dan RW							
4	Penambahan Penerima Dana Operasional Marbot dan Pendidik Non Formal							
5	Penyediaan Ruang dengan Konsep Harmonisasi antara Fungsi Ekologi, Sosial, Edukasi dan Rekreasi di 16 Kecamatan secara Gratis							
6	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan							
7	Menyediakan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (<i>link and match</i>).							
8	Menambah bantuan peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter.							
9	Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.							
10	Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah.							
11	Penciptaan ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi aktivitas budaya dengan pengelolaan yang berpihak pada seniman.							
12	Pengembangan program pelatihan kerja yang dapat menjangkau masyarakat luas.							
13	Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan dan akuisisi dari pihak lain							
14	Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang							
15	Penguatan riset dan inovasi daerah							

NO	Rincian Kegiatan	Indikator Tujuan Visi	Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
16	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi							
17	Menyediakan pendidikan gratis selama 13 tahun.							
18	Perluasan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin, berprestasi dan atlet.							
19	Pemantauan dan penguatan rantai pasok pertanian untuk pengendalian ketahanan pangan.							
20	Intensifikasi pertanian dan diversifikasi produk pangan berbasis lokal untuk menjaga ketahanan pangan.							
21	Program jaringan pengaman sosial masyarakat Kota Semarang.							
	Dst							

5. Dimensi *Smart Environment* (Perlindungan, Limbah, Energi)

Tabel 20
Rincian Kegiatan *Smart Environment*

NO	Rincian Kegiatan	Indikator Tujuan Visi	Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
A	Digital							
1	Perluasan penggunaan Sistem Peringatan Dini Banjir dan bencana alam							
2	Perluasan penggunaan AI mendeteksi pelanggaran atau masalah lingkungan (parkir, sampah, dll).							
3	Aplikasi Bank Sampah Digital							
4	Penerapan konsep bangunan cerdas							
5	Pemasangan CCTV pendeteksi kinerja pompa banjir							
6	Pemanfaatan drone untuk patroli keamanan daerah rawan kejahatan atau bencana alam.							
	Dst							
b	Non Digital							
1	Pengembangan Infrastruktur Kota (Penanganan Banjir dan Rob, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah dan Penganekaragaman Hayati)							
2	Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik							
3	Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan							
4	Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan							
5	Peningkatan upaya penghijauan wilayah							
6	Pengembangan desa wisata berbasis ekologi seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai.							
7	Pengendalian banjir dan rob							
8	Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah							
9	Meningkatkan persentase jumlah sampah terolah di fasilitas pengolahan							

10	Fasilitas stasiun pengisian daya kendaraan listrik di titik-titik strategis kota.							
	Dst							

6. Dimensi *Smart Branding* (Pariwisata, Penampilan, Bisnis)

Tabel 21
Rincian Kegiatan *Smart Branding*

	Rincian Kegiatan	Indikator Tujuan Visi	Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
A	Digital							
1	Pembangunan Aplikasi Wisata Terpadu							
2	<i>Virtual Reality (VR)</i> dan <i>Augmented Reality (AR)</i> obyek dan desa wisata							
3	Pengembangan Live Streaming dan Virtual Events							
4	Kolaborasi dengan <i>influencer</i> dan <i>travel blogger</i> (promosi kota)							
5	Pemasangan papan informasi digital di titik strategis							
6	Pemmbangunan <i>Smart recommendation</i> berbasis <i>AI</i> menampilkan produk sesuai preferensi pengguna.							
7	Pemanfaatan <i>social listening tools</i> untuk memantau media publik							
8	Fasilitasi <i>co-working space</i> dan ekosistem digital bagi industri kreatif							
9	Pembuatan <i>Chatbot & AI Assistant</i> untuk Informasi Wisata							
10	Portal digital data real-time tentang peluang investasi (berisi: kawasan industri, regulasi investasi, insentif pajak bagi investor, dll).							
B	Non Digital							
1	Menyelenggarakan event nasional dan internasional dengan melibatkan potensi lokal baik sumber daya manusia dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara.							
2	Penciptaan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur olahraga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan nama baik Kota Semarang di kancah Nasional dan Internasional.							
3	Kampanye tentang Made in Semarang							

4	Penggunaan produk lokal melalui kebijakan khusus							
5	Penetapan satu produk unggulan untuk tiap desa wisata							
6	Penyelenggaraan <i>investment forum</i> melalui <i>hybrid (online dan offline)</i>							
7	Pemanfaatan <i>mapping projection</i> di bangunan <i>heritage</i>							
	Dst							

 Terobosan Cepat & Aksi Cepat
  50 Program Prioritas
  Masukan Inisiasi Program *Smart City*

8.6 Dukungan pada Indikator Tujuan Visi

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Visi Pada RPJMD Kota Semarang, pada program *Smart City* diperlukan program strategis yang berorientasi pada hasil dengan indikator target yang jelas dan melihat jumlah dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan rincian kegiatan pada masing-masing dimensi *Smart City*. Sehingga dapat diketahui program masing-masing dimensi yang mendukung untuk pencapaian indikator tujuan visi yang tertera pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Tabel 22
Dukungan *Smart City* pada Tujuan Visi

	Indikator Tujuan Visi	Jumlah				Target						
		Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rincian Kegiatan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi					5,62						6,30
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
2	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis					0,51						0,63
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
3	Indeks Kesehatan					0,90						0,93
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
4	Indeks Pendidikan					13,31						13,59
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
5	Indeks pembedaan pancasila dan wawasan kebangsaan					84,34						85,55
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
6	Indeks Harmoni Indonesia											
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											

	Indikator Tujuan Visi	Jumlah				Target						
		Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rincian Kegiatan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
7	Tingkat Kemiskinan					4,03						2,,99
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
8	Rasio Gini					0,425						0,386
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
9	Nilai Pemenuhan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Kota					0,295						0,397
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											
10	Indeks Reformasi Birokrasi					88,32						90,00
	<i>Smart Governance</i>											
	<i>Smart Economy</i>											
	<i>Smart Living</i>											
	<i>Smart Society</i>											
	<i>Smart Environment</i>											
	<i>Smart Branding</i>											

8.7 Super Prioritas *Smart City* (*Game Changers*)

Dalam *Masterplan Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029, terdapat Super Prioritas *Smart City* (*Game Changers*) yang merupakan inovasi program terobosan strategis sebagai pendorong utama transformasi Kota Semarang menjadi *Smart City* serta mendukung mewujudkan menjadi pusat ekonomi yang lebih maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif.

Tabel 23
Pemilihan Program Super Prioritas

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan	Basis		OPD
			Digital	Non Digital	

8.8 *Quick Win Smart City*

Sebagai bagian dari strategi percepatan implementasi *Smart City* Kota Semarang, maka *Quick Win Smart City* merupakan inisiatif atau program jangka pendek yang dapat direalisasikan serta memberikan dampak positif dan terukur secara cepat pada pengembangan *Smart City* Kota Semarang. Program *Quick Win* dapat diimplementasikan karena tersedianya sumber daya yang dan tidak memerlukan perubahan yang berarti, serta memberi

manfaat nyata kepada masyarakat dalam waktu singkat. *Quick win* bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program *Smart City* dapat memberikan hasil cepat dan dapat dilakukan keberlanjutan.

Terdapat tiga tahapan dalam penerapan *Quick Win*, yaitu:

1. Menetapkan *Quick Win* pada tiap tahun (2025-2029) pada masing-masing dimensi *Smart City*.
2. Memilih *Quick Win* pada masing-masing dimensi *Smart City* (tanpa periode waktu).
3. Memilih *Quick Win* Utama dengan mengabaikan dimensi pada program yang berbasis digital maupun non digital.

8.8.1 Rekapitulasi Pilihan *Quick Win*

Rekapitulasi pilihan *Quick Win* yaitu melakukan pemilihan melalui Penetapan *Quick Win* Tahunan (2025–2029). Pada tahap ini, masing-masing dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment* menetapkan program *Quick Win* yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan, sekaligus memastikan setiap tahun terdapat program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tabel 24
Pemilihan *Quick Win*

No	Dimensi	Digital	Non digital
Tahun 2025			
1	<i>Smart Governance</i>		
2	<i>Smart Economy</i>		
3	<i>Smart Living</i>		
4	<i>Smart Society</i>		
5	<i>Smart Environment</i>		
6	<i>Smart Branding</i>		
Pilihan Tim SC			
Tahun 2026			
1	<i>Smart Governance</i>		
2	<i>Smart Economy</i>		

No	Dimensi	Digital	Non digital
3	<i>Smart Living</i>		
4	<i>Smart Society</i>		
5	<i>Smart Environment</i>		
6	<i>Smart Branding</i>		
Pilihan Tim SC			
Tahun 2027			
1	<i>Smart Governance</i>		
2	<i>Smart Economy</i>		
3	<i>Smart Living</i>		
4	<i>Smart Society</i>		
5	<i>Smart Environment</i>		
6	<i>Smart Branding</i>		
Pilihan Tim SC			
Tahun 2028			
1	<i>Smart Governance</i>		
2	<i>Smart Economy</i>		
3	<i>Smart Living</i>		
4	<i>Smart Society</i>		
5	<i>Smart Environment</i>		
6	<i>Smart Branding</i>		
Pilihan Tim SC			
Tahun 2029			
1	<i>Smart Governance</i>		
2	<i>Smart Economy</i>		
3	<i>Smart Living</i>		
4	<i>Smart Society</i>		
5	<i>Smart Environment</i>		
6	<i>Smart Branding</i>		
Pilihan Tim SC			

8.8.2 Quick Win Tiap Dimensi

Selain penetapan tahunan tabel sebelumnya, selanjutnya pada tahap kedua pemilihan *Quick Win*, dengan memilih *Quick Win* prioritas pada masing-masing dimensi *Smart City* (tanpa periode waktu) dan memilih dua (digital dan non digital). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam memilih inisiatif yang paling relevan dan siap dijalankan kapan pun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan.

Tabel 25
Quick Win per Dimensi

No	Dimensi	Basis	Uraian
1	<i>Smart Governance</i>	Digital	
		Non Digital	
2	<i>Smart Economy</i>	Digital	
		Non Digital	
3	<i>Smart Living</i>	Digital	
		Non Digital	
4	<i>Smart Society</i>	Digital	
		Non Digital	
5	<i>Smart Environment</i>	Digital	
		Non Digital	
6	<i>Smart Branding</i>	Digital	
		Non Digital	

8.8.3 Quick Win Utama

Dari seluruh program yang teridentifikasi pada tahap dua, dipilih beberapa *Quick Win* Utama yang bersifat prioritas tinggi, baik berbasis digital maupun non-digital, tanpa memperhitungkan dimensi spesifiknya. Pemilihan ini bertujuan untuk menciptakan dampak luas dan cepat terhadap tata kelola kota serta pelayanan publik secara umum.

Tabel 26
Quick Win Smart City Kota Semarang 2025-2029

No	Basis		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan
1	Digital	a	
		b	
		c	
2	Non Digital	a	
		b	
		c	

BAB IX

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN *SMART CITY*

9.1 Tata Kelola

9.1.1 Manajemen

Smart City adalah konsep kota cerdas yang memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing ekonomi. Tata kelola manajemen *Smart City* mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi untuk menciptakan kota yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan. Dasar tata Kelola *Smart City* terdiri dari enam pilar utama, yaitu:

- ***Smart Governance***

Pilar *Smart City* yang berfokus pada transformasi sistem pemerintahan agar lebih transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi.

- ***Smart Economy***

Fokus pada pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- ***Smart Society***

Menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui literasi digital, pendidikan, kesehatan, dan inklusivitas sosial.

- ***Smart Living***

Bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemanfaatan teknologi dalam aspek lingkungan, transportasi, dan infrastruktur perkotaan.

- ***Smart Environment***

Konsep keberlanjutan lingkungan melalui teknologi hijau dan efisiensi energi.

- ***Smart Branding***

Pola strategi membangun identitas kota agar lebih dikenal secara global melalui inovasi dan daya tarik unik.

Dalam rangka mewujudkan *Smart City* yang efektif, diperlukan tata kelola Manajemen *Smart City* yang baik dengan unsur-unsur berikut:

a. Kebijakan dan Regulasi

- Menerbitkan kebijakan *Smart City* untuk dapat tersinkronisasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
- Menyesuaikan peraturan yang ada dengan perkembangan teknologi dan payung peraturan di atasnya.
- Memperkuat perlindungan data dan privasi pengguna.
- Menggunakan teknologi digital terkini (sensor, *IoT*, *AI*, dll) untuk mendukung layanan publik.
- Memiliki SOP yang berkaitan dengan penggunaan digitalisasi pemerintahan.

b. Infrastruktur Digital

- Mengembangkan jaringan internet yang merata di semua wilayah dengan kondisi kuat / cepat dan stabil (5G dan fiber optik).
- Menggunakan *sistem cloud computing* yang aman untuk penyimpanan data.
- Memiliki *backup data center* dan kapasitas yang sesuai kebutuhan.

c. Manajemen Data dan Interoperabilitas

- Membangun integrasi data antar perangkat daerah (entitas) dengan platform yang terpusat.
- Menggunakan *big data analytics* untuk pengambilan Keputusan.
- Memperkuat sistem keamanan siber untuk mencegah serangan digital.
- Menggunakan teknologi terkini untuk implementasi manajemen layanan publik.

d. Manajemen Resiko

Manajemen Risiko adalah salah satu bagian yang wajib tertangani dalam program digitalisasi di daerah, yang merupakan suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko yang timbul akibat bencana, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Data center merupakan fasilitas yang sangat penting dalam mendukung operasional *Smart City* dan menjalankan berbagai system serta layanan kritis bagi Pemerintah Kota Semarang. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi oleh data center harus dikelola dengan sangat hati-hati agar operasional tetap aman, stabil, dan terjaga.

Tahapan Manajemen Risiko *Data Center*, terdiri dari:

➤ Identifikasi Risiko

Tahap identifikasi terhadap potensi risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasional data center.

- Risiko Fisik
(kebakaran, banjir, kelistrikan, atau kerusakan perangkat keras)
- Risiko Teknologi
(perangkat lunak / keras: mengalami kegagalan, serangan siber, *malware*, dll).
- Risiko Keamanan
(pelanggaran keamanan fisik maupun *cyber*: akses ilegal ke *data center*, pencurian data, serangan *cyber*. Dll).
- Risiko Operasional
(Gangguan / kesalahan manusia, tidak mengikuti standar / prosedural, kurangnya kemampuan / kompetensi SDM, dll)

➤ Penilaian Risiko

- Probabilitas Kejadian

(Seberapa besar kemungkinan risiko terjadi).

- Dampak
(Seberapa besar kerusakan / gangguan yang ditimbulkan)
- Prioritas risiko
(Penentuan yang harus dikelola terlebih dahulu)
- Tingkat kesiapsiagaan
(apa yang diperlukan dan disiapkan).

➤ **Mitigasi Risiko**

- Redundansi Infrastruktur
(Memastikan ada cadangan untuk setiap komponen kritis di data center, seperti: kelistrikan, *server*, sistem pendingin, dan konektivitas jaringan).
- Pengelolaan Keamanan Gedung
(Pemasangan *CCTV*, akses pintu terbatas, *alarm system*, dll)
- Keamanan Jaringan
(Pemasangan *firewall*, sistem deteksi, enkripsi data, dll)
- Protokol Keamanan dan Standarisasi
(*ISO 27001* untuk keamanan informasi, serta standar lain yang relevan).
- Penyimpanan Data dan Backup
(*backup data* teratur, penyimpanan lokasi terpisah bisa *data center* lain atau *cloud*).

➤ **Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat**

- *Disaster Recovery*
(Pengujian rencana pemulihan, serta memastikan Waktu *Recovery* dan Poin *Recovery* tercapai).
- Simulasi dan Latihan
(latihan pemulihan bencana berkala: pemulihan sistem IT maupun evakuasi staf dalam menghadapi situasi kritis).

➤ **Pemulihan dan Evaluasi**

- Pemulihan Operasional
(Pengembalian layanan dan operasional *data center*, prioritas layanan paling penting).
- Evaluasi Insiden
(melakukan evaluasi insiden untuk mengetahui penyebab terjadinya gangguan dan memperbaiki prosedur yang ada).

e. Partisipasi Publik dan Kerjasama

- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi *Smart City*.
- Menjalin Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan komunitas serta lainnya untuk mendukung *Smart City*.
- Pengembangan aplikasi partisipatif untuk aduan atau saran warga serta panggilan kegawatdaruratan.

f. Model Pembiayaan *Smart City*

- Pendanaan dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan swasta / perusahaan.
- Kerjasama dengan pihak eksternal, bisa melalui perjanjian Kerjasama, KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), PPP (*Publik Private Partnership*), atau bentuk lain.

Pembagian Urusan dan Bidang pada Dimensi *Smart City*

Tabel 27
Pembagian Urusan dan Bidang

<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>	<i>Smart Branding</i>
• Layanan • Kebijakan • Birokrasi	• Industri • Transaksi, • Kesejahteraan	• Harmoni • Kesehatan • Mobilitas	• Komunitas • Pembelajaran • Keamanan	• Perlindungan • Limbah • Energi	• Pariwisata • Penampilan • Bisnis
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
• Unsur Sekretariat Daerah • Unsur Sekretariat DPRD					• Unsur Sekretariat Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
• Unsur Perencanaan • Unsur Keuangan • Unsur Kepegawaian • Unsur Pendidikan Dan Pelatihan • Unsur Penelitian Dan Pengembangan	• Unsur Perencanaan • Unsur Keuangan • Unsur Penelitian Dan Pengembangan	• Unsur Perencanaan • Unsur Penelitian Dan Pengembangan	• Unsur Perencanaan • Unsur Pendidikan Dan Pelatihan • Unsur Penelitian Dan Pengembangan	• Unsur Perencanaan • Unsur Penelitian Dan Pengembangan	• Unsur Perencanaan • Unsur Penelitian Dan Pengembangan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
• Inspektorat Daerah					
Unsur Kewilayahan					
• Kecamatan	• Kecamatan	• Kecamatan	• Kecamatan	• Kecamatan	• Kecamatan

<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>	<i>Smart Branding</i>
Urusan Pemerintahan Umum					
• Kesatuan Bangsa Dan Politik		• Kesatuan Bangsa Dan Politik	• Kesatuan Bangsa Dan Politik		
Urusan Pemerintahan Konkuren, Bidang Urusan					
• Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil • Bidang Komunikasi Dan Informatika • Bidang Statistik • Bidang Persandian • Bidang Kearsipan	• Bidang Sosial • Bidang Tenaga Kerja • Bidang Pangan • Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah • Bidang Penanaman Modal • Bidang Kelautan Dan Perikanan • Bidang Pertanian • Bidang Perdagangan • Bidang Perindustrian • Bidang Pariwisata	• Bidang Kesehatan • Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang • Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman • Bidang Pertanahan • Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana • Bidang Perhubungan • Bidang Transmigrasi • Bidang Sosial	• Bidang Pendidikan • Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat • Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak • Bidang Pemberdayaan Masyarakat • Bidang Perpustakaan • Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil • Bidang Sosial • Bidang Pangan • Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	• Bidang Lingkungan Hidup • Bidang Kehutanan • Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral • Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang • Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	• Bidang Kepemudaan Dan Olahraga • Bidang Kebudayaan • Bidang Pariwisata • Bidang Komunikasi Dan Informatika

9.1.2 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang. Pembiayaan *Smart City* mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem teknologi, serta peningkatan layanan publik berbasis digital dan non digital. Rencana pembiayaan *Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28
Pembiayaan *Smart City* Kota Semarang 2025-2029

No	Dimensi	Tahun					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	<i>Smart Governance</i>						
2	<i>Smart Economy</i>						
3	<i>Smart Living</i>						
4	<i>Smart Society</i>						
5	<i>Smart Environment</i>						
6	<i>Smart Branding</i>						
Rencana Anggaran 5 Tahun (2025-2029)							

9.1.3 Penguatan Literasi *Smart City*

Penguatan literasi *Smart City* merupakan langkah penting dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan dari implementasi *Smart City* di Kota Semarang, dalam mendukung visi Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari Dan Inklusif. Literasi *Smart City* tidak hanya mengacu pada kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi canggih, tetapi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana *Smart City* dapat meningkatkan kualitas hidup, efisiensi layanan publik, dan keberlanjutan kota.

Penguatan literasi akan menciptakan ekosistem *Smart City* di Kota Semarang. Dengan literasi yang baik dan konsisten, serta sinergis dengan program-program lain yang dapat dikolaborasikan, akan menggugah

masyarakat untuk siap mengimplementasikan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh *Smart City*. Harapannya literasi *Smart City* akan mewujudkan masyarakat cerdas yang merupakan konsep yang menekankan peran manusia sebagai unsur utama sebuah kota dalam pembangunan. Hal ini melibatkan interaksi yang kuat dan tanpa batas antar warga, didukung oleh kemajuan teknologi, untuk menciptakan ekosistem sosio-teknis yang humanis, produktif dan dinamis. Literasi *Smart City* adalah program untuk mewujudkan *Smart Society* dan *Smart Living* akan berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan teknologi, dengan manusia sebagai pusatnya. Ini berarti menciptakan lingkungan yang cerdas, aman dan nyaman bagi semua warga, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan disabilitas.

Konsep *Smart Society* dan *Smart Living* diukur dalam 3 unsur, yaitu ekosistem belajar (*Learning*), interaksi masyarakat (*Community*) dan keamanan masyarakat (*Security*).

1. Ekosistem belajar (*Learning*)

Tujuannya untuk mengedukasi anak, menumbuhkan kreativitas anak terkait karir, minat baca, dan pengembangan potensi baik itu potensi sumberdaya manusia maupun potensi wilayah melalui promosi, publikasi dan komunikasi

2. Interaksi masyarakat (*Community*)

Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat, berupa kegiatan penggalangan dana, bakti sosial, pertolongan cepat korban kecelakaan (informasi cepat)

3. Keamanan masyarakat (*Security*)

Unsur keamanan dalam *Smart Society* adalah suatu konsep yang komprehensif yang melibatkan teknologi, kebijakan dan kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat untuk menciptakan

lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kejahatan, meningkatkan respon terhadap bencana dan menyediakan layanan keamanan lebih efisien

Untuk mewujudkan keberhasilan Iliterasi *Smart City* , dibutuhkan kerjasama yang solid dengan berbagai unsur, baik pihak pemerintah, swasta, kalangan akademis maupun komunitas di masyarakat. *Bottom up planning*, merupakan salah satu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk menggali potensinya sendiri, kemudian melakukan perencanaan, perencanaan yang dibuat berdasarkan pada kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang akan dihadapi, dan kemudian melakukan implementasi nyata di kehidupan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penguatan literasi *Smart City* sebagai berikut:

1. Pelibatkan berbagai kelompok Masyarakat (komunitas, profesional, akademisi dan lainnya) dalam pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan *Smart City*.
2. Penyelenggaraan pusat literasi *Smart City* (misal di pusat kota, daerah wilayah pinggiran kota, atau beberapa kecamatan) dengan komunitas hingga Tingkat kelurahan untuk mengedukasi masyarakat tentang *Smart City*.
3. Meningkatkan akses teknologi melalui penambahan *hotspot Wi-Fi* gratis di ruang publik dan pusat komunitas, untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan digital.
4. Pengembangan platform berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi pada layanan publik Kota Semarang, hal ini bagian penting dari penguatan literasi.
5. Membuka saluran online bagi masyarakat (bukan pengaduan atau laporan lainnya) untuk menyampaikan aspirasi dan ide tentang inovasi kota atau saluran forum tatap muka di kecamatan.

6. Lebih intensif melakukan sosialisasi tentang kebijakan data privasi untuk melindungi data pribadi warga atau untuk mencegah hoax.
7. Melakukan evaluasi secara berkala mengukur dampak program *Smart City* bagi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan *Smart City*. Melalui evaluasi dapat dijadikan tindak lanjut literasi yang akan dilakukan.

9.1.4 Pemantauan dan Evaluasi Program *Smart City*

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program *Smart City* Kota Semarang merupakan dua hal yang berbeda namun merupakan sebuah proses yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa implementasi *Smart City* Kota Semarang berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan, efektif dan efisien implementasinya, serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Kota Semarang.

Berkaitan dengan program *Smart City* yang terus berkembang, maka penting melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memantau kemajuan program tersebut, mengidentifikasi tantangan yang ditemukan dan pada akhirnya dapat menghasilkan solusi perbaikan di masa mendatang. Pemantauan dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memastikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergi proses implementasi perencanaan dan pengembangan *Smart City* sesuai arahan dari pemerintah pusat.

Pada intinya tujuan pemantauan dan evaluasi berbeda dan mempunyai tujuan sendiri-sendiri. pemantauan bertujuan untuk melihat perkembangan *Smart City* dan mendeteksi masalah lebih awal sedangkan evaluasi bertujuan membantu menilai efektivitas program dan memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan *Smart City*.

9.1.4.1 Pemantauan

Pemantauan adalah proses berkelanjutan untuk mengawasi perkembangan pelaksanaan program *Smart City* berdasarkan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Pemantauan bertujuan untuk mendeteksi masalah lebih awal dan memastikan operasional *Smart City* berjalan baik. Pemantauan program *Smart City* harus dilakukan secara berkelanjutan secara berkala dan berbasis data agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Metode pemantauan program *Smart City* melalui:

- Pemantauan berbasis data digital
- Pemantauan kinerja layanan publik berbasis *Smart City*
- Survei untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan *Smart City*
- Umpan balik masyarakat untuk menerima keluhan dan masukan masyarakat secara langsung.
- *Benchmarking* dan Studi Banding, untuk membandingkan kinerja *Smart City* dengan daerah lain.

Tahapan pemantauan program *Smart City* sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pemantauan *Smart City*
2. Persiapan dan perencanaan pemantauan
3. Perumusan strategi dan metode pemantauan
4. Pengumpulan data implementasi *Smart City*
5. Pengecekan langsung / ke lapangan
6. Forum Diskusi (pemangku kepentingan terpilih)
7. Analisis dan Evaluasi Data
8. Penyusunan laporan dan rekomendasi pemantauan.

9.1.4.2 Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian sistematis terhadap keberhasilan atau kegagalan program *Smart City* berdasarkan data yang dikumpulkan selama pemantauan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dimensi atau elemen *Smart City* yang perlu diperbaiki.

Metode evaluasi program *Smart City* :

Dilakukan melalui berbagai pendekatan untuk memastikan program berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan.

- Metode Kuantitatif

Metode ini menggunakan data numerik dan statistik untuk mengukur pencapaian program *Smart City* .

- Metode Kualitatif

Metode ini lebih berfokus pada analisis mendalam melalui wawancara, diskusi, dan kajian terhadap efektivitas program.

- Metode Evaluasi Partisipatif

Metode ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengevaluasi program *Smart City* .

Evaluasi *Smart City* harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan partisipatif. Kombinasi metode ini memungkinkan Pemerintah Kota Semarang untuk mengidentifikasi tantangan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan inovasi *Smart City* pada waktu setelahnya / ke depan.

Tahapan Evaluasi *Smart City*

Evaluasi *Smart City* bertujuan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan perbaikan yang diperlukan. Berikut adalah tahapan evaluasi *Smart City* :

1. Pembentukan tim evaluasi *Smart City*
2. Persiapan dan perencanaan evaluasi
3. Penetapan strategi evaluasi
4. Penentuan tujuan dan indikator evaluasi
5. Penetapan pendekatan evaluasi (sesuai kebutuhan)
6. Pengumpulan data dari berbagai sumber
7. Audit dan inspeksi lapangan

8. Analisis dan interpretasi data (perbandingan dengan target, identifikasi tantangan & hambatan, analisis dampak)
9. Penyusunan laporan evaluasi & rekomendasi

9.2 Kelembagaan Program *Smart City*

9.2.1 Tim Pelaksana *Smart City*

Dalam rangka memperkuat implementasi program *Smart City*, maka pada internal Pemerintah Kota Semarang perlu membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang yang di dalamnya hanya personal yang berasal dari internal Pemerintah Kota Semarang. Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang, yang memiliki tugas utama untuk menyusun *Masterplan Smart City*, merumuskan dasar hukum implementasi, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, memberikan persetujuan atas program terkait *Smart City*, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program *Smart City* yang diampu oleh perangkat daerah dan BUMD pada Pemerintah Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Semarang dan melaporkan hasil kerjanya secara berkala. Dalam operasionalnya tim memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan tugas fungsi yang terdefinisi. Tim pelaksana *Smart City* Kota Semarang harus dapat mendorong inovasi perangkat daerah, mengakselerasi transformasi digital, mewujudkan kualitas layanan publik, dan mengoptimalkan program-program *Smart City* yang dapat mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Semarang.

Susunan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang sebagai berikut:

Pembina

- Wali Kota Semarang
- Wakil Wali Kota Semarang
- Ketua DPRD Kota Semarang

Pengarah

- Sekretariat Daerah

Ketua

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Wakil Ketua

- Wakil Ketua 1 (*Smart City* OPD)
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua 2 (*Smart City* BUMD)
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
- Wakil Ketua 3 (*Smart City* Sekretariat Daerah)
Asisten Umum

Sekretaris

- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang

Koordinator

- Koordinator 1 (Bidang Kebijakan dan Regulasi)
Staf Ahli Wali Kota Semarang Bidang Pemerintahan
- Koordinator 2 (Bidang Digital)
Staf Ahli Wali Kota Semarang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan)
- Koordinator 3 (Bidang Non digital)
Staf Ahli Wali Kota Semarang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Anggota:

- Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (sesuai tugasnya)
- Seluruh Pimpinan BUMD (sesuai tugasnya)

9.2.2 Dewan *Smart City*

Dewan *Smart City* Daerah diawali dari terbitnya Surat Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo nomor 41/PK.KDH/A/2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Tindak lanjut dari surat tersebut berbagai daerah (Kabupaten/Kota) membentuk Dewan *Smart City* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan *Smart City*. Dewan *Smart City* Kota Semarang adalah sebagai lembaga koordinasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inisiatif *Smart City* di daerah. Dewan ini bertugas untuk merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta berfungsi sebagai pengarah dan pengawal untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan *Smart City* yang berkelanjutan di daerah.

Pembentukan Dewan *Smart City* Kota Semarang diterbitkan melalui Keputusan Walikota Semarang, yang mengatur struktur, tugas, dan kewenangan Dewan *Smart City* Kota Semarang dalam mendukung implementasi dan pengembangan *Smart City* Kota Semarang. Dewan tersebut terdiri dari berbagai pihak yang memiliki pemahaman dan keahlian dalam bidang teknologi informasi, perencanaan kota, serta kebijakan publik, dan menjadi penghubung antara pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan *Smart City* yang lebih baik.

Pembentukan Dewan *Smart City* Kota Semarang bertujuan untuk:

1. Memberikan masukan dan saran dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan terkait implementasi dan pengembangan *Smart City* Kota Semarang
2. Mendorong dan membantu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan pembangunan *Smart City* Kota Semarang, dalam rangka mewujudkan *Smart City* yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan

3. Melakukan monitoring dan mengevaluasi progres implementasi *Smart City*, serta memberikan rekomendasi kebijakan atau perbaikan yang diperlukan
4. Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Semarang dengan pemangku kepentingan Pembangunan *Smart City* untuk menciptakan ekosistem *Smart City* yang dapat mendorong inovasi di segala bidang Pembangunan daerah
5. Memberikan arahan agar konsep *Smart City* yang diterapkan dapat berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Masyarakat dan Kota Semarang.

Susunan Dewan *Smart City* Kota Semarang sebagai berikut:

Pembina

- Forkopimda Kota Semarang

Pengarah

- Wakil Walikota Semarang
- Sekretariat Daerah

Ketua

Unsur Akademisi atau Pakar Pembangunan Daerah

Wakil Ketua

- Wakil Ketua 1 Bidang Teknologi
Unsur Asosiasi / Pakar IT
- Wakil Ketua 2 Bidang Non Teknologi
Unsur Profesi / Pakar Perencanaan Pembangunan
- Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama
Unsur Asosiasi / Organisasi Pengusaha
- Wakil Ketua 4 Bidang Publikasi
Unsur Media / Komunitas / Humas

Sekretaris

- Sekretaris 1
Kepala Bappeda Kota Semarang
- Sekretaris 2
Kepala Diskominfo Kota Semarang

Anggota

Pemangku Kepentingan Pembangunan *Smart City*:

- Asisten Sekda yang membidangi
- Akademisi
- Pakar Teknologi Informasi
- Pakar Perencanaan Wilayah
- Pakar Ekonomi Kota
- Pakar Sosial Budaya
- Organisasi Masyarakat
- Organisasi Pemuda
- Organisasi Kehumasan
- Kadin
- APJJI
- Tokoh Masyarakat

Dapat ditambah unsur lainnya.

BAB X

PENUTUP

Penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kota yang berbasis teknologi, inovatif, inklusi dan berkelanjutan. Dengan melalui pendekatan yang komprehensif, sinergis dan kolaboratif dengan berbagai aspek Pembangunan daerah, maka *Masterplan Smart City* diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengembangkan berbagai dimensi dari *Smart City*, pada tiap dimensi: *smart governance*, *smart economy*, *smart society*, *smart living*, *smart environment* dan *smart branding*.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kota Semarang adalah memastikan bahwa pembangunan *Smart City* dapat dilakukan secara inklusif, dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, dalam *masterplan* lebih berorientasi pada penguatan program pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat. Melalui masterplan ini, menyajikan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk menjadikan Kota Semarang sebagai kota cerdas yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Dalam merancang *masterplan* ini, kami mempertimbangkan tiga elemen utama yang mendukung transformasi Kota Semarang menjadi *Smart City*, yaitu struktur pemerintahan, infrastruktur teknologi, dan suprastruktur sosial serta budaya. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan ekosistem *Smart City* yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan kota.

Melalui pendekatan berbasis data dan dukungan partisipasi pemangku kepentingan Pembangunan daerah, serta pemanfaatan berbagai dokumen, maka *masterplan* ini dapat menjawab tantangan perkotaan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang. Hal ini bertujuan agar Kota Semarang tidak hanya berkembang dalam hal teknologi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kami berharap masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan Pembangunan daerah, guna memastikan *masterplan* ini sudah sesuai dengan kebutuhan Kota Semarang. Pada akhirnya, *Masterplan Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan yang konkret dan aplikatif dalam membangun Semarang sebagai kota yang lebih cerdas, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung visi rencana Pembangunan jangka menengah Kota Semarang sebagai pondasi Kota Semarang mendukung Indonesia Emas 2045.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA INDUK KOTA CERDAS
(SMART CITY) TAHUN 2025-2029

ROAD MAP IMPLEMENTASI SMART CITY SEMARANG Tahun 2025 S/d 2029							
NO	DIMENSI SMART CITY	JUMLAH	RENCANA KEGIATAN DI TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	3	4	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
1	SMART GOVERNANCE	321	Rp335.910.406.685,20	Rp542.354.085.391,95	Rp629.378.156.274,99	Rp641.798.868.907,26	Rp639.678.866.114,27
2	SMART ECONOMY	133	Rp42.039.146.221,45	Rp23.641.665.218,00	Rp26.194.320.028,00	Rp28.482.618.464,00	Rp30.939.816.574,00
3	SMART ENVIRONMENT	129	Rp262.992.517.548,00	Rp74.676.043.530,65	Rp72.782.548.825,83	Rp73.149.866.396,47	Rp89.715.187.176,81
4	SMART LIVING	215	Rp716.998.940.129,25	Rp581.837.146.457,31	Rp616.754.998.549,90	Rp642.597.333.005,79	Rp669.842.261.421,32
5	SMART BRANDING	18	Rp12.606.504.176,00	Rp8.735.466.947,80	Rp9.306.626.230,78	Rp9.945.901.441,46	Rp10.663.704.172,70
6	SMART SOCIETY	198	Rp513.955.524.816,91	Rp530.801.905.498,07	Rp455.719.140.476,92	Rp458.869.338.259,62	Rp461.765.285.649,23
	Jumlah	1014	Rp1.884.503.039.576,81	Rp1.762.046.313.043,78	Rp1.810.135.790.386,42	Rp1.854.843.926.474,59	Rp1.902.605.121.108,32

ROAD MAP IMPLEMENTASI SMART CITY SEMARANG Tahun 2025 S/d 2029

SMART GOVERNANCE

NO	RENCANA KEGIATAN DI TAHUN										OPD
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output/ Manfaat	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Klinik Konsultasi <i>Good & Clean Government</i> (Belanja makanan dan minuman jamuan tamu)	Inovasi "Klinik Konsultasi <i>Good & Clean Government</i> " memberikan manfaat yang signifikan bagi OPD untuk mendapatkan solusi dari sisi pengawasan ketika menghadapi permasalahan dalam tugas dan fungsinya tanpa harus menunggu jadwal kegiatan audit. OPD yang semula menjadi obyek audit berganti sebagai subyek yang diharapkan aktif memanfaatkan layanan ketika menghadapi permasalahan yang perlu dikonsultasikan kepada Inspektorat selaku APIP. Dari sisi APIP inovasi ini akan meningkatkan kapabilitas yang berguna dalam pemerinkatan (leveling) APIP. Sehingga melalui inovasi Klinik Konsultasi " <i>Good & Clean Government</i> " dapat diperoleh keuntungan dari kedua belah pihak baik pemberi layanan, dalam hal ini Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun penerima layanan dalam hal ini yang utama adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun pihak-pihak lain seperti APIP lainnya, masyarakat dan lain sebagainya.	Rp42.500.000,00	Rp45.000.000,00	Rp47.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp55.000.000,00	Inspektorat
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Inovasi Layanan Surat Tugas Terintegrasi "LUGAS" (Evaluasi dan Pengembangan Sistem : Honor Narasumber, Makanan dan Minuman Rapat)	Inovasi Layanan Surat Tugas Terintegrasi "LUGAS" memberikan dampak yang signifikan yaitu: 1. Menghapus tata kerja manual yang berdampak inefisiensi dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara. 2. Meningkatkan keamanan dan ketepatan data yang dihasilkan 3. Meningkatkan jaminan pengelolaan data surat tugas berjangka panjang (bisa menyimpan data sampai dengan 10 tahun). 4. Menurunkan jumlah sampah kertas yang dihasilkan dari proses pembuatan surat tugas (dari 40 lembar perbulan menjadi 10 lembar perbulan). 5. Meningkatkan ketepatan pembuatan konsep surat, dari penulisan kelengkapan data pegawai mulai nama, nip dan sebagainya. 6. Meningkatkan kepatuhan pegawai atas kelengkapan pertanggungjawaban dokumen kelengkapan surat tugas seperti sertifikat, dan lainnya. 7. Meningkatkan indeks kepuasan pengguna pengelolaan surat tugas. Kelebihan inovasi ini adalah mampu membangun konsep satu data yang terintegrasi dan ramah lingkungan.		Rp28.500.000,00	Rp29.000.000,00	Rp29.500.000,00	Rp30.000.000,00	Inspektorat
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan "SIMWAS" (Evaluasi dan Pengembangan Sistem : Honor Narasumber, Makanan dan Minuman Rapat)	Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan "SIMWAS" berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan baik pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya pada Inspektorat, baik dari proses perencanaan (pembuatan surat tugas), pelaksanaan pengawasan (pembuatan program kerja, kertas kerja, dan laporan hasil pengawasan), hingga monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Sehingga tersedia database pengawasan yang memudahkan pelacakan dan rekapitulasi data.		Rp28.500.000,00	Rp29.000.000,00	Rp29.500.000,00	Rp30.000.000,00	Inspektorat
4	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Sistem Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis Teknologi Informasi (EVASAKTI) Fotokopi jilid materi, makan minum, honor narasumber, moderator, kepanitiaan	Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja, Inspektorat Kota Semarang mengembangkan sistem Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis Teknologi Informasi (EVASAKTI), sebuah platform digital yang digunakan oleh Inspektorat Kota Semarang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah.	Rp578.360.400,00	Rp579.000.000,00	Rp579.250.000,00	Rp579.500.000,00	Rp579.750.000,00	Inspektorat

5	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Konsultasi dan Asistensi ke OPD (Fotokopi jilid materi, makan minum, honor narasumber, moderator, kepanitiaan honor tenaga ahli, honor tim)	Kegiatan Konsultasi dan Asistensi ke OPD. Kegiatan ini dilakukan dengan Inspektorat datang ke OPD untuk memberikan pendampingan dan asistensi. Dengan kegiatan ini Inspektorat akan lebih mudah mengetahui seperti apa kondisi di lapangan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam penyelenggaraan pelayanan. juga menjadi <i>early warning sistem</i> bagi pelaksanaan APBD. Juga bekerja sama dengan APH untuk pelaksanaan pendampingan proyek strategis	Rp868.369.200,00	Rp870.000.000,00	Rp875.000.000,00	Rp875.500.000,00	Rp876.000.000,00	Inspektorat
6	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Inspektorat (Belanja makan minum dan uang transport)	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat baik dari Lapor Semar, SP4N Lapor, Surat Aduan. Pengaduan yang masuk ke Inspektorat dapat segera ditindaklanjuti sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Semarang.	Rp183.500.000,00	Rp184.000.000,00	Rp184.500.000,00	Rp185.000.000,00	Rp185.500.000,00	Inspektorat
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertetu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<i>Probit Audit</i> (Belanja makan minum dan uang transport)	Terlaksananya probity audit yang dilanjutkan dengan monitoring program yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur Kota Semarang untuk memantau dan mendorong agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik.	Rp91.250.000,00	Rp91.250.000,00	Rp91.250.000,00	Rp91.250.000,00	Rp91.250.000,00	Inspektorat
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja (Belanja makan minum dan uang transport)	Terlaksananya Audit Kinerja yang dilanjutkan dengan dilaksanakannya monitoring pada program yang menjadi sasaran. Tujuannya adalah menilai input, perencanaan, penganggaran, proses output dan pelaksanaan outcome dari aspek 3E (Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis) serta capaian pada program yang diaudit kinerja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan begitu program di OPD yang diaudit tersebut terpantau dan terdorong sehingga bisa terlaksana dengan baik.	Rp50.625.000,00	Rp50.625.000,00	Rp50.625.000,00	Rp50.625.000,00	Rp50.625.000,00	Inspektorat
9	Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Sosialisasi pengendalian gratifikasi di OPD (MMT, roll banner, belanja manmin, honor narsum, honor panitia, uang transport peserta)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di OPD dan masyarakat dan sosialisasi implementasi LOPISEMAR (Laporan dan Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang) yaitu layanan pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Kota Semarang bagi pegawai yang memiliki informasi dan ingin melaporkan dugaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara online.	Rp148.250.000,00	Rp148.500.000,00	Rp149.000.000,00	Rp149.500.000,00	Rp150.000.000,00	Inspektorat
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Menjadi Sarana Edukasi dan Literasi Hukum bagi warga Masyarakat	Rp225.776.400,00	Rp261.515.334,00	Rp289.182.512,00	Rp301.224.556,00	Rp303.436.508,00	Sekretariat DPRD
11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Pengelolaan Web DPRD, peningkatan Aplikasi Jdih DPRD Kota Semarang serta pendadaan Software	Kemudahan warga masyarakat kota semarang dalam mengakses Perda dan keputusan pimpinan DPRD melalui online	Rp1.232.167.084,00	Rp1.317.298.442,00	Rp1.456.662.854,00	Rp1.517.320.733,00	Rp1.554.744.372,00	Sekretariat DPRD
12	05.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0007 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan	Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah tahunan	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
13	05.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0007 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RPJMD	Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun	Rp100.000.000,00				Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
14	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Rencana Umum TMMD	Penyusunan dokumen perencanaan yang terkait dengan peningkatan harmonisasi tata kelola pemerintahan		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
15	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dalam Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Penyusunan dokumen perencanaan yang terkait dengan peningkatan harmonisasi tata kelola pemerintahan		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

16	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Implementasi Indeks Harmoni Indonesia di Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan yang terkait dengan peningkatan harmonisasi tata kelola pemerintahan			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
17	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Peningkatan Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan yang terkait dengan peningkatan harmonisasi tata kelola pemerintahan			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
18	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen RAD Bela Negara Tahun 2030-2034 Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan yang terkait dengan peningkatan harmonisasi tata kelola pemerintahan					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Digitasi Bangunan menggunakan GEE	Tersedianya data dan informasi Digitasi Bangunan Gedung Permanen Menggunakan <i>Google Earth Engine</i> (GEE) di Kota Semarang berdasarkan klasifikasi fungsi	Rp958.191.394,00	Rp1.054.010.533,00	Rp1.159.411.587,00	Rp1.275.352.745,00	Rp1.402.888.020,00	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
20	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Pembuatan <i>road map</i> informasi geospasial	Tersedianya peta jalan informasi geospasial	Rp100.000.000,00	Rp105.000.000,00	Rp110.250.000,00	Rp115.762.500,00	Rp121.550.625,00	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
21	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyediaan Sistem Elektronik Manajemen Aset Terintegrasi (SEMAR)	Tersedianya Sistem Elektronik Manajemen Aset Terintegrasi (SEMAR) dalam rangka mengoptimalkan penatausahaan BMD meliputi pendataan peta digital untuk tanah dan bangunan milik Pemkot Semarang, daftar aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan, serta sistem informasi persediaan	Rp87.581.760,00	Rp347.891.760,00	Rp87.581.760,00	Rp87.581.760,00	Rp87.581.760,00	BPKAD
22	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Sosialisasi Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya LKI (Lembar Kerja Inventarisasi) dan LHI (Laporan Hasil Inventarisasi) Barang Milik Daerah	Rp32.050.000,00	Rp33.050.000,00	Rp34.050.000,00	Rp35.050.000,00	Rp36.050.000,00	BPKAD
23	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Rp121.944.150,00	Rp129.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp163.000.000,00	Rp165.000.000,00	BPKAD
24	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Tersedianya Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Rp157.246.810,00	Rp140.000.000,00	Rp162.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp184.000.000,00	BPKAD
25	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp513.521.202,00	Rp514.521.202,00	Rp515.521.202,00	Rp516.521.202,00	Rp517.521.202,00	BPKAD
26	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Publikasi Perubahan APBD ke Media Cetak	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp484.328.491,00	Rp485.328.491,00	Rp486.328.491,00	Rp487.328.491,00	Rp488.328.491,00	BPKAD

27	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Terlaksanakannya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Rp126.890.460,00	Rp190.000.000,00	Rp220.000.000,00	Rp240.000.000,00	Rp242.000.000,00	BPKAD
28	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penyediaan Updating Data Kasda Online	Terinformasikannya transaksi keuangan atas RKUD Kota Semarang	Rp52.169.978,00	Rp52.169.978,00	Rp52.169.978,00	Rp52.169.978,00	Rp52.169.978,00	BPKAD
29	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kajian Pengembangan digitalisasi pemerintahan dan <i>smart city</i> , serta Pemerintahan Digital	efisiensi dan transparansi birokrasi, peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, terbukanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah secara keseluruhan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
30	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pekerjaan Umum	Kajian Penataan Infrastruktur dan Pendukung Digitalisasi Pemerintahan	pendorong ekonomi digital, kunci menuju industri 4.0, mendorong investasi baru, ekonomi tumbuh, pemerataan pendidikan, mendorong daya saing, mendukung lingkungan hidup, implementasi teknologi baru, lapangan kerja baru, industri startup, pemersatu bangsa, dan menaikkan kualitas hidup.	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
31	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.0002 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kajian terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan	Sebagai bahan dasar dalam penentuan kebijakan terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan	Rp790.000.000,00	Rp869.000.000,00	Rp955.000.000,00	Rp1.050.000.000,00	Rp1.155.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
32	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Penguatan Inovasi dan Daya Saing Daerah	meningkatkan tata kelola inovasi daerah dalam penguatan pembangunan	Rp230.000.000,00	253,000,000.00	278,300,000.00	306,130,000.00	336,743,000.00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	FGD/Rapat Penyusunan Dokumen Renstra OPD dan RTP RSO Tahun 2025-2029	Mendorong terciptanya kesepahaman arah kebijakan, mencegah tumpang tindih program, dan memperkuat integrasi antar sistem informasi, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak hanya mendukung efektivitas pembangunan, tetapi juga selaras dengan konsep integrasi layanan dalam <i>Smart City</i>	Rp43.495.000,00	Rp43.495.000,00	Rp43.495.000,00	Rp43.495.000,00	Rp43.495.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya mekanisme tata kelola data sektoral yang lebih terstruktur, pembentukan basis data sektoral yang terintegrasi, serta terbangunnya komitmen lintas perangkat daerah dalam menyediakan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya forum Walidata, proses pengumpulan, verifikasi, dan diseminasi data dapat dilaksanakan secara lebih sistematis sesuai standar Satu Data Indonesia	Rp49.475.000,00	Rp49.475.000,00	Rp49.475.000,00	Rp49.475.000,00	Rp49.475.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan kapasitas SDM, tetapi juga manfaat strategis berupa terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, pelayanan publik yang inovatif dan patuh regulasi, serta dukungan penuh terhadap keberlanjutan pembangunan <i>Smart City</i> yang modern, inklusif, dan berkelanjutan	Rp21.560.650,00	Rp21.560.650,00	Rp21.560.650,00	Rp21.560.650,00	Rp21.560.650,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
36	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Fasilitasi Pengadaan CASN Pemerintah Kota Semarang	Terselenggaranya proses seleksi CASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tersedianya basis data pelamar yang terintegrasi, serta terwujudnya laporan hasil seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum	Rp411.555.499,00	Rp411.555.499,00	Rp411.555.499,00	Rp411.555.499,00	Rp411.555.499,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
37	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Penyelesaian Administrasi PNS yang akan Purna Tugas	Seluruh dokumen administrasi purna tugas terdigitalisasi dan terhubung dengan basis data ASN (SIMPEG, SAPK, SIASN), sehingga mengurangi risiko kehilangan berkas fisik, mencegah duplikasi data, serta mendukung interoperabilitas antar-sistem dalam ekosistem <i>Smart City</i>	Rp188.632.919,00	Rp188.632.919,00	Rp188.632.919,00	Rp188.632.919,00	Rp188.632.919,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

38	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Desk/Asistensi dan FGD Penyelesaian Usul Pensiun	Memberikan ruang konsultasi personal bagi ASN yang akan purna tugas, sehingga mereka memahami persyaratan, alur digital, dan dokumen yang diperlukan. Melalui FGD, ASN juga dapat berbagi pengalaman, kendala, dan solusi secara kolektif, sehingga kapasitas bersama dalam memanfaatkan sistem digital meningkat	Rp39.680.577,00	Rp39.680.577,00	Rp39.680.577,00	Rp39.680.577,00	Rp39.680.577,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
39	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan Purna Tugas	Melalui pembekalan, ASN memperoleh kepastian informasi terkait hak pensiun, jaminan sosial, dan layanan pasca kerja. Kepastian ini memberikan rasa aman dan menumbuhkan motivasi positif hingga akhir masa pengabdian. Pembekalan juga diarahkan untuk membekali ASN dengan keterampilan kewirausahaan, literasi keuangan, atau peran sosial setelah pensiun. Dengan pemanfaatan platform <i>Smart City</i> (misalnya marketplace UMKM lokal, forum komunitas digital), pensiunan ASN dapat tetap aktif berkontribusi di masyarakat	Rp70.888.072,00	Rp70.888.072,00	Rp70.888.072,00	Rp70.888.072,00	Rp70.888.072,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
40	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Monev Administrasi Pemberhentian	Tertib administrasi, pengendalian risiko kesalahan, serta peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
41	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Langganan Aplikasi <i>Chatbot Savira</i>	Kemudahan mengakses informasi kepegawaian dan layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor dengan pelayanan yang cepat, responsif, dan dapat diakses 24/7, mendukung keterbukaan informasi publik.	Rp102.000.000,00	Rp102.000.000,00	Rp102.000.000,00	Rp102.000.000,00	Rp102.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
42	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Kegiatan <i>Coaching Clinic/Desk</i> Penempatan ASN	<i>Coaching Clinic</i> memberikan ruang dialog interaktif antara ASN dengan tim pembina (BKPP dan pejabat terkait). ASN mendapatkan arahan mengenai hak, kewajiban, mekanisme penempatan, serta peluang pengembangan karier	Rp24.200.000,00	Rp24.200.000,00	Rp24.200.000,00	Rp24.200.000,00	Rp24.200.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
43	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Kegiatan Manajemen Talenta/Uji Kompetensi	Data talenta yang diperoleh dari uji kompetensi dipadukan dengan kebutuhan organisasi. Penempatan ASN menjadi lebih terukur, berbasis bukti, dan sesuai dengan prinsip sistem merit	Rp182.250.000,00	Rp182.250.000,00	Rp182.250.000,00	Rp182.250.000,00	Rp182.250.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
44	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Kegiatan Monev Penempatan PNS	Menjadikan administrasi penempatan yang tertib, efisiensi layanan, dan pemetaan kebutuhan SDM yang lebih akurat	Rp18.950.000,00	Rp18.950.000,00	Rp18.950.000,00	Rp18.950.000,00	Rp18.950.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
45	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Sosialisasi Nomenklatur Baru Jabatan Pelaksana	ASN memperoleh informasi yang jelas terkait nomenklatur jabatan terbaru, termasuk fungsi, uraian tugas, dan implikasi terhadap karier. Hal ini mengurangi potensi miskomunikasi maupun resistensi terhadap perubahan	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
46	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Penyelenggaraan Kegiatan Tes Mutasi	Tes mutasi berbasis sistem digital memastikan bahwa hasil penilaian tidak dipengaruhi subjektivitas, melainkan berdasarkan skor uji kompetensi yang terekam secara elektronik. Pelaksanaan tes berbasis aplikasi/ <i>online</i> (CAT) mendukung prinsip efisiensi, mengurangi penggunaan kertas (<i>paperless</i>), serta memungkinkan hasil tes diperoleh secara real-time	Rp22.100.000,00	Rp22.100.000,00	Rp22.100.000,00	Rp22.100.000,00	Rp22.100.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
47	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Penyediaan <i>Platform</i> berbasis <i>website</i> terkait monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan dan serapan anggaran untuk seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang	Sebagai sarana bagi perangkat daerah untuk melakukan input dan menyimpan data kegiatan dari target pelaksanaan hingga realisasi kegiatan dan serapan anggarannya, sebagai sarana bagi bagian administrasi pembangunan untuk memperoleh data kegiatan dari target pelaksanaan hingga realisasi kegiatan dan serapan anggaran dan melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian bagi publik dan pihak2 lain bisa memperoleh serta memantau data target dan realisasi kegiatan serta serapan anggaran seluruh perangkat daerah di pemerintah kota semarang	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Monitoring Evaluasi Kelembagaan (Monevaga)	Aplikasi atau sistem yang digunakan untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menyediakan data dukung dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	Rp43.343.457,00	Rp45.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp55.000.000,00	Rp60.000.000,00	Bagian Organisasi
49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	E- Anajab (Analisis Jabatan)	Aplikasi atau sistem yang digunakan untuk membantu proses analisis jabatan dan beban kerja, terutama dalam konteks kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah		Rp95.000.000,00	Rp88.000.000,00	Rp89.000.000,00	Rp90.000.000,00	Bagian Organisasi

50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sistem Informasi Standar Operasional Prosedur (SISOP)	Aplikasi atau sistem yang membantu Perangkat Daerah dalam mempermudah penyusunan SOP dan menyediakan data seluruh SOP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang		Rp77.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp79.000.000,00	Rp80.000.000,00	Bagian Organisasi
51	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (Asikmas)	Aplikasi atau sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data survei kepuasan masyarakat		Rp80.000.000,00	Rp81.000.000,00	Rp82.000.000,00	Rp83.000.000,00	Bagian Organisasi
52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	Aplikasi atau sistem informasi satu pintu yang memuat informasi pelayanan publik, Index Pelayanan Publik (IPP), yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi Pelayanan Publik		Rp80.000.000,00	Rp81.000.000,00	Rp82.000.000,00	Rp83.000.000,00	Bagian Organisasi
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Platform Monitoring dan analisis Isu Media	Monitoring pemberitaan media massa serta persepsi publik terhadap kepala daerah, menjadi dasar strategi komunikasi dan pengambilan keputusan kepala daerah.	Rp192.000.000,00	Rp192.000.000,00	Rp192.000.000,00	Rp192.000.000,00	Rp192.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sistem informasi berbasis web e-agenda kepala daerah terintegrasi sambutan kepala daerah	Peningkatan pelayanan terhadap kepala daerah dalam penyusunan agenda, memudahkan akses informasi disposisi kepala daerah, mempercepat koordinasi antar OPD.						Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
55	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.02.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Agenda Elektronik Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Memudahkan mengelola agenda kegiatan secara terpusat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik di lingkungan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang						Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang
56	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.02.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Website Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Memberikan diseminasi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja organisasi						Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang
57	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.02.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sidia Konsumsi (Sistem Informasi Penyediaan Konsumsi)	Memudahkan dalam pencatatan, monitoring dan evaluasi penyediaan konsumsi Pemerintah Kota Semarang						Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang
58	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.02.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembinaan Kearsipan Unit Pengolah di Sekretariat Daerah Kota Semarang	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola arsip tentang pentingnya arsip di Setda Kota Semarang						Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang
59	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	- Pelayanan Terpadu - Sosialisasi Pelayanan Publik - Penyediaan Ruang Tunggu Layak Anak	- Meningkatkan aksesibilitas - Meningkatkan Kualitas Pelayanan - Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan	Rp125.243.600,00					Kecamatan Semarang Utara
60	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	- Pelayanan Terpadu - Sosialisasi Pelayanan Publik - Penyediaan Ruang Tunggu Layak Anak	- Meningkatkan aksesibilitas - Meningkatkan Kualitas Pelayanan - Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan	Rp183.535.200,00					Kecamatan Semarang Utara

61	PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	- Pelayanan Terpadu - Sosialisasi Pelayanan Publik - Penyediaan Ruang Tunggu Layak Anak	- Meningkatkan aksesibilitas - Meningkatkan Kualitas Pelayanan - Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan			Rp200.000.000,00			Kecamatan Semarang Utara
62	PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	- Pelayanan Terpadu - Sosialisasi Pelayanan Publik - Penyediaan Ruang Tunggu Layak Anak	- Meningkatkan aksesibilitas - Meningkatkan Kualitas Pelayanan - Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan			Rp225.000.000,00			Kecamatan Semarang Utara
63	PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	- Pelayanan Terpadu - Sosialisasi Pelayanan Publik - Penyediaan Ruang Tunggu Layak Anak	- Meningkatkan aksesibilitas - Meningkatkan Kualitas Pelayanan - Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan				Rp250.000.000,00		Kecamatan Semarang Utara
64	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Proses Pelayanan ke Masyarakat	Mempercepat dan meminimalisasi kesalahan dalam proses pelayanan ke masyarakat		Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Kecamatan Semarang Tengah
65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya tenaga IT 1 Kelurahan 1 orang tenaga IT dan tersedianya tenaga IT untuk Kecamatan	Fasilitasi tenaga IT guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif	Rp1.052.261.880,00	Rp1.052.261.880,00	Rp1.052.261.880,00	Rp1.052.261.880,00	Rp1.052.261.880,00	Kecamatan Semarang Timur
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	penyusunan laporan keuangan akhir tahun sekretariat daerah kota semarang	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sekretariat daerah kota semarang yang akuntabel	Rp111.400,00	Rp318.100,00	Rp335.000,00	Rp360.000,00	Rp400.000,00	Bagian Keuangan
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Kamera , Pemeliharaan Kamera dan Langanan Aplikasi Canva untuk Editing dan lain - lain	Pengenalan Kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan guna Meningkatkan aktivitas di Media Sosial untuk mengenalkan wilayah Kecamatan Semarang Selatan	Rp53.323.510,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Kecamatan Semarang Selatan
68	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Laptop Untuk Kasi Kelurahan	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memungkinkan fleksibilitas kerja, memfasilitasi adaptasi terhadap teknologi informasi, mendukung kinerja administrasi dan pelayanan publik, serta mempercepat proses pengambilan keputusan melalui akses informasi yang lebih cepat dan pengelolaan data yang lebih baik.		Rp175.943.200,00				Kecamatan Semarang Selatan
69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan PC dengan spec yang lebih baik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam bidang elektronik untuk mendukung pelayanan yang efektif dan cepat	Rp20.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp367.500.000,00	Rp385.875.000,00	Rp405.168.750,00	Kecamatan Gajahmungkur
70	-	-	-	sistem berbasis <i>desktop/website</i> (si madu)	Mengetahui lebih cepat aduan warga masyarakat (khususnya wilayah Kecamatan Gajahmungkur) via Media Sosial (Inovasi yang tidak ada di Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan)						Kecamatan Gajahmungkur
71				sistem berbasis <i>desktop/website</i> (siap spk)	Website ini dikembangkan untuk membantu PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), seperti camat, lurah, atau petugas di Kecamatan Gajahmungkur, dalam membuat, mengelola, dan menyimpan dokumen kontrak secara terstruktur dan sesuai standar.						Kecamatan Gajahmungkur
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Laptop	meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memungkinkan fleksibilitas kerja, memfasilitasi adaptasi terhadap teknologi informasi, mendukung kinerja administrasi dan pelayanan publik, serta mempercepat proses pengambilan keputusan melalui akses informasi yang lebih cepat dan pengelolaan data yang lebih baik.	Rp131.200.002,00		Rp134.118.400,00			Kecamatan Candisari

73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan <i>PC All In One</i>	meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memungkinkan fleksibilitas kerja, memfasilitasi adaptasi terhadap teknologi informasi, mendukung kinerja administrasi dan pelayanan publik, serta mempercepat proses pengambilan keputusan melalui akses informasi yang lebih cepat dan pengelolaan data yang lebih baik.	Rp148.590.640,00	Rp148.590.640,00				Kecamatan Candisari
74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya tenaga IT 1 Kelurahan 1 orang tenaga IT dan tersedianya tenaga IT untuk Kecamatan	Fasilitasi tenaga IT guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif	Rp1.295.553.800,00	Rp1.295.553.800,00	Rp1.295.553.800,00	Rp1.295.553.800,00	Rp1.295.553.800,00	Kecamatan Genuk
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan PC dengan spec yang lebih baik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam bidang elektronik untuk mendukung pelayanan yang efektif dan cepat	Rp456.503.984,00	Rp508.243.021,00	Rp530.762.258,00	Rp534.898.722,00	Rp544.655.784,00	Kecamatan Pedurungan
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Drone , Pemeliharaan Drone dan Langganan Aplikasi Canva untuk <i>Editing</i> dan lain - lain	Pembuatan Selayang Pandang wilayah Kecamatan Gayamsari dan Pengenalan Kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan guna Meningkatkan aktivitas di Media Sosial untuk mengenalkan wilayah Kecamatan Gayamsari	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Pelaksanaan kegiatan budaya kerja seluruh pegawai kecamatan gayamsari	Memberikan edukasi guna meningkatkan <i>soft skill</i> pegawai dalam menghadapi perkembangan zaman	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan FGD Sakip melibatkan Bappeda dan Inspektorat	Meningkatkan Nilai SAKIP Kecamatan agar dapat menambah penilaian SAKIP Kota secara keseluruhan	Rp57.112.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Pelaksanaan FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Anggaran untuk tahun selanjutnya bersama dengan Bappeda dan Inspektorat	Membantu Kecamatan dan Kelurahan dalam penyusunan dokumen RKA agar tidak terjadi kesalahan saat tahap perencanaan	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan juga Optimalisasi PBB di wilayah	Meningkatkan PAD Kota dan Kinerja Pemerintahan secara keseluruhan	Rp6.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja nasional, evaluasi kinerja kelurahan dan kecamatan, kegiatan jemput bola PBB	- peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB - peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB - peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB	Rp646.203.500,00	Rp242.848.900,00	Rp267.133.790,00	Rp272.476.466,00	Rp272.476.466,00	Kecamatan Tembalang
82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga IT 1 Kelurahan 1 orang tenaga IT dan tersedianya tenaga IT untuk Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Rp831.091.090,00	Rp847.712.911,80	Rp864.667.170,04	Rp881.960.513,44	Rp899.599.723,71	Kecamatan Banyumanik
83	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, kegiatan PBB	-peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB - peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB - peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB	Rp450.000.000,00	Rp480.000.000,00	Rp507.000.000,00	Rp498.000.000,00	Rp589.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- kegiatan pelayanan pada akhir pekan - Kegiatan pelayanan di hari libur - kegiatan pelayanan dengan menggunakan aplikasi	-akses layanan yang lebih inklusif, mengurangi antrean di hari kerja, kontinuitas untuk kebutuhan mendesak, efisiensi waktu dan biaya	Rp300.000.000,00	Rp330.000.000,00	Rp346.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp351.000.000,00	Kecamatan Gunungpati

85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang berbasis elektronik	peningkatan efisiensi, transparansi, keamanan, partisipasi publik, hingga keberlanjutan lingkungan	Rp100.000.000,00	Rp115.000.000,00	Rp119.600.000,00	Rp120.000.000,00	Rp125.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang berbasis elektronik	peningkatan efisiensi, transparansi, keamanan, partisipasi publik, hingga keberlanjutan lingkungan	Rp100.000.000,00	Rp115.000.000,00	Rp119.600.000,00	Rp120.000.000,00	Rp125.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dukungan Tenaga Pelayanan administrasi	Mempermudah pengadministrasian pelayanan umum dan menunjang Kegiatan yang berbasis Elektronik	Rp818.247.280,00	Rp818.557.280,00	Rp818.847.280,00	Rp819.347.280,00	Rp819.647.280,00	Kecamatan Mijen
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sisir PBB di Kelurahan	Optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pembangunan wilayah.	Rp26.962.216,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Kecamatan Mijen
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan DRONE	Mendukung promosi potensi wisata dan kegiatan kecamatan melalui pembuatan konten kreatif berbasis teknologi		Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Kecamatan Mijen
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, kegiatan PBB	-peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB - peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB - peringatan hari besar nasional, evaluasi kinerja kelurahan, dan kegiatan terkait PBB	Rp160.625.000,00	Rp480.000.000,00	Rp507.000.000,00	Rp498.000.000,00	Rp589.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- kegiatan pelayanan pada akhir pekan - Kegiatan pelayanan di hari libur - kegiatan pelayanan dengan menggunakan aplikasi	-akses layanan yang lebih inklusif, mengurangi antrian di hari kerja, kontinuitas untuk kebutuhan mendesak, efisiensi waktu dan biaya	Rp300.000.000,00	Rp330.000.000,00	Rp346.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp351.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan
92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang berbasis elektronik	peningkatan efisiensi, transparansi, keamanan, partisipasi publik, hingga keberlanjutan lingkungan	Rp100.000.000,00	Rp115.000.000,00	Rp119.600.000,00	Rp120.000.000,00	Rp125.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan
93	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda Kab/Kota	Supporting penyediaan Internet untuk mendukung aplikasi layanan publik (Smartcity)	Tersedianya layanan internet untuk mendukung aplikasi layanan publik (Smartcity)	Rp7.500.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp8.500.000.000,00	Rp9.000.000.000,00	Rp9.500.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
94	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemda	Pengembangan Data Center	Pusat Data Pemerintah Daerah	Rp600.000.000,00	Rp9.600.000.000,00	Rp10.400.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

95	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemda	Pembangunan Videotron	Penyebarluasan Informasi Publik	Rp1.200.000.000,00	Rp3.600.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
96	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PENGLOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pelayanan Informasi Publik	Pengembangan <i>Knowledge Manajemen System</i> terkait informasi publik di Kota Semarang	Tersedianya informasi publik yang cepat, mudah dan tepat bagi masyarakat dan informasi yang <i>up to date</i>	Rp150.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
97	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PENGLOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pelayanan Informasi Publik	Penilaian Keterbukaan Informasi Internal Pemerintah Kota Semarang	Tersedianya informasi berkala, setiap saat serta merta di website OPD, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan	Rp90.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Peralatan Kantor Berbasis TIK	Tersedianya peralatan TIK yang digunakan untuk mendukung terlaksananya SPBE	Rp418.000.000,00	Rp450.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp520.000.000,00	Rp550.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan SPBE	Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan SPBE	Rp260.000.000,00	Rp270.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp320.000.000,00	Rp350.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Diseminasi/ <i>Workshop</i> / Sosialisasi/ Bimbingan Teknis data statistik sektoral dan data geospasial	- Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan data statistik sektoral dan data geospasial. - Meningkatnya kualitas data statistik sektoral dan data geospasial - Meningkatnya kuantitas dan kualitas rekomendasi kegiatan statistik - Meningkatnya kuantitas dan kualitas metadata statistik sektoral dan data geospasial - Meningkatnya kuantitas dan kualitas standar data statistik sektoral dan data geospasial - Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi data statistik sektoral dan data geospasial	Rp80.686.354,00	Rp150.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp300.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
101	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan data statistik sektoral dan data geospasial	Meningkatnya pemahaman dan kapasitas SDM terkait pengelolaan data statistik sektoral dan data geospasial	Rp174.706.160,00	Rp200.000.000,00	Rp220.000.000,00	Rp240.000.000,00	Rp260.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Pemutakhiran teknologi informasi untuk pengelolaan data	Meningkatnya layanan teknologi informasi untuk pengelolaan data sebagai sarana publikasi data statistik sektoral dan data geospasial	Rp145.763.864,00	Rp250.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp400.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
103	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan <i>Masterplan</i> Kabupaten atau Kota Cerdas	sosialisasi aplikasi ruang warga	membuat panduan ke warga dalam mengisi aktivitas aplikasi ruang warga	Rp251.897.200,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
104	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	(Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://tpp.semarangkota.go.id/)	Meningkatkan efisiensi pengelolaan tunjangan pegawai dan keuangan secara transparan serta memudahkan pelaporan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
105	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	(Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://pph21.semarangkota.go.id/)	Mempermudah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pegawai secara otomatis.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

106	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan (<i>Imunify 360 Unlimited User, WhatsApp Blaster API E-Surat, dan WhatsApp Blaster API E-Sampah</i>)	Peningkatan keamanan server aplikasi, percepatan penyebaran informasi resmi, dan optimalisasi komunikasi layanan publik.	Rp45.954.000,00	Rp45.954.000,00	Rp45.954.000,00	Rp45.954.000,00	Rp45.954.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
107	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	(Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://tantekepo.semarangkota.go.id dan https://esurat.semarangkota.go.id)	Digitalisasi proses surat-menyurat internal dan eksternal, meminimalkan penggunaan kertas, dan mempercepat disposisi.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
108	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://semarangkota.go.id/)	Menyediakan informasi resmi kota, berita, layanan publik, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
109	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://portalkecamatan.emarangkota.go.id/)	Memberikan akses layanan administrasi dan informasi kegiatan di tingkat kecamatan secara <i>online</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
110	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://sipinter.semarangkota.go.id/)	Memberikan gambaran capaian dan kontribusi tenaga Non ASN dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
111	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://silaker.semarangkota.go.id/doLogin/)	Menyediakan informasi lowongan kerja dan pelatihan bagi pencari kerja.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
112	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://dp3a.semarangkota.go.id)	Memberikan informasi terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
113	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://stunting.semarangkota.go.id/)	Monitoring data <i>stunting</i> secara <i>real-time</i> untuk intervensi cepat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
114	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://silaga.semarangkota.go.id/)	Sistem Informasi dari Lahir Sampai Meninggal Kota Semarang	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

115	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://sisfo.pkk.semarangkota.go.id/home/login)	Digitalisasi administrasi dan pelaporan PKK kota.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
116	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://diskopumkm.semarangkota.go.id/)	Memberikan informasi terkait Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang beserta layanan	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
117	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://rpjmd.semarangkota.go.id/)	Mempermudah perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan target indikator.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
118	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://bapenda.semarangkota.go.id/)	Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
119	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://kopjas.semarangkota.go.id/)	Sistem monitoring koperasi jasa.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Langganan Lisesnsi Email go.id)	Keamanan dan kredibilitas komunikasi resmi pemerintah kota.	Rp199.499.600,00	Rp199.499.600,00	Rp199.499.600,00	Rp199.499.600,00	Rp199.499.600,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
121	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Chatbox AI Sistem Pelaporan)	Mempermudah warga menyampaikan laporan dan mendapat respons otomatis 24 jam.	Rp179.984.000,00	Rp179.984.000,00	Rp179.984.000,00	Rp179.984.000,00	Rp179.984.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
122	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Jasa Konsultasi Penyusunan <i>Master Plan Smart City</i> Kota Semarang 2025-2029)	Panduan strategis implementasi <i>smart city</i> lima tahun ke depan.	Rp99.736.000,00	Rp99.736.000,00	Rp99.736.000,00	Rp99.736.000,00	Rp99.736.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pendampingan ISO/IEC 27001:2022 Dan Penerbitan ISO/IEC 27001:2022)	Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan Audit ISO/IEC 27001:2022	Rp99.818.000,00	Rp99.818.000,00	Rp99.818.000,00	Rp99.818.000,00	Rp99.818.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

124	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Penerbitan ISO/IEC 27001:2022)	Meningkatkan keamanan informasi sesuai standar internasional.	Rp99.818.000,00	Rp99.818.000,00	Rp99.818.000,00	Rp99.818.000,00	Rp99.818.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
125	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Peningkatan Kapasitas DPRD-Sekretariat DPRD Kota Semarang	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Pengadaan <i>Software Utilities (Rebranding dan Desain Ulang</i> https://ppid.dprd.semarangkota.go.id/)	Tampilan lebih modern dan akses informasi publik DPRD lebih mudah.	Rp99.400.000,00	Rp99.400.000,00	Rp99.400.000,00	Rp99.400.000,00	Rp99.400.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
126	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Kajian Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Perubahan)	Menjadi dasar implementasi <i>change management</i> di Pemkot.	Rp88.677.900,00	Rp88.677.900,00	Rp88.677.900,00	Rp88.677.900,00	Rp88.677.900,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
127	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan <i>Franchise</i> (Lisensi <i>Software</i> Keamanan Informasi (FORTIGATE)	Perlindungan jaringan internal Pemkot dari ancaman siber.	Rp1.143.300.000,00	Rp1.143.300.000,00	Rp1.143.300.000,00	Rp1.143.300.000,00	Rp1.143.300.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
128	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	<i>Workshop/Sosialisasi/Diseminasi/Sarasehan/FGD</i> Pengembangan TIK	Terbangunnya kapasitas SDM komunikasi publik yang adaptif & profesional untuk komunikasi efektif, transparan, dan mendukung <i>Smart City</i>	Rp250.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp450.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
129	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi a.go.id ganti ke alamat https://pitantik.semarangkota.go.id/)	Mendukung digitalisasi layanan perizinan penelitian di Kota Semarang, memudahkan peneliti, mahasiswa, dan pihak terkait untuk mengajukan izin secara <i>online</i> , mempercepat proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
130	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan Aplikasi https://sisdm.semarangkota.go.id/matalentik/11951 , redirect ke https://matalentik.semarangkota.go.id/administrator/login)	Mendukung manajemen talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara terpusat, transparan, dan akuntabel.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
131	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan Aplikasi https://silaker.semarangkota.go.id)	Mendukung layanan perizinan tenaga kerja secara <i>online</i> , memudahkan perusahaan dan masyarakat mengurus administrasi ketenagakerjaan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
132	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Web https://brida.semarangkota.go.id/)	Menjadi portal informasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, mempermudah akses hasil riset dan inovasi untuk masyarakat dan <i>stakeholder</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
133	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi https://mmpi.semarangkota.go.id/)	Mendukung proses tes kepribadian pegawai dengan metode MMPI (<i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i>) secara digital, sehingga hasil tes lebih cepat, objektif, dan terdokumentasi. Bermanfaat untuk seleksi, penempatan, dan pengembangan SDM Aparatur di Kota Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

134	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika <i>Rebranding Web Site</i> Dinas Pertanian https://dispertan.semarangkota.go.id/)	Menyediakan informasi terkini mengenai program, layanan, dan data pertanian Kota Semarang dengan tampilan lebih modern dan ramah pengguna.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
135	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi https://sarpras.damkar.semarangkota.go.id/)	Mendukung pendataan sarana prasarana pemadam kebakaran, mempermudah monitoring ketersediaan peralatan dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
136	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan pelayanan rumah sakit kelas 3 yang di kelola oleh BPJS Kesehatan.	Rp91.770.483.100,00	Rp122.406.399.200,00	Rp145.688.096.328,00	Rp151.495.223.848,00	Rp151.495.375.239,00	Dinas Kesehatan
137	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Penanganan Aduan Uhc Warga Kota Semarang	Rp91.770.483.100,00	Rp122.406.399.200,00	Rp145.688.096.328,00	Rp151.495.223.848,00	Rp151.495.375.239,00	Dinas Kesehatan
138	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Penguatan Kerja Sama dan Kemitraan DKK Semarang dengan BPJS Kesehatan, OPD dan Sektor Swasta untuk Peningkatan Cakupan UHC	Rp84.751.592,00	Rp122.406.399.200,00	Rp145.688.096.328,00	Rp151.495.223.848,00	Rp151.495.375.239,00	Dinas Kesehatan
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Menyediakan data, memproses verifikasi keaslian, keakuratan dan kelengkapan data kependudukan yang dihasilkan	Ketersediaan data agregat kependudukan yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	Rp50.000.000,00	Rp4.575.500,00	Rp4.804.275,00	Rp5.044.488,75	Rp5.296.713,19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Belanja Modal Sarana Prasarana yang mendukung pelayanan berbasis teknologi informasi	Ketersediaan sarana prasarana penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Rp230.306.948,00	Rp241.822.295,40	Rp438.551.214,00	Rp460.478.774,70	Rp453.502.714,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
141	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Mengolah dan menyajikan data kependudukan dalam Aplikasi SIAK	Data kependudukan yang <i>terupdate</i>	Rp21.159.960,00	Rp22.217.958,00	Rp23.328.855,90	Rp24.495.298,70	Rp25.720.063,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
142	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/instansi lain	Data kependudukan yang dimanfaatkan oleh OPD/ instansi lain		Rp15.450.000,00	Rp16.222.500,00	Rp17.033.625,00	Rp17.885.306,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
143	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Pengumpulan dan pengintegrasian arsip manual ke dalam arsip digital kependudukan dan pencatatan sipil	Tersedianya data kependudukan dengan angka riil yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan	Rp119.382.461,00	Rp120.533.515,00	Rp126.560.190,75	Rp128.198.152,00	Rp128.675.630,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

144	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan tata kelola manajemen dari penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berkualitas	Rp23.659.960,00	Rp22.842.958,00	Rp23.985.105,90	Rp25.184.361,20	Rp26.443.579,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
145	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan pembinaan dan pengawasan penggunaan aplikasi SIAK di seluruh tempat layanan adminduk yang terintegrasi SIAK dan IKD	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp16.221.555,00	Rp17.032.632,75	Rp17.884.264,39	Rp18.778.477,61	Rp19.717.401,49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
146	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Kegiatan penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Terselenggaranya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Rp65.972.120,00	Rp58.548.084,00	Rp61.475.488,20	Rp64.549.262,61	Rp58.776.725,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
147	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi antar lembaga dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Terselenggaranya koordinasi antar lembaga dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp8.899.940,00	Rp9.344.937,00	Rp28.125.013,81	Rp29.531.264,50	Rp31.007.827,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
148	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kegiatan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam pelayanan adminduk	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi PIAK di seluruh tempat pelayanan adminduk	Rp12.293.220,00	Rp12.907.881,00	Rp23.553.275,00	Rp24.730.938,75	Rp25.967.485,69	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
149	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Penyediaan data agregat kependudukan skala kota	Tersedianya data agregat kependudukan skala kota untuk pembangunan daerah		Rp20.000.000,00	Rp23.000.000,00	Rp24.150.000,00	Rp24.635.641,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
150	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan buku profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Tersedianya buku profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Rp134.616.095,00	Rp115.194.925,00	Rp126.497.956,00	Rp131.573.301,00	Rp132.231.167,51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
151	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan dan pendaftaran LPK	LPK mendapat izin dan pembinaan	Rp20.838.706,00	Rp50.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp80.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
152	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	FGD Tematik	Tenaga kerja mendapat kan pelayanan informasi pasar kerja						
153	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Sosialisasi BKK	Penyebarluasan informasi pasar kerja	Rp146.438.355,99	Rp233.000.000,00	Rp233.000.000,00	Rp233.000.000,00	Rp233.000.000,00	
154	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Sosialisasi Ketenagakerjaan bagi Pencaker	Penyebarluasan informasi pasar kerja						
155	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Ketenagakerjaan bagi Perusahaan	Penyebarluasan informasi pasar kerja						Dinas Tenaga Kerja
156	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimbingan Teknis Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Peraturan memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Rp20.040.032,00	Rp43.995.252,00	Rp45.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp55.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

157	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah	Perusahaan dapat menyusun Struktur dan Skala Upah	Rp1.137.825.812,00	Rp283.110.504,00	Rp283.110.504,00	Rp290.000.000,00	Rp290.000.000,00	
158	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Sosialisasi UMK	Tersosialisasikannya informasi mengenai UMK						Dinas Tenaga Kerja
159	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perusahaan mampu menyelesaikan perselisihan secara internal	Rp32.775.529,00	Rp74.650.504,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
160	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PH	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial	Rp13.724.014,00	Rp27.002.114,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
161	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemeriksaan kondisi APAR, hidran, alarm, dan sistem proteksi kebakaran lainnya dengan pelaporan digital	Rekomendasi perbaikan dan penggantian sarana proteksi kebakaran secara tepat waktu	Rp447.894.732,00	Rp350.000.000,00	Rp370.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp405.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran
162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin peralatan kantor dan operasional dengan monitoring kinerja menggunakan aplikasi inventaris.	Peralatan tetap berfungsi optimal dan mendukung kelancaran operasional dinas.	Rp34.775.223,00	Rp38.252.745,00	Rp42.078.020,00	Rp46.285.822,00	Rp50.914.404,00	Dinas Pemadam Kebakaran
163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengembangkan integrasi layanan SPBE dengan dashboard <i>Smart City</i> .	Pelayanan publik lebih cepat; data layanan terintegrasi.		Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp75.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran
164	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tindak lanjut terhadap pelanggaran perda dan perkara dengan sidang tipiring	Pelanggar perda dan perkara jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali	Rp509.151.658,21	Rp431.113.264,00	Rp545.113.264,00	Rp531.134.254,00	Rp481.921.089,00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang
165	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Kegiatan pemerintah berjalan dengan baik dan lancar	Rp136.102.099,00	Rp279.995.133,00	Rp312.995.133,00	Rp326.945.133,00	Rp326.945.133,00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang

166	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Konsultasi terkait pengembangan layanan di Rumah Sakit	Mendapatkan rekomendasi untuk memperkuat rencana pengembangan untuk pelayanan maupun penunjang pelayanan Rumah Sakit	Rp373.500.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp400.000.000,00	RSWN
167	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengembangan sistem JDIH dengan menambahkan Dokumen editor penyusunan perancangan produk hukum	Mempermudah penyusunan produk hukum OPD	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Bagian Hukum
168	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pengembangan <i>e-Ling System</i> dengan upgrade framework Laravel dari versi 5 ke versi 12	Untuk meningkatkan performa, kompatibilitas <i>e-ling system</i> agar mendapat kemudahan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan dan dukungan integrasi teknologi terkini	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Bagian Hukum
169	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pengembangan SiLaker berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2025 meliputi fitur notifikasi layanan TTE serta pengembangan Aplikasi Surat Warga (Apel Surga) yang telah tersedia bagi masyarakat sebagai pemohon layanan.	Layanan persuratan digital berbasis <i>online</i> bagi masyarakat Kecamatan dan Kelurahan.		Rp486.394.746,00	Rp644.410.578,00	Rp713.186.423,00	Rp725.819.568,00	Bagian Tata Pemerintahan
170	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pengembangan SiLaker dilakukan melalui penambahan fitur preview laporan evaluasi kinerja secara menyeluruh pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pengesahan laporan secara elektronik.	Digitalisasi Laporan Evaluasi Kinerja: Dari Manual ke Digital		Rp486.394.746,00	Rp644.410.578,00	Rp713.186.423,00	Rp725.819.568,00	Bagian Tata Pemerintahan
171	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pengembangan SiLaker (Automatisasi Penilaian Evkin Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>))	Mempercepat proses penilaian administrasi melalui Automatisasi pengolahan data Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan.		Rp486.394.746,00	Rp644.410.578,00	Rp713.186.423,00	Rp725.819.568,00	Bagian Tata Pemerintahan
172	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengembangan SiLaker melalui Integrasi Data Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) dengan penambahan fitur edit tampilan peta	Memudahkan proses monitoring dan evaluasi pencapaian pendataan SINAR di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, serta memastikan kesesuaian data rupabumi dengan standar nasional		Rp3.170.557.556,00	Rp3.328.573.388,00	Rp3.397.349.233,00	Rp3.409.982.378,00	Bagian Tata Pemerintahan
173	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pengembangan SiLaker melalui integrasi Satu Data Kota Semarang dengan monografi Kecamatan dan Kelurahan yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas data dengan menyajikan informasi terpadu yang lebih valid, akurat, dan efisien.		Rp486.394.746,00	Rp644.410.578,00	Rp713.186.423,00	Rp725.819.568,00	Bagian Tata Pemerintahan
174	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pengembangan SiLaker melalui penambahan platform pelaporan masalah pada sistem	Memudahkan pencatatan, pemantauan, serta perbaikan permasalahan pada SiLaker.		Rp486.394.746,00	Rp644.410.578,00	Rp713.186.423,00	Rp725.819.568,00	Bagian Tata Pemerintahan
175	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Analitik Data Layanan SiLaker	Untuk menganalisis trend, prediksi, dan penyimpanan data dari setiap layanan di Kota Semarang		Rp486.394.746,00	Rp644.410.578,00	Rp713.186.423,00	Rp725.819.568,00	Bagian Tata Pemerintahan
176	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Anjungan Cetak Mandiri Layanan Aplikasi Surat Warga	Memudahkan warga mencetak surat layanan secara mandiri, kapan pun dan di mana pun, tanpa perlu menunggu lama di kantor kelurahan atau kecamatan.		Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
177	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Peningkatan Partipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dibidang partisipasi masyarakat	Kegiatan ini menghasilkan meningkatnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, tersusunnya program yang responsif terhadap kebutuhan warga, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Rp817.438.390,00	Rp823.833.136,00	Rp981.848.968,00	Rp1.050.624.813,00	Rp1.063.257.959,00	Bagian Tata Pemerintahan

[illegible]

201	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Resmi Kecamatan Gajahmungkur / Website Resmi Kecamatan Gajahmungkur (https://kecgajahmungkur.semarangkota.go.id/)	Informasi administrasi dan layanan publik di Kecamatan Gajahmungkur.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kecamatan Gajahmungkur
202	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian / Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (http://silik.semarangkota.go.id/index.php/login)	Layanan administrasi kepegawaian; promosi, dan dokumen kepegawaian.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
203	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Kantor Diklat / Website Kantor Diklat (http://diklat.semarangkota.go.id/)	Informasi program diklat dan pelatihan pegawai; pendaftaran dan modul pelatihan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
204	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Resmi Kecamatan Semarang Timur / Website Resmi Kecamatan Semarang Timur (https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id/)	Informasi layanan dan layanan publik Kecamatan Semarang Timur.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kecamatan Semarang Timur
205	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Resmi Kecamatan Ngaliyan / Website Resmi Kecamatan Ngaliyan (https://kecnngaliyan.semarangkota.go.id/)	Informasi layanan dan kontak publik Kecamatan Ngaliyan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan
206	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Resmi Kecamatan Semarang Utara / Web Site Resmi Kecamatan Semarang Utara (http://kecsmgutara.semarangkota.go.id/)	Informasi layanan dan pengumuman Kecamatan Semarang Utara.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kecamatan Semarang Utara
207	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Satpol PP / Website Satpol PP (http://satpolpp.semarangkota.go.id/)	Informasi tugas penegakan perda, patroli, dan layanan Satpol PP.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
208	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Aplikasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) (http://apppengangunan.semarangkota.go.id)	Manajemen proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
209	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Agenda Kegiatan dan Surat pada BPKAD / Agenda Kegiatan dan Surat pada BPKAD (https://agendabpkad.semarangkota.go.id/)	Manajemen agenda dan surat pada BPKAD; koordinasi administrasi keuangan daerah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
210	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SI-SIAP POLPP Sistem Informasi Terpadu Sekretariat PPNS / Sistem Informasi Terpadu Sekretariat PPNS (https://sisiap-polpp.semarangkota.go.id/)	Sistem informasi terpadu sekretariat PPNS dan Pol PP untuk administrasi tugas penegakan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
211	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Saberpungli Satgas Sapu Bersih Pungli / Website Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (https://saberpungli.semarangkota.go.id/)	Publikasi dan laporan pungli; mekanisme pengaduan dan transparansi penindakan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

224	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Buku Tamu Inspektorat / <i>Website</i> Buku Tamu Inspektorat (https://bukutamukeg.semarangkota.go.id/)	Buku Tamu Inspektorat	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	INSPEKTORAT
225	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Layanan Diskominfo Kota Semarang / Aplikasi Layanan Diskominfo Kota Semarang (layanandiskominfo.semarangkota.go.id)	Portal layanan digital Diskominfo (permintaan jaringan, <i>domain</i> , <i>email</i> , dan layanan TIK lain) untuk OPD dan masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
226	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> resmi disnaker kota semarang / <i>website</i> resmi disnaker kota semarang (disnaker.semarangkota.go.id)	Media informasi Resmi Dinas Tenaga Kerja	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
227	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Penilaian Angka Kredit Guru / Aplikasi Penilaian Angka Kredit Guru (https://pakguru.semarangkota.go.id/login)	Aplikasi untuk pengajuan dan penilaian angka kredit guru secara <i>online</i> ; mempermudah proses karier dan kepangkatan guru.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
228	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> <i>Opendata</i> Kota Semarang / <i>Website</i> <i>Opendata</i> Kota Semarang (https://opendata.semarangkota.go.id)	Portal data terbuka; menyediakan akses publik terhadap data pemerintah kota untuk transparansi dan inovasi.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
229	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> informasi geospasial kota semarang / <i>website</i> informasi geospasial kota semarang (https://dataspasial.semarangkota.go.id/)	Sistem informasi geospasial kota; menyediakan peta tematik dan data spasial untuk perencanaan pembangunan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
230	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Monevaga Kota Semarang / Aplikasi Monevaga Kota Semarang (https://monevaga.semarangkota.go.id/app/login)	<i>Monitoring</i> dan evaluasi anggaran pemerintah secara digital untuk transparansi.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
231	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> penyedia berita kota semarang / <i>website</i> penyedia berita kota semarang (berita.semarangkota.go.id)	Kanal berita resmi pemerintah kota sebagai sumber informasi publik.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
232	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jelita <i>Website</i> Jendela Inovasi Kota Semarang / <i>Website</i> Jendela Inovasi Kota Semarang (https://jelita.semarangkota.go.id/)	Menyediakan informasi, publikasi, dan dokumentasi inovasi daerah Kota Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
233	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Portal <i>Smart City</i> Kota Semarang / Portal <i>Smart City</i> Kota Semarang (https://smartcity.semarangkota.go.id/)	Portal utama implementasi <i>Smart City</i> yang memuat program, data, dan layanan digital.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
234	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Informasi Kegiatan Diskominfo Kota Semarang / Informasi Kegiatan Diskominfo Kota Semarang (https://infokegiatankominfo.semarangkota.go.id/infokegiatan_v3/)	Menyediakan jadwal, laporan, dan dokumentasi kegiatan Diskominfo Kota Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
235	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Informasi Kegiatan Disperkim Kota Semarang / Informasi Kegiatan Disperkim Kota Semarang (https://infokegiatanandispermim.semarangkota.go.id/)	Informasi kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

236	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Resmi Kecamatan Genuk / <i>Website</i> Resmi Kecamatan Genuk (https://kecgenuk.semarangkota.go.id/)	Informasi layanan administrasi dan kegiatan di Kecamatan Genuk.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	KECAMATAN GENUK
237	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Unit Pengendali Gratifikasi / <i>Website</i> Unit Pengendali Gratifikasi (https://gratifikasi.semarangkota.go.id/)	Sarana pelaporan gratifikasi ASN untuk mendukung tata kelola pemerintahan bersih.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	INSPEKTORAT
238	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah / sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-sakip.semarangkota.go.id)	Website Pengukuran kinerja OPD sesuai target RPJMD dan akuntabilitas pemerintah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
239	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Inspektorat Kota Semarang / <i>Website</i> Inspektorat (https://inspektorat.semarangkota.go.id/)	Informasi Program, Layanan, Kegiatan Inspektorat	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	INSPEKTORAT
240	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi eLING (Elektronik Legal Drafting) / Aplikasi eLING (Elektronik Legal Drafting) (eling.semarangkota.go.id)	Penyusunan rancangan peraturan daerah/perkada secara elektronik.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN HUKUM
241	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> E-Kontrak Kota Semarang / <i>Website</i> E-Kontrak Kota Semarang (ekontrak.semarangkota.go.id)	Pengelolaan kontrak secara digital untuk meningkatkan transparansi proyek pemerintah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
242	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Layanan <i>Helpdesk</i> Diskominfo Kota Semarang / Layanan <i>Helpdesk</i> Diskominfo Kota Semarang (https://helpdesk.semarangkota.go.id/)	memudahkan masyarakat dan perangkat daerah menyampaikan aduan atau permintaan layanan terkait teknologi informasi.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
243	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> bagian pengadaan barang dan jasa / <i>website</i> bagian pengadaan barang dan jasa (balapanbaja.semarangkota.go.id)	mempublikasikan informasi pengadaan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
244	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> pemantauan kinerja pemerintah semarang / <i>website</i> pemantauan kinerja pemerintah semarang (eksekutif.semarangkota.go.id)	menampilkan capaian kinerja perangkat daerah agar mudah dipantau	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	SEKDA
245	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> resmi pemerintah kota semarang / <i>website</i> resmi pemerintah kota semarang (semarangkota.go.id)	portal utama informasi, layanan publik, dan berita resmi pemerintah kota.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
246	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Bagian Tata Pemerintahan / <i>Website</i> Bagian Tata Pemerintahan (https://tapem.semarangkota.go.id/)	menyajikan informasi tugas, fungsi, dan layanan Bagian Tata Pemerintahan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
247	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pencatatan Insiden SMKI / Aplikasi Pencatatan Insiden Keamanan Informasi (https://smki.semarangkota.go.id/)	mendokumentasikan dan memantau insiden keamanan informasi untuk meningkatkan perlindungan data pemerintah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

260	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website LPSE Kota Semarang / Website LPSE Kota Semarang (https://lpse.semarangkota.go.id/eproc4)	Memberikan akses bagi penyedia barang/jasa untuk mengikuti proses lelang pengadaan pemerintah secara <i>online</i> , transparan, dan akuntabel.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
261	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	sistem informasi amanat walikota / sistem informasi amanat walikota (https://siawal.semarangkota.go.id/)	Menyediakan akses publik terhadap amanat, instruksi, dan kebijakan Walikota secara <i>online</i> sehingga lebih transparan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
262	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	website layanan penyidikan tindak pidana / website layanan penyidikan tindak pidana (https://reskrimsus.semarangkota.go.id/)	Menjadi kanal resmi untuk layanan penyidikan kasus tindak pidana tertentu, memudahkan pelaporan dan transparansi proses hukum.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
263	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Resmi Bagian Administrasi Pembangunan / Website Resmi Bagian Administrasi Pembangunan (bagpembangunan.semarangkota.go.id)	Menyajikan informasi program dan progres pembangunan kota, sehingga masyarakat bisa memantau pelaksanaan proyek pemerintah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
264	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Resmi Kecamatan Pedurungan / Website Resmi Kecamatan Pedurungan (https://kecpedurungan.semarangkota.go.id/)	Menyediakan informasi layanan, berita, dan pengumuman resmi untuk warga Kecamatan Pedurungan secara <i>online</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	KECAMATAN PEDURUNGAN
265	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi <i>Monitoring</i> Anggaran Bulanan / Aplikasi <i>Monitoring</i> Anggaran Bulanan (https://monevkominfo.semarangkota.go.id/)	Memudahkan pengguna memantau realisasi anggaran bulanan secara <i>online</i> , sehingga lebih transparan dan akuntabel.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
266	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Cloud Storage Kota Semarang / Cloud Storage Kota Semarang (cloudstorage.semarangkota.go.id)	Menyediakan penyimpanan data/dokumen digital yang aman dan terpusat, sehingga pengguna bisa mengakses dan berbagi dokumen lebih efisien.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
267	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Manajemen Inovasi Kota Semarang / Aplikasi Manajemen Inovasi Kota Semarang (https://ami.semarangkota.go.id/)	Menjadi wadah untuk mengelola, mendokumentasikan, dan memantau inovasi pelayanan publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui ide/inovasi baru yang diterapkan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
268	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Informasi Kegiatan Bappeda / Informasi Kegiatan Bappeda (https://agendabappeda.semarangkota.go.id/)	Menyajikan jadwal dan agenda resmi perencanaan pembangunan, memudahkan masyarakat dan <i>stakeholder</i> mengikuti kegiatan Bappeda.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
269	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	S'Denok / Aplikasi Dokumentasi Kependudukan <i>Online</i> (https://sidnok.semarangkota.go.id/)	Aplikasi dokumentasi kependudukan <i>online</i> untuk mempermudah masyarakat mengakses dokumen administrasi kependudukan dengan lebih cepat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
270	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Web Site Resmi Kecamatan Gunungpati / Web Site Resmi Kecamatan Gunungpati (http://kecgunungpati.semarangkota.go.id/)	Website Resmi Kecamatan Gunungpati bermanfaat sebagai sarana informasi, layanan publik, dan komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses data, program, serta kegiatan pemerintahan di Kecamatan Gunungpati.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGPATI
271	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Buku Tamu <i>On Line</i> PIP / Aplikasi Buku Tamu <i>On Line</i> PIP (http://bukutamu.semarangkota.go.id/)	Aplikasi Buku Tamu <i>Online</i> PIP Kota Semarang bermanfaat untuk memudahkan pencatatan dan <i>monitoring</i> data kunjungan secara digital sehingga lebih praktis, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

272	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pelaporan / Aplikasi Pelaporan (http://pelaporan.semarangkota.go.id/)	Aplikasi Pelaporan Kota Semarang bermanfaat untuk memfasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan perangkat daerah secara digital sehingga lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
273	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website Bappeda</i> / <i>Website Bappeda</i> (http://bappeda.semarangkota.go.id/)	<i>Website</i> Bappeda Kota Semarang bermanfaat sebagai media informasi, publikasi, dan layanan data perencanaan pembangunan daerah yang mendukung transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
274	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Tracking Media</i> / <i>Tracking Media</i> (http://www.trackingmedia.semarangkota.go.id)	<i>Tracking Media</i> Kota Semarang bermanfaat untuk memantau, merekap, dan menganalisis pemberitaan media secara cepat dan akurat sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan pemerintah daerah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
275	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website Resmi</i> Kecamatan Banyumanik / <i>Website Resmi</i> Kecamatan Banyumanik (http://kecbanyumanik.semarangkota.go.id/)	<i>Website Resmi</i> Kecamatan Banyumanik bermanfaat sebagai sarana informasi, layanan publik, dan komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses data, program, serta kegiatan pemerintahan di Kecamatan Banyumanik.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	KECAMATAN BANYUMANIK
276	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Agenda Walikota Semarang / Agenda Walikota Semarang (http://agendawalikota.semarangkota.go.id)	Agenda Walikota Semarang bermanfaat sebagai media informasi resmi yang menyajikan jadwal kegiatan Walikota secara transparan, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
277	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi / Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (https://like-rb.semarangkota.go.id/)	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Semarang bermanfaat untuk memudahkan proses evaluasi, <i>monitoring</i> , dan pelaporan kinerja reformasi birokrasi secara terukur, transparan, dan akuntabel.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
278	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Web Monitoring</i> Kota Semarang / <i>Web Monitoring</i> Kota Semarang (https://mondisk.semarangkota.go.id/v2/)	<i>Web Monitoring</i> Kota Semarang bermanfaat untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah secara transparan, <i>real-time</i> , dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
279	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Diskominfo Kota Semarang / <i>Website</i> Diskominfo Kota Semarang (https://diskominfo.semarangkota.go.id/)	<i>Website</i> Diskominfo Kota Semarang bermanfaat sebagai sarana informasi, publikasi, dan layanan komunikasi publik yang mendukung transparansi serta kemudahan akses layanan bidang informatika bagi masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
280	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Dinas Perdagangan / <i>Website</i> Dinas Perdagangan (https://disperdag.semarangkota.go.id/)	<i>Website</i> Dinas Perdagangan Kota Semarang bermanfaat sebagai media informasi dan layanan publik yang mendukung transparansi, promosi, serta kemudahan akses data dan program di bidang perdagangan bagi masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
281	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pendaftaran <i>Online</i> RSUD Kota Semarang / Aplikasi Pendaftaran <i>Online</i> RSUD Kota Semarang (http://online.rsud.semarangkota.go.id/)	Memudahkan pasien mendaftar rawat jalan secara <i>online</i> , mengurangi antrean dan mempercepat layanan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
282	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIPP Nakes DKK Semarang / SIPP Nakes DKK Semarang (http://dinkes.semarangkota.go.id/sipp-nakes/)	Memfasilitasi tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan/registrasi praktik secara digital sehingga lebih cepat dan transparan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
283	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	HRIS DKK Semarang / HRIS DKK Semarang (http://dinkes.semarangkota.go.id/hris/)	Memberikan akses bagi pegawai kesehatan untuk mengelola data kepegawaian, absensi, kinerja, dan administrasi SDM secara online.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

284	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Distaru / Website Resmi Distaru (https://distaru.semarangkota.go.id/v2/)	Menyediakan informasi tata ruang dan perizinan bangunan, sehingga warga bisa mengakses data rencana tata kota dengan mudah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENATAAN RUANG
285	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pembayaran PBB Semarang / Aplikasi Pembayaran PBB (https://e-pbb.semarangkota.go.id)	Memudahkan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara <i>online</i> , praktis tanpa harus ke loket.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
286	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Web Site Resmi Kecamatan Tembalang / Web Site Resmi Kecamatan Tembalang (http://kectembalang.semarangkota.go.id/)	Menyediakan informasi layanan administrasi dan berita resmi kecamatan untuk warga Tembalang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	KECAMATAN TEMBALANG
287	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi e-Kin / Aplikasi e-Kin (http://e-kin.semarangkota.go.id/v2/public/auth/login)	Memberikan sarana <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja aparatur secara digital, sehingga kinerja lebih transparan dan terukur.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
288	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Perijinan DPM-PTSP / Perijinan DPM-PTSP (https://izin.semarangkota.go.id:7999/index.php?r=site%2Fberanda)	Memberi sarana pengajuan berbagai perizinan usaha/layanan secara <i>online</i> , sehingga lebih cepat dan transparan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
289	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Tracking Perijinan DPM-PTSP / Tracking Perijinan DPM-PTSP (https://izin.semarangkota.go.id/tracking)	Memungkinkan pemohon melacak status perizinan yang diajukan secara <i>real time</i> tanpa harus datang langsung.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
290	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pajak Penghasilan Online / Aplikasi Pajak Penghasilan Online (http://sptpd.semarangkota.go.id/)	Mempermudah wajib pajak dalam pelaporan & pembayaran pajak penghasilan secara daring, sehingga lebih praktis dan akuntabel.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
291	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Monev Kota Semarang / Aplikasi Monev (http://monev.semarangkota.go.id/)	Memudahkan masyarakat dan pihak terkait memantau realisasi kegiatan dan anggaran pembangunan kota secara transparan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
292	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website BPKAD Semarang / Website BPKAD (http://bpkad.semarangkota.go.id/)	Menyediakan informasi anggaran, laporan keuangan, dan kebijakan pengelolaan aset/kas daerah sehingga masyarakat bisa mengakses data fiskal dengan mudah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
293	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Web KRK On Line / Aplikasi Web KRK On Line (https://distaru.semarangkota.go.id/pemohon)	Mempermudah warga mengajukan dan mengecek Keterangan Rencana Kota (peruntukan lahan/bangunan) tanpa harus datang ke kantor.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENATAAN RUANG
294	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Webmail Kota Semarang / Webmail Kota Semarang (https://webmail.semarangkota.go.id/)	Fasilitas email resmi untuk komunikasi internal dan eksternal aparatur pemerintah kota secara lebih profesional dan aman.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
295	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Dinas Perikanan Kota Semarang / Website Dinas Perikanan Kota Semarang (https://perikanan.semarangkota.go.id/)	Menyajikan informasi program perikanan, pembinaan nelayan & budidaya, serta layanan terkait perizinan dan potensi sektor perikanan di Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

296	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Web Site</i> Resmi Kecamatan Semarang Selatan / <i>Web Site</i> Resmi Kecamatan Semarang Selatan (http://kecsmsgselatan.semarangkota.go.id/)	portal informasi resmi bagi warga, seperti berita kecamatan, pelayanan publik, jadwal kegiatan, hingga pengumuman penting.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
297	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> E-BUMD Kota Semarang / <i>Website</i> E-BUMD Kota Semarang (https://bumd.semarangkota.go.id/)	menyediakan informasi kinerja, layanan, dan profil BUMD secara transparan kepada masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	
298	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	sistem informasi pengajuan gelar pns kota semarang / sistem informasi pengajuan gelar pns kota semarang (sigelar.semarangkota.go.id)	mempermudah proses administrasi pengajuan gelar bagi ASN secara online dan terintegrasi.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
299	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pemandu Kantor Pemerintahan Kota Semarang / Aplikasi Pemandu Kantor Pemerintahan Kota Semarang (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukir.pemkot.kantorpemerintah)	Memudahkan pengunjung menemukan lokasi kantor pemerintahan, lengkap dengan peta & petunjuk arah, tanpa perlu bertanya langsung.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
300	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi e-reporting Kota Semarang / Aplikasi e-reporting Kota Semarang (http://e-reporting.semarangkota.go.id/)	Memberikan sarana bagi OPD/lembaga melaporkan kegiatan/anggaran secara digital, sehingga laporan bisa dipantau pengguna (masyarakat) dengan lebih transparan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
301	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Data Induk Pegawai / Data Induk Pegawai (<i>offline akses</i>)	Basis data pegawai yang terpusat untuk keperluan manajemen SDM.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
302	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi KP dan KGB / Aplikasi KP dan KGB (<i>offline akses</i>)	Mengelola kenaikan pangkat (KP) dan kenaikan gaji berkala (KGB) secara lebih cepat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
303	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIM Cetak Ijin / SIM Cetak Ijin (<i>offline akses</i>)	Fasilitasi pencetakan perizinan secara digital.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
304	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIPP Nakes DKK Semarang ((https://dinkes.semarangkota.go.id/sip-nakes/login))	Sistem administrasi tenaga kesehatan (pendaftaran, izin, data nakes).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
305	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aduan CSIRT ((https://aduan.csirt.semarangkota.go.id/))	Kanal aduan insiden keamanan siber pada sistem/aplikasi Pemkot.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
306	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Sistem Informasi Layanan Kota Semarang (https://silintas.semarangkota.go.id/)	Portal layanan publik kota, akses layanan dan informasi masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

307	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Fasilitasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) bagi pedagang dengan metode jemput bola	Para pedagang yang memiliki komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) mendapatkan rekomendasi perizinan keamanan PSAT	Rp100.000.000,00	Rp215.754.904,00	Rp280.481.376,00	Rp364.625.788,00	Rp474.013.525,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
308	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Data statistik sektoral Dinas Perikanan	Mempermudah pengumpulan data, <i>monitoring</i> , dan evaluasi mengenai data statistik sektoral Dinas Perikanan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Perikanan
309	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan dan Perbaikan Instalasi CCTV	Menatau aktivitas kinerja pompa banjir banjir. -mengawasi area rumah pompa - memantau sampah dan enceng gondok di sungai	Rp239.401.408,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
310	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja makan minum jamuan tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp65.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
311	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Maintenance Web</i> Sang Juara	Sebagai data dan digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik tahun berkenaan	Rp595.720.806,00	Rp250.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp500.000.000,00	Dinas Pendidikan
312	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk BLC	Sebagai sarana pembelajaran dan penggunaan IT yang dipusatkan di tiap Kecamatan dan di Dinas Pendidikan	Rp454.039.716,00	Rp750.000.000,00	Rp4.687.500.000,00	Rp4.687.500.000,00	Rp1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan
313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.Menyediakan kanal/portal secara daily 2.Menerima informasi ATS /APS dari masyarakat 3.Menindaklanjuti laporan dari masyarakat dengan menyalurkan ATS/APS kesatuan pendidikan	Menjaring data anak putus sekolah dan penanganannya	Rp60.600.000,00	Rp60.100.000,00	Rp65.000.000,00	Rp65.000.000,00	Rp65.000.000,00	Dinas Pendidikan
314	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pendampingan untuk peserta didik dan guru	Membantu peserta didik, guru dan tenaga kependidikan yang mengalami bullying dan kekerasan di sekolah	Rp327.321.500,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Dinas Pendidikan

315	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 2. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 4. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 5. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 6. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 7. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1. Penyusunan pembelajaran dan penyajian bahan ajar bagi peserta didik 2. Pengatur dan pengisian instrumen penilaian bagi peserta didik 3. penyajian rapor hasil pembelajaran	Platform pendidikan yang memudahkan pihak sekolah, khususnya guru dalam membuat laporan mengenai kegiatan mengajar di sekolah. <i>Report</i> Nilai, <i>Report</i> Absensi, dan berbagai kebutuhan <i>reporting</i> lainnya bisa dengan mudah diolah. Program kerjasama dengan PT Telkom	Rp121.798.620,00	Rp687.945.401,00	Rp700.200.000,00	Rp722.200.960,00	Rp723.019.749,00	Dinas Pendidikan
316	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembuatan Jurnal Pendidikan yang berasal dari karya ilmiah guru yang mendukung pembelajaran dan pendidikan di Kota Semarang	Jurnal Karya Ilmiah Guru Kota Semarang	Rp65.529.015.687,00	Rp71.233.087.227,00	Rp78.769.236.212,00	Rp82.049.319.034,00	Rp82.651.823.640,00	Dinas Pendidikan
317	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pemanfaatan aplikasi game untuk bahasa inggris 1.kompetensi siswa 2.kompetensi guru 3.kompetensi sekolah	Kegiatan pembelajaran bahasa inggris yang mudah menyenangkan komprehensif dengan memanfaatkan aplikasi <i>game "down of civilization"</i>	Rp382.002.970,00	Rp575.000.000,00	Rp575.000.000,00	Rp575.000.000,00	Rp575.000.000,00	Dinas Pendidikan
318	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1. Pendampingan BOS SD/MI Swasta 2. Pendampingan BOS SMP/MTs Swasta 3. Pendampingan BOP TK Swasta	Membantu biaya operasional sekolah sehingga dapat membantu meringankan dan/atau membebaskan pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada orang tua, wali murid/siswa dan/atau masyarakat lainnya	Rp35.505.300.000,00	Rp38.872.200.000,00	Rp38.872.200.000,00	Rp38.872.200.000,00	Rp38.872.200.000,00	Dinas Pendidikan
319	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Tenaga Administrasi	Mendukung kelancaran pelayanan administrasi sekolah agar lebih tertib dan efisien.	Rp2.970.968.000,00					Dinas Pendidikan

320	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang dalam 3D	mendukung perencanaan tata ruang kota yang lebih akurat, mempermudah visualisasi rencana pembangunan, dan meningkatkan transparansi.	Rp1.070.000.000,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
321	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Geospasial Digital Support System</i>	integrasi data spasial untuk pengambilan keputusan, mempermudah analisis wilayah, dan mendukung kebijakan berbasis data.	Rp1.070.000.000,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Jumlah Smart Governance						Rp335.910.406.685,20	Rp542.354.085.391,95	Rp629.378.156.274,99	Rp641.798.868.907,26	Rp639.678.866.114,27	

ROAD MAP IMPLEMENTASI SMART CITY SEMARANG Tahun 2025 S/d 2029

SMART ECONOMY

NO	RENCANA KEGIATAN DI TAHUN										OPD
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output/ Manfaat	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Kajian Pemetaan dan Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekosistem UMKM Kota Semarang 2026–2030	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Roadmap Kota Semarang sebagai Kota Kreatif dan Destinasi Budaya 2026–2030	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Penguatan Kapasitas Ekspor di Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rencana Aksi Daerah (RAD) Transformasi Digital UMKM dan Koperasi Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Strategi Pengembangan Ekowisata dan Wisata Tematik sebagai Daya Ungkit Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
7	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Tabel <i>Input Output</i> Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah				Rp100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kajian Strategis Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kreatif Kota Semarang Berbasis Klaster Inovasi Lokal	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah				Rp100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

9	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Strategi Peningkatan Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah Kota dalam Mendorong Investasi Sektor Ekonomi Lokal	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah				Rp100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
10	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Roadmap</i> Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
11	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Optimalisasi Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dalam Perencanaan Ekonomi Makro	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
12	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Strategi Pemulihan dan Adaptasi Ekonomi Lokal Pascabencana dan Krisis melalui Pendekatan Ketangguhan Komunitas	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
13	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Peningkatan Investasi Kota Semarang melalui Perencanaan Ekonomi Makro Terintegrasi	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pembangunan perekonomian daerah						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
14	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rencana Integrasi Distribusi Komoditas Bahan Pokok Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
15	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rencana Aksi Ekonomi Hijau Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam				Rp100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
16	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Potensi Ekonomi Sektor Perikanan Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam				Rp100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
17	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan Aplikasi e-sumpah	Dikembangkan dalam fitur di menu e-sumpah memberikan berbagai manfaat bagi wajib pajak, khususnya dalam hal pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), antara lain: 1. Efisiensi waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke kantor serta mengurangi biaya transportasi dan waktu tunggu 2. Memberikan kemudahan akses layanan sehingga proses pengajuan dan pelaporan menjadi lebih cepat dan mudah 3. Dokumentasi digital	Rp222.278.610,00	Rp222.278.610,00	Rp300.000.000,00	Rp330.000.000,00	Rp300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

18	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan E-SPPT PBB	Aplikasi e-SPPT PBB memudahkan wajib pajak mengakses SPPT secara <i>online</i> , menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi tatap muka. Layanan ini juga lebih transparan, aman, ramah lingkungan, dan mendorong kepatuhan pajak masyarakat.						
19	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan Website Bapenda Kota Semarang	Pengembangan <i>website</i> Bapenda Kota Semarang memberikan berbagai manfaat, antara lain memudahkan masyarakat mengakses informasi pajak daerah secara cepat dan transparan. Selain itu, <i>website</i> ini mendukung transformasi digital layanan publik di Kota Semarang.						
20	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan Aplikasi "Hebat!"	Aplikasi <i>one stop service</i> pelayanan pajak daerah Kota Semarang berbasis <i>Mobile App</i> digunakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk registrasi, informasi, dan pembayaran pajak daerah.						
21	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengembangan Dashboard <i>Realtime</i> Pendapatan	Dashboard <i>real-time</i> pendapatan memberikan kemudahan dalam memantau penerimaan pajak dan retribusi daerah secara langsung, akurat, dan transparan. Dengan data yang selalu <i>ter-update</i> , pemerintah daerah dapat mengambil keputusan cepat, mengevaluasi kinerja pajak secara dinamis, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.	Rp3.083.008.160,00	Rp443.008.160,00	Rp787.308.976,00	Rp1.166.039.874,00	Rp1.200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
22	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peningkatan Informasi Teknologi <i>Updating</i> Peta	Peningkatan bermanfaat untuk memutakhirkan data objek pajak secara lebih akurat dan cepat, meminimalkan potensi kebocoran pajak, meningkatkan transparansi, serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah.						
23	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Call Center</i> Pajak Daerah	<i>Call center</i> memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan keluhan terkait pajak daerah secara cepat dan efektif.	Rp3.965.434.745,00	Rp3.234.602.496,00	Rp3.858.062.746,00	Rp4.243.869.020,00	Rp4.243.869.020,00	Badan Pendapatan Daerah
24	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Mobil Layanan Pajak Daerah	Mobil Layanan Pajak Daerah bermanfaat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana pembayaran pajak yang mudah diakses tanpa harus datang ke kantor. Kehadiran mobil ini membantu menghemat waktu dan biaya, sekaligus menjadi media sosialisasi aturan dan inovasi pajak.						Badan Pendapatan Daerah
25	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	IJOLKE	Program IJOLKE (Rejeki Jajan Dolan ning Kota Semarang) bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas pajak daerah melalui pengumpulan struk belanja sebagai bukti transaksi resmi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, IJOLKE mendorong kepatuhan wajib pajak, memperkuat transparansi, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						Badan Pendapatan Daerah
26	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dukungan Pemasangan/Instalasi Alat Rekam Pajak Daerah (E-Tax)	Pemasangan alat rekam pajak meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak dari pelaku usaha secara <i>real-time</i> . Hal ini memudahkan pemerintah daerah dalam memantau dan mengelola penerimaan pajak, sekaligus mengurangi risiko kebocoran dan penghindaran pajak.	Rp181.965.786,00	Rp181.965.786,00	Rp400.162.365,00	Rp640.178.601,00	Rp704.196.461,00	Badan Pendapatan Daerah
27	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0015 Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Perluasan kanal pembayaran (QRIS) yang didukung dengan <i>billing center</i>	Perluasan kanal pembayaran menggunakan QRIS yang terintegrasi dengan <i>Billing Center</i> memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara cepat, aman, dan fleksibel. Sistem ini mendukung transaksi non-tunai melalui berbagai platform digital, mengurangi antrean, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan daerah.		Rp135.908.979,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
28	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0015 Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Pengembangan Aplikasi e-retribusi	Pengembangan aplikasi e-Retribusi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi secara digital, cepat, dan transparan. Aplikasi ini mendukung transaksi non-tunai, mencatat pembayaran secara otomatis, serta meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas penerimaan daerah.						
29	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	Optimalnya transaksi non tunai dan pembayaran digital di Kota Semarang	Rp8.500.000,00	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	BPKAD

30	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kajian terkait Ekonomi, Perindustrian, dan Perdagangan	Sebagai bahan dasar dalam penentuan kebijakan terkait Ekonomi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp1.580.000.000,00	Rp1.738.000.000,00	Rp1.911.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp2.200.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
31	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- <i>Cooking Class</i> - Lomba - Lomba - Rakor Permasalahan Sosial - Monev Permasalahan Sosial	Menumbuhkan Wirausaha baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	Rp140.300.000,00					Kecamatan Semarang Utara
32	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- <i>Cooking Class</i> - Lomba - Lomba - Monev Permasalahan Sosial - Rakor Permasalahan Sosial - Pelatihan Kewirausahaan	Menumbuhkan Wirausaha baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi loka		Rp150.000.000,00				Kecamatan Semarang Utara
33	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- <i>Cooking Class</i> - Lomba - Lomba - Monev Permasalahan Sosial - Rakor Permasalahan Sosial - Pelatihan Kewirausahaan - Pelatihan Promosi UMKM melalui Media masa	200 UMKM aktif <i>online</i> ; omzet naik rata-rata 20%			Rp200.000.000,00			Kecamatan Semarang Utara
34	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- <i>Cooking Class</i> - Lomba - Lomba - Monev Permasalahan Sosial - Rakor Permasalahan Sosial - Pelatihan Kewirausahaan - Pelatihan Promosi UMKM melalui Media masa - Festival UMKM Tahunan	Melibatkan 100 UMKM di wilayah Kecamatan Semarang Utara				Rp250.000.000,00		Kecamatan Semarang Utara
35	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- <i>Cooking Class</i> - Lomba - Lomba - Monev Permasalahan Sosial - Rakor Permasalahan Sosial - Pelatihan Kewirausahaan - Pelatihan Promosi UMKM melalui Media masa - Pelatihan Packaging yang dapat menarik pelanggan -Festival UMKM Tahunan	200 UMKM aktif; meningkatkan produk lokal meningkat					Rp300.000.000,00	Kecamatan Semarang Utara
36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	- Bazar UMKM - <i>Cooking Class</i> - Pelatihan UMKM	Menciptakan ekosistem ekonomi kreatif dan digital yang lebih berkelanjutan	Rp179.142.858,00	Rp179.142.858,00	Rp179.142.858,00	Rp179.142.858,00	Rp179.142.858,00	Kecamatan Semarang Tengah
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	- Bazar UMKM - <i>Cooking Class</i> - Pelatihan UMKM	Menciptakan ekosistem ekonomi kreatif dan digital yang lebih berkelanjutan	Rp334.000.000,00	Rp334.334.000,00	Rp334.668.000,00	Rp335.000.000,00	Rp335.338.000,00	Kecamatan Semarang Barat
38	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Kegiatan <i>Cooking class</i> dan Bazar UMKM	meningkatkan ekonomi kreatif dengan mempromosikan produk lokal dan UMKM	Rp125.000.000,00	Rp136.000.000,00	Rp137.000.000,00	Rp138.000.000,00	Rp139.000.000,00	Kecamatan Semarang Selatan
39	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bazaar UMKM	menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik di level lokal maupun nasional memperkuat usaha mikro serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Kecamatan Gajahmungkur

40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Skill bagi pelaku UMKM di wilayah	Penguatan ekonomi lokal melalui fasilitasi pengembangan UMKM, peningkatan daya saing, dan perluasan pasar.	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Kecamatan Gajahmungkur
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Kegiatan Bazar UMKM, Kegiatan <i>cooking class</i> , Kegiatan lomba kreativitas	Terbentuk ekosistem ekonomi kreatif & digital yang lebih berkelanjutan	Rp125.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp305.000.000,00	Rp310.000.000,00	Rp315.000.000,00	Kecamatan Candisari
42	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bazaar UMKM	menggerakkan pertumbuhan ekonomi baik level lokal maupun nasional	Rp27.599.400,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Kecamatan Genuk
43	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan skill bagi pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Genuk	Penguatan ekonomi lokal melalui fasilitasi pengembangan UMKM peningkatan daya saing dan perluasan pasar	Rp125.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Kecamatan Genuk
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Skill bagi pelaku UMKM di wilayah	Penguatan ekonomi lokal melalui fasilitasi pengembangan UMKM, peningkatan daya saing, dan perluasan pasar.	Rp42.550.000,00	Rp44.377.767,00	Rp45.173.296,00	Rp45.319.423,00	Rp45.664.107,00	Kecamatan Pedurungan
45	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Bazaar UMKM <i>cooking class</i> pelatihan terkait UMKM	Terbentuk ekosistem ekonomi kreatif & digital yang lebih berkelanjutan		Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Bazaar UMKM <i>cooking class</i> pelatihan terkait UMKM Penyediaan Centra UMKM	Terbentuk ekosistem ekonomi kreatif & digital yang lebih berkelanjutan		Rp306.000.000,00	Rp336.600.000,00	Rp343.332.000,00	Rp343.332.000,00	Kecamatan Tembalang
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bazaar UMKM	Menggerakan pertumbuhan ekonomi baik di level lokal maupun nasional memperkuat usaha mikro serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	Kecamatan Banyumanik
48	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Skill bagi pelaku UMKM di Wilayah Kecamatan Banyumanik	Penguatan Ekonomi Lokal melalui fasilitasi Pengembangan UMKM. Peningkatan daya saing dan perluasan pasar	Rp117.575.888,00	Rp117.575.888,00	Rp117.575.888,00	Rp117.575.888,00	Rp117.575.888,00	Kecamatan Banyumanik
49	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bazaar UMKM <i>cooking class</i> pelatihan terkait UMKM	terbentuk ekosistem ekonomi kreatif & digital yang lebih berkelanjutan	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
50	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	umkm	Penguatan ekonomi lokal melalui fasilitasi pengembangan UMKM, peningkatan daya saing, dan perluasan pasar.		Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Kecamatan Mijen
51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan <i>Skill</i> bagi Pelaku UMKM di Wilayah	- Penguatan ekonomi lokal melalui fasilitasi pengembangan UMKM, peningkatan daya saing, dan perluasan pasar.	Rp29.786.600,00	Rp37.500.000,00	Rp39.375.000,00	Rp40.162.500,00	Rp40.162.500,00	Kecamatan Tugu
52	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Pendataan UMKM potensial - Sosialisasi manfaat digitalisasi - <i>Workshop</i> literasi digital dasar untuk UMKM	200 UMKM terdata dan 50 mengikuti pelatihan dasar	Rp50.000.000,00					Kecamatan Ngaliyan
53	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Pelatihan pembuatan akun <i>marketplace</i> - Pendampingan <i>upload</i> produk & foto katalog - Pelatihan pembayaran digital (QRIS, <i>e-wallet</i>)	100 UMKM aktif berjualan <i>online</i>		Rp150.000.000,00				

54	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- <i>Workshop</i> digital <i>marketing</i> & media sosial - Pembuatan "Ngaliyan <i>Smart</i> UMKM <i>Catalog</i> " <i>online</i> - Program promosi kolektif (subsidi iklan/ongkir)	200 UMKM aktif <i>online</i> ; omzet naik rata-rata 20%			Rp250.000.000,00			
55	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Pilot project Ngaliyan <i>Online</i> Store (marketplace lokal) - Kolaborasi dengan logistik lokal & koperasi - Integrasi <i>dashboard monitoring</i> UMKM	300 UMKM terdaftar di platform lokal				Rp300.000.000,00		
56	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- <i>Scale-up</i> UMKM digital ke pasar nasional/internasional - Inkubasi <i>startup</i> lokal berbasis UMKM - Festival UMKM Digital Ngaliyan tahunan	500 UMKM digital aktif; ekspor produk lokal meningkat						
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bazaar UMKM <i>cooking class</i> pelatihan terkait UMKM	terbentuk ekosistem ekonomi kreatif & digital yang lebih berkelanjutan	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00		
58	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan Upgrade Aplikasi https://sikepan.semarangkota.go.id/)	Mempercepat pengelolaan administrasi ketahanan pangan <i>online</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
59	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan Upgrade Aplikasi https://koperasi.semarangkota.go.id/dologin/)	Digitalisasi administrasi koperasi untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
60	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan Upgrade Aplikasi https://sidakocan.semarangkota.go.id/app_Login/)	Memberi kemudahan pemerintah dalam pemantauan serta koperasi dalam pelaporan. Sistem ini bermanfaat untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
61	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan Upgrade Aplikasi https://ninaonline.semarangkota.go.id/)	Layanan konsultasi untuk koperasi secara <i>online</i> di Kota Semarang	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
62	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	SIBARISTA	Memberikan edukasi pemasaran pariwisata, khususnya di tingkat desa wisata melalui pelatihan dan pendampingan kepada pengelola desa wisata	Rp129.550.000,00	Rp390.000.000,00	Rp395.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp405.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
63	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pembinaan Pokdarwis, Pembinaan Deswita, dan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif	Rp124.196.000,00	Rp213.416.548,00	Rp224.087.375,00	Rp235.291.742,00	Rp247.056.328,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

[illegible]

79	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi E-SPTPD Kota Semarang / Aplikasi E-SPTPD Kota Semarang (https://esptpd.semarangkota.go.id/)	Pelayanan pajak daerah <i>online</i> untuk wajib pajak; pelaporan dan pembayaran SPTPD.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
80	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website BPPT Semarang / Portal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (http://bppt.semarangkota.go.id)	Portal perizinan terpadu; informasi dan layanan izin usaha dan perizinan teknis.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
81	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Dinas Kelautan dan Perikanan / Website Dinas Kelautan dan Perikanan (http://kelautan.semarangkota.go.id)	Informasi program kelautan dan perikanan; layanan bagi nelayan dan pembudidaya.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
82	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Portal Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID / Portal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (https://tpid.semarangkota.go.id/)	Informasi kebijakan pengendalian inflasi daerah; data harga dan strategi stabilisasi.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
83	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Siumi Sistem Informasi Usaha Mikro / Sistem Informasi Usaha Mikro (https://siumi.semarangkota.go.id/)	<i>Database</i> dan layanan untuk usaha mikro; dukungan pengembangan usaha dan bantuan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
84	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Data Koperasi Primer di Kota Semarang / Data Koperasi Primer di Kota Semarang (https://koperasi.semarangkota.go.id/)	<i>Database</i> koperasi primer; <i>monitoring</i> kesehatan koperasi dan program pembinaan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
85	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Lumpangsemar Lumbung Pangan Kota Semarang / Website Lumbung Pangan Kota Semarang (https://lumpangsemar.semarangkota.go.id/)	Platform distribusi pangan pokok; mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan di Kota Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
86	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> dana bagi hasil cukai hasil tembakau / <i>website</i> dana bagi hasil cukai hasil tembakau (https://dbhcht.semarangkota.go.id/)	Portal transparansi penggunaan dana DBHCHT; menampilkan laporan alokasi dan pemanfaatan dana.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
87	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Informasi Kegiatan P3DN Kota Semarang / Informasi Kegiatan P3DN Kota Semarang (infokegiatanp3dn.semarangkota.go.id)	Publikasi agenda dan kegiatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
88	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website e-BPUM Diskopum Kota Semarang / Website e-BPUM Diskopum Kota Semarang (e-bpumdiskopum.semarangkota.go.id)	Informasi terkait BPUM Dinas Koperasi UKM Kota Semarang	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
89	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Data UMKM Pemerintah Kota Semarang / Website Data UMKM Pemerintah Kota Semarang (dataumkm.semarangkota.go.id)	memuat <i>database</i> pelaku UMKM sebagai sarana promosi, pendataan, dan pengembangan usaha.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
90	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> pengukur tingkat kesehatan koperasi / <i>website</i> pengukur tingkat kesehatan koperasi (sipon.penkeskop.semarangkota.go.id)	memudahkan <i>monitoring</i> kondisi koperasi agar sesuai standar kesehatan kelembagaan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

103	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi SIM PBB / Aplikasi SIM PBB (<i>offline akses</i>)	Memudahkan wajib pajak mengetahui data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menghitung, dan melacak kewajibannya.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
104	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SKRD / SKRD (<i>offline akses</i>)	Pengelolaan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
105	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIMBPHTB (Sistem Informasi BPHTB) / SIMBPHTB (Sistem Informasi BPHTB) (<i>offline akses</i>)	Sistem informasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
106	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIMKASDA (Sistem Informasi Kas Daerah) / SIMKASDA (Sistem Informasi Kas Daerah) (<i>offline akses</i>)	Pengelolaan kas daerah agar lebih transparan dan terkontrol.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
107	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIMPAD (Sistem Informasi Pajak Daerah) / SIMPAD (Sistem Informasi Pajak Daerah) (<i>offline akses</i>)	Sistem informasi pengelolaan pajak daerah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
108	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	CUAN (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kominfo.aplikasi_cuan)	CUAN (Catat Untung Akuntansi dan Neraca) adalah solusi aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat kecil dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
109	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Hitung Pesangon (https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.samarangkota.disnaker.hitungpesangon)	Kalkulator untuk menghitung hak pesangon pekerja sesuai aturan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
110	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan pasar pangan murah yang melibatkan stakeholder dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di Kota Semarang untuk mencapai kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi. Tujuan : mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang.	Tercapainya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Rp174.147.370,00	Rp100.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp169.000.000,00	Rp2.197.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

111	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Penyelenggaraan pasar pangan murah pada <i>event</i> tertentu (PAK RAHMAN), maupun secara berkala (KEMPLING SEMAR) yang berkeliling sampai tingkat Kelurahan di Kota Semarang. Tujuan : mempermudah akses pangan murah hingga tingkat wilayah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang.	Tercapainya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Rp750.479.500,00	Rp975.623.350,00	Rp1.268.310.355,00	Rp1.648.803.462,00	Rp2.143.444.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
112	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analissi Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pendataan Sentra IKM yang ada di Kota Semarang yang membantu Pengembangan Aplikasi dataindustri.semarangkot a.go.id	Memiliki data Sentra IKM yang lebih <i>up to date</i> dan pengembangan aplikasi dataindustri.semarangkota.go.id berupa fitur Data Sentra IKM yang dapat diakses oleh Publik	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Dinas Perindustrian Kota Semarang
113	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan Peran Serta Masyarakat	Tindak lanjut dari <i>Business Matching</i> mulai dari temu industri -> penguatan IKM -> menjadi <i>Partner Supply Produk Industri</i>	<i>Business Matching</i> hingga kemitraan supply industri mendi	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Dinas Perindustrian Kota Semarang
114	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota.	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan sekala mikro dan kecil dalam satu daerah kabupaten/kota.	<i>Workshop Packaging Desain dan Digital Marketing Product</i> Bagi Usaha Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatkan kesejahteraan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.	Rp18.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Dinas Perikanan
115	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan Aplikasi E-Retribusi	Mempermudah pencatatan transaksi pembayaran	Rp26.640.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Dinas Perikanan
116	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 - PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pengembangan dan Biaya Pemeliharaan Aplikasi E-Pendawa b. Pendataan Pedagang Pasar dan Pengembangan Aplikasi GIS Pasar	Penataan dan Penetapan Pedagang Pasar dan PKL Lokasi Pedagang Pasar sesuai dengan Peta Geospasial	Rp252.685.925,00	Rp200.000.000,00	Rp214.000.000,00	Rp228.000.000,00	Rp242.000.000,00	Dinas Perdagangan
117	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 - PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	a. Biaya Operasional; Sewa alat dan Pemeliharaan E-Retribusi	Mencapai Target Realisasi PAD kota Semarang melalui E-Retribusi Pedagang dan PKL kota Semarang	Rp566.700.000,00	Rp598.500.000,00	Rp628.425.000,00	Rp658.350.000,00	Rp688.275.000,00	Dinas Perdagangan
118	3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 - PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	a. Pemeliharaan Aplikasi dan Pengembangan <i>Event Semarang Great Sale</i>	<i>Semarang Great Sale</i> untuk Meningkatkan daya beli Produk Lokal UKM kota Semarang	Rp144.146.590,00	Rp160.000.000,00	Rp176.000.000,00	Rp184.000.000,00	Rp192.000.000,00	Dinas Perdagangan

119	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.01 - PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	a. Upgrade Aplikasi Sistem Informasi Pedagang Pasar Tradisional dan PKL/SIHARPA	Meningkatkan Prosentase Pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani.	Rp21.681.500,00	Rp24.000.000,00	Rp26.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp30.000.000,00	Dinas Perdagangan
120	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01 - PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	a. PEMELIHARAAN DAN UPDATING APLIKASI TERA dan TERA ULANG	Meningkatkan Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.	Rp27.863.509,00	Rp30.000.000,00	Rp32.200.000,00	Rp34.400.000,00	Rp36.600.000,00	Dinas Perdagangan
121	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembuatan SIBERBI (Simulasi Berusaha Bangun Investasi)	membuat aplikasi Simulasi Berusaha Bangun Investasi dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk berminat membangun usaha	Rp90.000.000,00					DPMPSTP
122	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Rp530.030.776,00	Rp538.628.169,00	Rp548.753.096,00	Rp549.559.912,00	DPMPSTP
123	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0004 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas kemitraan dengan mitra Bisnis KKMP sesuai 7 gerai unit usaha kkmp dan unit usaha lainnya	berkembangnya unit usaha kkmp	Rp50.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp100.000.000,00	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang
124		2.17.06.2.01 Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan KKMP melalui inkubasi koperasi dan Digitalisasi	KKMP kota semarang yang aktif dan produktif.	Rp500.000.000,00	Rp550.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp650.000.000,00	Rp700.000.000,00	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang
125	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan usaha Mikro	Fasilitasi Kemitraan dan temu usaha	Terbentuknya jaringan pemasaran yang semakin luas serta peningkatan omset usaha Mikro	Rp200.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp260.000.000,00	Rp270.000.000,00	Rp280.000.000,00	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang
126	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Updating data UMKM di kota Semarang	Tersedianya Data UMKM di Kota Semarang	Rp35.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp80.000.000,00	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang
127			2.17.07.2.01.011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Fasilitasi sertifikasi PIRT, Halal, HAKI	Meningkatnya kualitas dan standarisasi produk usaha Mikro	Rp582.987.650,00	Rp650.000.000,00	Rp710.000.000,00	Rp725.000.000,00	Rp750.000.000,00	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang
128			2.17.07.2.01.015 Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Ke wirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Ketrampilan dan manajemen kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Pelaku Usaha Mikro	Rp1.250.000.000,00	Rp1.300.000.000,00	Rp1.350.000.000,00	Rp1.400.000.000,00	Rp1.450.000.000,00	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang
129	2.17.18 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	2.17.08.2.01.0005 Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	Inkubator Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha berbasis sektor unggulan atau klaster lokal		Rp350.000.000,00	Rp375.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp425.000.000,00	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang

130		Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi pemasaran <i>online</i> (digitalisasi usaha)	Terwujudnya transformasi usaha konvensional menuju usaha berbasis digital.	Rp250.000.000,00	Rp260.000.000,00	Rp270.000.000,00	Rp280.000.000,00	Rp300.000.000,00	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang
131	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	<i>Bazaar</i> UMKM <i>coocing class</i> pelatihan terkait UMKM	Terbentuk ekosistem ekonomi kreatif & digital yang lebih berkelanjutan		Rp155.000.000,00	Rp165.000.000,00	Rp175.000.000,00	Rp185.000.000,00	Kecamatan Semarang Timur
132	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pasar Ikan Rejomulyo (Pasar Kobong)	meningkatkan daya saing sektor perikanan, memperkuat ekonomi nelayan, dan menghidupkan ekosistem perdagangan ikan modern.	Rp12.577.794.681,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
133	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kompleks Perdagangan Dargo (Pasar Dargo/ Eks- <i>Yogya Department Store</i>)	revitalisasi pasar tradisional, mendukung ekonomi lokal, serta menarik wisatawan melalui <i>branding</i> kawasan perdagangan bersejarah.	Rp6.675.135.028,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Jumlah <i>Smart Economy</i>						Rp 42.039.146.221,45	Rp 23.641.665.218,00	Rp 26.194.320.028,00	Rp 28.482.618.464,00	Rp 30.939.816.574,00	

ROAD MAP IMPLEMENTASI SMART CITY SEMARANG Tahun 2025 S/d 2029

SMART ENVIRONMENT

NO	RENCANA KEGIATAN DI TAHUN										OPD
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output/ Manfaat	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Outlook Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Bisnis Plan <i>Urban Farming</i> Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Peta Aset Pangan Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Peta Jalan Susut Sisa Pangan Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Outlook</i> Energi Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Masterplan</i> Perikanan	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
7	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Masterplan</i> Pertanian	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Studi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

9	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Peningkatan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang kewilayahan		Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
10	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Kajian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang kewilayahan		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
11	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang kewilayahan			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
12	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang kewilayahan			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
13	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan dampak Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang kewilayahan				Rp100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
14	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Implementasi Bangunan Gedung Hijau Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang kewilayahan					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
15	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen RAD Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang kewilayahan					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
16	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	<i>Early Warning System</i> (EWS) Banjir	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	Rp81.027.586,00	Rp350.000.000,00	Rp450.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp480.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	SEMARisk (Sistem Edukasi <i>Monitoring</i> peAporan InformaSi Kebencanaan)	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Rp87.000.000,00	Rp137.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp170.000.000,00	Rp174.634.874,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) Durian Lokal Unggul Kota Semarang	1. Meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang, khususnya pada UPTD Kebun Dinas. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas durian lokal unggul di wilayah Kota Semarang. 3. Membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan/membudidayakan dan mempertahankan plasma nutfah tanaman asli Kota Semarang 4. Inovasi ini BERBASIS NON TIK	Rp1.337.927.082,00	Rp1.404.823.436,10	Rp1.475.064.607,91	Rp1.548.817.838,30	Rp1.626.258.730,22	Dinas Pertanian

19	PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Demplot <i>Urban Farming</i> metode Penyiraman Otomatis	Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan air dan mempermudah perawatan tanaman, sehingga cocok untuk lahan terbatas di perkotaan	Rp103.369.131,00	Rp108.537.587,55	Rp113.964.466,93	Rp119.662.690,27	Rp125.645.824,79	Dinas Pertanian
20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Instalasi <i>Smart Farming on Farm</i> manajemen pangan kawasan BPP Mijen	Sistem pertanian terintegrasi dengan penerapan teknologi pertanian cerdas di lahan pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan	Rp116.550.000,00		Rp122.377.500,00		Rp128.496.375,00	Dinas Pertanian
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan mesin pengolahan umbi	Meningkatkan produktivitas petani, mengurangi ketergantungan pada metode pengolahan tradisional, hingga meningkatkan kualitas produk olahan umbi	Rp139.305.000,00		Rp122.377.500,00		Rp128.496.375,00	Dinas Pertanian
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Manajemen Pangan Kawasan BPP Mijen dengan Pembangunan <i>Green House Fodder</i> untuk pakan ternak system fodder	Pakan ternak yang diproduksi secara hidroponik dalam ruangan tertutup untuk produksi pakan hijauan berkualitas tinggi dalam waktu singkat, terlepas dari kondisi cuaca eksternal, karena tanaman ditanam dalam lingkungan yang terkendal	Rp125.629.800,00	Rp25.125.960,00	Rp26.382.258,00	Rp27.701.370,90	Rp29.086.439,45	Dinas Pertanian
23	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan <i>drone sprayer</i> pada tahun 2024	<i>Drone sprayer</i> pertanian (pesawat tanpa awak) yang dilengkapi dengan sistem penyemprot cairan (biasanya pestisida, herbisida, fungisida, atau pupuk cair) dan digunakan untuk menyemprot lahan pertanian secara otomatis dan efisien.						Dinas Pertanian
24	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kajian terkait Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan	Sebagai bahan dasar dalam penentuan kebijakan terkait Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan	Rp740.000.000,00	Rp810.000.000,00	Rp890.000.000,00	Rp979.000.000,00	Rp1.076.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
25	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kajian Pengembangan Sampah Terpadu	memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga meningkatkan kesehatan lingkungan, menyejahterakan masyarakat, dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Output-nya berupa rekomendasi pemilihan teknologi yang tepat, strategi pendanaan dan pembiayaan, serta rencana pengembangan kapasitas lokal untuk pengelolaan sampah yang efektif dan terintegrasi.	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
26	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan CCTV	Keamanan dan Pengawasan, Efisiensi Kerja, Keselamatan dan Kontrol Jarak Jauh	Rp100.908.990,00	Rp100.908.990,00	Rp100.908.990,00	Rp100.908.990,00	Rp100.908.990,00	Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Kendaraan Bermotor Roda 3	Membantu masyarakat dalam mendistribusikan sampahnya ke TPA	Rp123.000.000,00	Rp184.500.000,00	Rp246.000.000,00			Kecamatan Candisari
28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Pilah Sampah Warga seperti Alat Pembuat Genteng, Alat Pembuat Paving dan lainnya	Mendukung pelaksanaan kegiatan pilah sampah di masyarakat guna mendukung peningkatan perekonomian wilayah yang sekaligus mendukung program dari Pemerintah Kota Semarang	Rp1.687.680.163,00	Rp1.866.229.341,00	Rp1.943.942.254,00	Rp1.958.217.012,00	Rp1.991.888.210,00	Kecamatan Pedurungan
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Pilah Sampah Warga seperti Alat Pembuat Genteng, Alat Pembuat Paving dan lainnya	Mendukung pelaksanaan kegiatan pilah sampah di masyarakat guna mendukung peningkatan perekonomian wilayah yang sekaligus mendukung program dari Pemerintah Kota Semarang		Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Kecamatan Gayamsari

30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Lapangan Zona Aktifitas Gratis	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Alat dan Mesin Pencacah Sampah	Mendukung Bank Sampah dalam daur ulang sampah, meningkatkan Efisiensi Pengolahan Sampah, menghasilkan Produk Bermanfaat, dan mengurangi Beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Rp134.160.000,00					Kecamatan Tembalang
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Lapangan Zona Aktifitas Gratis	- Tersedianya taman, halaman, dan lapangan terbuka yang dilengkapi fasilitas aktivitas fisik dan sosial. - Meningkatkan kualitas hidup warga melalui ruang interaksi, olahraga, dan rekreasi yang inklusif.		Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Kecamatan Tembalang
33	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penyediaan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (3R))	- Mengurangi volume sampah ke TPA - Memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri - Menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang bisa diolah menjadi kompos, bahan baku daur ulang, atau produk lainnya		Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00		Kecamatan Tembalang
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	- Kebersihan lingkungan Pilah sampah	terciptanya lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan.	Rp2.350.000.000,00	Rp2.608.500.000,00	Rp2.712.840.000,00	Rp2.739.968.400,00	Rp2.740.516.393,68	Kecamatan Gunungpati
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pilah Sampah	Mendorong kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengurangi pencemaran, serta mendukung lingkungan berkelanjutan.	Rp26.769.600,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Kecamatan Mijen
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Vertical garden di dinding gedung kelurahan dan puskesmas, menanam tanaman obat keluarga (toga).	- Terbangunnya taman vertikal di dinding gedung kelurahan dan puskesmas dengan koleksi tanaman TOGA. - Memperindah lingkungan sekaligus menyediakan sumber tanaman obat mandiri bagi masyarakat.		Rp144.000.000,00				Kecamatan Tugu
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembuatan biopori dan sumur resapan di setiap RW untuk mengurangi limpasan dan meningkatkan daya resap air hujan dan Pendirian pusat komposting RW untuk pengolahan sampah organik, sekaligus edukasi pengurangan sampah	- Terlaksananya pembangunan biopori, sumur resapan, dan pusat komposting di setiap RW. - Mengurangi limpasan air hujan, meningkatkan cadangan air tanah, dan mengedukasi warga tentang pengelolaan sampah organik.					Rp119.000.000,00	Kecamatan Tugu
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	- Kebersihan lingkungan - Pilah sampah	terciptanya lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan.	Rp2.350.000.000,00	Rp2.608.500.000,00	Rp2.712.840.000,00	Rp2.739.968.400,00	Rp2.740.516.393,68	Kecamatan Ngaliyan
39	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		aplikasi pelaporan Pemantauan Jentik Nyamuk dan Pengendalian Tikus di Pemukiman berbasis <i>android</i>	Rp1.820.176.000,00	Rp715.902.016,00	Rp852.066.579,00	Rp886.029.953,00	Rp886.030.839,00	Dinas Kesehatan

40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pemantauan Jentik Nyamuk dan Pemberantasan Sarang Nyamuk	Menurunkan angka kejadian DBD di Kota Semarang	Rp7.500.000,00	Rp8.250.000,00	Rp9.075.000,00	Rp9.982.500,00	Rp10.980.750,00	Dinas Kesehatan
41	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan kendaraan pemadam, peralatan pemadam, APD, dan sistem komunikasi digital berbasis IoT.	Ketersediaan sarpras dan APD modern yang mendukung respon cepat dan integrasi data ke sistem <i>Smart City</i> .	Rp1.791.411.882,00	Rp2.148.682.369,00	Rp2.300.680.081,00	Rp2.486.950.168,00	Rp2.111.849.577,00	Dinas Pemadam Kebakaran
42	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi UKL-UPL DLH / Aplikasi UKL-UPL DLH (https://izinlingkungan.semarangkota.go.id/)	Pengelolaan UKL-UPL dan izin lingkungan; memfasilitasi pengajuan dan pemantauan dokumen lingkungan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
43	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pengukuran Distaru Semarang / Aplikasi Pengukuran Distaru Semarang (https://distaru.semarangkota.go.id/ukur/login)	Alat ukur kinerja Distaru; pengumpulan data dan evaluasi layanan kebersihan/tata ruang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Penataan Ruang
44	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Silappu Laboratorium dan Pengujian DPU / Sistem Informasi Laboratorium dan Pengujian DPU (https://silappu.semarangkota.go.id)	Sistem informasi laboratorium dan pengujian teknis untuk DPU.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
45	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pengarsipan Lab PU / Aplikasi Pengarsipan Lab PU (https://silappu.semarangkota.go.id/)	Sistem pengarsipan digital untuk laboratorium DPU; manajemen dokumen uji.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
46	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	sistem informasi <i>monitoring</i> pohon / sistem informasi <i>monitoring</i> pohon (https://pohon.semarangkota.go.id/)	Pemantauan kondisi pohon kota; perencanaan penghijauan dan perawatan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
47	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> resmi dlh kota semarang / <i>website</i> resmi dlh kota semarang (dlh.semarangkota.go.id)	Informasi layanan dan program Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
48	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pemantaun Sungai Kota Semarang / Aplikasi Pemantaun Sungai Kota Semarang (http://sungaiipu.semarangkota.go.id/)	Aplikasi Pemantauan Sungai Kota Semarang bermanfaat untuk memonitor kondisi sungai secara digital sehingga mendukung pengelolaan lingkungan, pencegahan banjir, dan pengambilan keputusan berbasis data.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
49	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pemantaun Irigasi Kota Semarang / Aplikasi Pemantaun Irigasi Kota Semarang (http://irigasipu.semarangkota.go.id/)	Aplikasi Pemantauan Irigasi Kota Semarang bermanfaat untuk memudahkan <i>monitoring</i> kondisi jaringan irigasi secara digital sehingga mendukung pengelolaan air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
50	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> BPBD / <i>Website</i> BPBD (http://bpbd.semarangkota.go.id/)	<i>Website</i> BPBD Kota Semarang bermanfaat sebagai sarana informasi, edukasi, dan layanan kebencanaan yang terintegrasi dengan SPBE daerah untuk mendukung transparansi, respons cepat, dan partisipasi masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

51	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Drainase Kota Semarang / Aplikasi Drainase Kota Semarang (http://drainasepu.semarangkota.go.id/)	Memudahkan masyarakat mengetahui kondisi saluran drainase, titik rawan genangan, serta mendukung pengaduan drainase.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
52	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> PSDA ESDM / <i>Website</i> PSDA ESDM (http://psdaesdm.semarangkota.go.id/)	Memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya air, energi, dan mineral di kota untuk mendukung transparansi dan layanan masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
53	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Lelang PSEL Jatibarang / <i>Website</i> Lelang PSEL Jatibarang (lelangpsel.semarangkota.go.id)	Memberi akses transparan terkait lelang pengelolaan sampah di PSEL Jatibarang, memudahkan peserta mengikuti proses secara <i>online</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Monevpu Kota Semarang / Aplikasi Monevpu Kota Semarang (https://monevpu.semarangkota.go.id/)	Membantu pengguna memantau progres pembangunan fisik/infrastruktur kota secara <i>online</i> , sehingga lebih transparan dan akuntabel.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
55	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIM KAR (Si Data Kebakaran) / SIM KAR (Si Data Kebakaran) (<i>offline akses</i>)	Pendataan kejadian kebakaran dan penanganannya.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
56	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	PANTAUSAMPAH (https://pantausemar.semarangkota.go.id/analitik)	Pemantauan kondisi TPS <i>real time</i> dengan AI, kirim notifikasi ke petugas kebersihan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
57	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	PANTAUBANJIR (https://pantaubanjir.semarangkota.go.id/)	Informasi banjir <i>real time</i> (peta genangan, CCTV, ketinggian air).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
58	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Sistem Informasi Sungai Kota Semarang (https://sungaiipu.semarangkota.go.id/)	<i>Monitoring</i> sungai (debit, kondisi, mitigasi banjir).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
59	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Bantuan Beras melalui Anjungan Terima Mandiri(ATM) Beras bagi warga kurang mampu yang terdaftar dalam DTKS tetapi belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rasta) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan bersifat STIMULAN agar para "Agniya"di sekitar mau membantu warga lain yang kekurangan	Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Rp1.306.500.000,00	Rp1.441.500.000,00	Rp1.873.950.000,00	Rp2.436.135.000,00	Rp3.166.975.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
60	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Pelaksanaan Pangan dan Gizi	Bantuan bahan pangan kepada warga kurang mampu di wilayah yang diidentifikasi masih dalam zona rawan pangan	Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Rp73.932.200,00	Rp96.111.860,00	Rp124.945.418,00	Rp162.429.043,00	Rp211.157.756,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

61	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang. Adalah Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya sampah pangan (<i>food waste and food loss</i>) dengan strategi habiskan isi piringmu, stop buang pangan, dan yuk berbagi pangan baik pangan segar maupun pangan olahan. Sekaligus menggandeng TP PKK Kota Semarang, Dharma Wanita maupun Organisasi Wanita lainnya sebagai agen perubahan	Mengelola dan mengurangi sampah pangan di Kota Semarang. Meningkatkan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp352.980.000,00	Rp458.874.000,00	Rp596.536.200,00	Rp775.497.060,00	Rp1.008.146.178,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
62	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Normalisasi/Restorasi Su	DED SUMUR RESAPAN	Meningkatkan Kualitas Air tanah. Mengurangi Beban Drainase. Meningkatkan Kelembaban tanah. -Mengurangi Risiko banjir	Rp75.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
63	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Pembangunan rumah pompa	- Mengurangi genangan air banjir - Mengatasi - Bagian dari sistem drainase untuk memastikan air dapat di alirkan keluar dari area tertentu,	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
64	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan berkala jalan aspal	- Memperpanjang umur jalan. kenyamanan -meningkatkan keselamatan pengguna jalan	Rp23.000.000.000,00	Rp23.500.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
65	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemantauan Udara Ambien (<i>Roadside Monitoring</i>)	Rp5.857.068.823,00	Rp5.857.068.823,00	Rp5.857.068.823,00	Rp5.857.068.823,00	Rp5.857.068.823,00	Dinas Lingkungan Hidup
66	Pemanfaatan Air Hujan Sebagai Sumber Alternatif	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembangunan <i>Rain Water Harvesting</i> (RWH)	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Dinas Lingkungan Hidup
67	Membantu mengurangi aliran pada permukaan dan mencegah terjadinya genangan air yang berlebih	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembangunan Sumur Resapan	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Dinas Lingkungan Hidup
68	Mencegah terjadinya banjir, mereduksi sampah organik	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pelubangan biopori dan penutupan biopori	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Dinas Lingkungan Hidup
69	Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Bank Sampah	Rp2.184.186.194,00	Rp2.184.186.194,00	Rp2.184.186.194,00	Rp2.184.186.194,00	Rp2.184.186.194,00	Dinas Lingkungan Hidup

70	Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya prinsip 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) dalam pengelolaan sampah	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional	Rp2.184.186.194,00	Rp2.184.186.194,00	Rp2.184.186.194,00	Rp2.184.186.194,00	Rp2.184.186.194,00	Dinas Lingkungan Hidup
71	Meningkatkan kesadaran dan penyelamatan lingkungan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Rp407.244.747,00	Rp407.244.747,00	Rp407.244.747,00	Rp407.244.747,00	Rp407.244.747,00	Dinas Lingkungan Hidup
72	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Proyek PSEL	Rp8.353.659.348,00	Rp8.353.659.348,00	Rp8.353.659.348,00	Rp8.353.659.348,00	Rp8.353.659.348,00	Dinas Lingkungan Hidup
73	Menambah kerapatan luasan penghijauan melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kegiatan konservasi lingkungan melalui gerakan jumat berkah jumat menanam	Rp550.327.378,00	Rp550.327.378,00	Rp550.327.378,00	Rp550.327.378,00	Rp550.327.378,00	Dinas Lingkungan Hidup
74	Mengoptimalkan Penanganan sampah dan mereduksi sampah organik menjadi produk bernilai ekonomis	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Budidaya maggot yang menghasilkan produk bernilai ekonomis	Rp8.353.659.348,00	Rp8.353.659.348,00	Rp8.353.659.348,00	Rp8.353.659.348,00	Rp8.353.659.348,00	Dinas Lingkungan Hidup
75	Mengoptimalkan Penanganan sampah dan mereduksi sampah organik menjadi produk bernilai ekonomis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembuatan <i>Eco-Enzym</i>	Rp550.327.378,00	Rp550.327.378,00	Rp550.327.378,00	Rp550.327.378,00	Rp550.327.378,00	Dinas Lingkungan Hidup
76	Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Patroli Kebersihan	Rp291.883.465,00	Rp291.883.465,00	Rp291.883.465,00	Rp291.883.465,00	Rp291.883.465,00	Dinas Lingkungan Hidup
77	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	PENINGKATAN SALURAN DRAINASE KAWASAN DEMPEL MUKTIHARJO KIDUL	Mengurangi risiko genangan dan banjir lokal, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.	Rp11.783.875.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	PENINGKATAN KAPASITAS POMPA TAWANGMAS	Meningkatkan efektivitas pengendalian banjir di wilayah terdampak, melindungi permukiman dan aktivitas ekonomi warga.	Rp8.783.875.000,00					Dinas Pekerjaan Umum

79	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	PENINGKATAN SALURAN DAN STASIUN POMPA KOLONEL SUGIYONO(LANJUTAN)	Memperkuat sistem drainase perkotaan untuk mengurangi banjir, menjaga kelancaran mobilitas dan kenyamanan warga.	Rp7.200.675.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
80	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Normalisasi/Restorasi Sungai	PENANGANAN BANJIR KAWASAN PLAMONGAN HIJAU	Memberikan perlindungan pada kawasan rawan banjir, meningkatkan rasa aman dan kualitas hidup masyarakat sekitar.	Rp6.900.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Normalisasi/Restorasi Sungai	PENINGKATAN SALURAN JALAN MT HARYONO PETUDUNGAN	Menambah kapasitas saluran air untuk mengurangi genangan, memperlancar aktivitas transportasi, dan mendukung tata kota.	Rp6.400.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
82	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	PENINGKATAN SALURAN JALAN GAJAH ASPOL KABLUK	Mengurangi genangan air di kawasan padat penduduk, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertata.	Rp5.900.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
83	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	PENINGKATAN SALURAN TANJUNG LANJUTAN	Menjamin keberlanjutan sistem drainase untuk meminimalisir banjir dan mendukung kenyamanan warga.	Rp2.400.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
84	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	PENINGKATAN SALURAN KAWASAN JATISARI (LANJUTAN)	Mengurangi potensi banjir di wilayah padat penduduk, sekaligus mendukung keberlanjutan infrastruktur permukiman.	Rp1.800.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
85	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Rembes	Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk lahan pertanian, mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.	Rp970.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN TAMAN	Menjaga keindahan, kebersihan, dan kenyamanan ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas lingkungan serta sarana rekreasi masyarakat.	Rp1.286.616.268,00					Dinas Pekerjaan Umum

87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Tenaga Kebersihan (	Menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi warga sekolah.	Rp6.076.980.000,00					Dinas Pendidikan
88	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pembangunan Gedung Rawat Inap 12 Lantai Tahap III	Tersedianya gedung rawat inap modern berkapasitas besar yang meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.	Rp25.480.340.600,00					RSWN
89	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pembangunan Gedung Unit Layanan Kanker Terpadu Tahap II	Terwujudnya pusat layanan kanker terpadu dengan fasilitas lengkap sehingga pasien mendapat perawatan lebih cepat dan efektif.	Rp22.483.711.000,00					RSWN
90	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Unit Layanan Kanker Terpadu Tahap II	Terjaminnya mutu, ketepatan waktu, dan efisiensi dalam pembangunan gedung layanan kanker terpadu.	Rp1.750.000.000,00					RSWN
91	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung 12 Lantai Tahap III	Kualitas pembangunan gedung 12 lantai tetap sesuai standar teknis dan selesai tepat waktu.	Rp1.750.000.000,00					RSWN
92	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Electric Hospital Bed 3 Crank</i>	Meningkatkan kenyamanan pasien serta memudahkan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan.	Rp1.450.000.000,00					RSWN
93	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Truck Armroll	Meningkatkan kapasitas angkut dan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Semarang.	Rp9.844.723.200,00					Dinas Lingkungan Hidup
94	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Seamp Buldozer (DAU)	Mempercepat pekerjaan konstruksi dan penanganan sampah skala besar di TPA.	Rp4.010.731.920,00					Dinas Lingkungan Hidup
95	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Kontainer Sampah	Menyediakan fasilitas penyimpanan sampah yang lebih rapi dan higienis.	Rp3.885.710.400,00					Dinas Lingkungan Hidup
96	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Truck Arm Roll (DAU)	Menunjang mobilitas pengangkutan sampah secara lebih efisien.	Rp3.786.432.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
97	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Dump Truck	Mendukung pengangkutan material dan sampah dalam jumlah besar dengan lebih cepat.	Rp3.197.688.000,00					Dinas Lingkungan Hidup

98	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETE R (AAS)	Meningkatkan akurasi pengujian kualitas lingkungan sebagai dasar pengambilan kebijakan.	Rp2.118.103.110,00					Dinas Lingkungan Hidup
99	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Loader (DAU)	Memudahkan proses pemindahan sampah dan material di TPA.	Rp2.100.009.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
100	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Alat Berat Excavator	Meningkatkan efisiensi pekerjaan penggalian dan pengelolaan sampah di TPA	Rp2.026.188.450,00					Dinas Lingkungan Hidup
101	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6m3 tertutup	Mengurangi pencemaran lingkungan melalui sistem penampungan sampah yang lebih aman.	Rp1.942.855.200,00					Dinas Lingkungan Hidup
102	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penyusunan DED Kebun Raya Tinjomoyo	Menjadi dasar perencanaan pembangunan kawasan wisata edukasi berbasis lingkungan.	Rp764.532.440,00					Dinas Lingkungan Hidup
103	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan <i>Mini Bus</i>	Mendukung mobilitas petugas dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan lapangan.	Rp621.464.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
104	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS3R Sendangmulyo	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R untuk mengurangi timbulan sampah.	Rp617.604.800,00					Dinas Lingkungan Hidup
105	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS3R Bangelayu Wetan	Masyarakat mendapatkan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.	Rp617.604.800,00					Dinas Lingkungan Hidup
106	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS3R Sembungharjo	Optimalisasi pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat berbasis 3R.	Rp617.604.800,00					Dinas Lingkungan Hidup

107	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6m3 tertutup (DAU)	Penyimpanan sampah lebih higienis dan ramah lingkungan.	Rp571.428.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
108	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Alat Uji Minyak	Mendukung pengendalian pencemaran lingkungan melalui uji kualitas air dan tanah.	Rp440.170.500,00					Dinas Lingkungan Hidup
109	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	PERENCANAAN IPAL TPA JATIBARANG	Tersusunnya rencana instalasi pengolahan air limbah untuk mengurangi pencemaran dari TPA.	Rp300.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
110	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan <i>Pick Up</i>	Mempermudah distribusi logistik dan operasional lapangan.	Rp256.021.500,00					Dinas Lingkungan Hidup
111	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengadaan Autentik Membran Filtrasi Manifold Set AM-001	Peningkatan kemampuan laboratorium dalam uji kualitas lingkungan.	Rp221.778.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
112	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	HVAS digital TSP	Pemantauan kualitas udara lebih akurat untuk mendukung pengendalian pencemaran.	Rp220.890.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
113	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengadaan Mobil <i>Pick Up</i>	Meningkatkan kelancaran mobilitas operasional dan pelayanan masyarakat.	Rp216.644.483,00					Dinas Lingkungan Hidup
114	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS Paket 2	Penyediaan fasilitas pengumpulan sampah yang lebih tertata.	Rp200.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
115	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS Pasar BK (DAU)	Memperbaiki kebersihan lingkungan pasar melalui penyediaan TPS yang layak.	Rp200.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
116	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS Paket 1	Tersedianya titik pengumpulan sampah yang memadai bagi masyarakat.	Rp200.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup

117	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pavingisasi TPS3R Polaman	Meningkatkan kualitas sarana TPS3R sehingga lebih nyaman dan higienis.	Rp200.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
118	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS Wonosari (DAU)	Meningkatkan layanan pengumpulan sampah di wilayah Wonosari.	Rp200.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
119	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Sistem informasi pengembangan digitalisasi data sampah TPA Jatibarang (Pembangunan Jembatan timbang TPA)	Terwujudnya sistem digital pengelolaan data sampah secara <i>real time</i> untuk kebijakan berbasis data.	Rp195.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup
120	Mereduksi volume sampah di TPA, mengurangi kebutuhan lahan untuk <i>landfill</i> di TPA, mengubah sampah menjadi sumber daya (energi listrik)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pembangunan Gedung Bank Sampah Krisan Biru	Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah bernilai guna.	Rp192.525.825,00					Dinas Lingkungan Hidup
121	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	BOD Meter	Pemantauan kualitas air lebih efektif untuk mendukung perlindungan lingkungan.	Rp185.603.211,00					Dinas Lingkungan Hidup
122	Mengetahui kondisi pencemaran udara dan air yang ada di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Lingkungan	Penguatan kapasitas laboratorium dalam pemantauan kualitas lingkungan.	Rp185.133.636,00					Dinas Lingkungan Hidup
123	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan Taman RBRA Abd. Saleh	menambah ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas udara, menjadi ruang interaksi sosial warga.	Rp2.870.400.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
124	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan Taman Garoot	mempercantik lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat lewat ruang rekreasi, serta mengurangi efek pemanasan kota (<i>urban heat island</i>).	Rp1.909.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
125	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGA RAAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Optimalisasi Fasilitas Sarpras dan Utilitas Jalan	meningkatkan kelayakan sarana jalan dan utilitas, mendukung mobilitas warga dan distribusi ekonomi.	Rp18.500.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
126	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGA RAAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Optimalisasi Fasilitas Sarpras dan Utilitas Jalan	mempercepat pemeliharaan dan penataan fasilitas umum, sehingga fungsi hunian lebih nyaman dan aman.	Rp5.000.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

127	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGA RAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	memperpanjang umur infrastruktur perkotaan, mengurangi biaya perbaikan darurat, dan menjaga estetika lingkungan.	Rp4.500.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
128	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGA RAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sarpras dan Utilitas Penunjang Jalan Lingkungan	memperkuat infrastruktur jalan lingkungan agar layak digunakan, memudahkan mobilitas dalam kawasan perumahan.	Rp3.192.124.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
129	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGA RAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Utilitas Penunjang Jalan Lingkungan	mendukung kelengkapan sarana jalan (drainase, penerangan, pedestrian), sehingga lingkungan lebih sehat, aman, dan nyaman.	Rp2.154.048.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Rp262.992.517.548,00	Rp74.676.043.530,65	Rp72.782.548.825,83	Rp73.149.866.396,47	Rp89.715.187.176,81	

ROAD MAP IMPLEMENTASI SMART CITY SEMARANG Tahun 2025 S/d 2029

SMART LIVING

NO	RENCANA KEGIATAN DI TAHUN										OPD
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output/ Manfaat	2025	2026	2027	2028	2029	
1						7	8	9	10	11	12
1	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Identifikasi Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Baru, Sungai Asin, Sungai Semarang dan Sungai Silandak	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Review</i> Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Kajian Manajemen Traffic pada Kawasan Strategis	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Kajian Manajemen Keselamatan Jalan	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur			Rp100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
7	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Review</i> Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD)	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur				Rp100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur				Rp100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

9	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Review Urban Mobility Plan</i> Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
10	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Kajian Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
11	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum</i> (RISPAM)	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
12	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
13	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen RP2P Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
14	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Roadmap</i> Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
15	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Roadmap</i> Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur					Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
16	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Review Masterplan</i> Transportasi	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
17	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Kajian Penanganan Drainase Sistem Semarang Timur	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

18	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP	Penyusunan dokumen pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan di bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
19	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyusunan dokumen pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan di bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
20	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Baseline Kawasan Kumuh Kota Semarang	Penyusunan dokumen pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan di bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
21	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Keputusan Walikota tentang Kawasan Kumuh Kota Semarang	Penyusunan dokumen pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan di bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
22	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Evaluasi Penanganan Banjir dan Rob	Penyusunan dokumen pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan di bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
23	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Capaian Layanan Perkotaan	Penyusunan dokumen pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan di bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
24	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan <i>Environmental Health Risk Assessment</i>	Penyusunan dokumen pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan di bidang kewilayahan						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
25	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Fasilitas Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	Penyusunan dokumen pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan di bidang infrastruktur						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
26	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJD, RPJMD dan RPKD)	Dokumen Perencanaan Semarang Lama	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang kewilayahan						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
						Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00		

27	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen <i>Masterplan Sport Centre</i> Kota Semarang	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang wilayah		Rp100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
28	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Masterplan</i> Peningkatan Sarana Gedung Pemerintahan	Penyusunan dokumen perencanaan terkait bidang wilayah						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Mesin <i>E-Ticketing Mobile</i> di UPTD Kebun Dinas	1. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah mengenai letak seluruh kebun Dinas Pertanian kota Semarang, jumlah tanaman, jumlah petani, jumlah kapetan, komoditas siap panen, stok sprodri serta pergerakan keluar masuk saprodri untuk setiap kebun dan setiap tanaman, asset maupun prasarana yang ada di UPTD Kebun Dinas 2. Mempermudah masyarakat untuk melakukan reservasi dalam hal wisata buah, PKL, magang, penelitian, peminjaman tempat dan berkunjung 3. Mempermudah masyarakat untuk melakukan pemesanan pembelian produk komoditas kebun secara <i>online</i> 4. Mempermudah masyarakat dalam menemukan informasi-informasi seputar Pertanian 5. Inovasi ini BERBASIS TIK 6. walaupun tidak ada anggaran pemeliharaan, aplikasi ini akan terus digunakan sampai 5 tahun ke depan	Rp93.892.591,00	Rp65.724.813,70				Dinas Pertanian
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pendaftaran Pelayanan dengan Sistem Informasi Kesehatan Hewan (Sikewan) di Puskesmas Gayamsari dan Puskesmas Mijen	Manfaat yang diperoleh dari penerapan inovasi ini antara lain : 1. Adanya sistem rekam medis yang memudahkan untuk Analisis data kejadian penyakit hewan di kota Semarang. 2. Berkas rekam medis bisa dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan Kesehatan pada sarana Kesehatan. Catatan tersebut bisa digunakan sebagai bukti pembiayaan pada pasien 3. Rekam medis bisa digunakan untuk sebagai bahan statistik Kesehatan hewan, khususnya untuk mempelajari perkembangan masyarakat veteriner dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit hewan tertentu. 4. Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. 5. Membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian Kesehatan masyarakat veteriner yang optimal. 6. Inovasi ini BERBASIS TIK 7. walaupun tidak ada anggaran pemeliharaan, aplikasi ini akan terus digunakan sampai 5 tahun ke depan	Rp100.135.586,20	Rp105.142.365,51	Rp110.399.483,79	Rp115.919.457,97	Rp121.715.430,87	Dinas Pertanian
31	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan DED Kantor Kelurahan Bulu Lor (BGH)	Penyusunan DED Kantor Kelurahan Bulu Lor yang menggabungkan arsitektur ramah lingkungan untuk menciptakan bangunan yang efisien, berkelanjutan, dan terkoneksi dengan ekosistem kota pintar	Rp26.257.626.870,00	Rp28.883.389.557,00	Rp31.771.728.513,00	Rp34.948.901.364,00	Rp38.443.791.500,00	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	Penyelenggaraan Penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pengelolaan proses perizinan dan pengawasan bangunan gedung melalui sistem berbasis elektronik						Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

33	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBGC	Pembuatan <i>road map</i> konservasi energi pada bangunan gedung	Tersedianya peta jalan dan strategi implementasi konservasi energi pada bangunan gedung di Kota Semarang	Rp1.777.510.362,00	Rp1.866.385.880,10	Rp1.959.705.174,11	Rp2.057.690.432,81	Rp2.160.574.954,45	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
34	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Perbaikan rumah tidak layak huni - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Terfasilitasinya kebutuhan hunian layak huni bagi masyarakat Kota Semarang	Rp13.936.540.540,00	Rp15.410.965.556,80	Rp16.052.703.954,40	Rp16.170.582.179,20		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Peningkatan kualitas sarana prasarana umum di kawasan kumuh	Rp2.613.101.351,25	Rp2.889.556.041,90	Rp3.009.881.991,45	Rp3.031.984.158,60		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
36	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Menyusun dokumen terkait kebijakan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman	Tersusunnya rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman	Rp871.033.783,75	Rp963.185.347,30	Rp1.003.293.997,15	Rp1.010.661.386,20		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Update</i> SIM Rusun, Validasi dan verifikasi penghuni Rusun	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan Rumah Susun	Rp100.000.000,00				Rp100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Update</i> SIM Pemakaman, Digitasi lubang makam	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemakaman di Kota Semarang	Rp100.000.000,00				Rp100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
39	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<i>Updating</i> aplikasi Sijali	Termonitornya kondisi jalan lingkungan sebagai acuan dalam rencana peningkatan dan pemeliharaan	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
40	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<i>Updating</i> aplikasi Sidarling	Termonitornya kondisi drainase lingkungan untuk mengurangi dampak banjir di kawasan permukiman	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kajian Pengoptimalan Sampah dan Kajian Pengelolaan Sampah untuk pembangkit tenaga sampah di TPA Jatibarang	Manfaat studi pengoptimalan dan pengelolaan sampah TPA Jatibarang mencakup manfaat lingkungan (mengurangi pencemaran, mencegah penyakit, menjaga kelestarian alam), manfaat sosial (meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat ikatan sosial), manfaat ekonomi (menghasilkan pendapatan dari daur ulang, menciptakan lapangan kerja), dan manfaat operasional (sistem penimbunan sampah yang lebih baik, pengurangan volume sampah). Outputnya adalah kebijakan dan rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan teknologi atau sistem pengelolaan sampah yang efektif, serta peningkatan nilai ekonomi dari sampah itu sendiri	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kegiatan Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Rp406.868.736,00	Rp406.868.736,00	Rp406.868.736,00	Rp406.868.736,00	Rp406.868.736,00	Kecamatan Semarang Tengah
43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Rp200.000.000,00	Rp199.000.000,00	Rp198.000.000,00	Rp197.000.000,00	Rp196.000.000,00	Kecamatan Semarang Timur
44	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Sigap Penanganan KDRT Semmur		Tidak Dianggarkan APBD	Rp25.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp40.000.000,00	Kecamatan Semarang Timur
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kegiatan Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Rp217.660.000,00	Rp217.660.000,00	Rp217.660.000,00	Rp217.660.000,00	Rp217.660.000,00	Kecamatan Semarang Barat
46	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan patroli keamanan bersama dengan Polsek dan Koramil rutin setiap hari mulai dari jam 19.00 s.d. 24.00 yang terkoneksi dengan SADEWA	Semarang sebagai <i>Smart city</i> harus dapat menjaga kenyamanan dan keamanan warganya setiap hari sehingga diperlukan pelaksanaan kegiatan patroli rutin bersama dengan Polsek dan Koramil untuk menjaga kenyamanan dan keamanan tersebut	Rp481.666.830,00	Rp532.625.074,00	Rp554.804.473,00	Rp558.878.514,00	Rp568.488.332,00	Kecamatan Pedurungan
47	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan patroli keamanan bersama dengan Polsek dan Koramil rutin setiap hari mulai dari jam 19.00 s.d. 24.00 yang terkoneksi dengan SADEWA	Semarang sebagai <i>Smart city</i> harus dapat menjaga kenyamanan dan keamanan warganya setiap hari sehingga diperlukan pelaksanaan kegiatan patroli rutin bersama dengan Polsek dan Koramil untuk menjaga kenyamanan dan keamanan tersebut	Rp0,00	Rp91.250.000,00	Rp91.250.000,00	Rp91.250.000,00	Rp91.250.000,00	Kecamatan Gayamsari
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan CCTV di lingkungan RT	Menjaga keamanan wilayah dan sebagai bahan deteksi dini bencana alam	Rp24.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
49	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rapat Koordinasi dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Tingkat Kecamatan	Pengentasan <i>Stunting</i> di wilayah Kecamatan	Rp6.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
50	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberian PMT Posyandu	Peningkatan mutu gizi masyarakat guna mencegah meningkatnya angka <i>stunting</i> di wilayah Kecamatan	Rp1.332.000.000,00	Rp1.332.000.000,00	Rp1.332.000.000,00	Rp1.332.000.000,00	Rp1.332.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan CCTV di Lingkungan RTRW	- menjaga keamanan wilayah - deteksi dini kejadian bencana	Rp87.473.654,00	Rp50.000.000,00	Rp53.000.000,00	Rp54.060.000,00	Rp54.060.000,00	Kecamatan Tembalang
52	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rapat Koordinasi dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Tingkat Kecamatan	adanya implementasi program penurunan <i>stunting</i> yang lebih efektif dan terintegrasi, dengan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak terkait.	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.180.000,00	Rp3.243.600,00	Rp3.243.600,00	Kecamatan Tembalang

53	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberian PMT Posyandu	meningkatkan status gizi balita dan ibu hamil, mencegah <i>stunting</i> dan masalah gizi buruk lainnya, serta memberikan edukasi gizi dan kesehatan kepada orang tua mengenai pentingnya pola makan sehat dan seimbang	Rp663.600.000,00	Rp663.600.000,00	Rp663.600.000,00	Rp663.600.000,00	Rp663.600.000,00	Kecamatan Tembalang
54	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rapat Koordinasi dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Tingkat Kecamatan	adanya mplementasi program penurunan <i>stunting</i> yang lebih efektif dan terintegrasi, dengan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak terkait.	Rp5.000.000,00	Rp5.550.000,00	Rp5.772.000,00	Rp5.829.720,00	Rp5.830.885,00	Kecamatan Gunungpati
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan <i>stunting</i>	Percepatan penurunan <i>stunting</i>	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
56	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	- penegakan perda - patroli keamanan dan ketertiban - tanggap cepat bencana alam	- adanya kepastian hukum digital, transparansi - adanya lingkungan aman, data keamanan terintegrasi - kesiapsiagaan, mitigasi kerugian	Rp111.000.000,00	Rp123.000.000,00	Rp128.000.000,00	Rp129.000.000,00	Rp131.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan CCTV di lingkungan RT	- menjaga keamanan wilayah - deteksi dini kejadian bencana	Rp150.000.000,00	Rp172.500.000,00	Rp179.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp187.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Sarpras Terbuka di Halaman, Taman dan Lapangan Zona Aktifitas Gratis	- Tersedianya taman, halaman, dan lapangan terbuka yang dilengkapi fasilitas aktivitas fisik dan sosial. - Meningkatkan kualitas hidup warga melalui ruang interaksi, olahraga, dan rekreasi yang inklusif.	Rp342.368.543,05					Kecamatan Tugu
59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Wisata	- Terbangunnya sarana pendukung wisata seperti jalur tematik, gazebo, dan <i>signage</i> edukatif. - Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas kawasan melalui daya tarik wisata.				Rp562.500.000,00		Kecamatan Tugu
60	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Rapat Koordinasi dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Tingkat Kecamatan	adanya mplementasi program penurunan <i>stunting</i> yang lebih efektif dan terintegrasi, dengan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak terkait.	Rp5.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp9.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan
61	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	- penegakan perda - patroli keamanan dan ketertiban - tanggap cepat bencana alam	- adanya kepastian hukum digital, transparansi - adanya lingkungan aman, data keamanan terintegrasi - kesiapsiagaan, mitigasi kerugian	Rp111.000.000,00	Rp123.000.000,00	Rp128.000.000,00	Rp129.000.000,00	Rp131.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan
62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan CCTV di lingkungan RT	- menjaga keamanan wilayah - deteksi dini kejadian bencana	Rp150.000.000,00	Rp172.500.000,00	Rp179.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp187.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan
63	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://iot.semarangkota.go.id/)	Monitoring perangkat IoT kota seperti CCTV, sensor lingkungan, dan infrastruktur publik untuk mendukung <i>smart city</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

64	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://bpb.d.semarangkota.go.id/)	Mempercepat penanganan bencana dengan pelaporan <i>online</i> dan informasi kebencanaan <i>real-time</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
65	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://ruangwarga.semarangkota.go.id/)	<i>Platform</i> adminitrasi RT/RW dengan insentif bantuan dana operasional 25 juta, memperkuat partisipasi warga.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
66	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://csr.semarangkota.go.id/)	Menyediakan wadah digital yang memudahkan masyarakat, kelompok, maupun lembaga untuk mengakses dan mengajukan bantuan dari perusahaan, BUMN, maupun BUMD dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Sekretariat CSR/PKBL yang berada di Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang berperan sebagai fasilitator antara kebutuhan masyarakat dengan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
67	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://selaras.semarangkota.go.id/doLogin/)	Integrasi data layanan kesehatan ibu dan anak untuk pemantauan <i>stunting</i> dan kesehatan keluarga.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
68	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://laporsemarangkota.go.id/)	Kanal aduan masyarakat yang terintegrasi dengan SPAN LAPOR nasional.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
69	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pengaduan.semarang&hl=id)	Memberikan akses pengaduan layanan publik langsung dari ponsel.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
70	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://siimut.semarangkota.go.id/)	Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu bagi masyarakat	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
71	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://sosialmenyapa.semarangkota.go.id/)	Media interaktif untuk program bantuan sosial.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
72	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://ppid.dsiddik.semarangkota.go.id/)	Meningkatkan keterbukaan informasi publik bidang pendidikan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

73	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://labkes.semarangkota.go.id/)	Digitalisasi layanan laboratorium kesehatan daerah.	Rp86.800.000,00	Rp86.800.000,00	Rp86.800.000,00	Rp86.800.000,00	Rp86.800.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
74	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi <i>Software Robot Operating System</i> (Robot Berjalan <i>Autonomous</i>))	Inovasi teknologi robot untuk pelayanan publik atau edukasi.	Rp96.320.000,00	Rp96.320.000,00	Rp96.320.000,00	Rp96.320.000,00	Rp96.320.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
75	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan, Pengelolaan, Analisis dan <i>Upgrade</i> Aplikasi https://simbg.semarangkota.go.id/)	Mempermudah pengurusan izin bangunan gedung secara <i>online</i> .	Rp99.900.000,00	Rp99.900.000,00	Rp99.900.000,00	Rp99.900.000,00	Rp99.900.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
76	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- <i>Software</i> (Pengembangan <i>Virtual Tour</i> Kota Semarang)	Promosi pariwisata berbasis teknologi imersif.	Rp4.250.000.000,00	Rp4.250.000.000,00	Rp4.250.000.000,00	Rp4.250.000.000,00	Rp4.250.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
77	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi https://labling.semarangkota.go.id/)	Mendukung digitalisasi layanan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mengajukan uji sampel, memantau hasil pengujian kualitas lingkungan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
78	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan <i>Web</i> https://e-radio.semarangkota.go.id/)	Menyediakan layanan radio <i>streaming</i> resmi Pemerintah Kota Semarang sebagai media informasi, edukasi, dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
79	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan <i>Web</i> https://sitamu.semarangkota.go.id/)	Mempermudah pengelolaan tamu dan kunjungan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, meningkatkan keamanan dan keteraturan administrasi tamu.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
80	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi API https://wa.simapp.semara ngkota.go.id/)	Menyediakan layanan API <i>WhatsApp</i> resmi untuk integrasi layanan publik, memudahkan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan interaktif.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
81	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan Aplikasi https://myinspektorat.inspektorat.semarangkota.go.id/)	Mendukung digitalisasi pengawasan dan pelaporan oleh Inspektorat, sehingga proses audit internal lebih transparan dan terdokumentasi.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
82	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pengembangan Aplikasi https://tantekepo.semara ngkota.go.id/cp_Login/)	Menyediakan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi perangkat daerah di Kota Semarang, mempercepat proses penandatanganan dokumen, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

83	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi <i>Mobile</i> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semarangkota.pantausemar)	Memudahkan masyarakat memantau wilayah secara <i>real time</i> melalui CCTV <i>online</i> di aplikasi	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
84	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi https://pantausemar.sem.arangkota.go.id/)	Memudahkan masyarakat memantau wilayah secara <i>real time</i> melalui CCTV <i>online</i> di <i>website</i>	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
85	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi https://gerbangharapan.semarangkota.go.id/)	Menyediakan layanan pendataan dan pengelolaan bantuan sosial agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
86	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi <i>Mobile</i> Sigadis : https://play.google.com/store/apps/details?id=semarangkota.sigadis&pli=1)	SIGADIS Merupakan Aplikasi Yang Mencakup Semua Pelayanan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Semarang. Dapatkan Informasi Terupdate dan Kemudahan Dalam Mengakses Layanan Pemerintah Kota Semarang Dalam Genggaman Anda.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
87	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi https://layanan.bagrumah.tangga.semarangkota.go.id/)	Mempermudah pengajuan dan <i>monitoring</i> layanan rumah tangga pemerintah seperti perawatan fasilitas, perbaikan, dan pemeliharaan sarana, peminjaman ruang/gedung balaikota	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
88	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Pembuatan Aplikasi https://myinspektorat.inspektorat.semarangkota.go.id/login)	Mendukung digitalisasi proses pengawasan, audit internal, dan tindak lanjut rekomendasi oleh Inspektorat Kota Semarang. Mempercepat penyampaian laporan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan proses pembinaan dan pengawasan berjalan efektif dengan jejak digital yang terdokumentasi.	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
89	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelaksanaan Kelas Ibu hamil,AMPSR,Peningkatan kompetensi kader	1.Optimalisasi peran linsek dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader	Rp362.680.000,00	Rp597.985.850,00	Rp717.583.000,00	Rp861.100.000,00	Rp1.033.000.000,00	Dinas Kesehatan
90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Konseling KB Pasca Salin, Pelaksanaan Kelas BBLR	1.Peningkatan capaian KB Pasca Salin 2.Pemantauan dan pendampingan BBLR	Rp20.500.000,00	Rp46.200.000,00	Rp56.000.000,00	Rp67.000.000,00	Rp85.000.000,00	Dinas Kesehatan
91	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pembinaan Pelayanan Ramah Anak	Meningkatnya pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Rp3.900.000,00	Rp51.275.000,00	Rp65.000.000,00	Rp78.000.000,00	Rp97.000.000,00	Dinas Kesehatan
92	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	1. Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 2. AMPSR	1. Meningkatkan pelayanan Balita 2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu balita	Rp5.100.000,00	Rp846.670.000,00	Rp1.016.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp1.350.000.000,00	Dinas Kesehatan

93	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelaksanaan Kelas Ibu hamil,AMPSR,Peningkatan kompetensi kader	1.Optimalisasi peran linsek dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader	Rp362.680.000,00	Rp597.985.850,00	Rp717.583.000,00	Rp861.100.000,00	Rp1.033.000.000,00	Dinas Kesehatan
94	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Konseling KB Pasca Salin, Pelaksanaan Kelas BBLR	1.Peningkatan capaian KB Pasca Salin 2.Pemantauan dan pendampingan BBLR	Rp20.500.000,00	Rp46.200.000,00	Rp56.000.000,00	Rp67.000.000,00	Rp85.000.000,00	Dinas Kesehatan
95	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan kejadian kebakaran secara cepat dengan dukungan GPS tracking armada dan komunikasi digital	Waktu respons kebakaran lebih cepat; kerugian material dan korban jiwa berkurang	Rp4.591.859.398,00	Rp958.100.000,00	Rp1.151.337.813,00	Rp1.200.000.000,00	Rp1.210.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran
96	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Operasi penyelamatan berbasis peta digital dan koordinasi melalui pusat komando	Proses evakuasi lebih cepat dan terarah; keselamatan warga meningkat	Rp83.489.940,00	Rp70.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp95.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran
97	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Simulasi dan Pelatihan bagi keluarga tanggap kebakaran rumah tangga melalui pertemuan langsung	Dengan simulasi dan pelatihan, keluarga tanggap kebakaran rumah tangga dapat menyelamatkan diri lebih cepat saat terjadi kebakaran.	-	Rp50.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp125.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran
98	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pengelolaan Pengaduan	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum tidak terjadi lagi dan bisa diminimalisir dengan ditindaklanjuti aduan yang masuk	Rp121.602.480,00	Rp263.034.100,00	Rp278.034.100,00	Rp300.039.100,00	Rp300.039.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang
99	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat terjaga dengan baik	Rp153.009.499,00	Rp320.525.166,00	Rp390.525.166,00	Rp400.525.166,00	Rp400.525.166,00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang
100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pengembangan Aplikasi/Software untuk pelayanan rumah sakit	1. Mempermudah Pasien/Masyarakat dalam menerima pelayanan 2. Mempermudah dan mempercepat administrasi dalam pelayanan rumah sakit	Rp325.750.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp400.000.000,00	RSWN
101	meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sunatan Massal	-	Rp150.000.000,00	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat

102	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Transportasi Semarang IOS / Transportasi Semarang IOS (https://itunes.apple.com/us/app/transport-asi-semarang/id1165210726?mt=8)	Memberikan informasi layanan transportasi umum (jadwal BRT, rute, halte); membantu mobilitas masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
103	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Dashboard DKK Semarang / <i>Dashboard</i> DKK Semarang (http://dinkes.semarangkota.go.id/dashboard/)	Visualisasi data kesehatan; membantu analisis, <i>monitoring</i> , dan pengambilan keputusan di sektor kesehatan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota
104	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	HEWS DKK Semarang / HEWS DKK Semarang (http://dinkes.semarangkota.go.id/hews/)	<i>Health Early Warning System</i> ; deteksi dini penyakit menular dan kewaspadaan kesehatan masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota
105	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	GISMAP DKK Semarang / GISMAP DKK Semarang (http://dinkes.semarangkota.go.id/gismap/)	Peta digital sebaran kesehatan (fasilitas, kasus penyakit, layanan); mendukung analisis spasial kesehatan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota
106	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Dinas Kesehatan / <i>Website</i> Dinas Kesehatan (http://www.dinkes.semarangkota.go.id/)	Informasi layanan kesehatan publik, fasilitas, dan program kesehatan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
107	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIF / Sistem Informasi Instalasi Farmasi (<i>offline</i>)	Manajemen data instalasi farmasi; stok obat dan pelayanan farmasi (<i>offline</i>).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Kesehatan
108	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi <i>e-leger</i> / Aplikasi <i>e-leger</i> (http://legerpu.semarangkota.go.id/)	<i>Database</i> Jalan, Jembatan dan Leger Dinas Pekerjaan Umum	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
109	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Sistem Informasi Geografis Penerangan Jalan Umum / Sistem Informasi Geografis Penerangan Jalan Umum (http://sigpju.semarangkota.go.id/)	Peta dan manajemen penerangan jalan umum; memudahkan perencanaan dan pemeliharaan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
110	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Resmi DPU / <i>Website</i> Resmi DPU (https://dpu.semarangkota.go.id/)	Informasi pekerjaan umum: infrastruktur, jalan, serta layanan teknis DPU.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
111	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Layanan <i>Smart Health</i> yohsehat / Aplikasi Layanan <i>Smart Health</i> (https://yohsehat.semarangkota.go.id/)	Layanan telekonsultasi dan informasi kesehatan digital untuk warga.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
112	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Layanan UHC / Aplikasi Layanan UHC (https://uhc.semarangkota.go.id/login)	Sistem pelacakan layanan kesehatan UHC; manajemen peserta dan klaim layanan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
113	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Siraga Sistem Informasi Olahraga / Sistem Informasi Olahraga (https://siraga.semarangkota.go.id/)	Manajemen data olahraga dan event; pendaftaran atlet dan pengelolaan kompetisi.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

114	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	sayangbunda Aplikasi pemantauan Ibu Hamil / Aplikasi pemantauan Ibu Hamil (https://sayangbunda.semarangkota.go.id/)	Pemantauan kesehatan ibu hamil; data kunjungan dan status kehamilan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
115	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	sayanganak Aplikasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak / Aplikasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak (https://sayanganak.semarangkota.go.id/)	<i>Monitoring</i> tumbuh kembang anak; intervensi gizi dan layanan kesehatan anak.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
116	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> resmi dishub kota semarang / <i>website</i> resmi dishub kota semarang (dishub.semarangkota.go.id)	Media informasi transportasi dan perhubungan; publikasi program, layanan BRT, serta informasi lalu lintas.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
117	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Infomudik Portal <i>Website</i> Informasi Mudik Kota Semarang / Portal <i>Website</i> Informasi Mudik Kota Semarang (https://infomudik.semarangkota.go.id/)	Memberikan informasi arus mudik, posko, dan layanan darurat untuk pemudik di Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
118	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Dinas Pengendalian Penduduk dan KB / <i>Website</i> Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (https://disdaldukkb.semarangkota.go.id/)	Informasi layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
119	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman / <i>Website</i> Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (https://disperkim.semarangkota.go.id/)	Informasi program, layanan, dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
120	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Transsemarang / <i>Website</i> Transsemarang (https://transsemarang.semarangkota.go.id/)	Informasi jadwal, rute, dan layanan transportasi BRT Trans Semarang.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
121	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	sistem informasi cek CCTV Kota Semarang / sistem informasi cek CCTV Kota Semarang (https://sicctv.semarangkota.go.id/)	Membantu masyarakat memantau kondisi lalu lintas dan keamanan kota melalui CCTV secara <i>real time</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
122	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	portal siaga corona kota semarang / portal siaga corona kota semarang (https://siagacorona.semarangkota.go.id/)	Memberikan informasi resmi terkait Covid-19 (data kasus, layanan kesehatan, protokol) agar masyarakat mendapat sumber terpercaya.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
123	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Instrumen <i>Self Assessment</i> Resiko Covid-19 / Aplikasi Instrumen <i>Self Assessment</i> Resiko Covid-19 (https://resikocovid19.semarangkota.go.id/)	Membantu masyarakat menilai mandiri tingkat risiko Covid-19 mereka, sehingga bisa lebih waspada dan melakukan tindakan pencegahan yang sesuai.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
124	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	form Pendaftaran Mobil Nikah Gratis / Form Pendaftaran Mobil Nikah Gratis (<i>offline</i> akses)	Memberikan akses bagi pasangan calon pengantin untuk mendaftar layanan mobil nikah gratis secara mudah, tanpa harus datang langsung.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

125	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Form Pendaftaran Mobil Nikah Gratis / Form Pendaftaran Mobil Nikah Gratis (https://mobilnikahgratis.semarangkota.go.id/)	Memberikan akses bagi pasangan calon pengantin untuk mendaftar layanan mobil nikah gratis secara mudah, tanpa harus datang langsung.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
126	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) / Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) (<i>offline</i>)	Membantu puskesmas mengelola layanan pasien (rekam medis, obat, jadwal, laporan) sehingga pelayanan kesehatan lebih efisien dan terdاتا.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
127	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIMOJAN / SIMOJAN (http://simojan.semarangkota.go.id/)	SIMOJAN Kota Semarang bermanfaat untuk <i>monitoring</i> jembatan	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
128	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Sistem Informasi Jalan / Sistem Informasi Jalan (http://jalanpu.semarangkota.go.id/)	Sistem Informasi Jalan Kota Semarang bermanfaat untuk menyediakan data dan informasi kondisi jalan secara digital sehingga mendukung perencanaan, pemeliharaan, serta peningkatan infrastruktur jalan secara lebih efektif dan transparan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
129	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website RSUD / Website RSUD (http://rsud.semarangkota.go.id)	Website RSUD Kota Semarang bermanfaat sebagai sarana informasi dan layanan kesehatan daring yang memudahkan masyarakat dalam mengakses profil rumah sakit, jadwal layanan, serta berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
130	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>One Map</i> Kota Semarang / <i>One Map</i> Kota Semarang (http://distaru.semarangkota.go.id/semarang/index.php?webgis=tataruang)	<i>One Map</i> Kota Semarang bermanfaat sebagai sistem informasi geospasial terpadu yang menyajikan data tata ruang secara akurat dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan pembangunan daerah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENATAAN RUANG
131	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Peta Pendistrian Kota Semarang / Aplikasi Peta Pendistrian Kota Semarang (http://pedestrianpu.semarangkota.go.id/)	Aplikasi Peta Pendistrian Kota Semarang bermanfaat untuk menyediakan informasi jalur pedestrian secara digital sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses data fasilitas pejalan kaki dan mendukung perencanaan kota yang ramah pejalan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
132	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	aplikasi keluar masuk barang bansos / aplikasi keluar masuk barang bansos (https://inventoribansos.semarangkota.go.id/)	Aplikasi Keluar Masuk Barang Bansos Kota Semarang bermanfaat untuk mempermudah pencatatan, <i>monitoring</i> , dan pengelolaan distribusi bantuan sosial agar lebih transparan, akurat, dan akuntabel.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS SOSIAL
133	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	puskesmas Pendaftaran <i>Online</i> Pasien Puskesmas / Pendaftaran <i>Online</i> Pasien Puskesmas Kota Semarang (epuskesmas.semarangkota.go.id)	Pendaftaran <i>Online</i> Pasien Puskesmas Kota Semarang bermanfaat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dengan proses pendaftaran yang lebih cepat, efisien, dan transparan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
134	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	ATCS Kota Semarang / ATCS Kota Semarang (http://www.lalinsemarang.info/)	ATCS Kota Semarang bermanfaat sebagai aplikasi pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi yang terintegrasi dengan SPBE daerah untuk mendukung <i>monitoring</i> , pengendalian, dan pelayanan informasi lalu lintas secara cepat dan transparan kepada masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
135	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Kantor Ketahanan Pangan / <i>Website</i> Kantor Ketahanan Pangan (http://ketahananpangan.semarangkota.go.id)	Memberikan informasi program ketahanan pangan, harga bahan pokok, serta layanan terkait pangan bagi masyarakat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
136	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SI TTRS / SI TTRS (http://dinkes.semarangkota.go.id/ttrs_smg/)	Portal informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan puskesmas secara <i>real time</i> .	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

137	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Web Gis Perijinan Kota Semarang / Web Gis Perijinan Kota Semarang (http://distaru.semarangkota.go.id/semarang/index.php?webgis=perizinan)	memudahkan masyarakat mengakses informasi spasial terkait perizinan secara transparan dan akurat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS PENATAAN RUANG
138	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pendaftaran Penduduk Sementara / Aplikasi Pendaftaran Penduduk Sementara (offline akses)	membantu pencatatan dan <i>monitoring</i> data penduduk sementara agar tertib administrasi kependudukan.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
139	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> untuk melakukan donasi alat disabilitas / <i>website</i> untuk melakukan donasi alat disabilitas (sidona.semarangkota.go.id)	Memudahkan masyarakat berdonasi alat bantu bagi penyandang disabilitas secara transparan dan tepat sasaran.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS SOSIAL
140	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi pendukung SIAK / Aplikasi pendukung SIAK (offline akses)	Mendukung akses data administrasi kependudukan secara luring.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
141	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	MYRSWN ((https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sim.rswn.epublic&hl=id))	Aplikasi layanan publik RS Wongsonegoro (pendaftaran <i>online</i> , info layanan, antrian).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	RSWN
142	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIMENIPEDI ((https://simenipedi.satpolpp.semarangkota.go.id/))	Pemetaan pelanggaran dan ketertiban berbasis peta digital (oleh Satpol PP).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
143	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIGAB (https://sigab.semarangkota.go.id/)	Sistem tanggap darurat (ambulans/bencana) untuk respon cepat kejadian gawat.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	INSPEKTORAT
144	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem pemantauan kualitas pangan pada Pasar Tradisional agar mendapatkan label hijau. Mengusung semangat kolaborasi multiheliks (Disdag, Dinkes, Disdik, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskominfo, TP-PKK, Kepolisian, TNI, LP2K, LPMK)	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar di Pasar-pasar tradisional Kota Semarang	Rp165.965.311,00	Rp1.325.862.935,00	Rp1.723.621.815,00	Rp2.240.708.359,00	Rp2.912.920.867,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
145	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan kualitas dan mutu pangan menggunakan mobil laboratorium pada pangan segar maupun pangan olahan yang beredar di masyarakat baik di kantin sekolah, pedagang kaki lima dan keliling, pasar rakyat maupun pasar modern.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar di Pasar-pasar modern, kantin sekolah, pedagang	Rp600.629.254,00	Rp130.000.000,00	Rp169.000.000,00	Rp219.700.000,00	Rp285.610.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
146	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Pembentukan Kader Keamanan Pangan baik di Wilayah dengan menggandeng PKK maupun di Pasar Tradisional dengan mengadndeng pedagang pasar	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar sampai dengan lingkungan wilayah Kecamatan	Rp153.500.000,00	Rp780.818.030,00	Rp1.015.163.439,00	Rp1.319.582.471,00	Rp1.715.457.212,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

147	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berdasarkan Sumber Daya Lokal	Sosialisasi, Pelatihan, Penyuluhan Pola Konsumsi B2SA berbasis sumber daya lokal	Angka Kecukupan Gizi/ Semakin meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi B2SA berbasis sumber daya lokal	Rp91.645.170,00	Rp119.138.721,00	Rp154.880.337,00	Rp201.344.438,00	Rp261.747.770,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
148	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum yang ramah lingkungan	Tersedianya Angkutan Umum yang ramah lingkungan	Rp260.148.153.000,00	Rp267.043.559.600,00	Rp294.802.623.130,00	Rp316.047.565.900,00	Rp340.670.992.300,00	Dinas Perhubungan
149	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengembangan Smart Lalu Lintas	Pantauan dan pengendalian lalu lintas secara otomatis	Rp7.380.467.158,00	Rp7.500.000.000,00	Rp7.650.000.000,00	Rp7.803.000.000,00	Rp7.959.060.000,00	Dinas Perhubungan
150	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Peningkatan efisiensi operasional Terminal dengan menggunakan sistem digital	Tersedianya sistem digital untuk meningkatkan efisiensi operasional terminal		Rp277.616.460,00	Rp283.168.780,00	Rp288.823.160,00	Rp300.500.000,00	Dinas Perhubungan
151	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerapan Zonasi Parkir Tepi Jalan Umum	Peningkatan retribusi dari penerapan zonasi parkir di Tepi Jalan Umum	Rp1.636.612.440,00	Rp1.900.000.000,00	Rp1.938.000.000,00	Rp1.976.760.000,00	Rp2.016.295.200,00	Dinas Perhubungan
152	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Dana BOP PAUD 4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Penganggaran BOS/BOP dengan menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)	Penggunaan BOSP lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien	Rp223.457.782.644,00	Rp223.457.782.644,00	Rp223.457.782.644,00	Rp223.457.782.644,00	Rp223.457.782.644,00	Dinas Pendidikan
153	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Aplikasi SPMB Online	Penerimaan Peserta Didik jenjang PAUD, SD, SMP secara online	Rp356.976.660,00	Rp360.000.000,00	Rp360.000.000,00	Rp360.000.000,00	Rp360.000.000,00	Dinas Pendidikan
154	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1. Pembangunan SMP Negeri 2. Pembangunan TK Negeri	Diharapkan minimal di semua kecamatan mempunyai 1 SMP Negeri dan 1 TK Negeri	Rp8.421.600.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp6.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan keakuratan data yang diinput ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai satu2nya sumber data pendidikan	Rp277.721.360,00	Rp335.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Dinas Pendidikan
156	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penetapan sekolah inklusi dan pengembangannya	Memberi fasilitas pendidikan bagi siswa inklusi	Rp138.100.000,00	Rp150.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Dinas Pendidikan

157	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pendampingan untuk peserta didik dan guru	Membantu peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dalam mendapatkan perlakuan yang adil dalam sekolah	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Dinas Pendidikan
158	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyusunan Kajian, pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan serta pilot project di beberapa satuan pendidikan, evaluasi hasil pilot project, rencana penerapan di satuan pendidikan, pelaksanaan evaluasi	Diharapkan lulusan TK, SD dan SMP di Kota Semarang mempunyai sertifikasi khusus yang dapat menjadi nilai tambah bagi peserta didik saat memasuki jenjang pendidikan di atasnya	Rp500.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp650.000.000,00	Rp650.000.000,00	Rp650.000.000,00	Dinas Pendidikan
159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pembangunan UPTD Puskesmas Tlogosari Kulon	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp4.100.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Lanjutan pembangunan UPTD puskesmas genuk	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp4.100.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Lanjutan pembangunan UPTD puskesmas pegandan	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp4.100.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Lanjutan pembangunan UPTD puskesmas krobokan	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp4.100.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pembangunan pemenuhan gedung RSUD Mijen	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp2.306.463.294,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
164	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pembangunan Pustu Ratu Rath	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp1.379.120.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pembangunan Pustu Beringin	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp1.379.120.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
166	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pembangunan Pustu Jabungan	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp830.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
167	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi UPTD puskesmas plamongansari	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan

168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi UPTD puskesmas tambakaji	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
169	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi Pustu Kekancan Mukti	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi UPTD puskesmas halmahera	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi parkir RSUD Mijen 1.02.02.2.02.0034	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
172	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi UPTD puskesmas ngemplak simongan	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
173	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi pustu pedurungan kidul	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi Instalasi Farmasi	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp200.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Belanja Modal Pengadaan Rehabilitasi Gedung Farmasi BLUD Puskesmas Halmahera	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp199.500.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi Gedung DKK	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp199.500.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi UPTD puskesmas bangetayu	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp167.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi UPTD puskesmas kaligawe	Menyediakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata	Rp132.500.000,00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
179	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	Peningkatan Jalan RM. Hadi Subeno (Simpang Wonolopo - Pasar Ace) Ngaliyan	Meningkatkan kelancaran arus transportasi dan aksesibilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi sekitar pasar dan kawasan permukiman.	Rp5.367.533.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
180	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pembangunan Jalan Jangli - UNDIP Tahap IV	Memperkuat konektivitas kawasan pendidikan, mengurangi kemacetan, dan menunjang kegiatan akademik maupun ekonomi masyarakat.	Rp3.400.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum

181	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Persen	Memberikan akses yang lebih cepat dan aman antarwilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa.	Rp5.400.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
182	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Pelebaran Jembatan Kudu - Manangeng	Mengurangi titik kemacetan, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas.	Rp10.400.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum
183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Mini Excavator	Menjamin kesiapan alat berat dalam mendukung pekerjaan infrastruktur dan penanganan darurat, sehingga pelayanan publik lebih efektif.	Rp940.585.617,00					Dinas Pekerjaan Umum
184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Mesin E-Tiket Trans Semarang	Mendukung sistem pembayaran non-tunai yang transparan dan efisien, meningkatkan kenyamanan penumpang serta akuntabilitas pengelolaan transportasi publik.	Rp1.800.000.000,00					Dinas Perhubungan
185	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Mesin E-Tiket Trans Semarang	Menjamin kelancaran operasional sistem tiket elektronik sehingga pelayanan transportasi publik tetap modern, andal, dan ramah pengguna.	Rp1.146.000.000,00					Dinas Perhubungan
186	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Pemeliharaan <i>Traffic Light</i> ATCS	Menjaga keandalan pengaturan lalu lintas berbasis teknologi, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.	Rp718.136.210,00					Dinas Perhubungan
187	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemeliharaan Servis Alat Uji Kendaraan Bermotor	Memastikan akurasi pengujian kelayakan kendaraan, sehingga kendaraan yang beroperasi lebih aman, ramah lingkungan, dan sesuai standar teknis.	Rp498.233.379,00					Dinas Perhubungan
188	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Pengadaan Dan Pemasangan Paku Jalan <i>Solar Cell</i> Lokasi Rawan Kecelakaan	Meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan penerangan jalan berbasis energi terbarukan, mengurangi risiko kecelakaan di titik rawan, serta mendukung efisiensi energi.	Rp652.014.000,00					Dinas Perhubungan
189	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemberian bantuan permakanan bagi PPKS	Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi PPKS	Rp4.620.000.000,00	Rp5.080.000.000,00	Rp5.100.000.000,00	Rp5.100.000.000,00	Rp5.110.000.000,00	Dinas Sosial
190	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Tenaga Keamanan (BU)	Memberikan rasa aman serta melindungi siswa, guru, dan aset sekolah.	Rp1.446.900.000,00					Dinas Pendidikan
191	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pembangunan Fasilitas TK Negeri	Menyediakan sarana pendidikan anak usia dini yang layak, aman, dan berkualitas guna mendukung tumbuh kembang serta kesiapan belajar anak.	Rp1.745.741.400,00					Dinas Pendidikan
192	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rehabilitasi Fasilitas TK Negeri	Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan anak usia dini agar lebih aman, nyaman, dan mendukung proses belajar secara optimal.	Rp555.875.536,00					Dinas Pendidikan
193	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pembangunan Fasilitas SD Negeri	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran.	Rp14.348.400.000,00					Dinas Pendidikan

194	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rehabilitasi Fasilitas SD Negeri	Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan dasar agar lebih layak, aman, serta mendukung proses belajar-mengajar yang optimal.	Rp29.199.000.000,00					Dinas Pendidikan
195	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pembangunan Fasilitas SMP Negeri	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan menengah pertama yang representatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.	Rp13.132.825.480,00					Dinas Pendidikan
196	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rehabilitasi Fasilitas SMP Negeri	Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan menengah pertama agar lebih layak, aman, serta menunjang proses belajar-mengajar yang efektif.	Rp5.030.480.400,00					Dinas Pendidikan
197	Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Menyediakan dan menyalurkan barang kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, serta menunjang kegiatan pendidikan maupun sosial.	Rp4.895.280.400,00					Dinas Sosial
198	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Menyediakan tenaga pendukung operasional guna menjaga kelancaran, ketertiban, serta kualitas layanan di lingkungan satuan pendidikan.	Rp969.014.440,00					Dinas Sosial
199	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Menyediakan tenaga pendukung yang bertugas membantu penanganan permasalahan sosial sehingga layanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan efektif.	Rp1.805.045.440,00					Dinas Sosial
200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberian PMT Posyandu	meningkatkan status gizi balita dan ibu hamil, mencegah <i>stunting</i> dan masalah gizi buruk lainnya, serta memberikan edukasi gizi dan kesehatan kepada orang tua mengenai pentingnya pola makan sehat dan seimbang	Rp399.000.000,00	Rp399.000.000,00	Rp399.000.000,00	Rp399.000.000,00	Rp399.000.000,00	Kecamatan Semarang Utara
201	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) KOTA SEMARANG	meningkatkan keselamatan lalu lintas di malam hari, mengurangi risiko kecelakaan, dan memberi kenyamanan bagi pengguna jalan.	Rp5.000.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
202	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PJU Lingkungan (Swadaya Masyarakat)	mendukung partisipasi warga dalam penerangan lingkungan, menekan tindak kriminalitas, dan menciptakan rasa aman.	Rp4.272.222.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
203	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) RETROVIT KOTA SEMARANG	efisiensi energi melalui lampu hemat energi, mendukung program kota ramah lingkungan dan berkelanjutan.	Rp3.500.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
204	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Optimalisasi 100 Titik Lampu PJU Kota Lama	mendukung sektor pariwisata Kota Lama, menjaga estetika kawasan <i>heritage</i> , dan memperpanjang jam aktivitas ekonomi malam hari.	Rp3.200.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

205	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARA AN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengadaan Komponen Pemeliharaan PJU (1 Tahun)	memastikan lampu jalan selalu berfungsi optimal sehingga penerangan tetap terjamin sepanjang tahun.	Rp2.274.037.466,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
206	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARA AN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Wilayah Kec. Mijen, Kec. Ngaliyan, Kec. Pedurungan	memperluas cakupan penerangan di kawasan pinggiran, menekan kesenjangan pembangunan antarwilayah.	Rp2.000.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
207	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARA AN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Wilayah Kec. Ngaliyan dan Kec. Mijen	menambah akses cahaya di jalur transportasi utama dan perumahan, menunjang kelancaran mobilitas warga.	Rp1.966.115.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
208	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Truk <i>Skylift</i>	mendukung operasional pemeliharaan PJU dan sarana kota, mempercepat perbaikan kerusakan lampu jalan.	Rp1.902.580.040,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
209	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARA AN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Wilayah Kec. Semarang Barat, Kec. Gunungpati, Kec. Mijen, Kec. Ngaliyan dan Kec. Tugu	pemerataan penerangan di berbagai kecamatan, mendukung keamanan, aktivitas sosial, dan ekonomi warga.	Rp1.093.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
210	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARA AN PSU PERUMAHAN	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) KOTA SEMARANG	peningkatan kenyamanan berlalu lintas di seluruh kota, mendukung <i>smart mobility</i> dan <i>smart living</i> .	Rp1.000.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
211	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Modal Penataan Kawasan TBRS	memperkuat fasilitas budaya & seni, menjadi ruang interaksi sosial masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup perkotaan.	Rp2.831.169.541,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
212	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Umum di Kota Semarang 4 (Pokir)	menjaga kenyamanan warga melalui fasilitas umum yang layak, sekaligus meningkatkan akses pelayanan publik.	Rp1.345.000.000,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

213	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Fasilitas Olahraga di Kota Semarang 2 (Pokir)	mendorong gaya hidup sehat masyarakat, menyediakan sarana olahraga yang aman & memadai.	Rp1.295.000.000,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
214	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Umum di Kota Semarang 5 (Pokir)	memperpanjang usia pakai fasilitas kota, mendukung kenyamanan dan keamanan warga.	Rp1.245.000.000,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
215	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Umum di Kota Semarang 1 (Pokir)	meningkatkan kualitas sarana perkotaan, memperkuat interaksi sosial dan pelayanan publik.	Rp1.020.000.000,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
						Rp716.998.940.129,25	Rp581.837.146.457,31	Rp616.754.998.549,90	Rp642.597.333.005,79	Rp669.842.261.421,32	

ROAD MAP IMPLEMENTASI SMART CITY SEMARANG Tahun 2025 S/d 2029

SMART BRANDING

NO	RENCANA KEGIATAN DI TAHUN										OPD
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output/ Manfaat	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kajian Pengembangan Semarang Lama dan Riset Budaya Kota Semarang	peningkatan nilai ekonomi dan potensi wisata melalui konservasi dan revitalisasi, sementara manfaat Riset Budaya Kota Semarang adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang kekayaan budaya lokal seperti seni dan tradisi, yang keduanya dapat berdampak pada perencanaan kota yang lebih baik, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan peningkatan kebanggaan serta kepedulian masyarakat terhadap warisan kot	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kajian Audit Energi dan Lingkungan dan reaktivasi pasar semawis	efisiensi penggunaan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penciptaan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti daur ulang dan pengolahan sampah menjadi sumber energi, yang berujung pada kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kajian pelestarian budaya lokal dan keberlanjutan kota lama berikut juga konservasi warisan budaya dan arsitektur	pelestarian identitas dan karakter kota, peningkatan daya tarik ekonomi melalui pariwisata dan penciptaan lapangan kerja, serta pendidikan dan pembangunan wawasan sejarah serta intelektual bagi masyarakat. Outputnya dapat berupa dokumen kajian, rencana konservasi, program revitalisasi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pelestarian warisan budaya.	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penguatan daya saing daerah	Meningkatkan peluang intervensi daya saing daerah	Rp150.000.000,00	Rp165.000.000,00	Rp181.500.000,00	Rp199.650.000,00	Rp219.615.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Penyelenggaraan Program CSR Kota Semarang	1. Mensinkronkan program pembangunan Kota Semarang dengan program CSR dari Perusahaan yang berlokasi di Kota Semarang 2. Memfasilitasi penyelenggaraan CSR baik dari perorangan maupun dari Perangkat Daerah Kota Semarang 3. Penyediaan sistem informasi yang memuat seluruh aspek penyelenggaraan program CSR di Kota Semarang	Rp392.245.400,00	Rp510.189.090,00	Rp510.189.090,00	Rp510.189.090,00	Rp510.189.090,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang di kelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Meningkatkan prestasi olahraga daerah hingga tingkat nasional/internasional. Menjadi aset daerah yang bisa dimanfaatkan untuk event olahraga maupun non-olahraga. Membantu program pemerintah dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Menjadi daya tarik wisata olahraga (<i>sport tourism</i>) dan mendorong ekonomi lokal.	Rp3.715.173.518,00	Rp4.086.690.869,80	Rp4.495.359.956,78	Rp4.944.895.952,46	Rp5.439.385.547,70	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	<i>Semarang Night Carnival</i>	Meningkatkan apresiasi komunitas seni budaya terhadap kesenian lokal	Rp671.437.370,00	Rp759.901.956,00	Rp835.892.152,00	Rp919.481.367,00	Rp1.011.429.503,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Digital Marketing dan Tools Marketing</i>	Aplikasi Konco Dolan: aplikasi yang membantu pengguna menjelajahi berbagai atraksi wisata, event, dan fasilitas di Semarang.	Rp272.280.000,00	Rp630.000.000,00	Rp640.000.000,00	Rp650.000.000,00	Rp660.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

9	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Telemarketing dan Influencer	Memperluas jangkauan promosi, meningkatkan minat kunjungan, serta membangun citra positif destinasi secara efektif	Rp150.000.000,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Anugerah Bangsa Berwisata di Indonesia	Mendorong apresiasi dan kompetisi sehat dalam sektor pariwisata	Rp149.944.050,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Pariwisata Semarang / Website Pariwisata Semarang (http://pariwisata.semarangkota.go.id/)	Promosi destinasi pariwisata; informasi event, atraksi, dan panduan wisata.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Info Pariwisata dan UKM / Website Info Pariwisata dan UKM (http://infowisata.ukm.semarangkota.go.id/)	Website Info Pariwisata dan UKM Kota Semarang bermanfaat sebagai media promosi dan informasi untuk memperkenalkan destinasi wisata serta produk UMKM lokal guna meningkatkan daya tarik wisata dan perekonomian daerah.	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
13	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Kampung Tematik Kota Semarang / Website Kampung Tematik Kota Semarang (https://kampungtematik.semarangkota.go.id/)	Memberikan informasi lengkap kampung tematik Semarang sehingga warga & wisatawan bisa menjelajah potensi lokal (wisata, UMKM, budaya).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISARA
14	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi Pariwisata Kota Semarang IOS / Aplikasi Pariwisata Kota Semarang IOS (https://itunes.apple.com/us/app/pariwisata-semarang/id1164779113?ls=1&mt=8)	Panduan wisata digital Semarang (info destinasi, kuliner, hotel, event).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
15	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Pemandu Wisata Kota Semarang ((https://wissemar.semarangkota.go.id/))	Panduan wisata digital Semarang (informasi destinasi, event, kuliner, hotel).	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
16	PISANG LEGI	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0005 Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi (Festival Pangan)		Rp200.000.000,00	Rp260.000.000,00	Rp338.000.000,00	Rp439.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
17	Terbangunnya Program Kampung Iklim di Kota Semarang	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembangunan Kampung Iklim	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Rp1.533.685.032,00	Dinas Lingkungan Hidup
18	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Workshop Revitalisasi Kawasan Kampung Batik Rejomulyo	melestarikan warisan budaya batik, memperkuat ekonomi kreatif, sekaligus meningkatkan citra Kota Semarang sebagai pusat batik.	Rp4.721.738.806,00					Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
						Rp 12.606.504.176,00	Rp 8.735.466.947,80	Rp 9.306.626.230,78	Rp 9.945.901.441,46	Rp 10.663.704.172,70	

ROAD MAP IMPLEMENTASI SMART CITY SEMARANG Tahun 2025 S/d 2029
SMART SOCIETY

NO	RENCANA KEGIATAN DI TAHUN										OPD
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Output/Manfaat	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Hearing Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua DPRD), DPRD Bersholawat	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh Pimpinan DPRD, siraman Rohani dan memperkuat kerukunan antar warga masyarakat	Rp 2.994.191.206,00	Rp 4.200.152.792,00	Rp 4.644.510.582,00	Rp 4.837.915.775,00	Rp 4.873.441.561,00	Sekretariat DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	Kegiatan Reses anggota Dewan di masing - masing Dapil	Penyerapan Aspirasi dari Masyarakat yang ditujukan kepada Anggota Dewan secara tatap muka	Rp 7.714.200.498,79	Rp 8.144.297.305,00	Rp 9.005.928.329,00	Rp 9.380.950.256,00	Rp 9.449.836.455,00	Sekretariat DPRD
3	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Implementasi Sistem Merit dalam Tata Kelola ASN	Penyusunan dokumen perencanaan yang terkait dengan peningkatan harmonisasi tata kelola pemerintahan						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Strategi Pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Penanggulangan TBC Kota Semarang Tahun 2026-2030	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
7	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen NA dan Ranperda Pencegahan dan Penurunan Stunting	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS Kota Semarang Tahun 2026-2030	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

9	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Sehat Kota Semarang Tahun 2026-2030	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
10	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Pembangunan Digitalisasi Arsip Pemerintahan	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
11	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Semarang Kota Inklusif Tahun 2027-2030	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
12	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Semarang Kota Ramah Lanjut Usia 2027-2030	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
13	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Ketenagakerjaan Kota Semarang 2027-2030	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
14	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Peran Komunitas atau Organisasi Kepemudaan dalam Proses Pembangunan di Kota Semarang	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia			Rp 100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
15	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Optimalisasi Bonus Demografi dalam Pembangunan Kota Semarang	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia			Rp 100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
16	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Optimalisasi Layanan Keluarga Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Indeks Pembangunan Keluarga	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia					Rp 100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

17	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Bidang Pendidikan Kota Semarang Tahun 2030-2034	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia							Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
18	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Bidang Kesehatan Kota Semarang Tahun 2030-2034	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia							Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
19	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Bidang Kesejahteraan Sosial Kota Semarang Tahun 2030-2034	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia							Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
20	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RAD Bidang Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2030-2034	Penyusunan dokumen Perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia							Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
21	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
22	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
23	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

24	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Monev KLA	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
25	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan <i>Support System</i> untuk Kompetisi Olahraga, Seni dan Inovator Muda	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia		Rp 100.000.000,00				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
26	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kelas Khusus Olahraga Kota Semarang	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia			Rp 100.000.000,00			Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
27	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Kota Semarang	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia				Rp 100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
28	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Semarang	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia				Rp 100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
29	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Evaluasi Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kota Semarang	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia				Rp 100.000.000,00		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
30	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Evaluasi Cakupan Pelayanan Satuan Pendidikan di Kota Semarang	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia					Rp 100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

31	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Evaluasi Cakupan Pelayanan Puskesmas di Kota Semarang	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia						Rp 100.000.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
32	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Pelaksanaan SDGs/TPB Kota Semarang Tahun 2018-2030	Penyusunan Laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia							Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
33	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen RAD Pangan dan Gizi Tahun 2030-2034	Penyusunan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam							Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
34	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rencana Aksi Nasional Pengendalian Ekstrimisme (RAN PE)	Pencegahan intoleransi, ekstrimisme, radikalisme, terorisme	Rp 82.581.110,00	Rp 90.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 130.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kegiatan Penguatan dan Implementasi Bela Negara	Penyusunan/ Perubahan rencana aksi bela negara di daerah	Rencana Aksi Nasional Bela Negara	Pengamalan Nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan masyarakat Kota Semarang		Rp 50.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Masyarakat mendapat pendidikan wawasan kebangsaan	Rp 16.060.500,00	Rp 20.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 40.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kegiatan Penguatan dan Implementasi Bela Negara	sosialisasi/diseminasi/pe ndidikan dan pelatihan bela negara, serta kegiatan publikasi lainnya	Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	Pengenalan Bela Negara ke keluarga	-	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

38	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Fun Game Kebangsaan	Aktualisasi Nilai-nilai pancasila melalui kegiatan yang menarik minat masyarakat	Rp 390.433.830,00	Rp 400.000.000,00	Rp 410.000.000,00	Rp 420.000.000,00	Rp 430.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Reaktualisasi Kampung Pancasila	Kampung Pancasila memiliki kemampuan untuk revitalisasi melalui motivasi dan media sosial	Rp 47.400.000,00	Rp 53.000.000,00	Rp 58.000.000,00	Rp 63.000.000,00	Rp 68.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
40	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelatihan Pendidikan 4 Pilar dan Konsensus Nasional	Mengembangkan individu yang berpengetahuan, terampil, berintegritas, dan berkarakter Pancasila	Rp 192.495.000,00	Rp 198.000.000,00	Rp 203.000.000,00	Rp 208.000.000,00	Rp 213.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Political discussion competition	Memberikan wadah dan saluran bagi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kejadian unjuk rasa bersifat kekerasan guna menunjang pencapaian Indeks Demokrasi Kota Semarang	Rp 141.977.980,00	Rp 80.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp 95.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
42	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan ormas (Ormas Award, Ormas Expo, Festival Budaya Ormas dan <i>Fundraising</i>)	Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan melalui pemberdayaan organisasi masyarakat	Rp 715.120.260,00	Rp 629.712.872,00	Rp 765.562.507,00	Rp 762.718.560,00	Rp 765.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

43	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Fasilitasi Pemberdayaan Ormas	Meningkatnya peran ormas dalam kegiatan yang mendukung pembangunan Kota Semarang	Rp 215.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp 275.000.000,00	Rp 280.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
44	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah di Kota Semarang	Terciptanya kondusivitas terkait permasalahan premanisme di Kota Semarang	Rp 394.450.000,00	Rp 450.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 550.000.000,00	Rp 600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
45	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kajian Pendataan Organisasi Masyarakat di Kota Semarang dan Penyusunan Buku Profil Organisasi Masyarakat di Kota Semarang	Data mengenai organisasi masyarakat dapat tersusun dengan baik	Rp 110.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
46	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perumusan Kebijakan di Bidang Ket. Ekososbud dan Agama	Penguatan secara teknis untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
47	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Sosialisasi Perda P4GN	Masyarakat mendapat pendidikan mengenai Perda P4GN			Rp 60.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
48	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Relawan Anti Narkoba	Terbentuknya satgas aktif yang bergerak melawan narkoba di tiap kecamatan di Kota Semarang			Rp 550.000.000,00	Rp 600.000.000,00	Rp 600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

49	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Peningkatan Inklusi Sosial	Terbentuknya pemahaman masyarakat dan komponen masyarakat tentang pentingnya inklusi	Rp	50.000.000,00	Rp	55.000.000,00	Rp	60.000.000,00	Rp	65.000.000,00	Rp	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
50	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Rp	580.397.684,00	Rp	500.000.000,00	Rp	350.000.000,00	Rp	500.000.000,00	Rp	350.000.000,00	Badan Penanggulan n Bencana Daerah
51	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Rp	294.077.371,00	Rp	213.090.303,00	Rp	350.000.000,00	Rp	350.000.000,00	Rp	373.091.684,00	Badan Penanggulan n Bencana Daerah
52	PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	<i>Urban Farming Corner</i> (UFC) Pelatihan	Sebagai pusat pembelajaran dan konsultasi tentang pertanian perkotaan, dan Berbasis non TIK	Rp	815.011.697,45	Rp	855.762.282,32	Rp	898.550.396,44	Rp	943.477.916,26	Rp	990.651.812,07	Dinas Pertanian
53	PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kobar Tani (Kongkow Bareng Petani)	Memberikan informasi Pertanian yang ditayangkan secara <i>live</i> melalui sosial media dan disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya.	Rp	16.040.014,00	Rp	16.842.014,70	Rp	17.684.115,44	Rp	18.568.321,21	Rp	19.496.737,27	Dinas Pertanian
54	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kajian terkait tema sosial dan budaya	Sebagai bahan dasar dalam penentuan kebijakan terkait urusan sosial dan budaya masyarakat	Rp	600.000.000,00	Rp	660.000.000,00	Rp	726.000.000,00	Rp	798.000.000,00	Rp	877.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
55	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	<i>Workshop</i> , Pelatihan dan Fasilitasi Perolehan Hak Kekayaan Intelektual	meningkatkan kepemilikan dan pengakuan atas kekayaan intelektual dari masyarakat	Rp	92.000.000,00	Rp	101.200.000,00	Rp	111.320.000,00	Rp	122.452.000,00	Rp	134.697.200,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
56	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi	Publikasi ilmiah melalui media jurnal dan temu ilmiah	meningkatkan ketersediaan informasi ilmiah dalam penguatan kebijakan berbasis bukti	Rp	122.000.000,00	Rp	134.200.000,00	Rp	147.620.000,00	Rp	162.382.000,00	Rp	178.620.200,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
57	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Penguatan Kompetisi Sains Pelajar	meningkatkan partisipasi pelajar dalam penguatan keilmuan	Rp	150.000.000,00	Rp	165.000.000,00	Rp	181.500.000,00	Rp	199.650.000,00	Rp	219.615.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
58	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penguatan kompetisi dan pameran teknologi inovasi	meningkatkan partisipasi warga kota dalam penciptaan teknologi dan inovasi	Rp	410.000.000,00	Rp	451.000.000,00	Rp	496.100.000,00	Rp	545.710.000,00	Rp	600.281.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
59	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penguatan kompetisi karya ilmiah	meningkatkan partisipasi pelajar dalam penguatan keilmuan	Rp	100.000.000,00	Rp	110.000.000,00	Rp	121.000.000,00	Rp	133.100.000,00	Rp	146.410.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
60	X.XX.01.02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.02.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOPI ARANG (Kotak Pengiriman Surat Masyarakat Kota Semarang)	Memudahkan masyarakat untuk mengirimkan surat kepada KDH, WKDH, Sekda secara daring dan menelusuri tindak lanjut surat secara <i>realtime</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang

61	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Mssyarakat di Kelurahan	- Adipura - Kegiatan Disabilitas - Kegiatan Bersholawat - Bazar - Dugderan - Kegiatan Masyarakat - Lomba MTQ - Lomba GENRE - Lomba Sepak Bola - Latihan Tari - Porwakos - Fasilitas Kegiatan Lomba - lomba-Pokdarwis - Pelatihan Forum Anak - Lomba Bregada - Senam Lansia - SNC - Penguatan Forum Anak	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Rp 301.324.340,00						Kecamatan Semarang Utara
62	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Mssyarakat di Kelurahan	- Adipura - Kegiatan Disabilitas - Kegiatan Bersholawat - Bazar - Dugderan - Kegiatan Masyarakat - Lomba MTQ - Lomba GENRE - Lomba Sepak Bola - Latihan Tari - Porwakos - Fasilitas Kegiatan Lomba - lomba-Pokdarwis - Pelatihan Forum Anak - Lomba Bregada - Senam Lansia - SNC - Penguatan Forum Anak - Pelatihan memasak menu makanan bergizi	Meningkatnya keterampilan usaha		Rp 350.000.000,00					Kecamatan Semarang Utara
63	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Mssyarakat di Kelurahan	- Adipura - Kegiatan Disabilitas - Kegiatan Bersholawat - Bazar - Dugderan - Kegiatan Masyarakat - Lomba MTQ - Lomba GENRE - Lomba Sepak Bola - Latihan Tari - Porwakos - Fasilitas Kegiatan Lomba - lomba-Pokdarwis - Pelatihan Forum Anak - Lomba Bregada - Senam Lansia - SNC - Penguatan Forum Anak - Pelatihan memasak menu makanan bergizi - Pelatihan Untuk Anak-Anak yang Putus sekolah	Meningkatnya kapasitas kepemimpinan masyarakat			Rp 375.000.000,00				Kecamatan Semarang Utara

[illegible]

68	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Rp 426.213.940,00	Rp 216.279.000,00	Rp 216.279.000,00	Rp 216.279.000,00	Rp 216.279.000,00	Kecamatan Semarang Selatan
69	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Rp 169.600.000,00	Rp 169.600.000,00	Rp 169.600.000,00	Rp 169.600.000,00	Rp 169.600.000,00	Kecamatan Semarang Selatan
70	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan Hasil Musrenbang Kegiatan Pemberdayaan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi	meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Rp 725.000.000,00	Rp 870.000.000,00	Rp 880.000.000,00	Rp 890.000.000,00	Rp 895.000.000,00	Kecamatan Semarang Selatan
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rumah Inspirasi	Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 50.000.000,00	Rp 375.000.000,00	Rp 375.000.000,00	Rp 331.086.071,00	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Gajahmungkur
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09.0009 - SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	PENDIRIAN RUMAH INSPIRASI BAGI KELOMPOK DISABILITAS DI TINGKAT KECAMATAN	TERWUJUDNYA PELAYANAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DALAM Mendukung KINERJA KECAMATAN CANDISARI	-	Rp 190.000.000,00	Rp 190.000.000,00	Rp 190.000.000,00	Rp 190.000.000,00	Kecamatan Candisari
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	7.01.03.2.02.0002 - PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG	MENINGKATKAN KEAKTIFAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN	Rp 8.341.000.000,00	-	-	-	-	Kecamatan Candisari
74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Rp 31.630.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Genuk
75	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Rp 141.240.220,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kecamatan Genuk
76	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengadaan Fasilitas Ramah Disabilitas, Jalur Selasar, Kursi Roda, Pembuatan Ruang Laktasi di tiap Kelurahan	Mendukung Program Pengarusutamaan Gender Pemerintah Pusat dan Kota	Rp 1.740.608.457,00	Rp 1.924.757.217,00	Rp 2.004.907.329,00	Rp 2.019.629.765,00	Rp 2.054.356.944,00	Kecamatan Pedurungan

77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rumah Inspirasi	Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 311.050.597,00	Rp 346.304.306,00	Rp 361.648.361,00	Rp 364.466.846,00	Rp 371.115.068,00	Kecamatan Pedurungan
78	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Rembug RT RW guna penyaluran usulan pembangunan di wilayah Kecamatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan wilayah	Rp -	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
79	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan sinkronisasi dan pertemuan bersama Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan	Menguatkan kerjasama antara Lembaga, Kecamatan dan Kelurahan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat bersinergi dan tidak tumpang tindih kepentingan	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rumah Inspirasi	Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Inspirasi	Menyediakan sarana dan prasarana Rumah Inspirasi untuk menunjang kegiatan layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 151.848.996,00	-	-	-	-	Kecamatan Tembalang
82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik	Rp 280.000.000,00	Rp 285.600.000,00	Rp 291.312.000,00	Rp 297.138.240,00	Rp 303.081.004,80	Kecamatan Banyumanik
83	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Meningkatnya keaktifan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Rp 45.000.000,00	Rp 45.900.000,00	Rp 46.818.000,00	Rp 47.754.360,00	Rp 48.709.447,20	Kecamatan Banyumanik
84	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Membentuk masyarakat yang tangguh, toleran, dan literat digital. Menjamin kehidupan yang aman, harmonis, dan siap menghadapi bencana.	Rp 12.000.000,00	Rp 125.000.000,00	Rp 125.000.000,00	Rp 125.000.000,00	Rp 125.000.000,00	Kecamatan Gayamsari
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dukungan Kampung Tematik Sinau Sampah Kelurahan Meteseh (Pelatihan dan Penyediaan Alat Pencacah Sampah)		Rp 200.000.000,00	-	-	-	-	Kecamatan Tembalang
86	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Pramusrenbang Kecamatan - Musrenbang Kecamatan	- sarana untuk menampung usulan masyarakat dalam pembangunan Kota Semarang di tahun berikutnya	Rp 200.000.000,00	Rp 210.000.000,00	Rp 220.500.000,00	Rp 231.525.000,00	Rp 243.101.250,00	Kecamatan Gunungpati

87	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Pemberdayaan di bidang sosial (posyandu, masyarakat) untuk meningkatkan kualitas hidup - Rumah Inspirasi	tumbuhnya masyarakat yang sadar kesehatan dan gotong royong Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 9.936.363.054,00	Rp 10.397.348.102,00	Rp 10.631.355.550,00	Rp 10.730.755.807,00	Rp 10.980.329.266,00	Kecamatan Gunungpati
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Membentuk masyarakat yang tangguh, toleran, dan literat digital. Memperkuat pemerintah yang resilien terhadap ancaman. Menjamin kehidupan yang aman, harmonis, dan siap menghadapi bencana. Mendukung masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.	Rp 114.000.000,00	Rp 126.000.000,00	Rp 132.000.000,00	Rp 133.000.000,00	Rp 135.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rumah Inspirasi	Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Kecamatan Gunungpati
90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rumah Inspirasi	Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 60.181.695,00	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kecamatan Mijen
91	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran beserta pelatihan teknis penggunaan APAR dan prosedur evakuasi di setiap kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat	- Terlaksananya pelatihan teknis APAR dan evakuasi bagi relawan di setiap kelurahan. - Meningkatkan kapasitas tanggap darurat masyarakat dan memperkuat sistem kesiapsiagaan lokal.			Rp 68.250.000,00			Kecamatan Tugu
92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Runah Inspirasi	- Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan. - Meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 77.134.131,00	Rp 203.821.253,00	Rp 584.526.755,00	Rp 613.576.685,00	Rp 487.039.104,00	Kecamatan Tugu
93	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Pramusrenbang Kecamatan - Musrenbang Kecamatan	- sarana untuk menampung usulan masyarakat dalam pembangunan Kota Semarang di tahun berikutnya	Rp 200.000.000,00	Rp 210.000.000,00	Rp 220.500.000,00	Rp 231.525.000,00	Rp 243.101.250,00	Kecamatan Ngaliyan
94	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Pemberdayaan di bidang sosial (posyandu, masyarakat) untuk meningkatkan kualitas hidup - Rumah Inspirasi	- Tumbuhnya masyarakat yang sadar kesehatan dan gotong royong - Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	Rp 9.936.363.054,00	Rp 10.397.348.102,00	Rp 10.631.355.550,00	Rp 10.730.755.807,00	Rp 10.980.329.266,00	Kecamatan Ngaliyan
95	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan stunting	Percepatan penurunan stunting	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan

96	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	Facilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Membentuk masyarakat yang tangguh, toleran, dan literat digital. Memperkuat pemerintah yang resilien terhadap ancaman. Menjamin kehidupan yang aman, harmonis, dan siap menghadapi bencana. Mendukung masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.	Rp 114.000.000,00	Rp 126.000.000,00	Rp 132.000.000,00	Rp 133.000.000,00	Rp 135.000.000,00	Kecamatan Ngaliyan
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rumah Inspirasi	Menyediakan pusat layanan inklusif bagi kaum disabilitas dan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses pelayanan publik yang setara	-	Rp 200.000.000,00	-	-	-	Kecamatan Ngaliyan
98	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular (Diabetes Melitus) dilakukan Prinsip "Bergerak Bersama ". kegiatan Gendis Larang dapat terintegrasi dengan lintas Program	Rp 654.950.000,00	Rp 90.250.000,00	Rp 107.415.550,00	Rp 111.697.134,00	Rp 111.697.245,00	Dinas Kesehatan
99	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Kegiatan deteksi dini Penyakit Hipertensi dengan rutin cek tensi mulai dari lingkup RT secara mandiri.	Rp 654.950.000,00	Rp 55.225.000,00	Rp 65.728.795,00	Rp 68.348.745,00	Rp 68.348.813,00	Dinas Kesehatan
100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular (Diabetes Melitus) dilakukan Prinsip "Bergerak Bersama ". kegiatan Gendis Larang dapat terintegrasi dengan lintas Program	Rp 654.950.000,00	Rp 90.250.000,00	Rp 107.415.550,00	Rp 111.697.134,00	Rp 111.697.245,00	Dinas Kesehatan
101	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Kegiatan deteksi dini Penyakit Hipertensi dengan rutin cek tensi mulai dari lingkup RT secara mandiri.	Rp 654.950.000,00	Rp 55.225.000,00	Rp 65.728.795,00	Rp 68.348.745,00	Rp 68.348.813,00	Dinas Kesehatan
102	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Deteksi dini <i>Ca Serviks</i> dan <i>Ca Mammariae</i> dengan Pemeriksaan Inspeksi <i>Visual Asetat</i> (IVA) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (Sadanis) bagi Wanita Usia Subur.	Rp 687.075.000,00	Rp 47.199.100,00	Rp 56.176.369,00	Rp 58.415.559,00	Rp 58.415.617,00	Dinas Kesehatan
103	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pembinaan Pelayanan Ramah Anak	Meningkatnya pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Rp 3.900.000,00	Rp 51.275.000,00	Rp 65.000.000,00	Rp 78.000.000,00	Rp 97.000.000,00	Dinas Kesehatan

104	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan	SDM yang terlatih dan memiliki ketrampilan teknis dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp 53.493.220,00	Rp 45.167.881,00	Rp 47.426.275,05	Rp 49.797.588,80	Rp 48.287.468,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
105	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Penyelenggaraan kerjasama Dukcapil dengan ormas dan perguruan tinggi	Terselenggaranya kerjasama Disdukcapil dengan ormas dan perguruan tinggi	Rp 56.013.620,00	Rp 48.814.301,00	Rp 51.255.016,05	Rp 53.817.766,85	Rp 50.508.655,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
106	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Penyelenggaraan sosialisasi administrasi kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan	Rp 128.169.541,00	Rp 134.578.018,05	Rp 141.306.918,95	Rp 148.372.264,90	Rp 155.790.878,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
107	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Pembinaan atlet melalui dispora dengan KKO (Kelas Khusus Olahraga) Kota Semarang di tingkat usia SMP, yang akan berkompetisi pada jenjang POPDA KOTA, POPDA PROVINSI dan POPNAS	Menjadi wadah pembibitan dan regenerasi atlet. Meningkatkan prestasi olahraga daerah hingga nasional/internasional. Mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga. Membantu program pemerintah dalam menyehatkan masyarakat lewat olahraga	Rp 2.134.311.180,00	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.300.000.000,00	Rp 3.630.000.000,00	Rp 3.993.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
108	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Festival Dalang Anak dan Remaja	Meningkatkan apresiasi seni budaya dari sanggar/kelompok seni budaya untuk tampil di gedung pertunjukan	Rp 125.000.000,00	Rp 165.987.324,00	Rp 175.000.000,00	Rp 180.000.000,00	Rp 185.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
109	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Mahakarya Legenda Goa Kreo	Meningkatkan apresiasi seni budaya dari sanggar/kelompok seni budaya untuk tampil di gedung pertunjukan	Rp 200.000.000,00	Rp 270.000.000,00	Rp 275.000.000,00	Rp 280.000.000,00	Rp 285.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
110	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Festival Wayang Orang	Meningkatkan apresiasi seni budaya dari sanggar/kelompok seni budaya untuk tampil di gedung pertunjukan	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
111	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Workshop, Sosialisasi, dan Awarding Film	Meningkatkan literasi, apresiasi, dan kreativitas masyarakat di bidang perfilman melalui pembekalan pengetahuan, penyebaran informasi, serta pemberian penghargaan bagi karya terbaik	Rp 1.700.000.000,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
112	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan karir bagi pencari kerja	tenaga kerja mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	Rp 114.117.843,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
113	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pelatihan bagi tenaga kerja disabilitas	Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Rp 26.550.466,00	Rp 60.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp 85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
114	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pelatihan bagi CPMI	CPMI/PMI terlindungi dan meningkat kompetensinya	Rp 50.324.865,00	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

115	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pelatihan bagi PMI purna	CPMI/PMI terlindungi dan meningkat kompetensinya	Rp 27.024.075,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
116	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pelindungan Sosial Pekerja Rentan Kota Semarang	Pekerja rentan Kota Semarang terlindungi jaminan sosial		Rp 1.650.000.000,00	Rp 1.850.000.000,00	Rp 1.050.000.000,00	Rp 2.250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
117	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Koordinasi Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja	Terkoordinirnya asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja	Rp 19.950.775,00	Rp 43.845.254,00	Rp 43.845.254,00	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
118	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Peringatan <i>May Day</i>	Menjaga harmonisasi dan kondusivitas hubungan pemerintah, pekerja, dan pengusaha	Rp 228.605.486,67	Rp 460.124.372,00	Rp 460.124.372,00	Rp 460.124.372,00	Rp 460.124.372,00	Dinas Tenaga Kerja
119	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Tripartit	Menjaga harmonisasi dan kondusivitas hubungan pemerintah, pekerja, dan pengusaha						
120	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Edukasi berbasis komunitas; kampanye digital; lomba kampung tanggap kebakaran	Partisipasi masyarakat meningkat; wilayah lebih siap menghadapi risiko kebakaran	Rp 348.400.697,00	Rp 300.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran
121	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	pelaksanaan sosialisasi perda dan perkara	Menginformasikan kepada masyarakat tentang perda dan perkara yang berlaku di Pemerintah Kota Semarang	Rp 11.091.350,00	Rp 101.514.755,00	Rp 146.514.755,00	Rp 149.514.787,00	Rp 149.514.787,00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang
122	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengembangan sistem JDIH dengan menambahkan <i>Chatbox AI</i> terkait informasi produk Hukum di Kota Semarang	Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi suatu produk hukum di JDIH	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Bagian Hukum

143	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi PPD / Aplikasi Penerimaan Peserta Didik (http://ppd.semarangkota.go.id/)	Sistem pendaftaran siswa baru; manajemen proses seleksi dan alokasi sekolah.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan
144	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Sosialmenyapa Aplikasi Pengelola Data PPKS dan PSKS / Aplikasi Pengelola Data PPKS dan PSKS (https://sosialmenyapa.semarangkota.go.id/)	Pengelolaan data korban PPKS dan PSKS; layanan sosial dan intervensi perlindungan.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS SOSIAL
145	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pustakadata Perpustakaan Statistik / Perpustakaan Statistik Pemerintah Semarang (https://pustakadata.semarangkota.go.id/)	Akses koleksi perpustakaan digital dan data statistik pemerintah.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
146	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website</i> Dinas Arsip dan Perpustakaan / Website Dinas Arsip dan Perpustakaan (https://arpusda.semarangkota.go.id/)	Informasi layanan arsip dan perpustakaan; akses koleksi dan layanan kearsipan.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
147	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Website Bagian Kesejahteraan Rakyat / Website Bagian Kesejahteraan Rakyat (https://bagkesra.semarangkota.go.id/)	Informasi <i>Website</i> Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
148	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	aplikasi pelatihan para pencari kerja / aplikasi pelatihan para pencari kerja (apel-canaker.semarangkota.go.id)	Platform pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk pencari kerja.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
149	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	pameran kearsipan <i>virtual</i> kota semarang 2023 / pameran kearsipan <i>virtual</i> kota semarang 2023 (https://pamerankearsipan.semarangkota.go.id/)	Pameran arsip <i>virtual</i> untuk edukasi dan publikasi koleksi kearsipan.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
150	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Website Callcenter</i> 112 / <i>Website Callcenter</i> 112 (https://callcenter112.semarangkota.go.id/)	Portal layanan darurat terpadu; menampilkan informasi layanan tanggap darurat dan edukasi masyarakat.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
151	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	portal <i>website</i> sekolah dasar / portal <i>website</i> sekolah dasar (dikdas.semarangkota.go.id)	Portal informasi dan layanan sekolah dasar di Kota Semarang; memuat data sekolah, kurikulum, dan berita pendidikan dasar.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
152	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>website</i> Jurnal Riptek Bappeda Kota Semarang / <i>website</i> Jurnal Riptek Bappeda Kota Semarang (https://ripte.semarangkota.go.id)	Media publikasi hasil riset dan kajian pembangunan Kota Semarang.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

183	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi BAMBUAPUS (https://bambuapus.semarangkota.go.id))	Platform pelaporan anak putus sekolah di Kota Semarang, membantu pemerintah dan lembaga pendidikan memantau dan menangani kasus putus sekolah agar setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak.	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
184	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan <i>E-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	SIBANDI (https://usulandisdik.semarangkota.go.id))	Sistem usulan bantuan pendidikan (beasiswa, bantuan sekolah) secara <i>online</i> .	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
185	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Sekolah Siaga Kependudukan	Mempersiapkan generasi yang mampu memanfaatkan teknologi, data, dan <i>platform</i> digital untuk membentuk generasi muda yang sadar akan isu kependudukan dan siap berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan	Rp 249.500.000,00	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
186	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Rumah Data Kependudukan	Terbentuknya Rumah Data Kependudukan di 177 Kelurahan		Rp 221.250.000,00	Rp 221.250.000,00	Rp 221.250.000,00	Rp 221.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
187	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kampung KB	Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan keluarga, serta terwujudnya lingkungan kondusif	Rp 43.180.740,00	Rp 205.203.871,00	Rp 225.724.258,00	Rp 248.296.683,00	Rp 273.126.352,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

188	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i> (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	PANSOS (Pawon Sehat Ngopeni <i>Stunting</i>) / DASHAT	Masyarakat mendapatkan edukasi tentang makanan protein tinggi, dan tips pengelolaan pangan murah serta berkualitas untuk mencegah <i>stunting</i> , khususnya bagi keluarga berisiko	Rp 1.841.200.000,00	Rp 2.025.320.000,00	Rp 2.227.852.000,00	Rp 2.450.637.200,00	Rp 2.695.700.920,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
189	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	PANAH ASMARA (Pelayanan KB Bergerak di Seluruh Kecamatan Kota Semarang)	Meningkatkan akses informasi dan layanan KB khususnya KB Pasca Persalinan (jadwal dan metode kontrasepsi yang digunakan)	Rp 3.308.975.000,00	Rp 3.639.872.500,00	Rp 4.003.859.750,00	Rp 4.404.245.725,00	Rp 4.844.670.298,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
190	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Konseling Kesehatan Reproduksi	Meningkatkan pemahaman dan sikap positif bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi	Rp 241.212.015,00	Rp 265.333.217,00	Rp 291.866.538,00	Rp 321.053.192,00	Rp 353.158.511,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
191	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0008 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Golok Pendekar (Program Generasi Berencana Sekolah Mengedukasi Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja di Kota Semarang)	Edukasi KB dan kesehatan reproduksi lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi dan <i>platform</i> digital untuk memperluas jangkauan edukasi	Rp 23.300.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
192	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akteptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan Sekolah Lansia	wadah bagi lansia untuk berkumpul, belajar, dan berinteraksi sehingga terwujudnya lansia berdaya yang sehat, merasa aman dan meningkatkan kualitas hidup lansia	Rp -	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp 255.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

193	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Konsultasi <i>online</i> bersama psikolog dan konselor melalui sistem pusat pembelajaran keluarga (puspaga)	Keluarga mendapat kemudahan akses konsultasi daring maupun luring dengan psikolog/konselor Puspaga untuk solusi permasalahan pengasuhan dan kesejahteraan psikososial						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	
194	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOT A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lomba pembuatan video pendek terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam menyebarkan pesan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media digital						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	
195	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pengadaan TIK Pembelajaran Sekolah SDN (Bankeu)	Meningkatkan mutu pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital di sekolah dasar.	Rp	6.000.000.000,00				Dinas Pendidikan	
196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Tenaga Alih Daya Tenaga Guru (BU)	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sehingga proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal.	Rp	3.448.445.000,00				Dinas Pendidikan	
197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan <i>PC All In One</i>	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sehingga proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal.	Rp	686.570.000,00				Dinas Pendidikan	
198	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT RW - Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui PKK, Karang Taruna, LPMK dan FKK	Meningkatkan pemberdayaan RT, RW, memperkuat kelembagaan sosial masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan kesejahteraan warga	Rp	382.007.372.649,00	Rp 383.678.449.966,00	Rp 386.055.821.806,00	Rp 387.442.703.953,60	Rp 387.806.462.425,74	16 kECAMATAN
						Rp	513.955.524.816,91	Rp 530.801.905.498,07	Rp 455.719.140.476,92	Rp 458.869.338.259,62	Rp 461.765.285.649,23	

QUICK WINS SMART CITY 2025-2029

No	Dimensi	2025		2026		2027		2028		2029	
		Digital	Non Digital	Digital	Non Digital	Digital	Non Digital	Digital	Non Digital	Digital	Non Digital
1	Smart Governance	SIDNOK	JEMPOL TIGER JAPRI (Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif)	SIM PKK. SILAKER	Pelatihan ASN "Digital Leadership" dan literasi SPBE	Mata Si Intel	Forum Kolaborasi Smart City Antar-OPD dan Kecamatan	JAS KAKAK (Kerja Sama Percepatan Layanan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian)	Program Pembinaan Zona Integritas OPD	Semarang Satu Data	Pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari
2	Smart Economy	SIIMUT, NALIKO (Pelayanan Penagihan Keliling Kota Semarang)	Pak Rahman	E-Marketplace UMKM Semarang Go Digital untuk transaksi online produk lokal, Nina Online (Klinik Layanan Konsultasi Koperasi)	Inkubasi Koperasi	SIHARPA	Kredit Wibawa	IJOLKE	Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi (Festival Pangan)	TATA RUANG Pro INVESTASI	Expo Smart Economy Kota Semarang
3	Smart Environment	AISSA	Pilah Sampah	Pantau Banjir	Pilah Sampah, Gerakan Penghijauan Wilayah Padat & CSR Taman Kota	IoTani	Pilah Sampah, Bio Petrasol	Dashboard Pemantauan Sampah & Energi	Pilah Sampah, PSEL	Platform "Green Semarang" (IoT + GIS) untuk pemantauan emisi & RTH	Pilah Sampah, PSEL
4	Smart Living	Lapor Semar	UHC	CC112, Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKETAN)	Urban Farming	Teman Bunda	SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang)	Pantau Semar	Ducting	pantau banjir	Ambulan Hebat
5	Smart Branding	LUNPIA, SAVIRA	Kota Lama	Virtual Tour Kota Semarang	Kampung Batik Rejomulyo	Cagar Budaya	Kampung Iklim	LUNPIA	Titik 0 KM	AI Tourism Assistant Kota Semarang	Bus Double Decker City Tour Kota Semarang (Bus Denok, Kenang, kuncung)
6	Smart Society	Ruang Warga, SIMPEN	P3DN	SPMB, SIKER	SDK	SiBooky	Rumah Inspirasi bagi kaum Disabilitas	Pantau Semar	Day Care Rumah Pelita	Sistem Data Sosial Terpadu (Social Intelligence Platform)	Gerakan Literasi & Inklusi Digital Masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
 PTL.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
 DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.
 Pembina
 NIP. 19740116 199903 2 003

WALI KOTA SEMARANG,
 ttd
 AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI